



LKjIP

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN
2021





TANAH LAUT
BERINTERAKSI



H. SUKAMTA
Bupati Tanah Laut

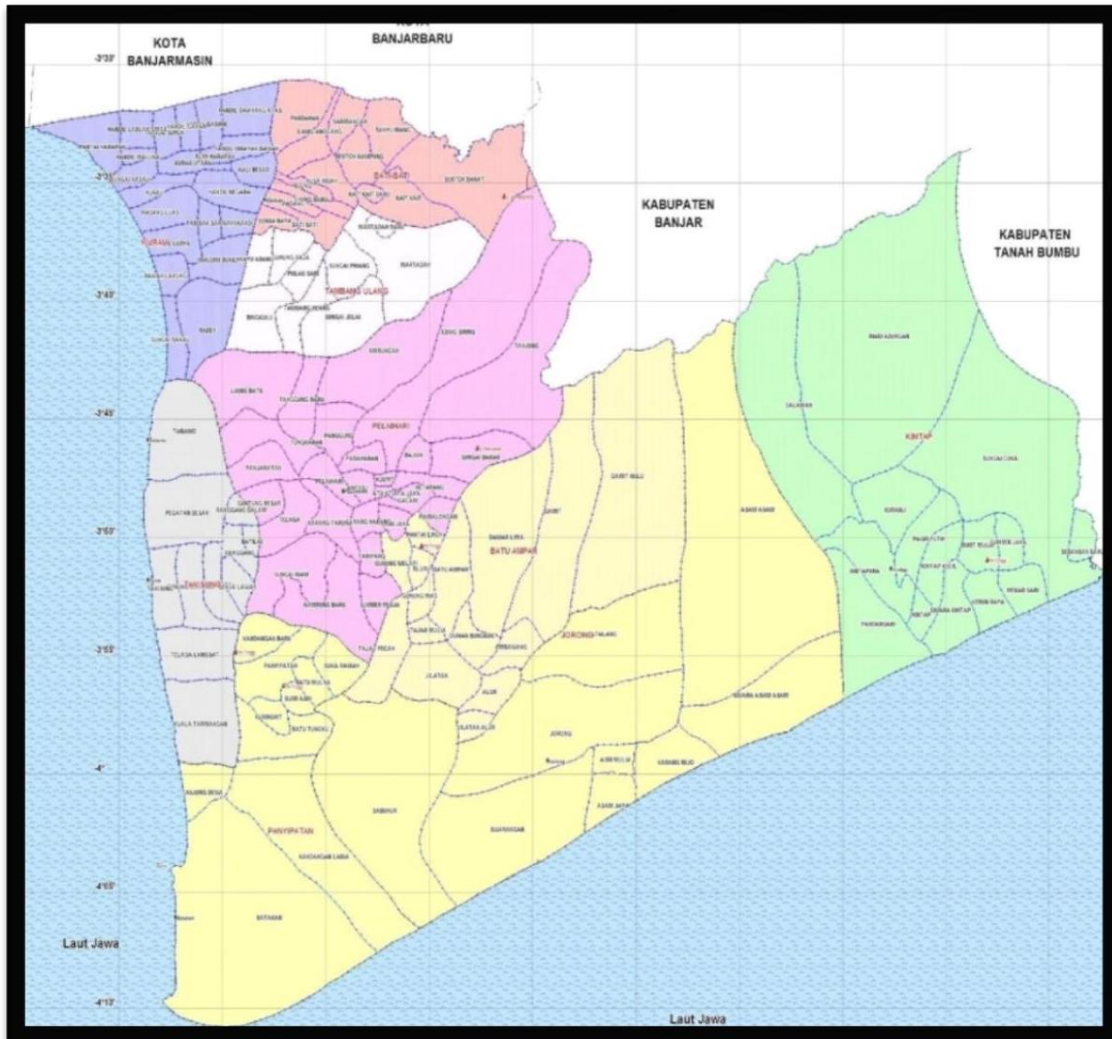


ABDI RAHMAN
Wakil Bupati Tanah Laut



TANAH LAUT
BERINTERAKSI

PETA KABUPATEN TANAH LAUT





LAMBANG DAERAH



MAKNA LAMBANG DAERAH

1. Lambang berbentuk perisai mengandung pengertian kekuatan mempertahankan daerah ini dari serangan musuh yang ingin mengganggu ketentraman.
2. Warna coklat dan biru pada bagian atas lambang dengan tulisan Tanah Laut melambangkan cakupan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi wilayah daratan dan lautan.
3. Warna hijau dan kuning pada tubuh lambang, melambangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki kesuburan alam dan kekayaan bahan tambang.
4. Garis miring hitam yang membelah pinang pada pertengahan lambang menunjukkan arah angin, yaitu tenggara dan barat laut yang memiliki pengertian bahwa Tanah Laut mengalami dua musim yakni, musim kemarau dan musim hujan, disamping merupakan garis pertautan abadi antara hasil tambang dengan kesuburan alamnya.
5. Belanga yang berada ditengah lambang adalah pedaringan atau tempat beras, yang melambangkan kekayaan alam Tanah Laut yang disimpan di dalam belanga untuk lebih dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya, kemakmuran rakyat.
6. Bintang bersudut lima berada di atas belanga melambangkan Pancasila, disamping juga melambangkan jumlah kecamatan pada awal pembentukan Kabupaten Tanah laut yang berjumlah lima Kecamatan.



7. Setangkai padi dan seikat purun di dalam lengkungan belanga melambangkan kemakmuran dan persatuan daerah Tanah Laut, yang juga merupakan salah satu hasil daerah yang berbentuk anyaman.
8. Perahu layar dan laut melambangkan bahwa Tanah Laut merupakan daerah nelayan yang kaya dengan hasil laut selain itu lambang ini juga memiliki pengertian ketabahan dalam menghadapi rintangan.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sebagai wujud pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada masyarakat yang semakin mengharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023. Laporan kinerja dibuat setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Laporan Kinerja ini juga menguraikan keberhasilan - keberhasilan serta hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan pada masa mendatang serta menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcomes*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut ini disusun semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan datang.

Pelaihari, Maret 2022

Bupati Tanah Laut,



H. SUKAMTA

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja ketiga RPJMD 2018 – 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 21 sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 31 indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Baik/Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2021 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2021. Hasil pengukuran secara mandiri



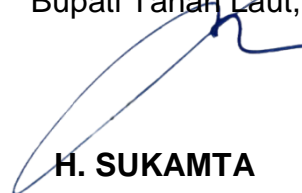
(*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 21 (dua puluh satu) sasaran strategis dan 31 indikator kinerja utama sementara yaitu 140,00% dengan rincian **23 (dua puluh tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan** dengan rentang capaian 80% s.d 90%, **4 (empat)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian 60% s.d 70%, dan **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian 50% s.d 60%.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2022 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, April 2022

Bupati Tanah Laut,



H. SUKAMTA



DAFTAR ISI

MAKNA LAMBANG DAERAH	i
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut	3
C. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	10
D. Aparatur Sipil Negara	16
E. Isu Strategis	17

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM)	20
B. Indikator Kinerja Utama	39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja	59
B. Akuntabilitas Keuangan	324

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	346
B. Strategi Peningkatan Kinerja	346



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU Kabupaten Tanah Laut
2. Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2021
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Daftar Penghargaan Tahun 2021
5. Foto Penerimaan Penghargaan Tahun 2021



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, kepala daerah bertanggungjawab melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Bupati menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah



diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja yaitu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Laut

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut berada di bagian selatan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" sampai 115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" sampai 4°11'38" Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi, wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) wilayah Kecamatan yang terbagi dalam 130 Desa dan 5 Kelurahan.

Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut Utara Kota Banjarbaru, Selatan Laut Jawa, Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan sebelah barat Laut Jawa.

Gambar 1.1
Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut, 2021



Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2022

Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau,



Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km².

Tabel 1.1
Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut beserta luas wilayahnya

NO.	KECAMATAN	LUAS AREA	PERSENTASE LUAS KECAMATAN DENGAN LUAS KABUPATEN
1.	PANYIPATAN	336,00	9,25
2.	TAKISUNG	343,00	9,45
3.	KURAU	127,00	3,50
4.	BUMI MAKMUR	141,00	3,88
5.	BATI-BATI	234,75	6,46
6.	TAMBANG ULANG	160,75	4,43
7.	PELAIHARI	379,45	10,45
8.	BAJUIN	196,30	5,41
9.	BATU AMPAR	548,10	15,09
10.	JORONG	628,00	17,29
11.	KINTAP	537,00	14,79
KABUPATEN TANAH LAUT		3.631,35	100,00

Sumber Data : BPS, Tanah Laut dalam angka Tahun 2021

Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, secara keseluruhan terdapat 135 desa dan kelurahan, untuk wilayah yang memiliki jumlah Desa dan Kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 Kelurahan),



Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan jumlah masing-masing 14 Desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tambang Ulang dan Kecamatan Bajuin dengan jumlah masing-masing 9 desa. Rincian jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA	DESA/KELURAHAN	
			DESA	KELURAHAN
1.	PANYIPATAN	PANYIPATAN	10	-
2.	TAKISUNG	GUNUNG MAKMUR	12	-
3.	KURAU	PADANG LUAS	11	-
4.	BUMI MAKMUR	HANDIL BABIRIK	11	-
5.	BATI-BATI	PADANG	14	-
6.	TAMBANG ULANG	TAMBANG ULANG	9	-
7.	PELAIHARI	PELAIHARI	15	5
8.	BAJUIN	BAJUIN	9	-
9.	BATU AMPAR	BATU AMPAR	14	-
10.	JORONG	JORONG	11	-
11.	KINTAP	KINTAPURA	14	-
KABUPATEN TANAH LAUT			130	5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2021

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan November - April dengan curah hujan rata-rata 322,5 dan bulan-bulan relative kering antara bulan Mei - Oktober dengan curah hujan rata-rata 79,16. Berdasarkan data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan

evapotranspirasi bulanan, maka Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance*-nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Curah hujan sebagai faktor fisik bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh waktu. Curah hujan dimasukkan sebagai faktor fisik karena besar kecilnya curah hujan akan mempengaruhi faktor fisik yang lain, seperti menyebabkan terjadinya erosi, adanya genangan air pada daerah-daerah tertentu. Dengan pengaruh kedua faktor fisik tersebut sekaligus akan mempengaruhi tindakan budidaya baik terhadap teknik pengolahan tanah maupun pemilihan jenis komoditi yang akan dibudidayakan dalam bidang pertanian.

2. Kondisi Demografi

Jika dilihat dari data registrasi pada tahun 2021 berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II jumlah penduduk sebesar 348.505 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Pelaihari dimana sekitar 22 persen penduduk Kabupaten Tanah Laut tinggal di kecamatan ini. Kecamatan ini juga merupakan kecamatan paling padat penduduk dengan kepadatan sekitar 205 jiwa per km². Kecamatan Bumi Makmur merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 13.920 jiwa. Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Batu Ampar dengan kepadatan sekitar 50 jiwa per km².

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010, 2020 dan 2021

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)			LAJU PERTUMBUHAN PER TAHUN (%)	
		2010	2020	2021	2010-2020	2020-2021
1.	PANYIPATAN	14,925	25,315	25,544	1.68	1.22
2.	TAKISUNG	21,151	32.378	32.818	1.42	1.02



NO.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (RIBU)			LAJU PERTUMBUHAN PER TAHUN (%)	
		2010	2020	2021	2010-2020	2020-2021
3.	KURAU	11.851	13,580	13,783	1.56	1.12
4.	BUMI MAKMUR	38.118	13,765	13,960	1.48	1.06
5.	BATI-BATI	38.645	44,737	45,350	1.43	1.03
6.	TAMBANG ULANG	14.925	17,797	18,092	1.72	1.24
7.	PELAIHARI	63.895	77,246	78,634	1.85	1.34
8.	BAJUIN	15.957	19,150	19,480	1.78	1.29
9.	BATU AMPAR	23.233	27,557	28,000	1.67	1.20
10.	JORONG	29.002	34,553	35,124	1.71	1.24
11.	KINTAP	38.118	43,068	43,555	1.19	0.85
	TANAH LAUT	296,333	348,966	354,340	1.59	1.15

Sumber Data : Tanah Laut Dalam Angka, 2021

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	RASIO JENIS KELAMIN	
		2020	2021
1	PANYIPATAN	103.0	103.3
2	TAKISUNG	104.3	104.5
3	KURAU	102.8	103.0
4	BUMI MAKMUR	103.9	104.1
5	BATI-BATI	104.8	104.7
6	TAMBANG ULANG	105.6	105.7



7	PELAIHARI	103.6	103.5
8	BAJUIN	106.2	106.2
9	BATU AMPAR	107.7	107.7
10	JORONG	107.7	107.2
11	KINTAP	108.5	108.1
	TANAH LAUT	105.3	105.3
	HASIL PROYEKSI	105.3	105.3

Sumber Data : Tanah Laut Dalam Angka, 2021

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tanah Laut 2021

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	16.277	15.663	31.940
5-9	17.136	16.594	33.730
10-14	15.427	14.462	29.889
15-19	14.623	13.386	28.009
20-24	14.412	13.966	28.378
25-29	14.716	14.069	28.785
30-34	14.662	14.318	28.980
35-39	14.642	14.154	28.796
40-44	13.966	13.079	27.045
45-49	12.232	11.359	23.591
50-54	10.121	9.503	19.624
55-59	8.287	7.813	16.100



60-64	6.311	5.629	11.940
65-69	4.560	4.069	8.629
70-74	2.283	2.321	4.604
75+	2.051	2.249	4.300
JUMLAH/TOTAL	181.706	172.634	354.340

Sumber Data : Tanah Laut Dalam Angka, 2021

Tabel 1.6
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Kabupaten Tanah Laut 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	-	-	-
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	-	-	-
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	8	3	11
4	SLTP/SEDERAJAT	40	9	49
5	SLTA	340	161	501
6	SMK	304	114	418
7	AKADEMI/DIPLOMA I/II/III	46	22	68
8	UNIVERSITAS	42	55	97
		780	364	1144

Sumber Data : Tanah Laut Dalam Angka, 2021

3. Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tanah Laut mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah melalui pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Untuk melaksanakan urusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

1) Susunan Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka pada Tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih tetap menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Umum dan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Penanggulangan Bencana.

Adapun nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.7
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA SKPD	NOMOR PERDA	TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
2	SEKRETARIAT DPRD	No. 6 Tahun 2016	Tipe B



3	INSPEKTORAT KABUPATEN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
5	DINAS KESEHATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
8	DINAS SOSIAL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
11	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
14	DINAS PARIWISATA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
18	DINAS PERHUBUNGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
21	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B



23	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe B
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	No. 6 Tahun 2016	Tipe C
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	No. 10 Tahun 2013	-
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	No. 10 Tahun 2013	Tipe B
30	KECAMATAN PELAIHARI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
31	KECAMATAN KINTAP	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
32	KECAMATAN JORONG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
33	KECAMATAN BARU AMPAR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
34	KECAMATAN PANYIPATAN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
35	KECAMATAN TAKISUNG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
36	KECAMATAN TAMBANG ULANG	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
37	KECAMATAN BATI-BATI	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
38	KECAMATAN BUMI MAKMUR	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
39	KECAMATAN KURAU	No. 6 Tahun 2016	Tipe A
40	KECAMATAN BAJUIN	No. 6 Tahun 2016	Tipe A

Sumber Data : Diolah

2) Tugas Pokok dan Fungsi



Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.8
Tugas dan Kewajiban SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA SKPD	TUGAS DAN KEWAJIBAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2.	SEKRETARIAT DPRD	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN	Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
5.	DINAS KESEHATAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN.	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGA HIDUP	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
8.	DINAS SOSIAL	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.



NO	NAMA SKPD	TUGAS DAN KEWAJIBAN
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olah raga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang ketahanan pangan dan perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
14.	DINAS PARIWISATA	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
17.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
18.	DINAS PERHUBUNGAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
19.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN.	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diberikan kepada daerah.
20.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
21.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perdagangan, koperasi dan usaha kecil.
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perpustakaan, bidang



NO	NAMA SKPD	TUGAS DAN KEWAJIBAN
		kearsipan dan tugas, pembantuan yang diberikan kepada daerah.
23.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
24.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.
25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
26.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
27.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah di daerah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien
30.	KECAMATAN	1. Camat mempunyai tugas : a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan; h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



NO	NAMA SKPD	TUGAS DAN KEWAJIBAN
		2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Sumber Data : Diolah

3) Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan Daerah, salah satu unsur terpenting adalah Aparatur Sipil Negara. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Data Simpeg Tahun 2021 adalah 4828 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2057 orang dan perempuan sebanyak 2771 orang.

Tabel 1.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI (ORANG)	PEREMPUAN (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
1	SD/SEDERAJAT	30	2	32
2	SLTP/SEDERAJAT	55	17	72
3	SLTA/SEDERAJAT	316	227	543
4	DIPLOMA I, II, III, IV	447	766	1213
5	STRATA I	1059	1673	2732
6	STRATA II	150	86	236
7	STRATA III	0	0	0
	JUMLAH	2057	2771	4828

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

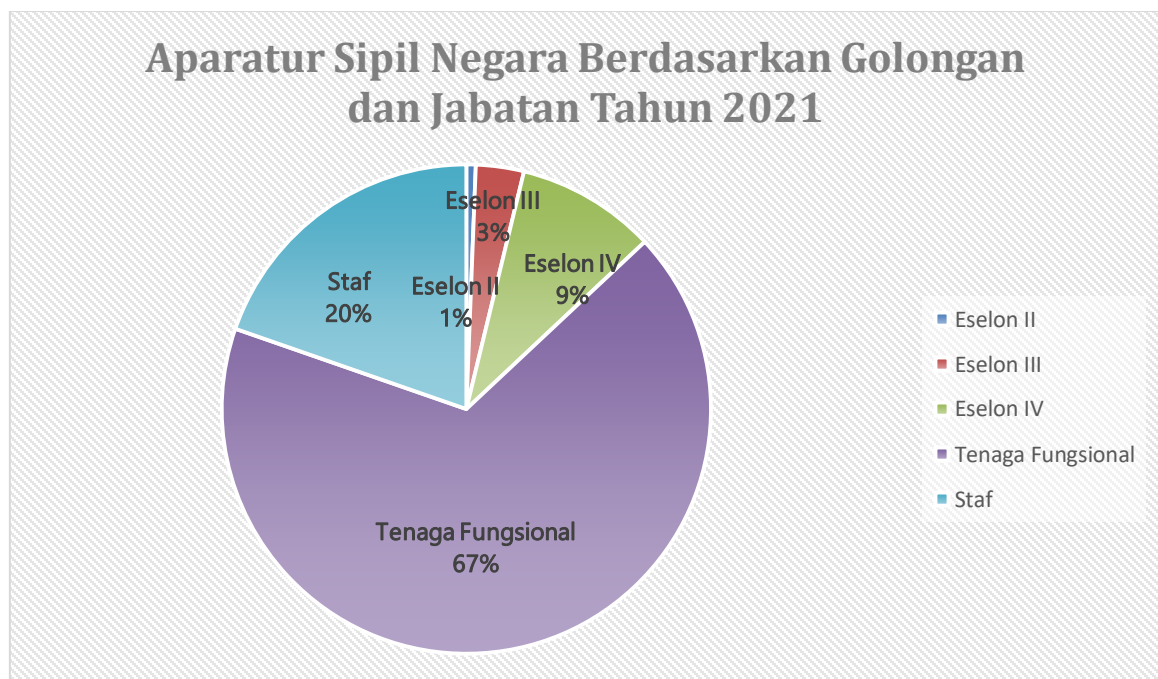
Tabel 1.10
Jumlah Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GOLONGAN I	40	4	44
2	GOLONGAN II	343	288	631
3	GOLONGAN III	1093	1939	3032
4	GOLONGAN IV	581	540	1121
JUMLAH		2057	2771	4828

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Grafik 1.1

Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2021



C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi

akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Isu strategis Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan RPJMD 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
2. Kawasan Industri Jorong
3. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
4. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
6. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
7. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
8. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
9. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Selain Isu-isu strategis tersebut, Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan juga harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman yaitu adanya Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 ini akan memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berikut beberapa strategi kedepan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut :

1. Mengintegrasikan kebijakan antar lini pemerintah dalam mendukung implementasi Making Indonesia 4.0 terutama terkait perindustrian, ketenagakerjaan, teknologi informasi dan sektor-sektor terkait dalam mengantisipasi perubahan ketenagakerjaan dan kondisi perekonomian daerah di masa yang akan datang dan melindungi kelompok rentan – terutama tenaga kerja perempuan.
2. Mengoptimalkan 5 (lima) Sektor Manufaktur Making Indonesia 4.0 dan sektor lain sesuai potensi daerah untuk menyerap angkatan kerja produktif.



3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai Standard Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Meningkatkan literasi keuangan petani/nelayan dan pelaku UMKM dengan mempermudah akses dana/modal dan sarana prasarana teknologi informasi untuk mengembangkan pasar, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.
5. Memperkuat keberadaan kelembagaan ekonomi melalui peningkatan peran masjid, pesantren dan tempat ibadah lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat.
6. Menyempurnakan kurikulum pendidikan yang adaptif serta merevitalisasi sekolah menengah dan vokasi sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri.
7. Membentuk ekosistem inovasi digital dan mengembangkan inkubasi bisnis/technopark yang ada di daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan membentuk dan menumbuhkembangkan start up/creative hub dan menjadikan perguruan tinggi sebagai center of excellence and innovation.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

B E R K A R Y A

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

I N O V A S I

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELEGIUS

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan

digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

2. Misi

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- RELIGIUS** : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
- AKTUAL dan SINERGI** : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Agenda Pembangunan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Tanah laut tahun 2018-2023 sebagai salah satu tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut tahun 2005-2025, maka dapat disusun agenda pembangunan sebagai berikut :

- Agenda 1 : Penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
- Agenda 2 : Peningkatan daya saing ekonomi.
- Agenda 3 : Reformasi birokrasi
- Agenda 4 : Peningkatan religiusitas kehidupan bermasyarakat.
- Agenda 5 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi serta kriteria pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan sebagai penjabaran atau operasionalisasi dari pernyataan visi dan misi yang bersangkutan yang wajib dijadikan pegangan dalam pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 2) Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
- 3) Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

- 4) Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
- 5) Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 9) Terwujudnya pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas.
- 10) Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah.
- 11) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 12) Peningkatan upaya membina desa dan menata kota.

5. Sasaran

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- 2) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
- 3) Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
- 4) Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga
- 5) Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi
- 6) Meningkatnya inovasi pelayanan publik
- 7) Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian
- 8) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
- 9) Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik
- 10) Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama
- 11) Meningkatnya wawasan kebangsaan
- 12) Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi
- 13) Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- 14) Menurunnya tingkat pengangguran
- 15) Meningkatnya perlindungan masyarakat
- 16) Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
- 17) Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
- 18) Meningkatnya ketahanan pangan
- 19) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup



- 20) Meningkatnya pembinaan desa
- 21) Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanah Laut

VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”															
MISI		TUJUAN								SASARAN STRATEGIS							
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya	1	Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,30	68,50	68,70	68,90	70,10	1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,97	8,06	9,00	10,00	12,00
												Harapan lama sekolah (tahun)	12,05	12,1	12,12	12.15	12.18
		2	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,30	68,50	68,70	68,90	70,10	2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	68,90	69,10	69,30	69,60	69,80
3	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70 (Kurang Baik)	75 (Kurang Baik)	76,5 (Baik)	77,5 (Baik)	80 (Baik)	3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	76.5	77.5	80		
																4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi



VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”													
MISI		TUJUAN							SASARAN STRATEGIS						
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
									generasi muda dan olah raga	Jumlah Atlet yang berprestasi	62	68	74	81	89
									5 Meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	1 Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 penghargaan	1 Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi
		2 Peningkatan Inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha	2 Meningkatkan Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	5 Unit Usaha	10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25 Unit Usaha
3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	65,0 (Baik)	68 (Baik)	70 (Baik)	73 (Baik)	75 (Baik)	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (77,00)	A (81)	A (81)
										Opini Pengawas	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”															
MISI		TUJUAN								SASARAN STRATEGIS							
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
												Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)					
										2	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik	11,90	23,81	35,71	47,62	59,52
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat	1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	100	100	100	100	100	1	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	0	0	0
										2	Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	0	0	0
5	Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan (%)	4,39	4,38	4,37	4,36	4,35	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuha n Ekonomi	4.85	4.9	3.50	5	5,05



VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”															
MISI		TUJUAN								SASARAN STRATEGIS							
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023		
												Indeks Gini (skor)	0,257	0,256	0,255	0,254	0,253
													PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	31,50	33,07	11,60	36,81
										2	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,25	88,50	88,75	89,00	89,50
										3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3,00	4,00	2,6	2,5
										4	Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	150 (Tinggi)	135 (Sedang)	130 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)
											Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	12,50	15,00	20,00	25,00	30,00	
	2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial	Indeks pembangunan Infrastuktur	70,50	70,75	71,00	72,00	73,00	1	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	70,50	70,75	71,00	72,00	73,00	



VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”															
MISI		TUJUAN							SASARAN STRATEGIS								
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023		
			dan Ekonomi yang berkualitas							Ekonomi yang berkualitas							
		3	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan sector unggulan daerah	5.02	5.03	5.04	5.05	5.06	1	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pertumbuha n sektor Petanian	3,50	3,51	3,52	3,53	3,57
												Pertumbuha n sektor Industri olahan	7,56	7,57	7,58	7,59	7,60
												Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangk an pemerintah (orang)	280	285	290	300	350
			2	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaa n (nilai)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00							
		4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (skor)	60,208	60,584	60,960	61,336	61,712	1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,208	60,584	60,960	61,336	61,712
												Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan	70,00	78,00	87,00	92,00	98,00



VISI		“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”															
MISI		TUJUAN								SASARAN STRATEGIS							
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023	URAIAN		INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
												RTRW Kabupaten (%)					
		5	Peningkatan upaya membina desa dan menata kota	Indeks desa membangun (skor rata-rata)	0,705(b erkembang)	0,706 (Maju)	0,71 (Maju)	0,715 (Maju)	0,720 (Maju)	1	Meningkatnya Pembinaan Desa	Persentase Desa Kategori Maju	20	22	24	26	28
												Jumlah Desa di bina berciri khas	5	5	5	5	5
										2	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	12,00	10,00	7,00	3,00	1,00

6. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tahun Anggaran 2021 ini dapat dikatakan begitu banyak dinamika eksternal seperti pandemic covid-19, serta terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, rilisnya aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut 126 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
1	Meningkatnya akses dan kualitas	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
	pelayanan bidang pendidikan		$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Keterangan :</p> <p>HSL_a^t = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i = Usia (a,a+1,.....,n)</p> <p>FK = Faktor Koreksi Pesantren</p> </div>
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$
4	Meningkatnya pelestarian/pe ngembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1 Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$
		2 Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1 Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1 Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1 Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n
		2 Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1 Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1 Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1 Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB tahun ke } n - \text{PDRB tahun } (n-1)}{\text{PDRB tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2 Indeks Gini (skor)	$G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			<p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapat atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G < 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>
		3	<p>PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)</p> $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	<p>Indeks Pembangunan Gender =</p> $\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	<p>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</p> $\text{TPP} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran - Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Data Indeks Resiko Bencana Kabupaten pada tahun n
		2	<p>Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)</p> $\frac{\text{PMKS yang mandiri}}{\text{PMKS yang tertangani}} \times 100\%$
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	<p>Indeks Pembangunan Infrastruktur</p> <p>((jumlah panjang jalan nasional + jalan provinsi + jalan lokal primer dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan keseluruhan x 100%)+((Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik/jumlah panjang irigasi x 35) + (jumlah luas areal yang dilayani irigasi/jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi x 20) +(Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik/jumlah panjang drainase x15)+(Jumlah</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN RUMUS
				kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani/jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun) x 30)) + (((Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik/jumlah gedung kantor x 100%) + (((Jumlah rumah tangga berakses air bersih/Jumlah rumah tanggax100%) + ((Jumlah rumah tangga berakses air limbah/jumlah rumah x 100%))/2) + ((Jumlah rumah layak huni/jumlah seluruh rumah x 100%) + (Luas permukiman kumuh yang ditangani/(luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani x 100%))/2) + (((Panjang jalan bertrottoar di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%) + (Panjang jalan berdrainase di perkotaan / panjang jalan di perkotaan)x 100%))/2) + (((Jumlah sampah yang tertangani/Jumlah produksi sampah x 100%) + (Jumlah taman dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan Taman x 100%))/2))/4) + (((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik/jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya adax100%) + '(Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik/Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada x 100%)/2))/5
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Petanian	<p>Growth Pertanian=</p> $\frac{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } n - \text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)}{\text{ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	<p>Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO)</p> <p>GIO =</p> $\frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan
		2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang}}{\text{Sesuai RTRW}} \times 100\%$
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1 Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan
		2 Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1 Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$

8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,12	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,30	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	76,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	74	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 inovasi	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15 unit usaha	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Daerah Inspektorat
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	35,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	3,50	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretaria t Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,255	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	11,60	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	Sumber data BPSP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,52	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,960	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategori Maju	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN RPJMD)		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Adanya perubahan target antara di dokumen RPJMD dan RKPD khususnya pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, IPM dll, dikarenakan adanya pandemi covid yang secara global mempengaruhi/berimbas kepada struktural ekonomi dan social tidak terkecuali Indonesia. Berikut daftar indikator yang mengalami perubahan target sesuai RPJMD 2018-2023.

Tabel 2.4
Daftar Perubahan Target IKU Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Target	
			RPJMD 2018-2023	Tahun 2021
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1 Pertumbuhan Ekonomi	4.95	3.50
		2 PDRB perkapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	34.73	11.6
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1 Tingkat pengangguran terbuka	2.8	4.0

Sehingga melalui pemerintahan pusat dan pemprov, kita melakukan rakortek untuk mensinkronisasikan dan harmonisasi terhadap target indikator makro, dari hasil rakortek tersebut telah ditetapkan target terbaru. Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 21 sasaran di atas, Pemerintah kabupaten Tanah Laut didukung dengan dengan APBD sebesar Rp. 2.220.694.238.313,00. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.5



Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan		1,136,384,933,168.00
		Program Pengelolaan Pendidikan	144,672,051,327.00
		Program Pengelolaan Kurikulum	1,204,205,780.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	989,803,201,841.00
		Program Pembinaan Perpustakaan	638,092,110.00
		Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	67,382,110.00
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan		231,206,516,620.00
		Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48,925,400,983.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178,655,350,953.00
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90,414,500.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,535,350,184.00
		Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48,925,400,983.00
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya		8,068,275,107.00
		Program Pendaftaran Penduduk	554,663,900.00
		Program Pencatatan Sipil	126,115,500.00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	991,796,020.00
		Program Pengendalian Penduduk	226,784,206.00
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5,169,876,746.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	999,038,735.00
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga		19,746,135,803.00
		Program Pengembangan Kebudayaan	199,979,870.00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	946,352,580.00
		Program Pembinaan Sejarah	106,500,000.00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1,182,158,159.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,948,668,644.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13,663,667,230.00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	698,809,320.00
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi		3,337,739,822.00
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	3,218,789,432.00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	44,040,390.00
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74,910,000.00
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841.00
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian		993,299,062,791.00
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3,176,861,614.00
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	124,999,750.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Hubungan Industrial	193,999,586.00
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik		299,109,937,087.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34,582,909,316.00
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	252,594,595,623.00
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8,158,957,644.00
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,568,962,434.00
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	645,459,370.00
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	559,052,700.00
9	Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik		1,061,847,406,450.00
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34,582,909,316.00
		Program Perekonomian dan Pembangunan	2,402,081,574.00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32,314,359,721.00
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	989,803,201,841.00
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	63,577,700.00
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	102,926,376.00
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360,827,472.00
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825,549,762.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	347,461,130.00
		Program Penatagunaan Tanah	608,301,116.00
		Program Pengelolaan Arsip	206,342,082.00
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200,748,584.00
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	29,119,776.00
10	Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama		2,709,062,196.00
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,824,698,096.00
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	612,236,410.00
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272,127,690.00
11	Meningkatkan Wawasan kebangsaan		11,433,477,531.00
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	380,051,090.00
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	689,271,976.00
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10,364,154,465.00
12	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		21,510,764,849.00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	440,317,574.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,018,604.00
		Program Penyuluhan Pertanian	875,501,978.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Perizinan Usaha Pertanian	364,964,068.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,902,498,495.00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,975,042,240.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	161,820,820.00
		Program Pengembangan Ukm	186,324,772.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,059,428.00
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	125,073,750.00
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	649,046,620.00
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	152,462,800.00
		Program Pengembangan Ekspor	149,695,620.00
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,503,202,350.00
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179,215,100.00
		Program Pelayanan Penanaman Modal	426,215,310.00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397,937,800.00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	117,940,820.00
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	198,129,500.00
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	607,297,200.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
13	Meningkatkan Peranan perempuan dalam pembangunan daerah		1,444,466,863.00
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	927,615,417.00
		Program Perlindungan Perempuan	221,636,800.00
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	34,702,436.00
		Program Perlindungan Khusus Anak	260,512,210.00
14	Menurunnya tingkat pengangguran		6,441,051,187.00
		Program Penempatan Tenaga Kerja	494,203,352.00
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	741,370,376.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,198,154,510.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	957,323,249.00
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat		25,721,059,467.00
		Program Penanggulangan Bencana	1,954,838,128.00
		Program Penanganan Bencana	6,845,033,480.00
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10,209,212,266.00
		Program Rehabilitasi Sosial	4,198,154,510.00
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	957,323,249.00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	528,444,000.00
		Program Pemberdayaan Sosial	901,852,350.00
		Program Pengelolaan Taman Makm Pahlawan	126,201,484.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
16	Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi		322,240,300,865.00
		Program Penyelenggaraan Jalan	140,388,663,345.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30,796,526,594.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,726,676,736.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12,840,007,801.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	54,880,591,743.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,975,042,240.00
		Program Penataan Bangunan Gedung	45,634,966,313.00
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	99,999,950.00
		Program Pengembangan Jasa Kontruksi	489,947,874.00
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24,894,076,029.00
		Program Pengelolaan Pelayaran	513,802,240.00
17	Meningkat kinerja unit usaha sektor unggulan		16,266,810,753.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,059,428.00
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	502,556,142.00
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7,273,192,151.00
		Program Pemasaran Pariwisata	1,951,446,818.00
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,402,081,574.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	152,462,800.00
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	161,820,820.00
18	Meningkatkan ketahanan pangan		198,551,800,834.00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,276,555,732.00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,052,720,188.00
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	202,378,876.00
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	86,075,170.00
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2,547,130,504.00
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178,655,350,953.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,902,498,495.00
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,975,042,240.00
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	440,317,574.00
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,018,604.00
		Program Perizinan Usaha Pertanian	364,964,068.00
		Program Penyuluhan Pertanian	875,501,978.00
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	858,034,330.00
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	357,850,696.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	330,170,406.00
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00
19	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		34,314,492,243.00
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	213,858,016.00
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4,806,231,872.00
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9,933,521,872.00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1,475,462,400.00
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	365,904,492.00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	115,021,596.00
		Program Pengelolaan Persampahan	13,202,210,637.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,139,253,292.00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	63,028,066.00
20	Meningkatkan desa membangun		16,336,647,566.00
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3,723,727,516.00
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,668,984,320.00
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,273,114,554.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2,547,130,504.00
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	276,976,716.00
		Program Penataan Desa	436,188,310.00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	410,525,646.00
21	Meningkatkan cakupan penataan kota		79,423,970,003.00
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	2,793,665,000.00
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30,796,526,594.00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,726,676,736.00
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,139,253,292.00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	24,111,576,687.00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,059,428.00
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10,209,212,266.00
		Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	2,793,665,000.00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja tahun ketiga RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terdapat 21 sasaran dengan 31 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Memuaskan** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 140,00%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut **Nomor 126 Tahun 2019** tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk periode 2019-2023 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis Misi 1

MISI 1						
Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	7,89	87,67%
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,12	12,31	101,57%
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,30	69,59	100,41%
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,5	84,53	110,49%
4.	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	100%
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	74	143	193,2%%
5.	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik	100	100	100%

			berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)			
--	--	--	---	--	--	--

Tabel 3.2

Indikator Sasaran Strategis Misi 2

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
6.	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	6	300%
7.	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	15	103	686,67%

Tabel 3.3

Indikator Sasaran Strategis Misi 3

MISI 3 Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)	B (66,11)	85,86%
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP	100%
9.	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	35,71	55,87	156,45%

Tabel 3.4
Indikator Sasaran Strategis Misi 4

MISI 4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
10.	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	100%
11.	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	100%

Tabel 3.5
Indikator Sasaran Strategis Misi 5

MISI 5 Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
12.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	3,50	3,47	99,14%
		2	Indeks Gini (skor)	0,255	0,232	109,02%
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	11,6	29,68	255,86%
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	86,86	97,87%
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,52	112%
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (sedang)	178 (tinggi)	63,07%
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	56,32	281,6%

MISI 5						
Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3		4	5	6
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,00	43,13	60,74%
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Petanian	3,52	1,81	51,42%
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58	5,01	66,09%
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290.000	193.671	66,78%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	84,1	88,53%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,960	68,70	112,7%
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87,00	87,00	100%
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju (%)	24	33,08	137,83%
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	6	120%
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00	0,33	195,28%

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target

kinerja dalam tahun 2021. Sesuai dengan dokumen RPJMD 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 5 (lima) misi. Masing-masing misi dijabarkan lebih lanjut dalam 12 (dua belas) tujuan, selanjutnya tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 21 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 31 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Di atas 80% sampai dengan 90	Memuaskan
III	Di atas 70 sampai dengan 80	Sangat Baik
IV	Di atas 60 sampai dengan 70	Baik
V	Di atas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100% Target
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target – (Realisasi-Target) ----- X 100% Target
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target + (Target- Realisasi) X 100% Target
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Misi adalah sebagai berikut :

MISI 1

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 3 tujuan untuk misi 1 yaitu:

1. Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
2. Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
3. Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan misi I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
2	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	70,10
3	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang pendidikan
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan dan bidang kesehatan
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya
4. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda

dan olahraga

5. Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

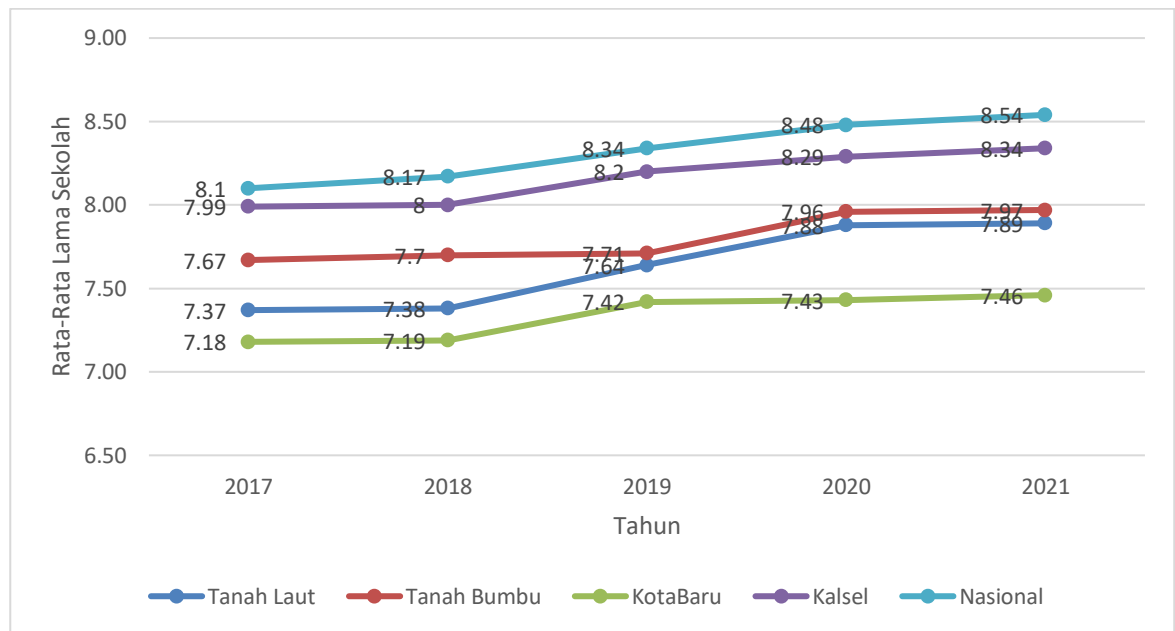
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,64	7,88	9,00	7,89	87,67%
2	Harapan lama sekolah	Tahun	11,96	12,01	12,12	12,31	101,57%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							94,62%

a. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Realisasi indikator Angka rata-rata lama sekolah (ARLS) tahun 2021 adalah 7,89 tahun, belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 9,00 tahun dengan tingkat capaian 87,67%. Mengalami peningkatan 0,01 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 7,88 tahun. Realisasi tersebut baru mencapai 65,75% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 12 tahun.

Grafik 3.1.1
ARLS Kab. Tanah Laut 2017 – 2021



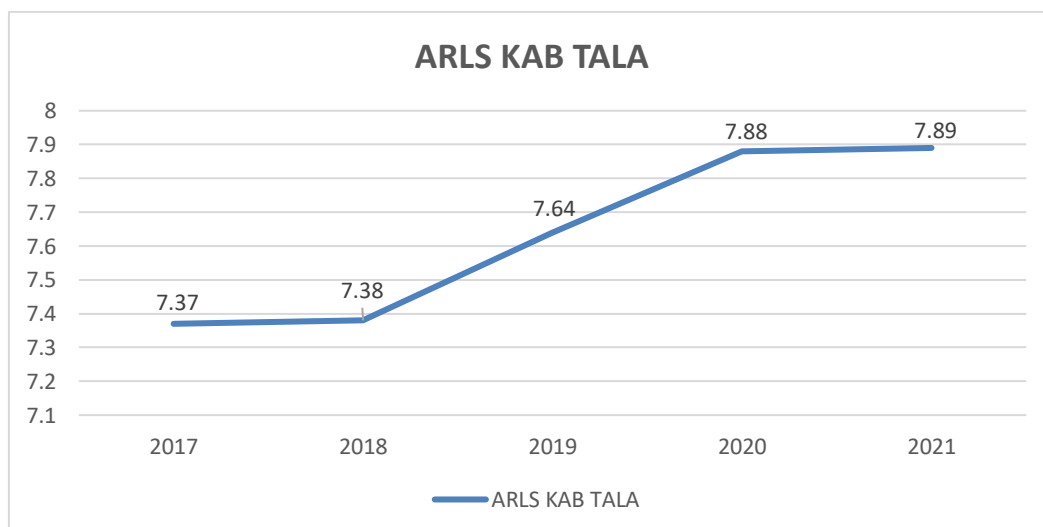
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk **rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Laut dengan angka 7,89 tahun** lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 7,97 tahun. Jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 8,34 tahun** maka lebih rendah 0,45 tahun dan **lebih rendah 0,65 tahun** jika di bandingkan dengan rata-rata lama sekolah **Indonesia dengan angka 8,54 tahun**.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 7,89 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kabupaten Tanah Laut dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama/SMP. Sehingga untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari pemerintah Kabupaten Tanah Laut. hal ini sebagai Pekerjaan Rumah dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan program nasional wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Angka rata-rata lama sekolah tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena salah satunya masih banyak penduduk di wilayah Tanah Laut yang berada di bawah garis kemiskinan, angka putus sekolah juga mempengaruhi meski angka putus sekolah di wilayah Tanah Laut tergolong rendah dengan realisasi jenjang SD 0,64 % jenjang SMP 0,22 % dan pada jenjang SMA 2,25 % dan yang selanjutnya yang paling mempengaruhi adalah minat dari penduduk tersebut apalagi yang sudah berusia 40 tahun keatas yang memiliki pemahaman bahwa wajib belajar tidak manfaat dan pengaruh lagi untuk diri mereka baik untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk bekerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan orang tua.

Grafik 3.1.2
ARLS Kab. Tanah Laut 2017 – 2021





Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari grafik di atas, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, artinya masyarakat semakin sadar dan memahami pentingnya arti sekolah bagi masa depan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan angka rata – rata lama sekolah dengan menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan yaitu melalui kegiatan paket A, B dan paket C yang siap menampung penduduk yang putus sekolah maupun penduduk yang tidak bersekolah melalui Pendidikan Non Formal, pemberian BOP Kesetaraan, Pendidikan keluarga melalui program unggulan Desa Sahabat Keluarga yang memberikan sosialisasi kepada Masyarakat sejak dini pentingnya peran serta orang tua dalam dunia pendidikan yang akan berdampak semakin menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya minat masyarakat putus sekolah untuk kembali bersekolah dan membangun pemahaman bersama bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab orang tua dan masyarakat.

Selain itu juga banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung melalui perbaikan prasarana dan sarana, pembangunan infrastruktur pendidikan terus dilakukan baik penambahan maupun rehabilitasi sarana/ prasarana proses belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyiapkan berbagai kebijakan untuk terlaksananya pendidikan secara menyeluruh di tanah laut, diantaranya dengan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang difokuskan untuk SMP Negeri.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, disamping itu juga berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Selain itu disediakan dana bantuan untuk pelajar Tanah Laut agar bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut meluncurkan Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah ke atas.

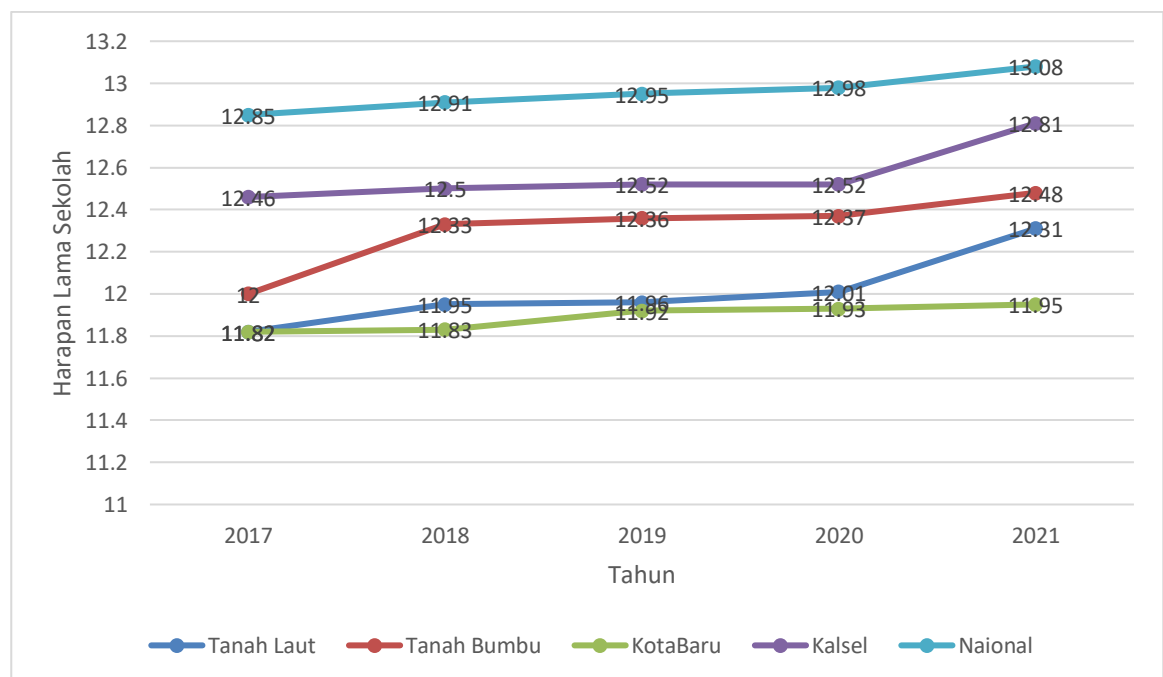
Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah

1. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan
2. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF.

b. Harapan Lama Sekolah

Realisasi indikator Harapan lama sekolah (HLS) tahun 2021 adalah 12,31 tahun, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 12,12 tahun dengan tingkat capaian 101,57%. mengalami peningkatan 0,11 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 12,01 tahun. Realisasi tersebut telah mencapai 101,07% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 12,18 tahun.

Grafik 3.1.3
HLS Kab. Tanah Laut 2017 – 2021



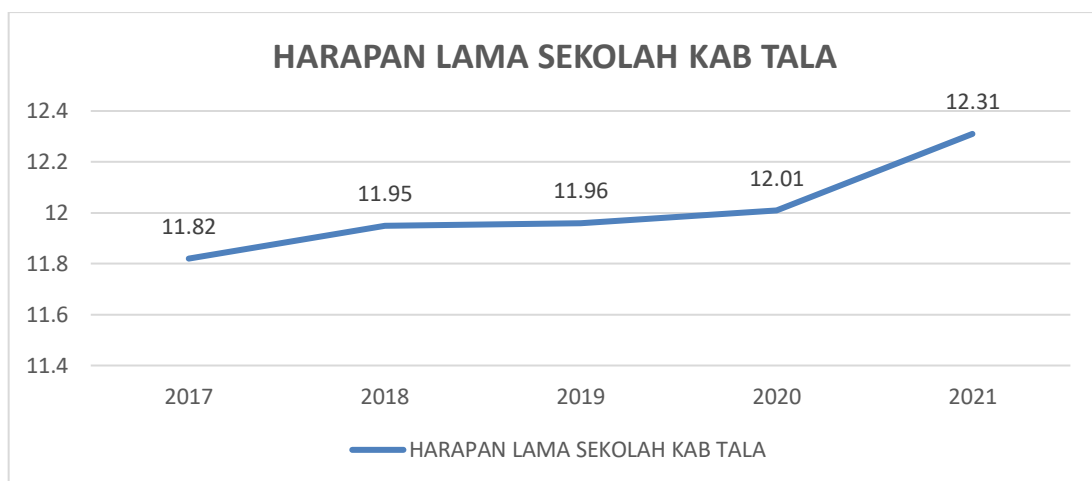
Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk **harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut dengan angka 12,31 tahun** lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 12,48 tahun. Jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 12,81**

tahun maka lebih rendah 0,5 tahun dan **lebih rendah 0,77 tahun** jika di bandingkan dengan angka harapan hidup **Indonesia** dengan angka 13,08 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 berada pada angka 12,31 tahun, artinya bahwa peluang lamanya bersekolah yang akan dirasakan oleh anak umur tertentu (7 Tahun ke atas) adalah 12,31 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA (kelas XII).

Grafik 3.1.4
HLS Kab. Tanah Laut 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Bagi suatu daerah, pendidikan merupakan sektor yang fundamental karena pendidikan mampu memberikan manfaat positif bagi pembangunan meskipun manfaatnya baru dapat dirasakan beberapa tahun ke depan.

Pada tahun 2021 HLS pada angka 12,31 tahun menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Laut hingga mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan angka harapan lama sekolah menunjukkan

bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah belum tercapai sesuai target tercapai karena dipengaruhi beberapa hal yaitu masyarakat di Tanah Laut yang mayoritasnya adalah muslim memilih kecenderungan menyekolahkan anak pada pondok pesantren dan masalah timbul ketika penduduk usia sekolah kita bersekolah di pondok pesantren dengan model salafiyah yaitu pondok pesantren yang tidak melaksanakan wajib belajar yang berakibat tidak terdata pada aplikasi DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang membuat penduduk usia sekolah tersebut memiliki status ATS (Anak Tidak Sekolah) sehingga begitu mempengaruhi harapan lama sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Masalah selanjutnya adalah penduduk usia sekolah yang bermukim di wilayah pesisir yang memiliki orang tua berprofesi sebagai seorang nelayan yang sering berpindah pindah mengikuti musim penangkapan ikan mereka tercatat sebagai penduduk usia sekolah yang berada di wilayah Tanah Laut sementara mereka bersekolah tidak di wilayah Tanah Laut. Penduduk usia sekolah bermukim diperbatasan antara Tanah Laut dengan wilayah Kota Banjarbaru yang mana juga cenderung melanjutkan pendidikan di wilayah kota banjarbaru karena orang tua terutama anak mereka memiliki opini bahwa bersekolah di Kota Banjarbaru memiliki kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang lebih baik. Usia sekolah pada jenjang sekolah dasar di wilayah Tanah Laut masih ada yang berusia di bawah 7 Tahun karena sebagian orang tua memiliki kebanggaan bahwa anak mereka mampu bersekolah di jenjang sekolah dasar meski masih memiliki usia belum genap 7 Tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara sekolah gratis melalui kegiatan pemberian dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), sosialisasi melalui program Desa Sahabat Keluarga bahwa selain pentingnya ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga penting.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah adalah Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C.



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan di dukung oleh 5 Program dengan Pagu Rp. 1.136.384.933.168 dan terealisasi Rp. 936.260.809.091 atau sebesar 82,39%.

Tabel 3.1.3
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Pendidikan	144.672.051.327	127.002.272.231
2	Program Pengelolaan Kurikulum	1.204.205.780	404.711.019
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	989.803.201.841	808.249.651.331
4	Program Pembinaan Perpustakaan	638.092.110	567.685.510
5	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	67.382.110	36.489.000
Jumlah		1.136.384.933.168	936.260.809.091

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Meningkatnya akses dan pelayanan bidang kesehatan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

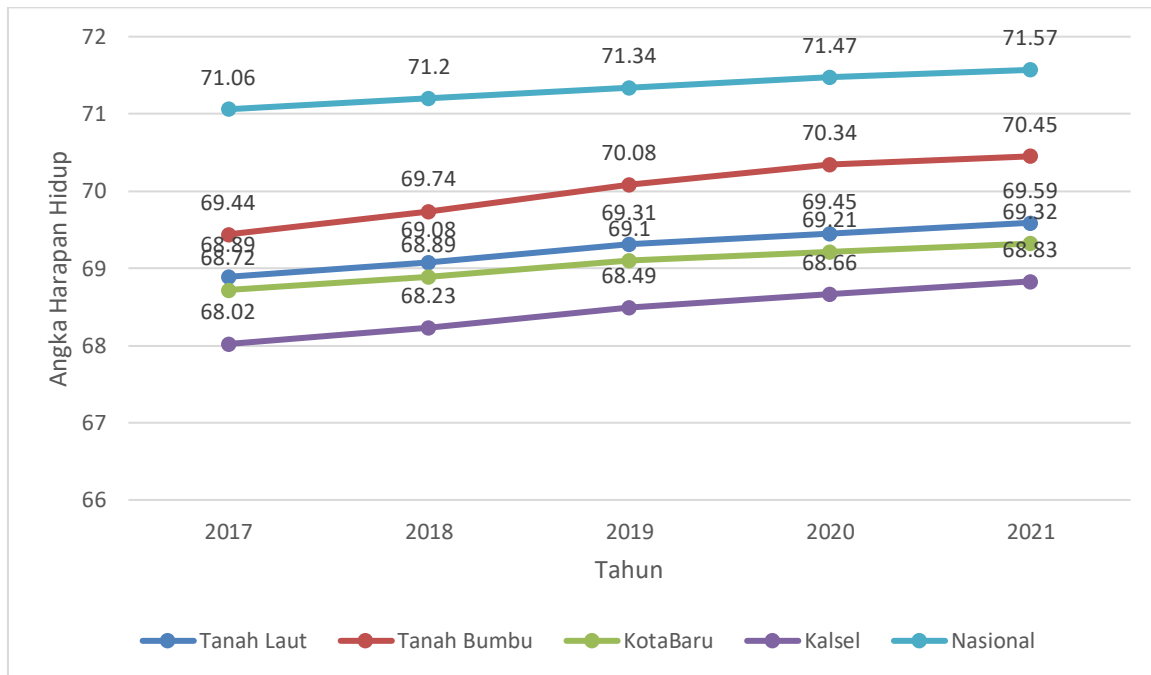
Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,31	69,45	69,30	69,59	100,41%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100,41%

Angka/Umur Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata peluang untuk hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indikator tersebut. Umur Harapan Hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam menghitung umur harapan hidup yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup dilakukan proses normalisasi berdasarkan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).

Realisasi indikator Angka Harapan Hidup tahun 2021 adalah 69,59 tahun, realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,30 tahun dengan tingkat capaian 100,41%. mengalami peningkatan 0,14 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 69,45 tahun. Realisasi tersebut sudah mencapai 99,7% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 69,80 tahun.

Grafik 3.1.5
Angka harapan hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional



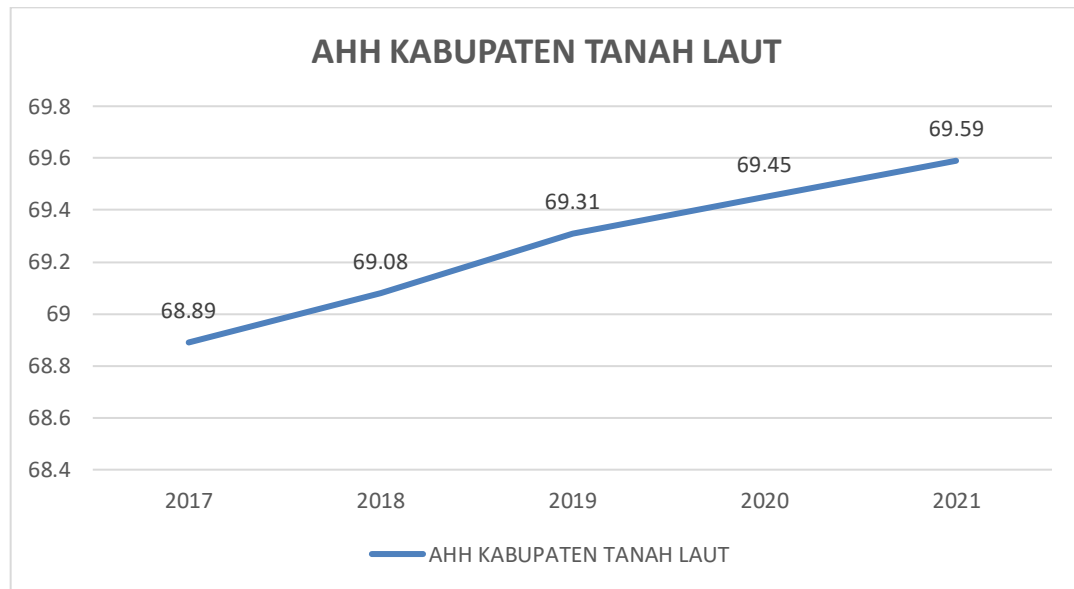
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk **angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dengan angka 69,59 tahun** lebih tinggi dari Kabupaten Kotabaru namun berada di bawah Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 70,45 tahun. Jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tinggi 0,62 tahun** dengan angka 68,83 tahun dan **lebih rendah 1,98 tahun** jika dibandingkan dengan angka harapan hidup **Indonesia** dengan angka 71,57 tahun.

Kualitas sumber daya manusia suatu daerah dapat dilihat secara fisik maupun non fisik. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk, di mana salah satu indikator utama untuk mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir atau yang sebelumnya biasa disebut Angka Harapan Hidup.

Trend peningkatan angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.1.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2017 -2021



Sumber: BPS Kabupaten tanah Laut

Pada tahun 2020, angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut sebesar 69,45 sementara pada tahun 2021 angka tersebut meningkat menjadi 69,59. Angka tersebut menggambarkan bahwa perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 diharapkan mencapai umur 69,59 tahun hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi. Peningkatan umur harapan hidup pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut semakin meningkat.

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi, jika kematian bayi jumlahnya besar, umur harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya daerah yang Angka Harapan Hidupnya tinggi pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi yang menggambarkan peningkatan status kesehatan masyarakatnya yang diukur dengan indikator sesuai tabel dibawah.

Tabel 3.1.6
Data kematian ibu dan bayi serta prevelensi gizi stunting
Kabupaten Tanah Laut

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
1	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	46,2	122,8	267
2	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	7,4	9,5	11,3
3	Prevalensi Gizi stunting (%)	15,66 %	10,67%	6,41%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Dari data ini dapat digambarkan AKI dan AKB mengalami peningkatan di tahun 2021 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 267 dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 11,3 akan tetapi Prevalensi Gizi Stunting mengalami penurunan 6,41 %. Angka Kematian Ibu pada tahun 2020 berjumlah 8 orang dan di tahun 2021 meningkat menjadi 17 orang, kemudian Angka Kematian Bayi tahun 2020 berjumlah 73 orang dan di tahun 2021 menurun menjadi 72 orang.

Angka harapan hidup erat kaitannya dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi merupakan jumlah kematian pada usia di bawah satu tahun. Menurut BPS (2016) secara teori menurunnya angka kematian bayi dapat meningkatkan angka harapan hidup di suatu wilayah. Hal ini dikarenakan bayi sangat rentan terhadap penyakit dan pengaruh dari lingkungan lainnya seperti lingkungan sosial, ekonomi dan lingkungan fisik.

Meskipun demikian banyak faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup, berikut ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama / Penyebab panjangnya umur manusia, tergantung dari beberapa faktor (Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, ahli gizi Institut Pertanian Bogor) yaitu:

- 1) Pola makan
- 2) Penyakit bawaan dari lahir/penyakit degeneratif
- 3) Lingkungan tempat tinggal
- 4) Stress/tekanan

Faktor-faktor kesehatan yang mempengaruhi dan berhubungan dengan umur

harapan hidup terdiri atas:

- 1) Gizi
- 2) Merokok
- 3) Manepause
- 4) Osteoporosis/tulang keropos

Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 83,69 (Mutu Pelayanan Baik), oleh karenanya meskipun AKI dan AKB Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan akan tetapi Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 69 tahun, 31 hari (tahun 2019) menjadi 69 tahun, 45 hari (tahun 2020) meningkat 14 hari, hal ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.


Angka harapan hidup Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai melebihi target dikarenakan:

- 1) Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan yang bisa diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 diperoleh pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,69 dimana dapat diartikan bahwa kepuasan masyarakat pada kisaran Baik.
- 2) Pelayanan Kesehatan juga bisa diukur dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dimana Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 capaian AKI adalah 267 per 100.000 Kelahiran Hidup lebih tinggi dari target RPJMN yaitu 183 per 100.000 kelahiran hidup dan target SDGs yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Tanah Laut mencapai 11,3 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target RPJMN yaitu 16 per 1000 Kelahiran Hidup dan SDGs sebesar 12 per 1000 Kelahiran Hidup lebih.
- 3) Keberadaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut sampai tahun 2021 ini dapat dikatakan telah memadai. seluruh jenis fasilitas kesehatan dasar telah tersedia di Kabupaten Tanah Laut dari rumah sakit sampai dengan polindes. saat ini pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki 2 buah rumah sakit daerah yaitu Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dan Rumah Sakit KH. Mansyur Kintap.

selain itu kita juga mendapat dukungan dari beberapa rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Borneo Citra Medika, Rumah Sakit Khusus RSIA Ibunda dan RSIA Ainun, Klinik Utama Ammariz, Klinik-Klinik Perusahaan serta beberapa Klinik Pratama lainnya yang kesemuanya berada di wilayah kabupaten Tanah Laut.

4) Layanan kesehatan pada puskesmas di Kabupaten Tanah Laut tersebar merata di seluruh kecamatan sebanyak 19 buah, dengan 2 buah adalah puskesmas rawat inap yaitu puskesmas tajau pecah dan kurau. sampai tahun 2021 ini hasil penilaian akreditasi puskesmas adalah:

- + 7 puskesmas mendapat predikat utama, meliputi puskesmas kurau, asam-asam, sungai cuka, pelaihari, bati-bati, tambang ulang dan sungai riam.
- + 11 puskesmas mendapat predikat madya, yakni puskesmas padang luas, bumi makmur, kintap, jorong, tajau pecah, tanjung habulu, tirta jaya, batakan, panyipatan, kait-kait, dan angsau.
- + 1 puskesmas mendapat predikat dasar yakni puskesmas Takisung
- + sementara, 2 puskesmas baru yang dibangun dan dioperasikan pada Desember 2021 proses akreditasinya akan dilaksanakan pada tahun 2022/2023.
- + Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala atau diakreditasi ulang 3 (tiga) tahun sekali. Dari pelaksanaan akreditasi perdana maka pada tahun 2019/2020 seharusnya telah dilakukan re akreditasi pada 5 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2017, pada tahun 2021 ini seharusnya dilakukan reakreditasi pada 6 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2018, namun karena kondisi pandemi covid-19 kegiatan ini menjadi tertunda, sehingga pada tahun 2021 ada sebanyak 11 Puskesmas yang rencana akan diakreditasi ulang. Selajutnya pada tahun 2022 akan dilaksanakan re akreditasi pada 8 puskesmas yang diakreditasi pada tahun 2019. Untuk itu perlu kita persiapkan pelaksanaan akreditasi ulang (Re Akreditasi) untuk Puskesmas-Puskesmas dan kembali dikuatkan komitmen re akreditasinya.

-  Puskesmas yang telah mendapatkan predikat dasar, madya dan utama direncanakan akan dire-akreditasi dan diharapkan akan meningkat menjadi puskesmas predikat utama dan paripurna.
- 5) Peningkatan manajemen puskesmas dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kepada semua puskesmas, 19 puskesmas yang telah di BLUD kan pada tahun 2019, 2 Puskesmas di Tahun 2022.
 - 6) Penempatan Bidan Desa di semua desa dan kelurahan (130 desa dan 5 Kelurahan) yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut, disamping itu juga Dinas Kesehatan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil terutama yang berisiko tinggi dengan mendatangkan dokter spesialis kebidanan secara berkala di Puskesmas yang ditunjuk. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak.
 - 7) Pencegahan terhadap penyakit akan berpengaruh pada angka kesakitan dengan sendirinya juga akan mempengaruhi Angka Harapan Hidup, pelayanan pencegahan terhadap penyakit, Dinas Kesehatan telah melakukan upaya-upaya seperti pelayanan imunisasi dan Vaksinasi di tahun 2021 hal ini dampak adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat *Physical Distancing* dan kebijakan Bupati Tanah Laut untuk menunda kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Dinas Kesehatan juga melaksanakan pelayanan penyuluhan penyakit menular dan tidak menular dimana pencegahan penyakit sangat diutamakan, di masa Pandemi COVID-19 saat ini fokus utama Dinas Kesehatan adalah pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021 jumlah kasus COVID-19 yang positif sebanyak 6.620 orang, yang sembuh sebanyak 6.433 orang dan meninggal 187 orang.

Untuk pencapaian target vaksinasi covid 19 sampai dengan 31 Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic corona Virus Disease 2019, maka setiap Fasyankes melaksanakan kegiatan vaksinasi berdasarkan Juknis-Juknis yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yang berbeda berdasarkan kategori, tenaga Kesehatan, Masyarakat Umum, Lansia,

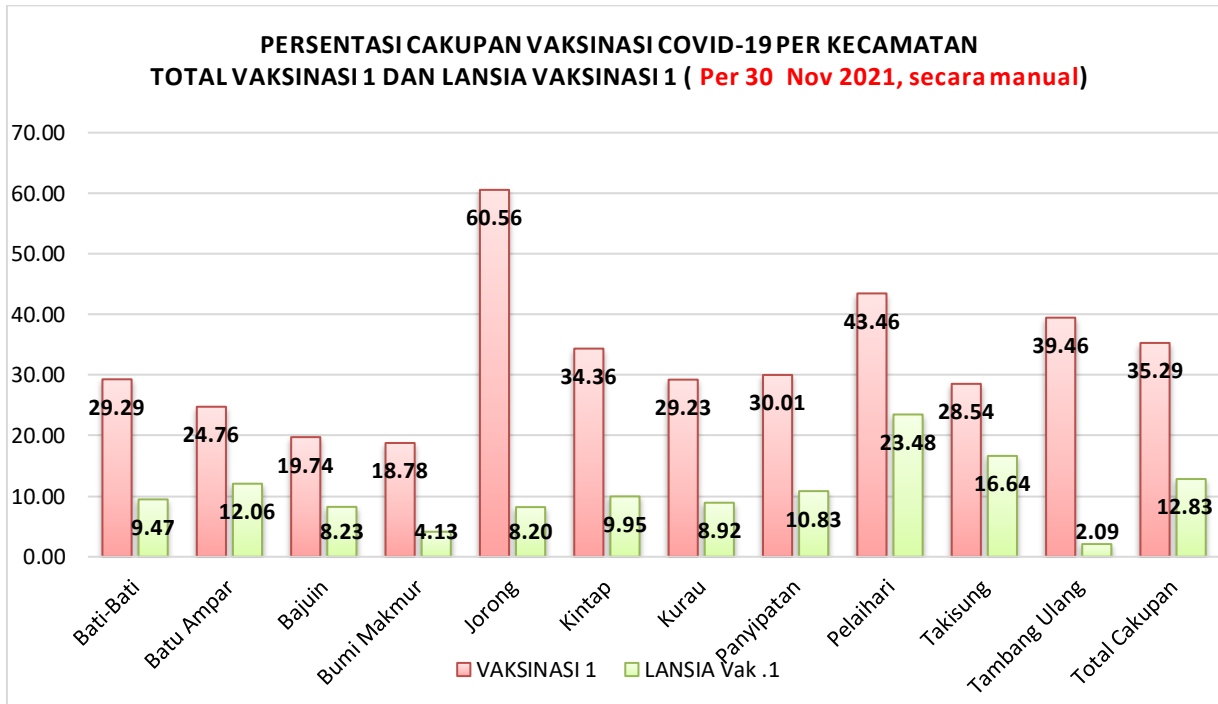
Petugas Publik, Ibu hamil dan remaja dengan total keseluruhan sasaran adalah 269.965 sasaran. Berikut adalah capaian Vaksinasi Covid 19 berdasarkan laporan manual :

Tabel 3.1.7
Capaian Vaksinasi Covid 19 update 30 November 2021

No	KECAMATAN	SASARAN	VAKSINASI 1	LANSIA VAKSINASI 1
1	Bati-Bati	34.426	29,29	9,47
2	Batu Ampar	21.181	24,76	12,06
3	Bajuin	14.921	19,74	8,23
4	Bumi Makmur	10.607	18,78	4,13
5	Jorong	25.961	60,56	8,20
6	Kintap	32.990	34,36	9,95
7	Kurau	10.779	29,23	8,92
8	Panyipatan	19.540	30,01	10,83
9	Pelaihari	60.342	43,46	23,48
10	Takisung	25.285	28,54	16,64
11	Tambang Ulang	13.933	39,46	2,09
	Total Cakupan	269.965	35,29	12,83

Grafik 3.1.7

Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Kecamatan Per 30 Nov 2021



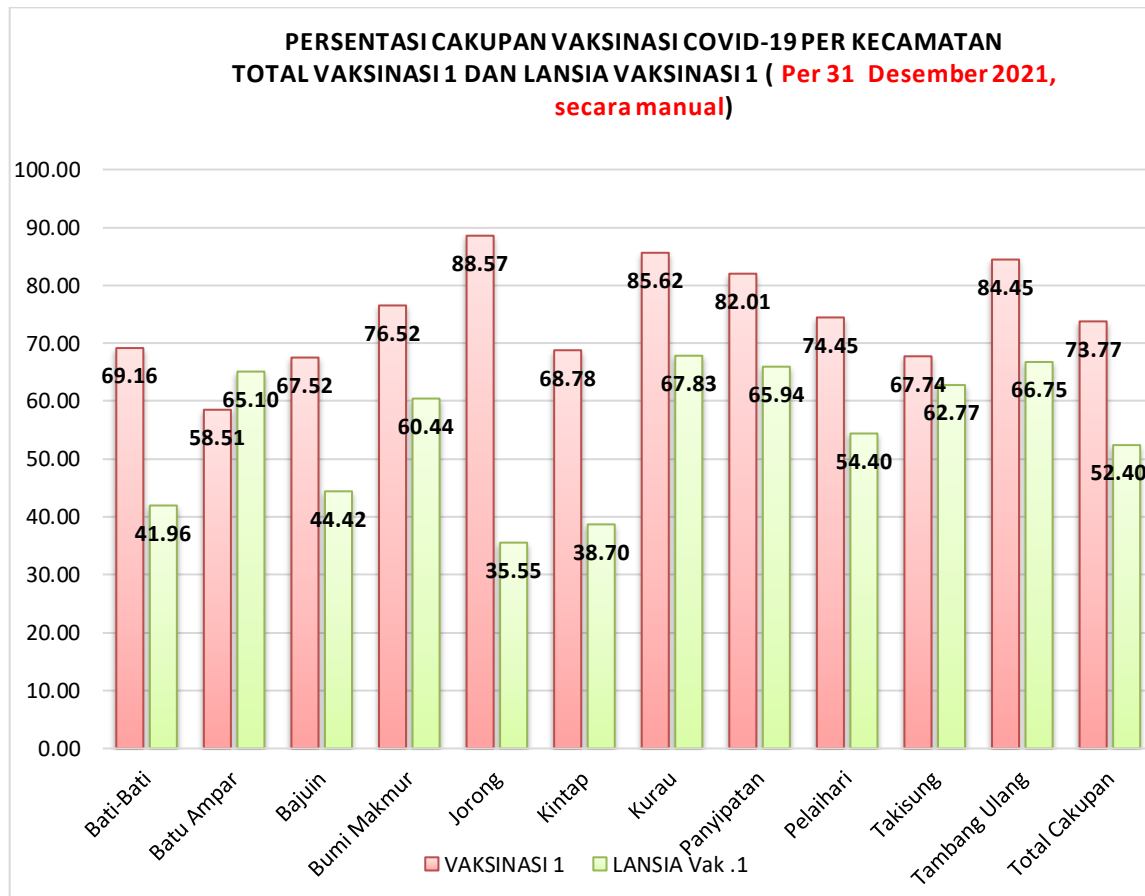
Tabel 3.1.8

Capaian Vaksinasi Covid 19 update 31 Desember 2021

KECAMATAN	SASARAN	VAKSINASI 1	LANSIA Vak .1
Bati-Bati	34.426	69,16	41,96
Batu Ampar	21.181	58,51	65,10
Bajuin	14.921	67,52	44,42
Bumi Makmur	10.607	76,52	60,44
Jorong	25.961	88,57	35,55
Kintap	32.990	68,78	38,70
Kurau	10.779	85,62	67,83
Panyipatan	19.540	82,01	65,94
Pelaihari	60.342	74,45	54,40
Takisung	25.285	67,74	62,77
Tambang Ulang	13.933	84,45	66,75
Total Cakupan	269.965	73,77	52,40

Grafik 3.1.8

Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19 Per Kecamatan Per 31 Des 2021



- 8) Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak. Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 11 Kecamatan yaitu 2 (dua) Rumah sakit Umum Daerah, 19 (sembilan belas) Puskesmas, 1 (satu) Instalasi Gudang Farmasi, 1 (satu) Laboratorium Kesehatan Daerah, 61 (enam puluh satu) Puskesmas Pembantu, 124 (seratus dua puluh empat) Poskesdes/Polindes, 19 (sembilan belas) Ambulan, 19 (sembilan belas) Puskesmas Keliling, dan 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Posyandu dan pada akhir Tahun anggaran 2021 telah berdiri 2 Puskesmas yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Tanah Laut H. Sukamta yaitu Puskesmas Bentok Kampung dan Puskesmas Durian Bungkok berikut untuk menunjang operasional puskesmas tersebut telah disiapkan juga 2 (dua) unit Mobil Ambulan.






- 9) Memberikan bentuk pelayanan kesehatan yang tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan saja akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdiri dari ;
- Dokter Spesialis sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 28 orang dokter spesialis di RSUD H. Boejasin Pelaihari dan 3 orang Dokter Spesialis di RSUD K.H Mansyur Kintap.
 - Dokter Umum sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang terdiri dari 20 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 10 orang di RSUD K.H Masyur Kintap, 8 Orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 2 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing - masing.
 - Dokter Gigi sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, terdiri dari 3 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 2 orang di RSUD KH. Mansyur Kintap, 1 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskemas masing – masing.
 - Dokter Gigi Spesiallis sebanyak 1 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari.
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 22 orang terdiri dari 2 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 4 orang di RSUD. K.H. Mansyur Kintap sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
 - Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 43 orang yang terdiri dari 7 Orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 1 orang di RSUD.K.H. Mansyur Kintap, 1 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT puskemas masing masing.
 - Tenaga Nutrisisionis sebanyak 70 orang terdiri dari 20 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 5 orag di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 2 orang di RSBCM Pelaihari dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing masing.
 - Perawat sebanyak 539 orang terdiri dari 241 di RSUD H. Boejasin pelaihari, 36 orang di KH Mansyur Kintap, 64 orang di RSBCM Pelaihari, 1 orang di RSIA Ainun, 6 Orang di RSIA ibunda dan sisanya tersebar di Puskemas masing – masing.
 - Bidan sebanyak 511 orang terdiri dari 94 di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 24 Orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 95 orang di RSBCM pelaihari, 10 Orang

di RSIA Aiunun, 21 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas masing-masing.

- Tenaga Ahli Laboratorium Medik sebanyak 75 orang terdiri dari 25 Orang di RSUD H. Boejasin pelaihari, 6 orang di RSUD K.H Mansyur Kintap, 7 Orang, di RSBCM pelaihari, 2 orang di RSIA Ibunda.
- Tenaga Teknik Bio Medika lainnya sebanyak 57 Orang terdiri dari 39 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 7 Orang di KH. Masyur Kintap, 9 orang di RSBCM pelaihari, 2 orang di RSIA Ibunda.
- Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 21 orang terdiri dari 6 Orang di RSUD. H. Boejasin Pelaihari, 15 org di RSBCM Pelaihari.
- Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 32 orang terdiri dari 17 orang di RSUD H. Boejasin Pelaihari, 3 orang di RSUD K.H. Mansyur Kintap, 6 Orang di RSBCM Pelaihari, 6 orang di RSIA Ibunda dan sisanya tersebar di UPT Puskesmas Masing Masing.

- 10) Meningkatnya perilaku masyarakat terhadap hidup bersih dan sehat. Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidaklah mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, untuk pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2021 adalah 49,78% (dari 8.044 jumlah rumah tangga yang dilakukan Survey PHBS terdapat 3.956 rumah tangga yang ber PHBS) capaian ini belum mencapai target renstra pada tahun 2021 (60%) tetapi angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2020 (45,0%) dari capaian PHBS tahun 2021 diketahui masih ada 50,22% masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang belum berperilaku hidup bersih dan sehat salah satu indikator yang membuat capaian PHBS tidak tercapai adalah masih banyak masyarakat yang merokok dalam rumah yaitu sebesar 51,3%. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah

dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 Pilar STBM yaitu pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan, dimana masyarakat diajak untuk melihat permasalahan lingkungan dan perilaku yang tidak sehat dan memecahkan sendiri permasalahannya yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. 5 pilar STBM yaitu:

-  Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS),
-  Mencuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air mengalir (CTPS),
-  Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM RT),
-  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,
-  Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

- 11) Secara kumulatif desa yang sudah melaksanakan STBM sampai dengan tahun 2021 sebanyak 92 (sembilan puluh dua) desa atau mencapai 170% dari target 2021 sebanyak 54 (lima puluh empat) desa, dan sudah melebihi target renstra Dinas kesehatan di tahun 2021 (69,02%). Akan tetapi untuk pilar pertama yaitu Stop Buang Besar Sembarangan (BABS) sampai tahun 2021 masih 11 % desa (15 Desa dari 130 Desa dan 1 Kelurahan dari 5 Kelurahan) yang sudah di nyatakan desa ODF (Open Defecation Free) artinya Desa yang sudah bebas buang air besar sembarangan yang mana dinyatakan melalui deklarasi desa ODF melalui verifikasi sebelumnya.
- 12) Pelaksanaan Layanan *On Call PSC 119*. Bermula dengan adanya Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 Pemda Tanah Laut memerintahkan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membentuk Layanan Publik (PSC 119), Serta adanya Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut, akhirnya Terbentuklah **Layanan Public Safety Center 119**. Bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional **12 November 2019** yang dilaksanakan di Halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang diresmikan Langsung Bapak Bupati Sukamta, Dewan DPRD Tanah Laut, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Layanan *On Call* atau Layanan *Public Safety Center*. Layanan on Call merupakan salah satu program unggulan Bupati tanah Laut yang

beralamat pada jalan hutan kota (komplek perkantoran Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut).

Kemudian pada akhir tahun 2021 Layanan *On Call PSC 119* berpindah tempat ke Gedung Ex RSUD H. Boejasin Pelaihari tepatnya pada awal November 2021 Adapun kegiatan Layanan *On Call PSC 119* pada tahun 2021 tercantum pada table di bawah ini :

Tabel 3.1.9
Data Layanan On Call dari Januari sampai dengan Desember 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	<i>Emergency</i>	503
2	<i>Non Emergency</i>	2004
3	kegiatan	44
4	Panggilan telepon	503

Gambar 3.1.1
Kegiatan Layanan *On Call 119*





Hambatan:

- 1) Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara ekonomi dan sosial, serta sebagai salah satu cara mengatasi kesenjangan dalam upaya mencapai kesetaraan dan mewujudkan hidup makmur. Pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, diharapkan seseorang akan semakin mudah dalam menyerap, memilih, beradaptasi atau mengembangkan segala bentuk informasi dan pengetahuan baru untuk kehidupannya.
- 2) Faktor ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat akan menunjukkan kemampuan seseorang terhadap daya beli maupun menunjukkan pendapatan dari masing-masing personal dengan didapatkannya alat pembayaran. Hampir semua yang ada di dunia memerlukan alat pembayaran untuk memperolehnya, baik sandang, pangan, ataupun papan. Angka harapan hidup itu sendiri yang menjadi ukuran kesehatan dan keberhasilan dalam indeks pembangunan manusia pasti memerlukan berbagai macam biaya untuk mencapainya. Oleh karena itu, faktor perekonomian suatu individu atau daerah menjadi penting. Perekonomian daerah erat kaitannya dengan produk domestik regional bruto yang merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten atau kota
- 3) Faktor pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jika pendapatan per kapita (PDRB)

meningkat maka akan mengurangi angka kematian bayi dan angka harapan hidup akan meningkat.

- 4) Kurangnya respon masyarakat terhadap akses kesehatan.

Solusi :

- 1) Memperluas akses kesehatan masyarakat melalui program *Universal Health Coverage (UHC)* atau hak jaminan kesehatan cakupan semesta yang dimaksudkan untuk memastikan masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial melalui program jaminan kesehatan nasional-kartu indonesia sehat (JKN-KIS) dijamin pada layanan kesehatan kelas III.
- 2) Lebih meningkatkan upaya-upaya yang sudah baik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan berbagai bidang lain.
- 3) Memberikan penyuluhan pengetahuan tentang pentingnya angka harapan hidup itu sendiri dikarenakan tidak banyak yang tahu terkait pentingnya angka harapan hidup, terutama kalangan dengan pendidikan yang relatif rendah.
- 4) meningkatkan Umur harapan Hidup tidak hanya bidang kesehatan, dan sangat diperlukan kerjasama di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, Sosial, Ekonomi dan lain lain.
- 5) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 3.1.10
Terkait Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Jaminan
Kabupaten / Kota Tahun 2021

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persentase (%)
1	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)		
	PBI APBN	99.495	28,57
	PBI APBD	122.480	35,17
	Sub Jumlah PBI	221.975	63,74
2	NON PBI		
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	75.237	21,61
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/ Mandiri	41.460	11,91



	Bukan Pekerja	3.883	1,12
	Sub Jumlah NON PBI	120.580	34,63
	Jumlah (Kab / Kota)	342.555	98,37

Sumber data : Seksi Jaminan Kesehatan (Bidang Yankes) & BPJS Kesehatan Kab. Tanah Laut

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 231.206.516.620 dan terealisasi Rp. 186.702.102.907 atau sebesar 80,75%.

Tabel 3.1.11
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.925.400.983	39.081.121.820
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178.655.350.953	147.594.648.587
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90.414.500	26.332.500
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.535.350.184	3.208.762.559
Jumlah		231.206.516.620	186.702.102.907

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.12
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik (82,73)	Baik (84,59)	76,5	Baik (84,53)	110,49%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							110,49%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

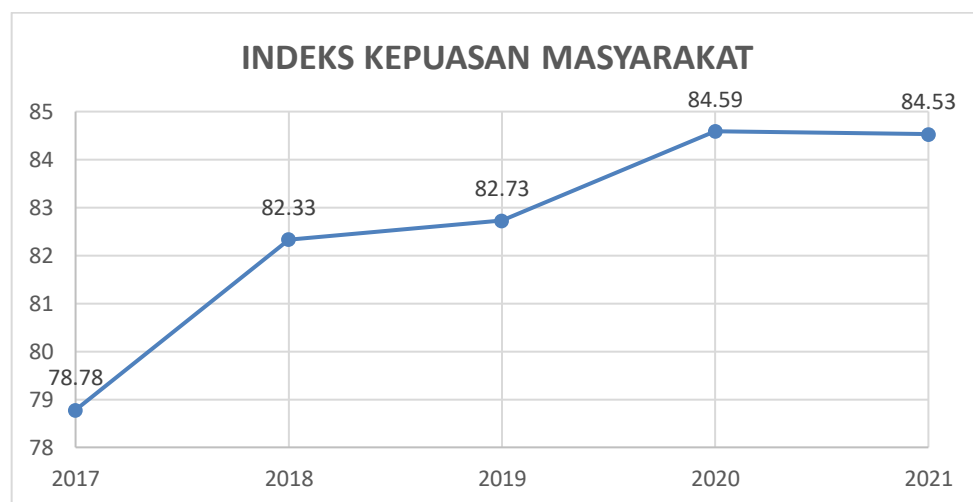
Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat, pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada SKPD layanan publik.

Realisasi indikator IKM di tahun 2021 adalah **84,53 (Baik)**, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 76,5 (Baik) dengan tingkat capaian 110,44%. mengalami penurunan 0,06 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 84,59 (Baik). Realisasi tersebut sudah mencapai 105,67% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 80 (Baik).

Secara umum kualitas pelayanan pada SKPD/unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dipersepsikan **“BAIK”** oleh masyarakat penggunaanya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh yaitu 84,53 (Kategori B = Baik) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat di seluruh SKPD. Terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 84,59 (Kategori B=Baik). Dari tahun 2017 indeks kepuasan masyarakat sudah berkategori Baik, peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1.9
IKM Kabupaten Tanah Laut 2017 – 2021



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Pada tahun 2021 nilai IKM Kabupaten Tanah Laut sebesar 84,53 dengan kategori **“BAIK”**. Rata-rata persentase nilai SKM masing-masing SKPD bisa dikatakan Baik karena lebih dari 76,61. Untuk tahun 2021 ada 8 SKPD yang kategori nilai SKM nya kategori **“SANGAT BAIK”** yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (94,16), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (89,28), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (95,72), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,54), Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (88,97), Satpol PP dan Damkar (89,97), Kecamatan Panyipatan (88,80), dan Kecamatan Bumi Makmur (91,44).

Tabel 3.1.13
 Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

REKAPITULASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)				
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT				
No	Nama Satuan Kerja	Nilai IKM 2019	Nilai IKM 2020	Nilai IKM 2021
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	81.79	81.99	86,73
2	Sekretariat DPRD	82.44	82.75	82,76
3	Inspektorat	78.79	80.07	83,14
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79.71	79.75	79,81
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	79.57	89.32	83,80
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	90.59	93.24	94,16
7	Badan Pendapatan Daerah	79.49	88.76	81,07
8	Badan Kesbangpol	76.78	79.34	85,98
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.23	82.81	83,82
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.79	94.22	83,64
11	Dinas Kesehatan	83.42	83.53	83,69
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	77.29	77.39	77,39
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	87.95	88,04
14	Dinas Sosial	92.20	89.88	87,11
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	82.40	82.28	82,06
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.82	85.41	89,28
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.00	81.50	80,20



18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	96.49	95.26	95,72
19	Dinas Pariwisata	80.49	80.67	81,10
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83.56	83.69	83,16
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87.63	87.68	89,54
22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.84	97.08	88,97
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	76.76	79.95	79,06
24	Dinas Perhubungan	81.88	-	-
	UPT Terminal	-	85.86	83,01
	UPT Pelabuhan dan Penyeberangan	-	88.76	80,06
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	-	81.46	82,19
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	88.39	86.14	85,64
26	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	82.32	80.59	83,01
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	83.12	83.22	83,52
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	80.05	81.59	87,72
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	78.01	89.52	89,97
30	Kecamatan Pelaihari	81.81	81.90	81,92
31	Kecamatan Takisung	81.00	82.10	82,30
32	Kecamatan Panyipatan	79.53	82.00	88,80
33	Kecamatan Bajuin	77.89	81.33	83,64
34	Kecamatan Jorong	80.74	80.76	80,87
35	Kecamatan Kintap	-	81.85	81,85
36	Kecamatan Batu Ampar	83.62	80.14	87,01

37	Kecamatan Tambang Ulang	77.84	80.10	80,26
38	Kecamatan Bati-Bati	82.23	79.33	81,13
39	Kecamatan Kurau	84.52	85.31	85,48
40	Kecamatan Bumi Makmur	89.87	96.40	91,44
	Total Nilai IKM	82.73	84.59	84.53

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Ada beberapa SKPD/Unit Pelayanan yang unsur pelayanannya dianggap paling memuaskan oleh responden dan mencapai angka 4,00, yang terdapat pada yang terdapat pada Bappeda, BPKAD, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Bumi Makmur. Sedangkan unsur pelayanan yang kurang memuaskan dengan angka dibawah 3,00 terdapat pada Badan Kesbangpol, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor.

Kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan salah satunya dikarenakan adanya kegiatan **Manunggal Tuntung Pandang yaitu kegiatan bermalam di desa untuk Bupati dan seluruh jajaran** dan Perangkat Daerah. Pada saat manunggal tuntung pandang dilaksanakan, SKPD pemberi layanan misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, DPMPTS memberikan layanan kepada seluruh masyarakat. Hal ini juga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat tanpa mereka harus datang langsung ke Kantor SKPD pemberi layanan.

Gambar 3.1.2
Pemberian pelayanan pada kegiatan manunggal tuntung pandang



Selain itu bagi beberapa SKPD yang telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan publik dengan masa uji coba 1 tahun lebih juga dapat membuat proposal untuk dapat diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk dilombakan agar mendapatkan Top 99 atau Top 40 dari seluruh Kabupaten/Provinsi se Indonesia.

Selain itu untuk nilai rata-rata **kualitas pelayanan publik Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2021 adalah 3,5 (B) kategori Baik** sesuai dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kendala - kendala:

Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami penggunaan aplikasi pelayanan, sehingga yang seharusnya proses layanan dilakukan 1 hari selesai menjadi lebih dari 1 hari selesainya.

Solusi

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi pelayanan.

Rencana aksi

- 1) Dilakukan survei Kepuasan Masyarakat oleh pihak eksternal;
- 2) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD berkelanjutan secara berkala, (3 sampai dengan 6 bulan sekali).
- 3) Pemberian *reward* and *punishment* terhadap SKPD dengan predikat layanan terburuk dan terbaik.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya di dukung oleh 6 Program dengan pagu Rp 8.068.275.107 dan realisasi sebesar sebesar Rp 6.211.832.923 atau 76,99% sebagai berikut:

Tabel 3.1.14
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pendaftaran Penduduk	554.663.900	438.368.985
2	Program Pencatatan Sipil	126.115.500	104.298.950
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	991.796.020	971.269.246
4	Program Pengendalian Penduduk	226.784.206	205.720.466
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.169.876.746	4.062.125.824
6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	999.038.735	430.049.452
Jumlah		8.068.275.107	6.211.832.923

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.15
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	100	100	100	100	100%
2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	138	66	74	143	193,2%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							146,6%

a. Cakupan Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah

Realisasi indikator pelestarian dan pengembangan budaya daerah di tahun 2021 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian indikator cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tercapai 100% dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Realisasi tersebut juga sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

Dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan ke dalam Keputusan Bupati Tanah laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Sedangkan untuk unsur-unsur lain seperti seni music, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati namun tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangannya.

Pembangunan kebudayaan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh konstitusi pada Pasal 32 menyatakan bahwanegara berperan dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya

serta menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tanah Laut juga telah mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025. Meskipun undang-undang khusus tentang pembangunan kebudayaan masih dalam proses, berbagai dokumen kebijakan berulang kali menyebutkan delapan pilarnya, yaitu (1) hak-hak berkebudayaan; (2) jati diridan karakter bangsa; (3) multikulturalisme; (4) sejarah dan warisan budaya; (5) industri budaya; (6) diplomasi budaya; (7) pranata dan insans kebudayaan; serta (8) sarana dan prasarana budaya. Peran penting yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya daerah serta pengembangan interaksi antar budaya.

Adapun Langkah Langkah yang di ambil untuk melestarikan kebudayaan:

- 1) Dengan melaksanakan kegiatan lomba-lomba tradisional, lomba paduan suara, lomba membaca pantun, lomba membaca puisi, lomba menyanyi yang semuanya menggunakan bahasa daerah. Selain itu juga melaksanakan lomba busana sasirangan, lomba tari tradisional dan tari umum.
- 2) Melakukan pendataan sanggar sanggar seni yang ada di Kabupaten agar kebudayaan tetap hidup dan lestari di kabupaten Tanah Laut.
- 3) Melaksanakan Pembuatan Buku sejarah kabupaten tanah laut dan kemudian akan dijadikan sebagai buku muatan local agar setiap siswa paham dan mengerti sejarah kabupaten tanah laut
- 4) Melakukan Pemeliharaan bangunan bangunan peninggalan bersejarah di Kabupaten Tanah laut.
- 5) Melakukan Inventarisasi Barang Peninggalan Bersejarah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk pelestarian budaya lokal Seni Tari Daerah, Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi-Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi, pelestarian makam makam yang memiliki potensi cagar budaya di Tahun 2021 yaitu rehab makam keramat datu panjang di Desa Tungkaran, kubah makam keramat lok batu datu ahmad Kelurahan Karang Taruna, pembangunan sarana prasarana dan faslitasi bangunan peninggalan bersejarah makam keramat

ustana (pangeran datu ahmad) di Kelurahan Karang Taruna, rehab kubah makam keramat habib alwi bin Iderus Bahasyim di Desa Handil Birayang Bawah Bumi Makmur, kubah makam keramat datu pamulutaan Kecamatan Panyipatan.

Menurut Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ayau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dalam rangka melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya maka Bupati Tanah Laut menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1002-KUM/2021 dengan menetapkan cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 3.1.16
Daftar cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA	KATEGORI	LOKASI
1	Makam Keramat Datu Bungur	Struktur Cagar Budaya	Desa Simpang 4 Sei Baru Kec. Jorong
2	Makam Keramat Datu Timang	Struktur Cagar Budaya	Desa Jorong Kec. Jorong
3	Makam Keramat Datu Nafis	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
4	Makam Keramat Istana Pangeran Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari
5	Makam Keramat Datu Panjang	Struktur Cagar Budaya	Desa Tungkaran Kec. Pelaihari
6	Makam Keramat Lok Batu Datu Ahmad	Struktur Cagar Budaya	Desa Telaga Kec. Pelaihari
7	Makam Keramat KH. Abdussamad Khairi	Struktur Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung

8	Benteng Tabanio	Situs Cagar Budaya	Desa Tabanio Kec. Takisung
9	Makam Keramat Syekh Abdul Gani Bin Abdurrahim	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Kec. Bati-Bati
10	Makam Keramat Datu Insad	Struktur Cagar Budaya	Desa Sambangan Kec. Bati-Bati
11	Makam Keramat Tuan Datu H. Ismail	Struktur Cagar Budaya	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati
12	Makam Keramat Ahmad Syamhudi	Struktur Cagar Budaya	Desa Padang Luas Kec. Kurau
13	Makam Keramat Datu Pamulutan	Struktur Cagar Budaya	Desa Tanjung Dewa Kec. Panyipatan
14	Marcusuar Peninggalan Kolonial Belanda	Bangunan Cagar Budaya	Desa Batakan Kec. Panyipatan
15	Makam Keramat Habib Alwi Bin Idrus Bahasyim	Struktur Cagar Budaya	Ds. Handil Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur
16	Banker Peninggalan Kolonial Jepang	Bangunan Cagar Budaya	Desa Sungai BakarKec. Bajuin

Kendala yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya yaitu TIM Sertifikasi penetapan cagar budaya belum terbentuk yang mengakibatkan daerah tidak bisa menetapkan potensi cagar budaya menjadi cagar budaya, karena TIM tersebut yang dapat menilai layak atau tidak layak menjadi cagar budaya, terdiri dari Seni Tari Daerah Seni Musik Daerah, Madihin, Kurung-Kurung, Mandi Mandi, Batamat Al Qur'an, Baaayun Anak, Kuda Lumping, Hadrah / Maulid Habsyi.

Tabel 3.1.17
 Daftar Kelompok Seni dan Budaya

No	Kecamatan	Nama Kelompok	Jenis Kesenian
1	Kecamatan Bajuin	Al Zahra	Maulid Habsyi
		Al Ikhwan	Maulid Habsyi
		Kifayatul Ghulam	Maulid Habsyi
		Nurul Amanah	Maulid Habsyi
		Babus Syafaah	Maulid Habsyi



		Nurul Hasanah	Maulid Habsyi
		Raudatul Ilmi	Maulid Habsyi
		Ahbabdurasul	Maulid Habsyi
		Syifa Annisa	Maulid Habsyi
		Arraudah	Maulid Habsyi
		Al Ikhlas	Maulid Habsyi
		Mistahussa'adah	Maulid Habsyi
		Hubbun Nabi	Maulid Habsyi
		Turonggo Tri Budoyo	Kuda Lumping
		Samboyo Putro	Kuda Lumping
		Putro Birowo	Kuda Lumping
		Manggala Tri Budoyo	Kuda Lumping
		Turonggo Cipta Bududoyo	Kuda Lumping
		Sanggar Tirta Kesuma	Sanggar Seni Tari
		Rajawali	Seni Beladiri (Kuntau)
2	Kecamatan Bati-Bati	Al - Munawar	Maulid Habsyi
		Darul Hasanah	Maulid Habsyi
		Ar - Raudah	Maulid Habsyi
		Nurul Janah	Maulid Habsyi
		Maulid Al Furqon	Maulid Habsyi
		Raudatul Jannah	Maulid Habsyi
		Habsy Asyiroh	Maulid Habsyi
		Safa Marwah	Maulid Habsyi
		Al Ikhlas	Maulid Habsyi
		Nurul Iman	Maulid Habsyi
		Al - Anshor	Maulid Habsyi
		Asyifa	Maulid Habsyi
		Al - Ikhlas	Maulid Habsyi
		Nurul Huda	Maulid Habsyi
		Az Zahro	Maulid Habsyi
		Turonggo Putro	Kuda Gepang
		Puryo Budoyo	Kuda Gepang
		Darussalim	Sinoman Hadrah
		Yaa Thoiybah	Sinoman Hadrah
		Sanggar 2 Selempang	Seni Tari & Musik Panting
		Jahratun Nisa	Seni Musik
		Nuzhatul Muttaqin	Seni Musik
		Nurul Syafaah	Seni Musik
		Al Barokah	Seni Musik
		Nurul Qolby	Seni Musik
		Nurul Hidayah Putra	Seni Musik
		Nurul Hidayah Putri	Seni Musik
		Pagar Nusa	Seni Musik



	Ar Rumi	Seni Teater
	Pencak Silat	Silat
	Persaudaraan Setia Hati Terate	Bela Diri dan Olah Raga
	Persaudaraan Setia Hati Terate	Bela Diri dan Olah Raga
	Sumardi Wahono	Seni Rupa
	Moh.Thaher Syamsoedin	Seni Rupa

Rencana Aksi kedepan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelestarian budaya daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Menggali potensi cagar budaya baru.
2. Mengadakan aruh sastra Kalimantan Selatan ASKS yang ke 19 Tahun 2022 berdasarkan rekomendasi ASKS ke 17 Tahun.
3. Pelaksanaan pemilihan nanang dan galuh Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
4. Pelaksanaan kegiatan kegiatan rutin yang sdh dianggap baik.
5. Pelaksanaan sosialisasi pelestarian cagar budaya yang dibina di kabupaten Tanah Laut dengan sasaran yaitu pengelola makam, pengelola situs dan tokoh masyarakat.

b. Jumlah Atlet Yang Berprestasi

Realisasi indikator jumlah atlet yang berprestasi di tahun 2021 adalah 143 atlet , telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 74 atlet dengan tingkat capaian 193,2%. mengalami peningkatan sebanyak 77 atlet berprestasi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 66 atlet. Realisasi tersebut sudah melampaui target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 89 atlet.

Tabel 3.1.18
Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2021

NO	KEJUARAAN	NAMA CABANG OLAHRAGA		KELAS/KATEGORI	JUMLAH ATLET YANG MENGIKUTI KEJUARAAN		JUMLAH MEDALI			JUMLAH ATLET BERPRESTASI	
							EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1		2		3	4		5	6	7	9	
1	(POPDA) 2021	1	Atletik		17	Orang				9	Orang
				1	Lari 5000 M		1			1	Orang
				2	Lempar Lembing			1		1	Orang
				3	800 M				1	1	Orang



				4	400 M				1		1	Orang
				5	100 M				1		1	Orang
				6	100 M Putera			1			1	Orang
				7	100 M Putera				1		1	Orang
				8	Lompat Jauh Putera			1			1	Orang
				9	200 Putera			1			1	Orang
		2	Gulat			20	Orang				16	Orang
				1	Bebas Putra 45 Kg					1	1	Orang
				2	Bebas Putra 48 Kg			1			1	Orang
				3	Bebas Putra 65 Kg					1	1	Orang
				4	Bebas Putra 71 Kg					1	1	Orang
				5	Bebas Putra 80 Kg				1		1	Orang
				6	Bebas Putri 43 Kg				1		1	Orang
				7	Bebas Putri 46 Kg			1			1	Orang
				8	Grego Putra 48 Kg				1		1	Orang
				9	Grego Putra 51 Kg					1	1	Orang
				10	Grego Putra 71 Kg			1			1	Orang
				11	Grego Putra 65 Kg					1	1	Orang
				12	Bebas Putri 57 Kg				1		1	Orang
				13	Bebas Putri 61 Kg					1	1	Orang
				14	Grego Putra 60 Kg				1		1	Orang
				15	Grego Putra 55 Kg				1		1	Orang
				16	Bebas Putri 49 Kg					1	1	Orang
		3	Panahan			5	Orang	-	-	-	-	Orang
		4	Dayung			5	Orang	-	-	-	-	Orang
		5	Renang			8	Orang				14	Orang
				1	Gaya Kupu-Kupu Putri 50 M			1			1	Orang
				2	Gaya Dada Putra 50 M					1	1	Orang
				3	Gaya Dada Putri 50 M			1			1	Orang
				4	Gaya Bebas Putri 200 M			1			1	Orang
				5	Gaya Ganti Perorangan Putri 200 M			1			1	Orang
				6	Gaya Bebas Putri 400 M			1			1	Orang
				7	Gaya Punggung Putri 100 M			1			1	Orang
				8	Gaya Dada Putra 100 M				1		1	Orang
				9	Gaya Dada Putri 100 M			1			1	Orang
				10	Gaya Bebas Putri 50 M			1			1	Orang



				11	Gaya Bebas Putri 50 M			1		1	Orang
				12	Gaya Punggung Putri 50 M		1			1	Orang
				13	Gaya Bebas Putri 100 M		1			1	Orang
				14	Gaya Kupu-Kupu Putri 100 M		1			1	Orang
		6	Judo			9	Orang			7	Orang
				1	40-44 Kg Putri			1		1	Orang
				2	52-57 Kg Putri		1			1	Orang
				3	57-63 Kg Putri		1			1	Orang
				4	+63 Kg Putri		1			1	Orang
				5	50-55 Kg Putra				1	1	Orang
				6	55-60 Kg Putra		1			1	Orang
				7	66-73 Kg Putra		1			1	Orang
		7	Karate			13	Orang			5	Orang
				1	Kumite -48 Kg Putri			1		1	Orang
				2	Kumite -53 Kg Putri				1	1	Orang
				3	Kumite Kelas Bebas Putri			1		1	Orang
				4	Kumite -60 Kg Putra				1	1	Orang
				5	Kumite Kelas Bebas Putra			1		1	Orang
		8	Kempo			13	Orang			17	Orang
				1	Randori Putra Kelas 50 Kg		1			1	Orang
				2	Randori Putra Kelas 55 Kg		1			1	Orang
				3	Randori Putra Kelas 60 Kg		1			1	Orang
				4	Randori Putri Kelas 50 Kg		1			1	Orang
				5	Randori Putri Kelas 55 Kg				1	1	Orang
				6	Embu Pasangan Putra Kyukenshi			2		2	Orang
				7	Embu Pasangan Putri Kyukenshi		2			2	Orang
				8	Embu Pasangan Campuran Kyukenshi			2		2	Orang
				9	Embu Pasangan Kyu I (PA/PI/MIX)			2		2	Orang
				10	Embu Beregu (PA/PI/MIX)			4		4	Orang
		9	Taekwondo			10	Orang			7	Orang
				1	Under 59 Kg Putra		1			1	Orang
				2	Under 63 Kg Putra		1			1	Orang
				3	Under 55 Kg Putra				1	1	Orang
				4	Under 42 Kg Putri				1	1	Orang
				5	Under 44 Kg Putri			1		1	Orang



				6	Under 49 Kg Putri				1		1	Orang
				7	Under 46 Kg Putri				1		1	Orang
		10	Tinju			10	Orang				7	Orang
				1	Kelas 45 Kg Putri			1			1	Orang
				2	Kelas 48 Kg Putri				1		1	Orang
				3	Kelas 51 Kg Putri					1	1	Orang
				4	Kelas 60 Kg Putri					1	1	Orang
				5	Kelas 49 Kg Putra			1			1	Orang
				6	Kelas 52 Kg Putra			1			1	Orang
				7	Kelas 81 Kg Putra			1			1	Orang
		11	Voli Pasir	1	Beregu Putra	4	Orang	-	1	-	4	Orang
JUMLAH						114	Orang	35	31	17	86	Orang
2	PORDA SOINA KALSEL 2021	1	Atletik	1	Putri Higt 100 M	2	Orang	1	-	1	2	Orang
				2	Putra Low 25 M	1	Orang	1	-	-	1	Orang
				3	Putri Low 25 M	2	Orang	1	-	1	2	Orang
		2	Bocce	1	Putra 16-21 Tahun	1	Orang	-	1	-	1	Orang
				2	Putra 12-15 Tahun	1	Orang	1	-	-	1	Orang
		3	Renang	1	Putri Gaya Dada 50 M	1	Orang	-	-	1	1	Orang
				2	Putri Gaya Bebas 50 M	1	Orang	-	-	1	1	Orang
		4	Bulu Tangkis	1	Beregu Putra	2	Orang	1	-	-	2	Orang
				2	Beregu Putri	2	Orang	-	1	1	2	Orang
		5	Tenis Meja	1	Beregu Putra	2	Orang	-	-	1	1	Orang
				2	Perorangan Putri	1	Orang	1	-	-	1	Orang
		6	Voli Putra	1	Beregu Putra	6	Orang	1	-	-	6	Orang
		7	Basket Putra	1	Beregu Putra	5	Orang	-	-	1	5	Orang
		8	Bola Tangan Putra	1	Beregu Putra	7	Orang	-	-	1	7	Orang
		9	Bola Tangan Putri	1	Beregu Putri	7	Orang	1	-	-	7	Orang
		10	Futsal Putra	1	Beregu Putra	6	Orang	1	-	-	6	Orang
		11	Futsal Putri	1	Beregu Putri	6	Orang	1	-	-	6	Orang
			JUMLAH			53	Orang	10	2	8	52	Orang
3	PON	1	Silat			1	Orang	-	1	-	1	Orang
		2	Kempo			1	Orang	-	1	-	1	Orang
			JUMLAH			2		-	2	-	2	Orang
4	PEPERNAS	1	Catur Beregu			1	Orang	1	-	-	1	Orang
		2	Catur perorangan			1	Orang	-	-	1	1	Orang
		3	Atletik			1	Orang	-	-	1	1	Orang
			JUMLAH			3		1	-	2	3	Orang
			TOTAL			172	Orang	46	35	27	143	Orang



TOTAL

108 Medali

143 Atlet

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut
Sebagai bahan pembandingan, berikut disajikan daftar jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dan medali yang diperoleh Tahun 2020.

Tabel 3.1.19
Daftar Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Medali yang diperoleh Tahun 2020

NO	KEJUARAAN	NAMA CABANG OLAHRAGA		KELAS/KATEGORI		JUMLAH ATLET YANG MENGIKUTI KEJUARAAN		JUMLAH MEDALI			JUMLAH ATLET BERPRESTASI	
								EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1		2		3		4		5	6	7	9	
1	(POPDA) 2020	1	Basket Putra/Putri		Beregu Putra	24	Orang	-	-	1	12	Orang
		2	Sepak Takraw			10	Orang	-	-	-	0	Orang
		3	Bulu Tangkis			8	Orang	-	-	-	0	Orang
		4	Tenis Meja		Ganda Putri	9	Orang	-	-	1	1	Orang
		5	Pencak Silat			24	Orang				21	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putra D			1			1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri A			1			1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri B			1			1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri D			1			1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri E			1			1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri G				1		1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri F				1		1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putra H				1		1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putra C				1		1	Orang
			Pencak Silat		Ganda Putra				1		2	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri H					1	1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putri C					1	1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putra F					1	1	Orang
			Pencak Silat		Tanding Putra B					1	1	Orang
			Pencak Silat		Beregu Putri					1	3	Orang
			Pencak Silat		Beregu Putra					1	3	Orang
		6	Tenis Lapangan			3	Orang	-	-	-	0	Orang
		7	Sepak Bola		Beregu Putra	20	Orang	-	-	1	20	Orang
		8	Bola Volly Putra/Putri		Beregu Putra	24	Orang	-	-	1	12	Orang
JUMLAH						122	Orang	5	5	10	66	Orang
								20 Medali			66 Atlet	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan atlet berprestasi selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan pusat pembinaan dan latihan olah raga pelajar daerah dengan 6 Cabor di beberapa Kecamatan.
2. Pembangunan lapangan futsal di desa asam jaya kecamatan jorong.
3. Pelaksanaan rehab GOR, yaitu lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis.
4. Rehab lapangan takrow.
5. Pelatihan kepada pelatih terdiri dari 38 Cabor, dari KONI, NPC, Soina, KORMI.
6. Kegiatan kompetisi olah raga prestasi, tradisional dan rekreasi.
7. Pemberian penghargaan berupa bonus kepada atlet berprestasi dan pelatih untuk atlet berprestasi.

Gambar 3.1.3
Pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi



Rencana aksi ke depan untuk terus meningkatkan jumlah atlet yang berprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Lebih meningkatkan prestasi yang dicapai melalui semua cabang olahraga
- 2) Dilaksanakannya pemusatan latihan atlet yang lebih intensif
- 3) Terlaksananya Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Cabang Olahraga Unggulan
- 4) Melaksanakan kejuaraan daerah dan provinsi
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
- 6) mewujudkan masyarakat sehat melalui olahraga



Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga di dukung oleh 7 Program dengan pagu sebesar Rp 19.746.135.803 terealisasi sebesar Rp 17.706.306.773 atau 89,67%.

Tabel 3.1.20
Realisasi Program Penunjang

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Pengembangan Kebudayaan	199.979.870	105.357.070
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	946.352.580	717.384.900
3	Program Pembinaan Sejarah	106.500.000	80.797.500
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.182.158.159	1.164.494.000
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.948.668.644	2.607.753.262
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.663.667.230	12.616.311.041
7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	698.809.320	414.209.000
Jumlah		19.746.135.803	17.706.306.773

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.21
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	%	100	100	100	100	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%

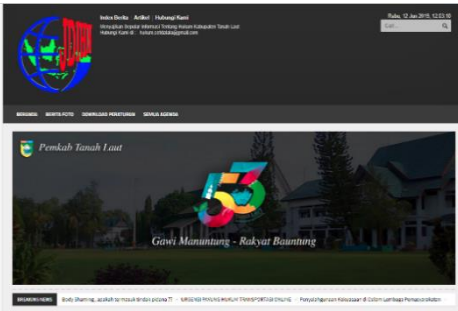
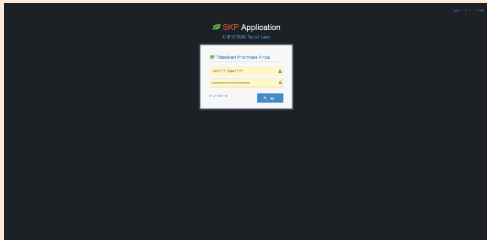


Realisasi indikator Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD di tahun 2021 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%. Capaian 100% diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 100%.

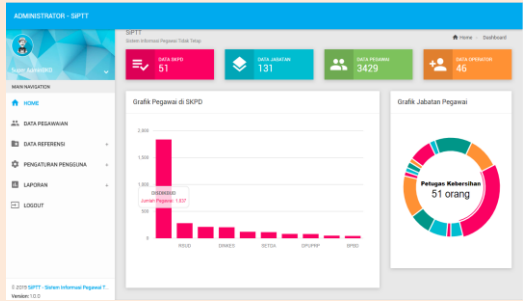


Tugas Pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui inovasi baru salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan. Banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa SKPD telah menggunakan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya Disdukpencahil, DPMPSTP, BKPSDM, Dinas Kesehatan UPTD RSUD. Hadji Boejasin, Dinas Perhubungan, Kecamatan panyipatan, Kelurahan Angsau, Kelurahan Pabahanan dll. Berikut disajikan aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Laut.


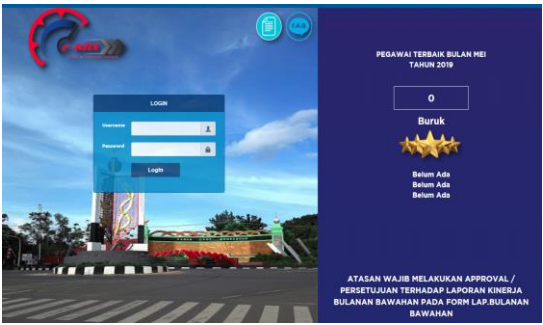
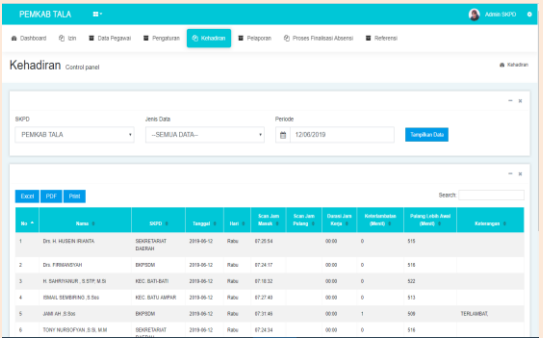

Tabel 3.1.22
Aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Tanah Laut


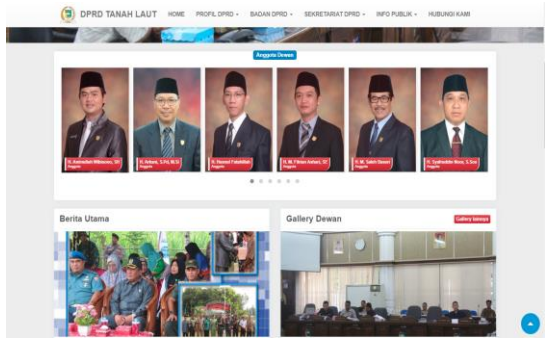


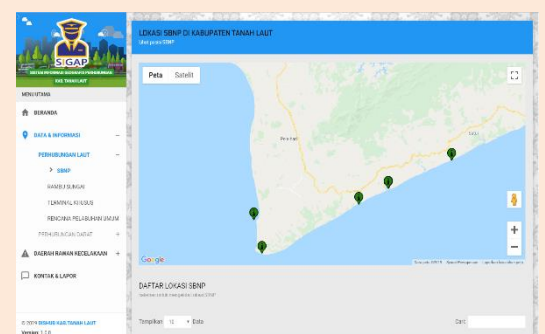
NO.	SKPD/ NAMA APLIKASI	KETERANGAN	SCREENSHOOT
1	BPKAD SIMDA Barang	Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP. Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah	
2	BPKAD SIMDA Keuangan	Aplikasi ini dikembangkan oleh Tim Aplikasi BPKP. Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.	
3	BKPSDM SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian)	Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Tanah Laut, Berisi basis data pegawai ASN di Kabupaten Tanah Laut	
4	BPKAD SIM GAJI	Aplikasi Simgaji Taspen Online untuk diakses seluruh OPD	
5	BPAKD Simantap (Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah)	Sistem Informasi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah	

6	Setda Bag. Hukum JDIH (Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum)	Website Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum berisi data-data Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut	
7	BKPSDM ESKP	Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai ASN Kabupaten Tanah Laut secara Elektronik, Berisi data SKP ASN yang diisi secara berkala di Kabupaten Tanah Laut	
8	BKPSDM SILKA (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian)	Sistem Informasi Layanan Kepegawaian merupakan sistem informasi yang berisi basis data pegawai dan layanan terkait kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut	
9	DPMPTSP Apperindu (Aplikasi pelayanan Perizina Terpadu Satu Pintu)	Aplikasi pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Aplikasi ini berisi daftar perizinan yang hanya dapat diakses oleh internal SKPD.	
10	Setda Bag. PBJ SPSE (Sistem Informasi Pengadaan Barang Elektronik)	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	

11	<p>BKPSDM</p> <p>SIPTT (Sistem Informasi Pegawai Tidak Tetap)</p>	<p>Sistem Informasi Pegawai Tidak Tetap. Aplikasi ini dibuat atas Kerja sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemetaan Pegawai Tidak Tetap di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi ini menyimpan basis data pegawai dan riwayat pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di seluruh SKPD/Intansi di Kabupaten Tanah Laut.</p>	
12	<p>Diskominfo</p> <p>Satu Data</p>	<p>Satu Data Tanah Laut adalah data terpadu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Satu Data Tanah Laut merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk menjawab keinginan masyarakat tentang apa saja yang ada di Kabupaten Tanah Laut, serta menghindari kesimpang siuran informasi/data yang berkembang di masyarakat. Aplikasi ini dibuat untuk merangkum seluruh informasi/data setiap instansi/SKPD terkait dan dikelola secara mandiri sehingga dapat memberikan informasi secara akurat dan terpercaya.</p>	
13	<p>Dinkes Puskesmas Tambang Ulang</p> <p>SI ALUH (Sistem Informasi Alarm Ibu Hamil)</p>	<p>SI ALUH adalah Sistem Informasi Alarm Ibu Hamil dan Melahirkan. SI ALUH berfungsi sebagai Aplikasi sistem informasi ibu hamil, yang memuat informasi data-data ibu hamil dan sebagai alarm/notifikasi jadwal rutin kunjungan ibu hamil (K1,K2,K3 & K4) serta alarm/notifikasi jadwal melahirkan ibu hamil bagi petugas di puskesmas maupun bidan puskesmas dan bidan desa. Aplikasi ini telah dimanfaatkan pada Puskesmas Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut</p>	
14	<p>Dinkes Puskesmas Angsau</p> <p>SIGAR LAKAS (Sistem Integrasi Administrasi Layanan Kesehatan)</p>	<p>SIGAR LAKAS adalah Sistem Integrasi Administrasi Layanan Data Kesehatan. SIGAR LAKAS berfungsi sebagai Aplikasi Peng-integrasian antara Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dengan Aplikasi P-Care milik BPJS. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh pihak</p>	-



		Puskesmas untuk memberikan kemudahan petugas Puskesmas dalam pengadministrasian Layanan pasien yang menggunakan layanan BPJS.	
15	Kec. Panyipatan Sipaman (Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan) Tidak aktif	SIPAMAN adalah Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan Panyipatan yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan administrasi berupa pembuatan surat rekomendasi, daftar surat masuk, Pembuatan Suart keterangan pindah, dan pembuatan surat dispensasi Nikah serta layanan Aduan/Laporan Warga.	
16	BKPSDM E-KITA	E-KITA atau Aplikasi Kinerja dan Tunjangan Aparatur merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat ukur kinerja dan kedisiplinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Tanah Laut guna pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterapkan pada awal Tahun 2019.	
17	SIAP (Sitem Informasi Administrasi Presensi)	SIAP atau Sitem Informasi Administrasi Presensi Pegawai merupakan aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi monitoring / pencatat kehadiran bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada di Tanah Laut sebagai salah satu penunjang untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS. Aplikasi ini juga sebagai monitoring kehadiran bagi pegawai tidak tetap di beberapa OPD.	
18	Diskominfo Website PPID (Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi)	Portal layanan informasi daerah yang dikelola oleh PPID dan PPIDP di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut	

19	DPMPTSP Simizin Online / Perizinan Online	Sistem Informasi Layanan Perizinan satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Aplikasi berfungsi untuk melakukan pendaftaran izin baru secara mandiri dan melihat status / informasi perizinan.	
20	DPRD Tanah Laut	SIBER WEB adalah Sistem Informasi Berbasis Web sebagai sarana informasi publik dan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut agar lebih efisien	
21	DISDUKCAPIL Sipede (Sistem Informasi Pemanfaatan Data)	SIPEDA atau Sitem Informasi Pemanfaatan Data merupakan aplikasi Web Service yang ada pada DISDUKCAPIL guna pemanfaatan data kependudukan bagi dinas/instansi lain yang telah melakukan perjanjian kerja sama.	
22	SETDA SIKITA E-RAKOR (Sistem Informasi Rapat Koordinasi Perangkat Daerah)	Sistem Informasi Rapat Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan aplikasi yang dapat mempermudah manajemen Rapat Koordinasi seluruh OPD Se Kabupaten Tanah Laut baik info jadwal, hasil rapat, serta menindaklanjuti hasil Rapat yang dipantau langsung oleh Kepala Daerah.	
23	Dinas Perhubungan SIGAP (Sistem Informasi Geografis Perhubungan Kabupaten Tanah Laut)	Sistem Informasi Geografis Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah aplikasi yang bertujuan untuk menyediakan data dan informasi geografis yang ada di lingkup Dinas Perhubungan khususnya bidang Perhubungan Laut, Sungai dan penyeberangan yang bersumber dari stakeholder internal dan eksternal serta hasil kegiatan pemantauan di lapangan	

24	Dispusip SIMPUN (Sistem Informasi Pengelolaan Unit Kerasipan)	Aplikas pengelolaan dan pencatatan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut	
25	Inspektorat Kabupaten Aplikasi WBS (Whistle Blowing System)	Aplikasi Whistle Blowing System Kabupaten Tanah Laut adalah aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan beindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.	
26	Setda Bag. PBJ Website Sosialita	SOSIALITA adalah Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut	
27	Website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	Website yang menyediakan Kumpulan Produk Hukum dan Informasi Hukum Kabupaten Tanah Laut	
28	Disdukcapil SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via SmartPhone)	Merupakan aplikasi berbasis Smartphone yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga Kabupaten Tanah Laut.	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Seluruh SKPD di atas telah melakukan pelayanan berbasis elektronik, sebagai contoh disajikan data jumlah pelayan berbasis teknologi informasi yang diberikan oleh DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 3.1.23
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh DPMPTSP

NO	URAIAN			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
				JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN	JUMLAH IZIN
1.	TDP			615	582	589			153
		*	PERORANGAN				449	398	102
		*	CV				141	91	24
		*	PT				60	50	18
		*	KOPERASI				8	12	6
		*	LAINNYA				2	16	3
2.	SIUP			586	591	586	672	578	154
3.	TANDA DAPTAH INDUSTRI/IUI			15	42	9	3	4	
4.	TDG (Tanda Daftar Gudang)						2	2	3
4.	IJIN GANGGUAN HO (Izin Lingkungan Limbah B3 & Cair)			232	113	56			15
		*	IZIN LINGKUNGAN				22	40	6
		*	IZIN LIMBAH B3				22	18	5
		*	IZIN LIMBAH CAIR				17	17	4
5.	IMB			216	216	185	225	225	121
6.	SIUJK			86	88	108	74	39	20 (sampai april, selanjutnya OSS)
7.	IJIN USAHA PERKEBUNAN			6	3			1	1
8.	IJIN USAHA HUBURAN UMUM			15	14		6		0
9.	IJIN PEMBUKAAN KOPERASI						1		
10	IJIN KOPERASI SIMPAN PINJAM						1	2	
11	IJIN RENTAL PLAYSTATION/GAME								
12	IJIN REKLAME			132	149	129	117	137	134
13	IJIN PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET								
14	IJIN USAHA PERIKANAN (Pencatatan Kapal Perikanan)			14	44	36	47	45	91
15	IJIN PENANGKAPAN IKAN			24					



16	IJIN USAHA TOKO MODERN		12	7	10	8	14
17	IJIN KETERANGAN TEMPAT USAHA	1220	1,238	1247			
	* PERORANGAN				770	699	
	* CV				380	305	
	* PT				213	182	
18	IJIN USAHA PETERNAKAN		7		2	5	2
19	IJIN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT	2					
20	IJIN PENGGILINGAN PADI.	4	5	1	2	5	2
21	IJIN PENUMPUKAN BAHAN BAKAR MINYAK / BBM	3	9	9	8		provinsi
22	IJIN PRAKTEK DOKTER HEWAN		1		2	3	0
23	IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS		3		3		
24	IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)					6	
25.	IJIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN						
26.	JASA KEPARIWISATAAN (TDUP)		23	6	6	7	2
27.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	3	41	20	25	8	3
28.	IZIN RUMAH SAKIT DAN RUMAH SAKIT BERSALIN SWASTA			2			
29.	IZIN KLINIK SWASTA	4		5			
30.	IZIN KLINIK PERUSAHAAN						
31.	IZIN APOTEK	6	3	8	5	5	11
32.	IZIN TOKO OBAT	1	2	2	2	1	2
33	IZIN KURSUS	9		1	-	6	2
34	IZIN KEPARIWISATAAN	5	4	7		7	
35	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)			131	253	118	237
36	SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEHNS KEFARMASIAN			33	40	33	56
37	SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER			5	15	10	36
38	SURAT IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT			3	8	11	16
39	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM				5	31	
40	SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS				4	36	
41	SURAT IZIN PRAKTEK KESEHATAN MASYARAKAT				2	3	
42	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN				2	70	224
43	IZIN OPERASIONAL KLINIK			5	4	4	4
44	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT			3	2		1
45	IZIN PENYELENGGARA OPTIKAL			1			
46	SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA				29	52	22



47	IZIN LPK			1	1	3	1
48	SURAT KETERANGAN TATA RUANG			12	95	89	79
49	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH				5	16	24
50	IZIN LOKASI				11	11	12
51	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS						2
52	IZIN USAHA PERKEBUNAN BUDIDAYA						1
53	IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK						43
54	IZIN PRAKTEK PSIKOLOGI KLINIS						2
55	IZIN PRAKTEK PENATA ANESTESI						3
56	IZIN PRAKTEK TENAGA GIZI						12
57	IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN						1
58	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI						15
59	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS						1
60	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN						18
61	SURAT IZIN KERJA PROMOTOR KESEHATAN						11
62	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPIS						2
63	SURAT IZIN KERJA TENAGA REKAM MEDIS						10
64	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI						6
65	SURAT IZIN KERJA TENAGA OKUPASI TERAPI						1
66	IZIN PENELITIAN						71
67	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE DEPO AIR MINUM						4
68	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA						1
69	SKB						
	• PERORANGAN						602
	• CV						289
	• PT						176
	• BADAN USAHA LAIN						0
70	SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL						1
Jumlah		3,198	3,148	3,207	3,773	3,409	2,882

Sumber : DPMPTSP Kab. Tanah Laut

Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke DPMPTSP baik itu secara langsung maupun elektronik harus melalui aplikasi Apperindu (Aplikasi Perizinan Terpadu) agar tidak terjadi pemalsuan perizinan (perizinan bodong).

Tabel 3.1.24
Jumlah Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi Yang Diberikan Oleh Disdukcapil
Tahun 2021

No	JUMLAH PERMOHONAN				JUMLAH	
	APLIKASI SILAKAS		WHATSAPP			
	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK	DITERIMA	DITOLAK
1	12.833	6.943	13.774	912	26.607	7.855

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut

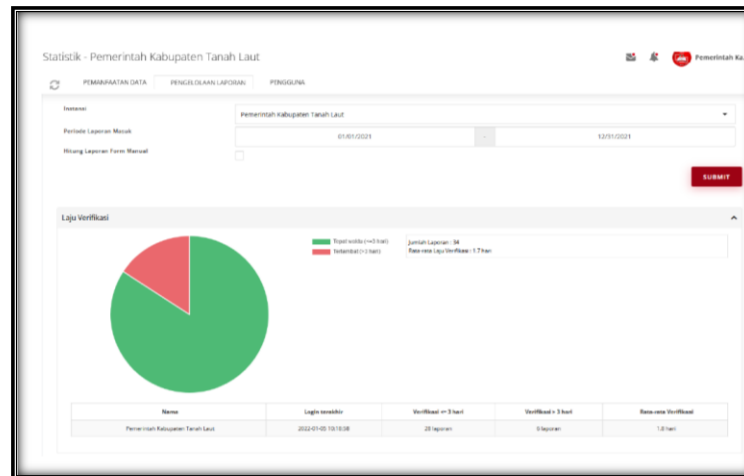
Seluruh permohonan pelayanan yang masuk ke Disdukcapil diverifikasi oleh petugas. Apabila data dukung yang diberikan lengkap maka permohonan akan segera diproses dan diselesaikan. Untuk permohonan yang adata dukungnya tidak lengkap maka permohonan akan ditolak dan disarankan untuk melakukan permohonan ulang dengan melengkapi seluruh data dukung yang dipersyaratkan.

Untuk pelayanan berbasis elektronik yang disediakan oleh BKPSDM kepada seluruh PNS diantaranya yaitu Simpeg, E-SKP, SIDIKA, My SAPK, SIMPONI, aplikasi-aplikasi tersebut telah dimanfaatkan oleh seluruh PNS yaitu berjumlah 4828 orang telah mengakses dan menggunakannya.

Selain itu pada DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengaplikasikan penggunaan Tanda Tangan Digital (*digital signature*) sehingga lebih mempercepat proses pelayanan di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk pengaduan pelayanan juga telah tersedia aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat) yang dikembangkan oleh kemenpanRB dan telah diaplikasikan di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Data layanan pengaduan pada aplikasi LAPOR pada Tahun 2021 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 3.1.4
Grafik Pengaduan pada aplikasi LAPOR



Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut

Pada Tahun 2021 jumlah pengaduan yang masuk pada aplikasi LAPOR berjumlah 34 pengaduan, dengan ketepatan waktu verifikasi kurang dari 3 hari berjumlah 28 laporan dan verifikasi lebih dari 3 hari berjumlah 6 laporan. Seluruh laporan telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui akun masing-masing SKPD.

Langkah-langkah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan SKPD terkait dalam rangka peningkatan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dalam mendukung SKPD agar dapat menindaklanjuti seluruh permohonan pelayanan publik diantaranya:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan-layanan apa saja dan oleh SKPD mana saja yang memberikan pelayanan berbasis elektronik.
- 2) Pengembangan *E-Government* melalui Penempatan Aplikasi Pelayanan Perizinan di Server Kominfo;
- 3) Tersedianya website seluruh SKPD dan aplikasi penunjang pelayanan
- 4) Pengintegrasian seluruh website dan aplikasi di dalam portal resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diakses <https://portal.tanahlautkab.go.id>.
- 5) Pembuatan hosting yang bertujuan untuk kelancaran akses website SKPD.
- 6) Sinkronisasi Data Kependudukan dengan Data Ketenagakerjaan dan untuk Pelayanan Puskesmas

- 7) Sinkronisasi Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Aplikasi Perizinan Terpadu Secara Online.
- 8) Melaksanakan analisa jaringan;

Dengan adanya upaya-upaya di atas maka, seluruh permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diajukan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh SKPD. Namun masih terdapat Kendala-kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih belum terbiasanya masyarakat untuk menggunakan layanan secara elektronik terutama masyarakat yang masih minim terhadap teknologi informasi.
- 2) Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang inovasi-inovasi pelayanan yang tersedia.
- 3) Belum terintegrasi sepenuhnya seluruh Aplikasi layanan namun seluruh aplikasi secara terpusat sudah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Masih susah nya jaringan internet di beberapa Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Bajuin.

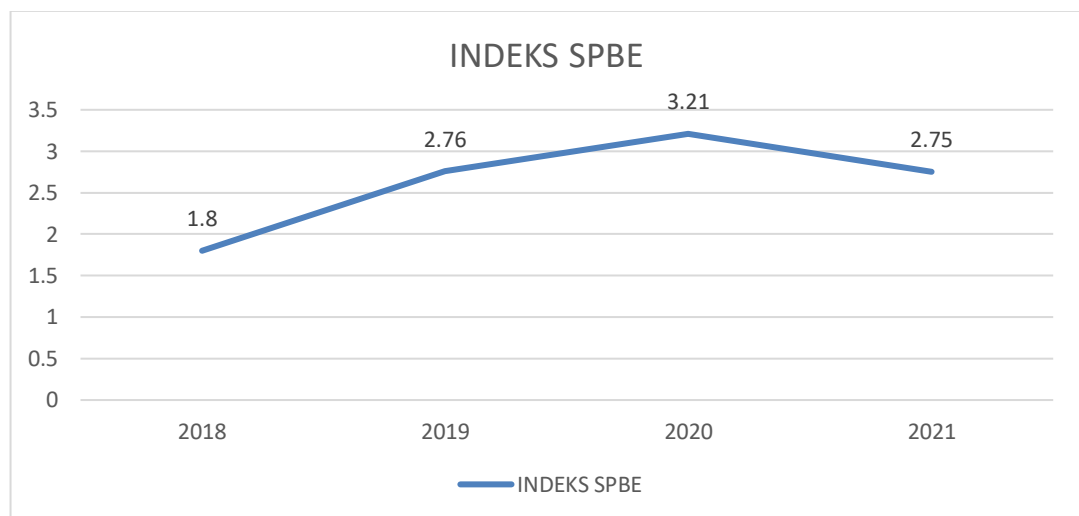
Rencana Aksi/Langkah-langkah ke depan dalam rangka peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, radio dan lain-lain.
- 2) Melakukan reviu terhadap SOP.
- 3) Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik;
- 4) Pembangunan data center dan command center kabupaten;
- 5) Pembangunan jaringan antar SKPD;
- 6) Penyusunan peraturan bupati tentang aplikasi daerah;
- 7) Pengembangan aplikasi daerah yang terintegrasi:
- 8) Pemanfaatan infrastruktur *E-Government* untuk penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektroink;
- 9) Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang teknologi informasi; dan
- 10) Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi.
- 11) mengadakan pemeliharaan dan penambahan kecepatan kualitas jaringan

internet

sebagai bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh Indeks SPBE pada Tahun 2021 yaitu 2,75 dengan predikat Baik. Nilai ini memang mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2020 yaitu 3,21 dengan predikat baik. Penurunan ini disebabkan oleh berubahnya indikator-indikator dalam penilaian SPBE oleh Kemenpan dan RB. Namun, nilai ini masih merupakan nilai tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan serta tertinggi kedua di regional Kalimantan di bawah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut disajikan Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2021.

Grafik 3.1.10
Indeks SPBE Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2021



Dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp 3.337.739.822 terealisasi Rp 3.337.739.822 atau 89,91%.



Tabel 3.1.25
Realisasi Program Penunjang

No	Nama Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.218.789.432	2.918.423.057
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	44.040.390	32.175.000
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.910.000	50.345.000
Jumlah		3.337.739.822	3,000,943,057.00

MISI II

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 2 tujuan untuk misi II yaitu :

1. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik.
2. Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industry kreatif.

Untuk mrngukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu jumlah penghargaan inovasi publik dan jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian.

Tabel 3.2.1
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Penghargaan	1 Penghargaan
2	Peningkatan inovasi di masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Jumlah industri kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Unit Usaha	25 Unit Usaha

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2. Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6**Meningkatnya inovasi pelayanan publik**

Meningkatnya inovasi pelayanan publik diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	inovasi	5	5	2	6	300%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							300 %

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

Tujuan dari Inovasi Pelayanan Publik, yaitu:

- 1) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik;
- 2) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik;
- 3) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 4) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Realisasi indikator jumlah inovasi yang didaftarkan di tahun 2021 adalah 6 inovasi, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 2 inovasi, dengan tingkat capaian 300%. Nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 5 inovasi. Realisasi tersebut telah mencapai 300% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 2 inovasi.

Pada tahun 2021, ada 6 (enam) inovasi yang ada di SKPD yang diikutsertakan pada Innovative Government Award (IGA) 2021, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi,



Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut memperoleh kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.

6 inovasi yang didaftarkan itu adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Inovasi	Tahun Pembuatan	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	2020	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.
2	Sekretariat Daerah	Gapura Karomah (Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah)	2020	Gapura Karomah adalah program yang dibuat dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD.
3	Dinas PUPRP	BOC (Bina Marga On Call)	2021	BOC adalah kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Dinas PUPRP utk penanganan jalan-jalan rusak yang sifatnya darurat/emergency, yang tidak terencana dan tidak terlalu luas penanganannya seperti jalanan berlubang, jalan amblas, jembatan, gorong2 pecah yang volumenya tidak luas.
4	Dinas Pariwisata	Fantastic Radio	2020	Radio berbasis aplikasi di android yang memberikan informasi kepariwisataan, hiburan di radio ini bisa didengarkan dimana saja dan kapan saja (24 jam).
5	Dinas Kesehatan	PSC 119	2019	PSC 119 adalah layanan panggilan sebagai ujung tombak pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut. Diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan membangun jaringan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan.
6	Dinas PMD	Program Manunggal Tuntung Pandang	2019	Manunggal Tuntung Pandang adalah salah satu dari 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati yaitu bermalam Bersama yang dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Desa selama 5 (lima) tahun jabatan Bupati. Dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Daerah, masyarakat Desa, unsur Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah

Inovasi-inovasi pelayanan publik terus dikembangkan setiap tahunnya, berikut disajikan inovasi-inovasi pelayanan publik yang diciptakan oleh SKPD Tahun 2019, 2020, dan 2021.

Tabel 3.2.3
Daftar Inovasi pelayanan publik yang didaftarkan Tahun 2019-2021

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	-	Superhero (Serangkaian Upaya dan Penatalaksanaan Pasien untuk Berhenti Merokok) yang diciptakan oleh UPTD puskesma Tambang Ulang	Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut) adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD
2	-	Jumantik Junior	Gapura Karomah (Program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah) adalah program yang dibuat dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD.
3	-	Lanjung Lanjung (Layanan Kunjungan) diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BOC (Bina Marga On Call) adalah kemudahan pelayanan yang diberikan oleh Dinas PUPRP utk penanganan jalan-jalan rusak yang sifatnya darurat/emergency, yang tidak terencana dan tidak terlalu luas penanganannya seperti jalan berlubang, jalan amblas, jembatan, gorong2 pecah yang volumenya tidak luas.
4	-	Laksa (Layanan Administrasi Kependudukan Sabtu Ahad) diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Fantastic Radio adalah Radio berbasis aplikasi di android yang memberikan informasi kepariwisataan, hiburan di radio ini bisa didengarkan dimana saja dan kapan saja (24 jam).
5	-	SI KIJANG MAS (Sistem Pelayanan KIA Melalui Jaringan Media Sosial) diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PSC 119 adalah layanan panggilan sebagai ujung tombak pelayanan kegawatdaruratan pra rumah sakit di Kabupaten Tanah Laut. Diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dan membangun jaringan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit bagi masyarakat yang membutuhkan.
6			Program Manunggal Tuntung Pandang adalah salah satu dari 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati yaitu bermalam Bersama yang dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Desa selama 5 (lima) tahun jabatan Bupati. Dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Daerah, masyarakat Desa, unsur Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Tabel 3.2.4
Daftar inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

No	UNIT KERJA	INOVASI	TAHUN PEMBUATAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	1 Sosialita (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut)	2020	Perbup Tala Nomor 98 Tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020	Sosialita adalah sistem order semua instansi lingkup Tanah laut untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan 50 juta. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD. Metode pengadaan di aplikasi sosialita ini adalah metode pengadaan langsung yang menggunakan dana APBD.
		2 PLK HAD (Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa Kabupaten Tanah Laut)	2018	Perbup Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa Kabupaten Tanah Laut.	Layanan hukum untuk desa untuk membantu permasalahan yang terjadi dalam hukum administrasi desa di Kab. Tanah Laut
				SK Bupati Tala Nomor : 188.45/469-KUM/2018 tentang Penetapan Prosedur Pelayanan, Pembentukan Tim dan Penetapan Desa <i>Pilot Project</i> Pusat Layanan Konsultasi Hukum Administrasi Desa (PLK HAD)	
		3 SI PADUKA (Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah)	2021	SK Bupati Tala Nomor : 188.45/729-KUM/2021 tentang Penyusunan Keputusan Bupati dengan menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online)	Aplikasi pendukung tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut dalam pelayanan penyusunan produk hukum daerah secara daring yang berfungsi antara lain : sebagai sistem pengajuan SKPD dalam penyusunan produk hukum daerah; media informasi proses pengajuan pelayanan yaitu sebagai alat untuk pengecekan sampai sejauh mana proses penyelesaian penyusunan produk hukum daerah yang dimohon; dan alat untuk pendokumentasian produk hukum daerah.
		4 Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Tala	2021	Perbup Tala Nomor 91 Tahun 2021, tanggal 29 September 2021	Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kinerja seluruh perangkat daerah agar tercipta organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktifitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan motivasi secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur perangkat daerah untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas.
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Inovasi Integrasi dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kab. Tala	2021	Perbup Tala Nomor 83 Tahun 2021	Pedoman untuk melaksanakan dan menerapkan model skema, alur, dan proses perencanaan yang berorientasi prioritas di lingkungan Pemda secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan peraturan perencanaan dengan teknis yang dilakukan oleh perencana Bappeda dengan tidak melanggar aturan diatasnya.



5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	Sistem Informasi Layanan Kepegawaian dan Administrasi (SILKA)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/731-KUM/2021, tanggal 3 Juni 2021	Dalam rangka menunjang layanan kepegawaian satu pintu pada BKPSDM Kab. Tanah Laut
		2	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/732-KUM/2021, tanggal 3 Juni 2021	Aplikasi yang dirancang sebagai solusi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel
		3	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/733-KUM/2021, tanggal 3 Juni 2021	Sistem informasi yang dirancang sebagai solusi untuk menangani berbagai hal dalam pengelolaan kepegawaian mulai dari penyimpanan dan pemusatan data secara terkomputerisasi hingga menangani berbagai macam laporan yang berhubungan dengan kepegawaian sehingga memudahkan untuk meningkatkan kebutuhan administrasi kepegawaian.
		4	Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian (SIDIKA)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/734-KUM/2021, tanggal 3 Juni 2021	Dalam rangka mewujudkan tertibnya penatalaksanaan arsip kepegawaian sehingga memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pencarian arsip kepegawaian bagi ASN di Kab. Tala
		5	Sistem Informasi Berkala Otomatis (SILBA)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/735-KUM/2021, tanggal 3 Juni 2021	Dalam rangka memudahkan proses kenaikan gaji berkala secara otomatis bagi ASN di Kab. Tala
		6	Aplikasi Kinerja dan Tunjangan Aparatur Elektronik (e-KITA)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/746-KUM/2021, tanggal 9 Juni 2021	Aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi ASN dalam melaporkan kinerja harian secara berkala
		7	Aplikasi Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (MyTPP)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/747-KUM/2021, tanggal 9 Juni 2021	Aplikasi yang dirancang untuk mempermudah dalam merekapitulasi tambahan penghasilan pegawai (TPP)
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	Implementasi Transaksi Non Tunai di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	2020	Perbup Tala Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 14 Juni 2021	Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka dilakukan perubahan ketentuan mengenai implementasi transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut
		2	Penyampaian Laporan Keuangan dan Aset SKPD secara Elektronik dan Digitalisasi	2021	Perbup Tala Nomor 47 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021	Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
		3	Sistem Informasi Pajak Bermotor (SIMPKB)	2021	Perbup Tala Nomor 117 Tahun 2021, tanggal 21 Nopember 2021	Inovasi Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Aplikasi Sistem Informasi Pajak Bermotor (SIMPKB)
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	E-BPHTB/SI BEB HATA	2019	Perbup Tala Nomor 164 Tahun 2020	BPHTB



		2 Pemutakhiran Data PBB/Pendataan PBB/ Pemetaan PBB	2019	Perbup masih dalam proses	PBB
		3 Implementasi Simda Pendapatan online	2020	Tidak ditetapkan dengan Perbup atau SK, Pelayanan untuk Pajak Daerah yang bersifat self assesment	Pelayanan Pajak Daerah
		4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan bukan (non) PLN	2020	Perbup Tala Nomor 32 Tahun 2020	Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan
		5 E-SPPT	2020	Perbup Tala Nomor 76 Tahun 2021	PBB
		6 Aplikasi Rekon PBB	2020	Perbup masih dalam proses	PBB
		7 SI PBB	2021	Perbup Tala Nomor 76 Tahun 2021	PBB
		8 Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Online	2021	Perbup Tala Nomor 84 Tahun 2021	Pemungutan Pajak Daerah Pajak (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan)
		9 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir pada Toko Retail/Modern	2021	Perbup Tala Nomor 85 Tahun 2020	Pemungutan Pajak Daerah Pajak Parkir
		10 Aplikasi Rekon PBB	2020	Perbup belum ada	PBB
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Penandatanganan elektronik pada Pelayanan Rekomendasi Penelitian	2021		Sarana Penandatanganan Elektronik melalui Aplikasi Adobe Acrobat. Sedangkan sarana/media yang digunakan untuk pengiriman berkas/data melalui Aplikasi Whats App. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tertanggal 23 Desember 2020. pemberlakuan 1 Januari 2021.
		2 Desa Ku ADEM (Aman, Damai, tEntraM)	2021		Dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak ada kesadaran dan kesepakatan toleransi ditingkat mikro/desa/kelurahan. Melalui pembentukan Desa Sadar Konflik. Desa yang ditunjuk sebagai desa sadar konflik adalah desa yang memiliki kriteria masyarakat/kelompok/atau desa itu sendiri sebagai desa yang bisa meminimalisir terjadinya konflik dengan pemusyawaratan hasil penyelesaian. Desa Sadar Konflik yang dibentuk dapat ditetapkan melalui SK Bupati/Kepala Daerah. dengan pemberdayaan sadar konflik diharapkan desa aman dan tentram bisa terwujud secara berkesinambungan.
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1 Inovasi Pelayanan Publik pada BPBD	2021	SK Bupati Tala Nomor : 188.45/754-KUM/ 2021, tanggal 10 Juni 2021	Pelayanan yang memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memantau daerah rawan bencana dan daerah mana yang pernah terjadi bencana serta penanganannya melalui website BPBD, playstore, dan media sosial



		Kabupaten Tanah Laut			
11	DINAS KESEHATAN	1 PSC 119	2018	Perbup Tala Nomor 73 Tahun 2018	
		2 UHC (Universal Health Coverage)	2020	Perjanjian kerja Bupati Tala Nomor : 188.45/65-PK-KUM/2020 Nomor : 251/KTR/VII-05/1220	
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1 Bina Marga On Call (BOC)	2021	SK Kepala Dinas PUPRP Kab. Tanah Laut Nomor : 620/033-SET/DPUPRP	Kemudahan pelayanan yang diberikan Dinas PUPRP utk penanganan jalan-jalan rusak yang sifatnya darurat/emergency, yg tidak terencana dan tidak terlalu luas penangannya seperti jalanan berlubang, jalan amblas, jembatan, gorong2 pecah yang volumenya tidak luas.
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1 Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman Berbasis Website (SIPKIM)	2021	SK Bupati Tala Nomor 188.45/834-KUM/2021	Sipkim adalah sistem informasi online yang dikembangkan oleh Tim IT DPRKPLH dalam rangka mewujudkan kemudahan Pengaduan, Pengusulan dan Permohonan Rekomendasi bagi warga Tanah Laut
14	DINAS SOSIAL	1 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "TAPARUKUI" (istilah dalam kamus Bahasa Banjar yang artinya Kesamaan Pendapat)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/1083-KUM/2019	Penetapan Pelaksana / Penyelenggara Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kab. Tala
		2 Layanan Kedaruratan Dinas Sosial "#24171"	2021	SK Kepala Dinas Sosial Nomor 47 Tahun 2022	Layanan Kedaruratan #24171 merupakan pelayanan cepat tanggap dan tepat masyarakat yang dapat diakses selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kedaruratan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
		3 Sistem Informasi Data Jangkauan Masyarakat Sejahtera (SI TAJAU MAS)	2021	SK Kepala Dinas Sosial Nomor 49 Tahun 2021	SI TAJAU MAS merupakan data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
15	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Si Pelopor	2021	SK Kadispora Kab. Tanah Laut Nomor : 427/73.2/Dispota/2021, tanggal 31 Maret 2021	Proses Seleksi dan Pendampingan serta Pengembangan Pemuda Pelopor Kabupaten Tanah Laut
		2 Simple Bulan PSP3	2021	SK Kadispora Kab. Tanah Laut Nomor : 427/71.2/Dispota/2021, tanggal 1 Februari 2021	Sistem Pelaporan Bulanan dan Pendampingan PSP3 di Masyarakat
		3 Tim Kreatif	2021	SK Bupati Tala Nomor : 188.45/419-KUM/ 2021, tanggal 23 Februari 2021	Program Gerakan Ayo Olahraga Kabupaten Tanah Laut



		4 PPLPD (Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar Daerah Kabupaten Tanah Laut)	2021	SK Bupati Tala Nomor : 188.45/557-KUM/ 2021, tanggal 25 Maret 2021	Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar Daerah Kabupaten Tanah Laut
		5 Website Dispora	2021	SK Kadispora Kab. Tanah Laut Nomor : 814/74/Dispora/IV/2021, tanggal 1 April 2021	Mempersiapkan Atlit Usia Dini Cabang Olahraga Unggulan di Tanah Laut
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Layanan Kunjungan (LANJUNG)	2018	SK Bupati Tala Nomor 188.45/554-KUM/2018, tanggal 25 Juni 2018	Layanan dokumen kependudukan yang mengunjungi desa-desa, sekolah, lapas, panti asuhan, rumah warga yang membutuhkan layanan khusus seperti penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit maupun lansia.
		2 Layanan Sehari Tuntung (LASUNG)	2018	SK Bupati Tala Nomor 188.45/555-KUM/2018, tanggal 25 Juni 2018	Layanan yang memiliki komitmen penyelesaian pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehari selesai dengan catatan semua berkas lengkap dan sesuai perpres nomor 96 tahun 2108.
		3 Two In One (2 In 1), Three In One (3 In 1) dan Four In One (4 In 1)	2018	SK Bupati Tala Nomor 188.45/629-KUM/2018, tanggal 7 Agustus 2018	Layanan dengan sekali pengurusan mendapat 2 dokumen, 3 dokumen, sampai 4 dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus.
		4 Layanan Administrasi Kependudukan Setiap Ahad (LAKSA)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/406-KUM/2019, tanggal 28 Februari 2019	Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan setiap hari ahad/minggu yang berlokasi di Ruang Terbuka Hijau(RTH).
		5 Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/986-KUM/2019, tanggal 23 Oktober 2019	Layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke desa-desa untuk memberikan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga setiap warga desa tersebut memiliki dokumen kependudukan yang komplit untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi kependudukan.
		6 Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan (SI PEDE)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/987-KUM/2019, tanggal 23 Oktober 2019	Sistem yang digunakan oleh OPD yang bekerjasama berupa pemanfaatan data dengan Dinas Dukpencapil yang dimana dapat melihat data kependudukan yang sesuai dengan yang telah disepakati dalam kerjasama.
		7 Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Kependudukan Secara Elektronik (SI KECE)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/988-KUM/2019, tanggal 23 Oktober 2019	Aplikasi yang digunakan oleh operator untuk mengarsipkan berkas permohonan dokumen kependudukan secara digital.
		8 Sistem Pelayanan KIA Melalui Jaringan Media Sosial (SI KIJANG MAS)	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/989-KUM/2019, tanggal 23 Oktober 2019	Layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui media sosial whatsapp



		9 Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone (SILAKAS)	2020	SK Bupati Tala Nomor 188.45/607-KUM/2020, tanggal 11 Juni 2020	Layanan dokumen kependudukan melalui media digital berbasis android yang dapat didownload di playstore.
		1 0 Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL)	2021	Perbup Tala Nomor 43 Tahun 2021, 2 Juni 2021	Aplikasi dimana setiap lini proses, sejak penerimaan berkas, verifikasi petugas penerima, verifikasi dari pejabat verifikasi, proses dokumen oleh operator, pemberitahuan status dokumen kepada pemohon, sampai pada penyerahan dokumen dapat dilakukan dalam aplikasi yang terintegrasi.
		1 1 PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)	2021	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1120-KUM/2021	Layanan yang terintegrasi dengan pengadilan negeri yang apabila terjadi perubahan elemen dana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Dukpencapil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Dukpencapil.
		1 2 SI CAPUNG (Sistem Informasi Cerai di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung)	2021	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1119-KUM/2021	Layanan yang terintegrasi dengan pengadilan agama yang apabila terjadi perubahan status perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan agama maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Dukpencapil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Dinas Dukpencapil.
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	2020	Perbup Tala Nomor 170 Tahun 2020, tanggal 02 Desember 2020	Aplikasi untuk pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1 Sub Penyalur Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kab. Tala	2019	Perbup Nomor 103 Tahun 2019, tanggal 15 Juli 2019	Untuk menjamin kelancaran dan ketersediaan jenis bahan bakar minyak tertentu di wilayah Kecamatan dalam Kab. Tala maka perlu adanya sub penyalur
		2 Penetapan Ongkos Angkut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Solar Bagi Nelayan di Kab. Tala	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/766-KUM/2019, tanggal 24 Juli 2019	Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, penunjukan Sub Penyalur pada wilayah yang belum terdapat penyalur, cngkcs angkut jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan dari penyalur ke titik serah sub penyalur ditetapkan melalui mekanisme musyawarah daerah
19	DINAS PARIWISATA	1 Penetapan Logo Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	2019	SK Bupati Tala Nomor 188.45/1071-KUM/2019, tanggal 17 Desember 2019	Logo ini merupakan representasi utuh dari pariwisata Tanah Laut yang didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni aspek fungsional, estetika, sosial, nilai budaya, serta visi dan misi pariwisata Kab. Tala.
21	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1 Penyelenggara an Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Apperindu)	2019	Perbup Tala Nomor 203 Tahun 2019, tanggal 9 Desember 2019	Apilikasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan



		2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Paralel pada DPMPSTSP	2020	Perbup Tala Nomor 91 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020	Pelayanan yang dibuat dalam rangka mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada pelaku usaha dengan secara paralel
		3	Reaksi Cepat Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Penyandang Disabilitas Netra (RACAP)	2021	Perbup Tala Nomor 40 Tahun 2021, tanggal 17 Mei 2021	Pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada penyandang disabilitas netrayang memiliki usaha di Kab. Tanah Laut
		4	Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment) untuk Pemohon Perizinan dan Non Perizinan	2021	Perbup Tala Nomor 39 Tahun 2021, tanggal 17 Mei 2021	Pemberian penghargaan dan sanksi untuk pemohon perizinan dan non perizinan pada DPMPSTSP yang lokasi usahanya ada di Kab. Tanah Laut serta telah memenuhi persyaratan permohonan perizinan dan non perizinan yang disyaratkan
		5	Pelayanan Keliling Perizinan dan Non Perizinan	2021	Perbup Tala Nomor 49 Tahun 2021, tanggal 25 Juni 2021	Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pelaku usaha juga sebagai bentuk inovasi pelayanan publik yang diberikan DPMPSTSP dalam rangka mewujudkan pelayanan mudah, cepat, dan akuntabel.
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Pembentukan Rumah Perlindungan Sementara (Shelter) Kabupaten Tanah Laut	2017	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/788-KUM/2017	Rumah Perlindungan Sementara (Shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Rumah persembunyian sangat dibutuhkan segera dibangun sesuai dengan ketentuan undang-undang karena korban dapat mengetahui dan merasa aman di dalam rumah persembunyian tersebut.
		2	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020	2020	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/677-KUM/2020	Upaya pencegahan perkawinan usia anak dan pencegahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tanah Laut
		3	Komitmen dan Dukungan Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Tanah Laut	2020	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Sangar Alba Nomor : 188.45/33-KB/KUM/2020, Nomor : 10/S-ALBA/2020	Fasilitasi layanan sebagai bentuk komitmen dan dukungan dalam mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Tanah Laut



		4	Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut	2021	Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Kementerian Agama kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/11-KB/KUM/2021, Nomor : 32 Tahun 2021	Kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak sesuai dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak dan pencegahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Tanah Laut
		5	Program Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1 B	2021	Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Pelaihari Kelas I B dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut Nomor : W15-A7/1523/HM.01/9/2021, Nomor : 260/01/PPPA-DP2KBP3A/2021	Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologis dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan di bawah usia 19 Tahun di Kabupaten Tanah Laut
		6	Penetapan Inovasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	2021	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1302-KUM/2021	Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat berupa Pelayanan KIE, konseling dan rujukan dalam permasalahan keluarga secara gratis
		7	Penetapan Inovasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Goes To School pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut	2021	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1319-KUM/2021	Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan materi kependudukan, Keluarga Berencana ke dalam mata pelajaran sesuai pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar dan mempertajam materi yang di bahas

23	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	1	Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg Bersubsidi	2021	Perbup Tala Nomor 24 Tahun 2021, tanggal 5 April 2021	Pedoman untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran LPG tabung 3 kg bersubsidi dengan distribusi tertutup untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian LPG tabung 3 kg.
24	DINAS PERHUBUNGAN	1	Tim dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tanah Laut	2020	SK Bupati Tala Nomor 188.45/64-KUM/2020	Tim yang dibentuk untuk mengatasi semakin meningkatnya permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan
		2	Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala Online Terintegrasi (UBOLT) Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP)	2021	Perbup Tala Nomor 78 Tahun 2021	Aplikasi yang dibuat dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan umum yang bersifat digital kepada masyarakat pengguna jasa layanan transportasi di wilayah Kab.Tanah Laut
32	KECAMATAN TAKISUNG	1	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (SILANTAS DESA KTA)	2021	Perbup Tala Nomor 65 Tahun 2021	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi desa
35	KECAMATAN BAJUIN	1	Sistem Informasi dan Pelayanan Online Terpadu (SIMPONI-T)	2021		Proses dan aplikasi yang berbasis komputer dan dilakukan secara daring dengan mengoptimalkan akses informasi organisasi dan pelayanan publik kepada masyarakat Kec. Bajuin

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen akan terus meningkatkan inovasi-inovasi di segala sendi kehidupan terutama inovasi dalam hal pelayanan publik. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbulnya kesadaran dari ASN untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat.

- 2) Menciptakan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- 3) Mempersingkat panjangnya birokrasi terutama dalam hal pelayanan publik

Selain itu, pada tahun 2021 Bupati Tanah Laut juga meminta agar setiap SKPD membuat inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ada di SKPD tersebut, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1) melakukan sosialisasi tentang inovasi dan mengajak SKPD berlomba-lomba melakukan inovasi untuk melakukan layanan pemerintahan yang cepat dan adaptif agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat.
- 2) melakukan pembinaan inovasi dalam kompetisi sehingga akan mendorong SKPD untuk memunculkan inovasinya lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan lebih baik dan berkualitas.

Berikut adalah perbandingan jumlah inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2019-2021.

Tabel 3.2.5

Perbandingan Jumlah Inovasi dari Tahun 2019-2021

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Inovasi SKPD	12	13	40

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Organisasi Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dari Tahun 2019 s.d 2021, yaitu dengan total jumlah inovasi 65 inovasi. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Bupati Tanah Laut yang meminta kepada SKPD dan jajarannya agar terus dapat menciptakan inovasi-inovasi pada SKPD yang nantinya mempermudah dalam pelayanan publik.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mendapatkan penghargaan pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 dan memperoleh kategori Inovatif dengan skor indeks 52,42.

Gambar 3.2.1

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Inovasi SKPD Tahun 2021



Dalam mencapai sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik lainnya di tahun 2021 di dukung oleh 1 program dengan pagu Rp. 409,816,840 dan realisasi Rp. 198,325,300 atau sebesar 48,39%.

 Tabel 3.2.6
 Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841	808,249,651,331
	Jumlah	989,803,201,841	808,249,651,331

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian

Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	unit	10	25	15	103	686,67%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							686,67 %

Industri Kreatif adalah Kumpulan Aktivitas Ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri Kreatif juga dikenal dengan nama Ekonomi Kreatif. Menurut Kementerian Perdagangan, Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, mainan dan permainan, kuliner, televisi dan radio serta permainan video.

Sedangkan Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Realisasi indikator jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang di tahun 2021 adalah 103 unit, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 15 unit dengan tingkat capaian 686,67%. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 78 unit jika

dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 25 unit. Realisasi tersebut telah mencapai 412% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 25 unit usaha.

Berikut disajikan jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang di Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Tabel 3.2.8
Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Langkar Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Kuyit Sasirangan	Desa Kuyit, Kec. Bajuin	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Delima Sasirangan Kintap,	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Anyaman Pandan Swarangan	Desa Swarangan, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
5	IKM Anyaman Purun Telaga Langsung	Desa Telaga Langsung, Kec. Pelaihari	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Kerajinan Kayu Ulin Pelaihari	Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari
7	IKM Kerajinan Kayu Ulin Panyipatan	Desa Kandungan Lama, Kec. Panyipatan	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong
8	IKM Kerajinan Kayu Ulin Ds. Telaga	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Sasirangan Jorong	Desa Jorong, Kec. Jorong	9	IKM Karya Mulia Creative Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia Creative Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
10	IKM Tenun Pelaihari	Desa Tebing Siring, Kec. Pelaihari	10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
			13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari	13	IKM El Banjarie Eksklusive	Pelaihari
			14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun "Bunga Purun"	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati



			15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
			16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
			17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
			18	IKMRNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung
			19	IKM Cisy/ Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisy/ Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
			21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
			23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari
			24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
			25	IKM LuwesCollection	Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
						26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
						27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
						29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
						30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari
						31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
						32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
						33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
						34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang



						35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
						36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
						37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin
						38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
						40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
						41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
						42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
						43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari
						44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong
						45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari
						46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
						47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin
						48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan
						49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
						50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin
						51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
						52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
						53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
						54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung



						55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
						56	IKM Krenov POLITALA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari
						57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
						58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap
						59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong
						60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
						61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
						62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
						63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kampung, Kec. Bati-Bati
						64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur
						65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang
						66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur
						67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
						68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
						69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati
						70	IKM Keramat Handicraft	Ds. Takisung, Kec. Takisung
						71	IKM Zulfa & Yara Collection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung
						72	IKM Salsabila Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
						73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung



						74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung
						75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari
						76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung
						77	IKM Neyney Collection	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
						78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung
						79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec, Pelaihari
						80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsat, Kec. Takisung
						81	IKM Perbengkelan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar
						82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
						83	IKM BYHAF Minuman Herbal	Ds. Tirta Jaya, Kec. Bajuin
						84	IKM Susu Kurma DMM	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
						85	IKM BONZEE Food	Ds. Sungai Riam, Kec. Pelaihari
						86	IKM Keripik Naschips	Ds. Panggung, Kec. Pelaihari
						87	IKM Peyek PA HAJI	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
						88	IKM Kerupuk Karya Bersama	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
						89	IKM Kue Kering Sefhia	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
						90	IKM Keripik AUDIT	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
						91	IKM Sahabat Madu	Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung
						92	IKM Tahu Tempe RIDHO JAYA 88	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari

					93	IKM Keripik Jamur SYIFA	Ds. Telaga, Kec. Pelaihari
					94	IKM Minuman Herbal YOGATAMA	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
					95	IKM Kerupuk Udang MAMA RIAN	Ds. Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
					96	IKM Keripik Jamur 3 Ardi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
					97	IKM Kue Kering MB-LA	Ds. Liang Anggang, Kec. Bati - Bati
					98	IKM Kerupuk Amplang PINUS PERMAI	Ds. Batakan, Kec. Panyipatan
					99	IKM RISMA Amplang	Ds. Takisung Kec. Takisung
					100	IKM Kerupuk Duitri	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan
					101	IKM Susu Segar ROJO KOYO	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari
					102	IKM Amplang OMEGA	Ds. Takisung, Kec. Takisung
					103	IKM Kerupuk Nyai Kasnah	Ds. Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan

Pada tahun 2020 dari target pertumbuhan jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 40% dari total IKM unggulan yaitu sebanyak 25 IKM. Dan teralisasi sesuai dengan target yaitu sebanyak 25 IKM.

Sedangkan pada tahun 2021 target pertumbuhan jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 80% dari total IKM unggulan yaitu sebanyak 50 IKM. Namun pada realisasinya, jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri sebanyak 82 IKM sebagaimana terinci pada tabel di atas.

Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan dan pembinaan intensif dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut, APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun melalui Dana

Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Kementerian Perindustrian RI. Di Tahun 2021, semenjak pandemi covid-19 melanda di seluruh wilayah Indonesia, dana - dana kegiatan pembinaan IKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut mengalami refocusing dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari data pelatihan, data pertumbuhan jumlah industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun pada tahun 2021 terdata sebanyak 3458 IKM dengan sebaran data sebagai berikut :

Tabel 3.2.9
Rekap data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM
1	Kintap	Muara Kintap	25
		Sumber Jaya	11
		Sebamban Baru	19
		Mekar Sari	25
		Kebun Raya	44
		Sungai Cuka	18
		Bukit Mulya	15
		Salaman	5
		Pandan Sari	18
		Kintap Kecil	26
		Riam Adungan	4
		Pasir Putih	9
		Kintap	12
		Kintapura	21
		TOTAL	252
2	Bati-Bati	Banua Raya	17
		Bati-Bati	46
		Padang	30
		Ujung	27
		Pandahan	37
		Nusa Indah	18
		Liangganggang	55
		Kait-Kait	28
		Ujung Baru	36
		Kait-Kait Baru	31



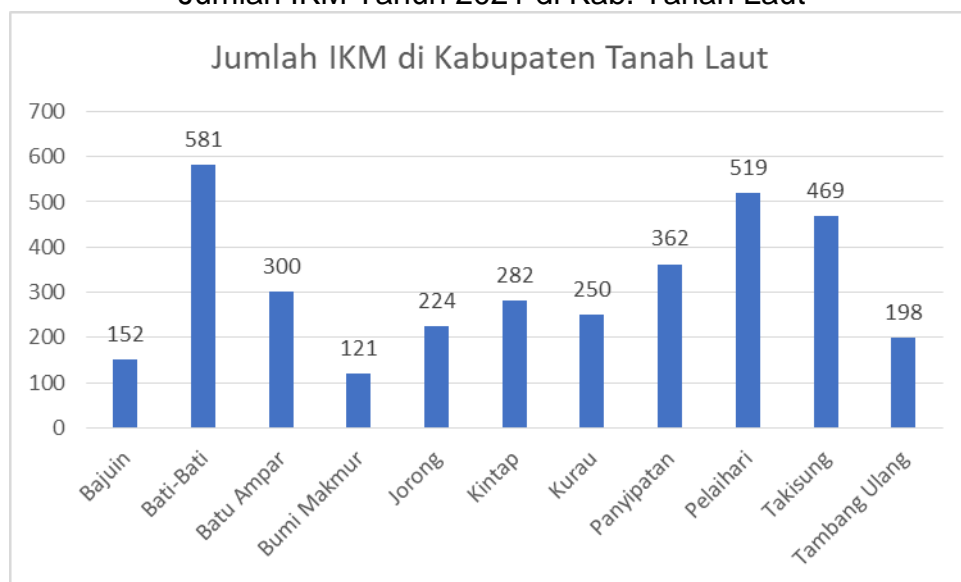
		Sambangan	23
		Bentok Kampung	24
		Bentok Darat	28
		Banyu Irang	30
		TOTAL	430
3	Tambang Ulang	Martadah	9
		Martadah Baru	24
		Tambang Ulang	29
		Bingkulu	13
		Kayu Abang	13
		Gunung Raja	35
		Pulau Sari	27
		Sungai Pinang	16
		Sungai Jelai	21
		TOTAL	187
4	Batu Ampar	Tajau Mulya	10
		Gunung Mas	25
		Gunung Melati	20
		Tajau Pecah	33
		Jilatan Alur	16
		Jilatan	13
		Batu Ampar	20
		Ambawang	17
		Damit Hulu	15
		Damar Lima	16
		Damit	29
		D. Bungkok	49
		Bluru	22
		Pantai Linuh	18
		TOTAL	303
5	Takisung	Gunung Makmur	45
		Benua Tengah	35
		Sumber Makmur	39
		Pagatan Besar	65
		Takisung	66
		Tabanio	25
		Telaga Langsung	25
		Benua Lawas	26
		Ranggang	24
		Ranggang Dalam	12
		Batilai	27
		K. Tambangan	83
		TOTAL	472
6	Jorong	Alur	19
		Karang Rejo	25
		Swarangan	22
		Batalang	3
		Sabuhur	20
		Asam Jaya	27



		Asri Mulya	15
		Jorong	50
		Muara Asam-Asam	19
		Asam-Asam	15
		Simpang 4 Sei Baru	20
		TOTAL	235
7	Bajuin	Tanjung	46
		Bajuin	12
		Sungai Bakar	9
		Kunyt	24
		Ketapang	19
		Pemalongan	13
		Tebing Siring	18
		Tirta Jaya	14
		Galam	16
		TOTAL	171
8	Bumi Makmur	Bumi Harapan	9
		H. Bl. Atas	15
		H. Bl. Bawah	4
		Handil Babirik	15
		Handil Gayam	13
		Kurau Utara	52
		Handil Suruk	11
		Pantai Harapan	15
		Sungai Rasau	60
		Handil Maluka	7
		H. Labuan Amas	12
		TOTAL	213
9	Kurau	Raden	9
		Bawah Layung	11
		Tambak Karya	19
		Tambak Sarinah	14
		Maluka Baulin	10
		Sarikandi	17
		Kurau	21
		Handil Negara	72
		Kali Besar	30
		Padang Luas	15
		Sungai Bakau	13
		TOTAL	231
10	Panyipatan	Batakan	92
		Batu Tungku	31
		Kandangan Lama	33
		Kuringkit	48
		Batu Mulya	37
		Panyipatan	36
		Bumi Asih	20
		Sukaramah	38
		Kandangan Baru	51

		Tanjung Dewa	27
		TOTAL	413
11	Pelaihari	Telaga	28
		Ambungan	29
		Panggung	11
		Pemuda	37
		Guntung Besar	12
		Kampung Baru	26
		Sungai Riam	38
		Sumber Mulia	25
		Atu-Atu	11
		Bumi Jaya	48
		Tampang	19
		Panjaratan	17
		Sarang Halang	18
		Pabahanan	21
		Karang Taruna	48
		Angsau	13
		Ujung Batu	18
		Tungkaran	7
		Panggung Baru	23
		Pelaihari	22
		TOTAL	471
		Jumlah Data IKM	3378

Grafik 3.2.1
Jumlah IKM Tahun 2021 di Kab. Tanah Laut



Sumber: Disnakerid Kab. Tanah Laut

Melalui hasil pendataan tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.378 industri menjadi 3.458 industri atau terjadi peningkatan sebesar 2,36 % .

Selain itu, pada tahun 2021 telah disusun Dokumen Perwilayahan Industri dimana dokumen ini bertujuan untuk memetakan Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kab Tanah Laut serta Bantuan Fasilitasi Hak Merek, Sistem Jaminan Halal dan Bantuan Hibah Mesin dan Peralatan yang pendanaannya bersumber dari dana DID dan Dana APBD Perubahan 2021.

- a. Beberapa IKM mendapatkan bantuan Hibah, antara lain :
1. Kelompok Koperasi Produsen Madu Permata Sejati berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
 2. KTH Tani Jaya Makmur berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
 3. Cisyl Collection berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
 4. Faeyza RNH berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
 5. Insan Leather Prolita berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masingIKM-masing 1 buah
 6. IKM Batu Balai berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin perajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1 buah
 7. IKM Batu Tanah Laut Manis berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin perajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1 buah
 8. IKM Karya Mandiri Sejahtera alat pertukangan berupa Band saw 1 buah, bor listrik 4 buah, gerinda 4 buah, jig saw 3 buah, mata bor full size 4 set, mesin katan 3 buah, mesin pemotong kayu duduk 2 buah, pahat ukir full size 3 set, scroll saw 3 buah dan mesin pemotong kayu 1 buah.
 9. KWT Bina Keluarga berupa mesin giling daging sebanyak 2 buah.

- b. Dari Dana DID, ada 87 IKM yang difasilitasi Hal Merk antara lain :

Tabel 3.2.10
Daftar IKM Yang Difasilitasi Hal Merk Tahun 2021

NO	NAMA IKM	MEREK	NAMA PEMILIK	ALAMAT
1	Hangit Craft	Hangit Craft	Supian Hadi	Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
2	Rumah Sasirangan Asam-Asam	Rumah Sasirangan Asam-Asam	Noormilasari	JL. ILIR RT 005/002 Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
3	Azmi Snack & Cookies	Azmi Snack & Cookies	Mimin Rahayu	Komp. Multi Madya B/34, Desa Liang Anggang
4	Yogatama	Yogatama	Supatmi	Jl. A. YANI KM 3.5, Desa Pabahanan, Kec. Pelaihari
5	Bunga Purun	Bunga Purun	Enyk Sulistyaningsih	Komp. Liang Anggang Permai RT.005/RW.002 Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
6	Jingga Orange	Jingga Orange	Fazri Kurniawan	Jl. KH. Dewantara G'G Damai RT.007/RW.003 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari
7	Pelangi Sasirangan	Pelangi Sasirangan	Hj. Rusdiana	JL.H.Yamin RT.01 RW.01, Desa Kandangan Lama
8	Kaganangan Sasirangan	Kaganangan Sasirangan	Debi Arisanti	JL.Mangga Besar RT 9/4, Desa Sarang Halang
9	Almanah Sasirangan	Almanah Sasirangan	Sulistianah	Desa Martadah Baru, RT.02/RW.01, Kec. Tambang Ulang
10	Dapur Mas Muflih	Dapur Mas Muflih	Nursahid	Komp. Wengga, Desa Pabahanan
11	LENNMADE	LENNMADE	Leny Apriyanti	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
12	YAZIDAN Sasirangan	YAZIDAN Sasirangan	Romlah	Desa Martadah Baru RT 02 RW 01, Kec. Tambang Ulang
13	Kandangan Lama Manis	Kandangan Lama Manis	Sayid Hasan	Kec. Panyipatan



14	Kerupuk Udang Mama Madan	Kerupuk Udang Mama Madan	Rusmina	Desa Bawah Layung RT. 005/RW.002 Kec. Kurau
15	KUKER SEFHIA	KUKER SEFHIA	Betty Mahdalena	Jl. Sultan Hadi Wijaya, RT.006/RW. 003, Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
16	MB-LA	MB-LA	Chalifah	Komp. Multi Madya B/34, Desa Liang Anggang
17	Nas_Chips Aneka Kripik	Nas_Chips Aneka Kripik	Maulidatun Nisa	Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No. 07 RT. 19, Desa Panggung Kec. Pelaihari
18	yuJAVA	yuJAVA	Epi Lestari	JL. KH. A. Nawawi, Komp. Permata Jingga 3 BLOK. B NO. 50
19	KA' MCE Sasirangan	KA' MCE Sasirangan	Rini Yulia Ningsih	Ds. Martadah Baru RT.010/RW.003
20	Tala AI Plus (TAP)	Tala AI Plus (TAP)	Amrullah	Desa Panjaratan, Kec. Pelaihari
21	Kunyit Sasirangan	Kunyit Sasirangan	Marsita Emaliasani	Jl. Soepirman RT.02/RW.01 Kec. Bajuin
22	GP. ART Galery	GP. ART Galery	Dasar Puji Handoko	Jl. Jend. Sudirman RT.017/RW.007 Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
23	Olahan Ziah	Olahan Ziah	Fauziah	Jl. A. Yani KM. 5.5 Komp. Mahkota Panggung
24	Nejma Collection	Nejma Collection	Susanti	K.H. Ahmad Nawawi, Kel. Karang Taruna
25	Pondok Sasirangan	Pondok Sasirangan	Salmiah	JL. PADAT KARYA RT 04 RW 02, Desa gunung Raja, Kec. Tambang Ulang
26	Peyek Pa Haji	Peyek Pa Haji	Sri Wahyu Lidiana	Jl. Matah Komp. Karunia Kembar I Blok. B No.09 Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut
27	Comel Sasirangan	Comel Sasirangan	Dewi Handayani	Jln. Tebing Siring I Dusun 2 RT.006 Kec. Bajuin
28	AR Madu	AR Madu	Bagus Amanu	Mantiwah RT.001/RW.001 Desa Telaga, kec. Pelaihari
29	Citra Sofa Mandiri (CSM)	Citra Sofa Mandiri (CSM)	Dian Nugraha	Desa Mekar Sari, Kec. Kintap

30	ZI@DUL	ZI@DUL	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaihari
31	SMZ Snack	SMZ Snack	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaihari
32	Radjamadu	Radjamadu	Muhammad Noor Kolbi	Desa Sungai Pinang RT.001/RW.001, Kec. Tambang Ulang
33	Telaga Madu	Telaga Madu	Hariyadi	Mantiwah RT.001/RW.001 Desa Telaga, kec. Pelaihari
34	Madu Gunung Katunun	Madu Gunung Katunun	Abd. Basir	Katunun RT.003/RW.003 Desa Telaga, Kec. Pelaihari
35	Mimi Donkent	Mimi Donkent	Fenina Noor Islamiyah	Jl. KH. Mansyur RT.015/RW.001, Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
36	Windi Collection	Windi Collection	Wiwin Megawati	Benua Tengah RT.001/RW.001 Desa Banua Tengah, Kec. Takisung
37	Kerupuk Udang Mama Rian	Kerupuk Udang Mama Rian	Misru Minah	Jl. Pembangunan RT.001/RW.001 Desa Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
38	Kambit Jaya Collection	Kambit Jaya Collection	Suwanti Ningsih	Jl. Untung Suropati RT.003/RW.001 Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
39	Bu Kokom	Bu Kokom	Siti Komsianah	Jl. A. Yani Rt.001/RW.001 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
40	Madu Kelulut Bakula	Madu Kelulut Bakula	Dani Firnadi	Komp. Anugerah Hamparan Jl. Kol Soepirman Rt.011/RW.002, Kel. Atu-Atu
41	Kripik Audit	Kripik Audit	Normiati	Jl. Panembahan Senopati RT.10B, Dusun 04 Desa Bumi Jaya
42	Sakatalu	Trigona Sakatalu	Didiyani	Jl. Wisata Air Terjun Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin
43	Haidar Sasirangan	Haidar Sasirangan	Abdullah Hayat	Pemukiman 36 RT. 014 Simpang Empat Sei. Baru, Kec. Jorong



44	Blok'D Sasirangan	Blok'D Sasirangan	Paulyn K.I Palendeng	JL. A. ANTASARI, Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
45	Hanum Meubel	Hanum Meubel	Dedik Setiawan	Jl. Dahlia RT.010/RW.003 Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap
46	Mama Nabil	Mama Nabil	Nawiyati	Jl. Datu Daim, RT.VI/RW.II No. 61, Kec. Pelaihari
47	Kemiri Kita	Kemiri Kita	Ibnu Kasim	Desa Galam RT.004/RW.002 Kec. Bajuin
48	Sugeh	Sugeh	Ernawati	Jl. Merdeka RT.006/RW.002 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
49	Yotro Teko Berkah (YTB)	Yotro Teko Berkah (YTB)	Eka Dewi Kharisman	Jl. Pangeran Antasari RT.004/RW.001 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
50	Harisma	Harisma	Suhartin	Jl, Panglima Sudirman RT.002/RW.001 Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
51	Mama Naura	Mama Naura	Darti Sutini	Komp. Daffa Land No. 18 RT.018/RW.001, Kelurahan Atu-Atu, Kec. Pelaihari
52	3Tri	3Tri	Srinatun	Jl. Achmad Yani RT.007 Dusun 3 Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
53	Berkah Sasirangan Bajuin	Berkah Sasirangan Bajuin	Herlinawati	Jl. Bina Ilmu RT.002/RW.001, Desa Bajuin, Kec. Bajuin
54	Dapur Riri	Dapur Riri	Mahrta Sari	Jayau RT.009/RW.002 Desa Ambungan, Kec. Pelaihari
55	Hibak Juice	Hibak Juice	Guntur Angga Saputra	Jl. HM. Djapri No. 48 RT.004/RW.005 Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari
56	Vania Renata	Vania Renata	Desi Mawita	Jl. Merdeka RT.006/RW.002 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
57	Pinus Permai	Pinus Permai	Misna Yanti	Jln. Pariwisata RT.016 Desa Batakan, Kec. Panyipatan



58	Iqlima Bakery	Iqlima Bakery	Wardatul Firdausi	Jl. Sejahtera RT.008 Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
59	Basmen	Basmen	Muhammad Abdul Khair	Jln. Sarigading RT.001/RW.001, Kecamatan Takisung, Kab. Tanah Laut
60	Dibalik Rasa	Dibalik Rasa	Inayati Humairo	Jl. A. Yani Km. 6 Desa Panggung, Komp. Mahkota Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
61	Getuk D'Tiya	Getuk D'Tiya	Syaekun	Jln. Ibunda RT.005/RW.001, Desa Tirta Jaya, Kecamatan Bajuin, Kab. Tanah Laut
62	Ridho Jaya 88	Ridho Jaya 88	Deddy Purnomo	Jl. Basuki Rahmat No. 26, RT.026/RW.006, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
63	Ridho'Rehan	Ridho'Rehan	Sari Emi	Jl. Simpang Tiga Gerogot RT.004/RW.002, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kab. Tanah Laut
64	Sukodadi	Sukodadi	Suwito	Jln. A. Yani RT.009 , Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
65	Rengginang Bajuin	Rengginang Bajuin	Ade Ratna Ningsih	Jl. Sido Rukun RT.005/RW.003, Kecamatan Bajuin, Kab. Tanah Laut



66	Madu Mongso Ellyana	Madu Mongso Ellyana	Sulistianah	Jl. Tarini RT.002/RW.001 Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut
67	NK Collection	NK Collection	Lia	Jl. Sukadamai RT.003/RW.002 Kecamatan Takisung
68	Sannas	Sannas	Mustaqimah	Jl. Majapahit RT.005/RW.002 Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
69	Syyfa	Syyfa	Sugianti	Katunun Rt.003/RW.003 Desa Telaga, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
70	Nyai Kasnah	Nyai Kasnah	Kasnah	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
71	Pukaha	Pukaha	Kartini	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
72	Oemiy Bakery	Oemiy Bakery	Raden Rizki Amalia	Jl. Teluk Baru No. 33 RT.008/RW.003, Kelurahan Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
73	Ferdah	Ferdah	Badri	Jl. Majapahit RT.005/RW.002 Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut



74	Cap Raja Gunung	Cap Raja Gunung	Widarningsih	G'g Harapan Maju RT.005/RW.002, Desa Gunung Raja, Kab. Tanah Laut
75	Parimata	Parimata	Masitah	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
76	@ni Cake	@ni Cake	Andriani Purnamasari	Jl. Kayu Manis RT.003/RW.001, Desa Pangung, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
77	Madu Kelulut Gunung Birah	Madu Kelulut Gunung Birah	H. Rosmani	Desa Kandangan Lama, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
78	Kopi Banua	Kopi Banua	Marsudi	Jl. Hutan Kintap KM. 31 RT.007/RW.003 Desa Riam Adungan, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut
79	Kleti'an Bu Kar	Kleti'an Bu Kar	Karsini	Jl. Soepirman RT.003/RW.002 Desa Kunyt, Kec. Bajuin
80	Harapan Bersama	Harapan Bersama	Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut



81	di'Ela	di'Ela	Ela Nurlaili	Jl. Prof. Dr. Soepomo RT.021/RW.006 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
82	Mama Zeva	Mama Zeva	Suhartati	Desa Maluka Baulin RT.005/RW.001, Desa Maluka Baulin, Kec. Kurau
83	M@yun	M@yun	Mawardi	Desa Ambungan RT.011/RW.001, Kec. Pelaihari
84	Protala	Protala	Heriyanto	Jl. Raya Takisung Gunung Makmur NO. 15 RT.001/RW.001
85	Ferariaputri Sasirangan	Ferariaputri Sasirangan	Winarsih	Martadah Baru RT.001/RW.001 Kelurahan Martadah Baru
86	Khusnul	Khusnul	Hamrah	Pagatan Besar RT.004/RW.002, Kelurahan Pagatan Besar
87	Rumai	Rumai	Rumai Noor	Ranggang Dalam RT.003/RW.001
88	Kulak Sayur Kode Kelas 9	Kulak Sayur	Guntur Angga Saputra	Jl. HM. Djapri No. 48 RT.004/RW.005 Desa Atu- Atu, Kec. Pelaihari

89	Kulak Sayur Kode Kelas 35	Kulak Sayur	Rumai Noor	Ranggang Dalam RT.003/RW.001
----	------------------------------	-------------	------------	---------------------------------

- c. Pada tahun 2021, sebanyak 22 IKM Pangan yang difasilitasi Sistem Jaminan Halal melalui Dana DID dan sebanyak 8 IKM difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2.11
Daftar IKM Yang Difasilitasi Sistem Jaminan Halal Tahun 2021

NO	NAMA IKM	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
1	YOGATAMA	Supatmi	Jl. A. YANI KM 3.5, RT.002/RW.001 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	Minuman Segar Herbal
2	DAPUR MAS MUFLIH	Nursahid	JL. RANCAH NO. 2 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	Susu Kurma dan Madu
3	BONZEE FOOD	Zida Amaludin	SUNGAI RIAM RT.12/RW.05 JL. RAYA BATAKAN, Desa Sungai Riam, Kec. Pelaihari	Produk Makanan Frozen
4	JINGGA ORANGE	Fazri Kurniawan	Jl. A. Yani GG Telaga Budi RT. 06/Rw.03 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	Keripik Tempe
5	PEYEK PA HAJI	Sri Wahyuni	Komp. Kurnia Kembar Matah, Kec. Pelaihari	Peyek
6	OLAHAN_ZIAH	Fauziah	Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. Mahkota panggung RT.06/RW.01, Kec. Pelaihari	Keripik
7	KUKER SEFHIA	Bety Magdalena	Jln. Sultan Hadi Wijaya RT.006/RW.003 Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	Aneka Kue Kering



8	KERIPIK AUDIT	Normiati	Jl. Mataram RT. 003/RW.001, Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	Keripik Tempe dan Pisang
9	RASA PENGEN LAGI	Tumini	Bumi Jaya, RT.001/RW.001, Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	Keripik Usus, Talas
10	TAHU TEMPE SUMBER BERKAH 88	Deddy Purnomo	Jl. Basuki Rahmat No. 26 RT.026/RW.006 Kecamatan Pelaihari	Tahu dan Tempe
11	SYIFA	Sugianti	Katunun	Keripik Jamur
12	KERUPUK UDANG MAMA MADAN	Rusmina	Desa Bawah Layung RT.005/RW.002, Kec. Kurau	Kerupuk Ikan dan Udang
13	KERUPUK UDANG MAMA RIAN	Misru Minah	JL. PEMBANGUNAN RT.001/RW.001, Desa Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	Kerupuk Udang
14	AZMI SNACK & COOKIES	Mimin Rahayu	Komp. Multi Madya, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-bati	Aneka Kue dan Bolu
15	MB-LA (MAJU BERSAMA- LIANG ANGGANG)	Chalifah	Komp. Multi Madya, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-bati	Aneka Kue Kering
16	PINUS PERMAI	Misna Yanti	Pantai Asmara, Desa Muara Asam-Asam, Kec. Jorong	Kerupuk Udang dan Ikan



17	LAKSMANA BAHARI	Sari Emi	Desa Swarangan, Kec. Jorong	Kerupuk Ikan dan Udang
18	TRIGONA SAKATALU	Didiyani	Jl. Air Terjun Bajuin RT.003/RW.001, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Madu
19	ROJO KOYO	Moch Ansary	Pasar PTPN Kec. Pelaihari	Susu Segar
20	KERUPUK ACIL A'AH	Ahdiah	Desa Pagatan Besar, Kec. Takisung	Amplang
21	BAKULA MADU	Dani Firnadi	Komp. Anugrah Hamparan, Jl. Kol Soefirman RT.011/RW.002, Ds. Atu-atu	Madu
22	RISMA AMPLANG	Paridatul Aina	Jl. Raya Takisung	Amplang dan Kerupuk Ikan
23	NAS_CHIPS	Maulidatun Nisa	Komp. Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No.07 RT.19, Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	Keripik Singkong, Keripik Tahu, Keripik Kentang, Rempeyek, dan Bawang Goreng



24	KARYA BERSAMA	Norliana	Jl. Pelabuhan, RT.005 RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
25	Usaha Mandiri/Nyai Kasnah	Kasnah	Jl. Pelabuhan, RT.005 RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udang
26	Zona Kopi	Rijani	Jln. A. Syairani, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	Kopi
27	Kopi Pemalongan	Paidi	Jln. Trans 50 RT.06/RW.03, Ds. Pemalongan, Kec. Bajuin	Pengolahan Kopi
28	Hasan Al-Zahra	Hasan Rumambi	Jln. Telkom Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari	Madu
29	Sahabat Madu	Kuswanto	Rombongan 4, RT.08 RW.04, Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung	Madu
30	Radjamadu	Muhammad Noor Kolbi	Ds. Sungai Pinang RT.001/Rw.001, Kec. Tambang Ulang	Madu
31	Madu Gunung Katunun	Abd. Basir	Katunun RT.003/RW.003 Ds. Katunun, Kec. Pelaihari	Madu

Selain berupa bantuan hibah peralatan dan fasilitasi Hak Merk dan Sistem Jaminan Halal, melalui dukungan dana DID serta dana DAK Kementerian Perindustrian RI pada tahun anggaran 2021 telah diadakan Mobil Toko sebagai salah satu alternatif promosi produk IKM. Dengan adanya Mobil Toko, maka promosi akan lebih mudah dilakukan yaitu dengan cara membersamai ketika ada kegiatan di desa semisal Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang dan kegiatan-kegiatan daerah lainnya. Sedangkan melalui anggaran dana DAK Kementerian Perindustrian RI telah dibangun Rumah Kemasan di area Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari yang bertujuan untuk memudahkan dan memfasilitasi IKM untuk meningkatkan kualitas kemasan yang dimiliki agar lebih berdaya saing.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah :

1. **Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pemasaran.**

Adanya Covid-19 sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Dengan adanya pandemi ini pula, even-even promosi dan pameran yang biasanya rutin dilaksanakan oleh kabupaten/provinsi dan pusat, saat ini berkurang daripada sebelumnya, sehingga tingkat penjualan produk IKM yang biasanya naik ketika ada even kegiatan, maka ketika even tersebut ditiadakan maka penjualan produk menjadi tidak sebesar tahun sebelumnya. Demikian juga obyek wisata yang menjadi tempat penjualan produk, dengan adanya pandemi obyek wisata tersebut mengalami penurunan pengunjung sehingga tingkat penjualan produk IKM pun menjadi menurun.

2. **Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pendanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi IKM**

Dengan adanya refocusing anggaran kegiatan berakibat pada pencapaian target penumbuhan IKM serta peningkatan kapasitas teknologi IKM tidak mencapai target sebagaimana yang tertuang pada renstra. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam

pelaksanaan pelatihan industri yang diupayakan berlokasi di Kabupaten Tanah Laut.

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berharap even-even promosi dan pameran serta obyek wisata tetap diselenggarakan dan dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kembali penjualan produk IKM.
2. mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Pada Tahun 2019 ada 6 orang IKM yang mengajukan permohonan dan di Tahun 2020 ada 11 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah. Selain dari Program Gapura Karomah, usulan peralatan dan mesin dari kelompok IKM melalui proposal maupun melalui kegiatan Musrembang juga akan kami anggarkan di Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut.
3. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.
4. Dalam rangka menyikapi refocusing anggaran kegiatan pelatihan, dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut

Rencana Aksi :

1. Akan lebih giat mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat

Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun kerajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : ***Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang***), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan di tahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online. Selain itu, kami akan bekerjasama dengan Radio Tuntung Pandang dan juga membuat brosur mengenai kedua tempat promosi tersebut.

2. Akan berkoordinasi dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai Program Gapura Karomah serta akan terus mensosialisasikan program ini ke masyarakat ketika ada pelatihan-pelatihan. Selain hal tersebut, kami juga mendorong IKM untuk mengusulkan mesin dan peralatan yang diperlukan melalui proposal dan melalui Kegiatan Musrembang.
3. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp 3,495,860,950 dan realisasi sebesar 3,132,025,205 atau sebesar 89,59%.

Tabel 3.2.12
Realisasi Program Penunjang

PNo	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.176,861,614	2,869,059,059
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	124,999,750	113,741,600
3	Program Hubungan Industrial	193,999,586	149,224,546
Jumlah		3,495,860,950	3,132,025,205

MISI III

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi III yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.3.1
Target indikator tujuan Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	75 (Baik)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
2. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 8**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan diukur mealui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.2
 Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B (64,89)	B (65,88)	BB (77)	B (66,11)	85,86%
2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							92,93%

a. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP adalah rangkaian sistematis dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya tersebut, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented program*).

Realisasi indikator Nilai SAKIP di tahun 2021 adalah B (66,11) belum mencapai target yang ditetapkan yaitu BB (77) dengan tingkat capaian 85,86%. Nilai ini mengalami peningkatan 0,23 *point* jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu B (65,88). Realisasi tersebut baru mencapai 82,63% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 80 (Baik).

Dilihat dari penilaian per komponen, dari ke 5 (lima) komponen penilaian SAKIP seluruhnya mengalami peningkatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

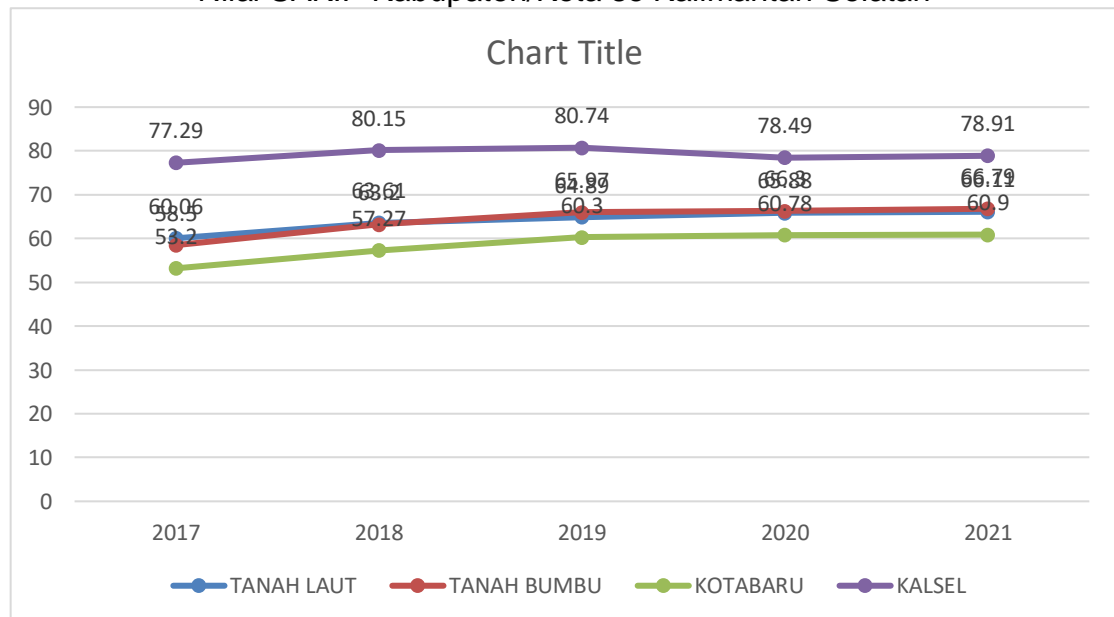
Tabel 3.3.3
Nilai Komponen SAKIP tahun 2019 dan 2020

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,99	22,14	22,25
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,05	16,18	16,22
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,35	10,45	10,49
d.	Evaluasi Internal	10	6,17	6,53	6,53
e.	Capaian Kinerja	20	10,32	10,58	10,62
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,89	65,88	66,11
Tingkat akuntabilitas kinerja			B	B	B

Sumber: diolah

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah BB (78,91).

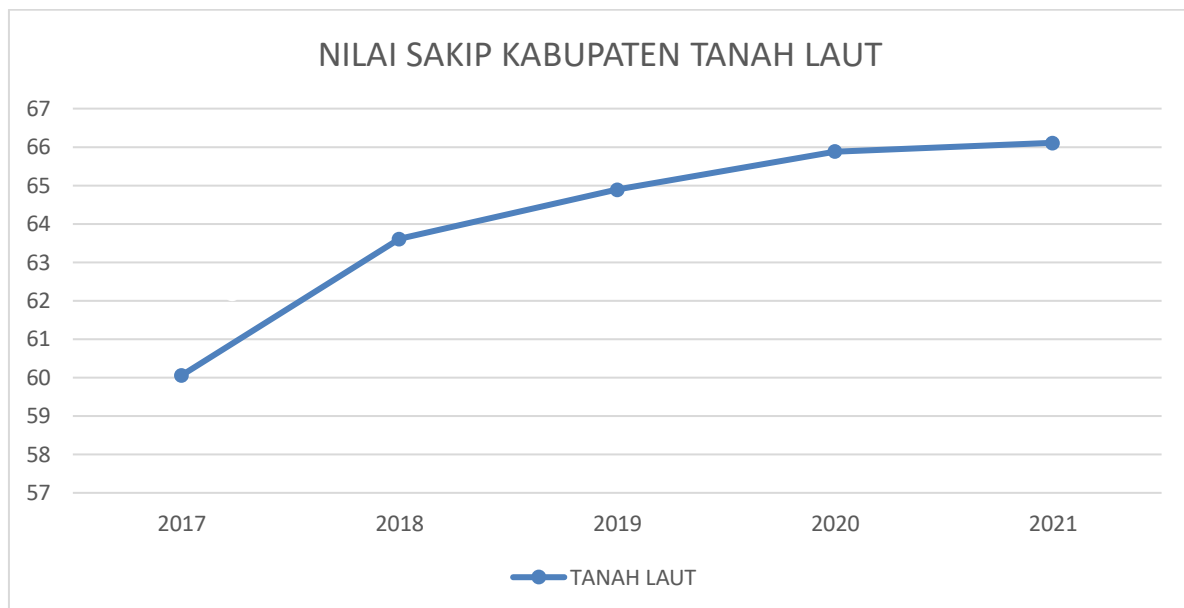
Grafik 3.3.1
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.3.2
Nilai SAKIP tahun 2017– 2021



Sumber: diolah

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP, karena dilihat dari nilai semua komponen masih banyak terdapat kekurangan, nilai komponen yang masih sangat rendah yaitu capaian kinerja dimana nilai maksimal adalah 20 dan terealisasi sebesar 10,31 atau 53,1%

Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP di tahun 2021 antara lain :

1. Revisi Renstra dan Pohon Kinerja seluruh SKPD menyelaraskan dengan RPJMD mulai dari eselon II, III dan IV agar Indikator Kinerja seluruh SKPD bersifat spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achivable*), berorientansi hasil (*Result Oriented*), yang dapat dicapai dalam periode atau satuan waktu tertentu (*time-bond*) atau *SMART*.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD yang ditetapkan telah memuat penjabaran kinerja (*cascade down*) hingga level pelaksana.
3. Efektifitas program dan kegiatan melalui refocusing program kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah berorientasi pada *outcome* bukan sebatas *output*. Terdapat efektifitas program sebesar 30,95% dan kegiatan sebesar 21,78%. Perbandingan jumlah program dan kegiatan antara APBD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut :

APBD TAHUN 2021	RKPD TAHUN 2022
Program 128	Program 128
Kegiatan 551	Kegiatan 431
Sub Kegiatan 1.385	Sub Kegiatan 1.222

Sumber: Bappeda Kabupaten Tanah Laut

4. Inspektorat Kabupaten melakukan reuiu dan evaluasi SAKIP terhadap 40 SKPD dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

JUMLAH SKPD	KATAGORI	PERSENTASE	INTERPRESTASI
9	A	22,5	Memuaskan
17	BB	42,5	Sangat Baik
10	B	25	Baik
3	CC	7,5	Cukup
1	C	2,5	Kurang

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2021 terdapat 9 SKPD atau sebesar 22,5% dengan nilai SAKIP kategori A (memuaskan), 17 SKPD dengan nilai SAKIP BB (Sangat Baik), 10 SKPD dengan nilai SAKIP B (Baik), 3 SKPD dengan nilai SAKIP CC (Cukup) dan 1 SKPD dengan nilai SAKIP C (kurang). Berikut table data hasil evaluasi SAKIP seluruh SKPD Tahun 2021 masing-masing komponen.

Tabel 3.3.4
Rekapitulasi Nilasi SAKIP SKPD per komponen Tahun 2021 hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten

NO	ENTITAS AKUNTABILITAS (SKPD)	IRBAN PENGAMPU	NILAI KOMPONEN					Total Nilai	KATEGORI
			Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Internal (10%)	Pencapaian Kinerja (20%)		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	28,18	21,88	13,3	8,18	17,38	88,91	A
2	Inspektorat Kabupaten	3	26,62	21,57	13,37	8,14	17,85	87,55	A
3	Sekretariat Daerah	4	28,80	21,88	13,21	6,92	16,00	86,81	A
4	Badan Pendapatan Daerah	4	25,80	21,25	12,14	6,92	17,00	83,11	A
5	Dinas Kesehatan	2	29,75	23,13	10,52	5,89	12,28	81,57	A
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4	28,35	21,88	10,49	5,99	14,00	80,70	A
7	Dinas Pariwisata	2	25,6	20,94	12,58	8,42	13,09	80,62	A
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	26,23	17,19	13,21	6,78	17,00	80,41	A
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	26,3	19,38	12,23	7,13	15,32	80,16	A
10	Sekretariat DPRD	2	26,93	19,38	10,61	6,55	14,44	77,89	BB
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	25,23	20,00	10,61	7,14	14,88	77,85	BB
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	28,05	21,38	8,43	5,99	13,00	76,84	BB
13	Kecamatan Bajuin	1	28,95	22,19	10,88	3,04	11,75	76,80	BB
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	25,48	18,13	10,61	6,92	15,39	76,53	BB
15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	26,60	16,25	12,31	6,55	14,45	76,16	BB
16	Kecamatan Takisung	4	27,43	18,75	9,35	5,99	14,00	75,51	BB
17	Kecamatan Kurau	1	26,23	14,38	12,21	5,15	17,63	75,49	BB
18	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	25,23	18,13	10,61	6,55	14,64	75,16	BB
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	25,18	19,69	10,42	5,90	13,88	75,06	BB
20	Kecamatan Jorong	1	23,89	21,25	10,52	4,77	14,38	74,78	BB



21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	23,82	13,75	11,68	6,98	17,13	73,35	BB
22	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	24,16	19,06	10,61	6,92	11,31	72,07	BB
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	25,73	15,63	10,03	6,55	14,00	71,93	BB
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	26,48	15	10,69	6,55	15	71,72	BB
25	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	27,55	20,31	10,79	5,85	7,08	71,58	BB
26	Dinas Perhubungan	1	28,65	20,94	9,45	2,61	8,64	70,29	BB
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	26,32	18,44	9,61	4,64	10,32	69,33	B
28	Kecamatan Bumi Makmur	3	24,90	20,31	9,80	5,69	8,46	69,16	B
29	Kecamatan Bati-Bati	4	23,63	15,31	9,77	6,92	12,00	67,63	B
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	24,15	18,19	10,61	4,89	14,40	67,23	B
31	Kecamatan Batu Ampar	3	24,54	15	9,62	5,26	11,96	66,38	B
32	Dinas Sosial	4	23,80	16,25	8,68	6,34	11,00	66,07	B
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	3	24,19	14,38	9,26	5,52	10,04	63,39	B
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	19,32	18,44	10,22	0,67	14,63	63,31	B
35	Kecamatan Pelaihari	3	20,87	13,75	9,97	5,11	12,88	62,56	B
36	Kecamatan Tambang Ulang	4	19,00	14,69	9,77	5,78	11,00	60,23	B
37	Kecamatan Kintap	2	19,82	15,31	8,29	0,89	12,13	56,44	CC
38	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4	19,58	15,63	10,15	3,33	6,50	55,19	CC
39	Kecamatan Panyipatan	2	21,45	14,38	7,08	0,67	6,94	50,51	CC
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	15,1	15,94	4,97	0,67	5,25	41,93	C

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam peningkatan SAKIP antara lain:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan dan seluruh Aparatur dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja.
2. Sasaran kinerja SKPD belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam pemilihan program dan kegiatan sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang kurang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
3. Kualitas pengukuran kinerja SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, masih ada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja, dimana masih banyak laporan kinerja yang mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum sepenuhnya menyajikan analisis pencapaian kinerja program serta belum mampu menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
5. Evaluasi atas program belum sepenuhnya mampu menampilkan efektivitas program yang diemban oleh setiap SKPD disebabkan belum berorientasi kepada kinerja program, dan hanya pelaksanaan program atau kegiatan serta penyerapan anggaran.
6. Masih kurangnya capaian kinerja Kabupaten dan SKPD dikarenakan masih kurangnya kualitas pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja secara triwulan dan evaluasi internal seluruh SKPD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan nilai SAKIP adalah:

1. Internalisasi BerAKhlak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar bekerja lebih berorientasi kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level Kepala SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
3. Mempertajam rumusan pengukuran Indikator Kinerja Utama SKPD.
4. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran

dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil revidi ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;

5. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
6. Memastikan kegiatan yang menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten mendapatkan anggaran yang sesuai dengan posisinya, sehingga dapat mencapai target indikatornya.
7. Membangun Komitmen antara KDH/WKDH dengan seluruh Aparatur Sipil Negara Lingkup Kabupaten Tanah Laut dengan bantuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Coaching Klinik dengan KemenpanRB tentang SAKIP untuk di sarankan agar kemudian memperbaiki sistem yang telah dibangun.
8. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
9. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
10. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
11. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
12. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi

penggunaan anggaran;

Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan Desk penajaman terhadap rumusan pengukuran Indikator Kinerja Utama SKPD.
2. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan nilai beberapa indikator yang salah satunya adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperoleh.
3. Pembangunan dan pengaplikasian E SAKIP Kabupaten Tanah Laut yang telah dianggarkan di Tahun 2022.
4. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja individu dan organisasi.
5. Dilaksanakan *workshop* dalam rangka peningkatan kompetensi *evaluator* SAKIP.

b. Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi indikator Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah di tahun 2021 adalah WTP, mencapai target yang ditetapkan yaitu WTP dengan tingkat capaian 100%. Opini ini diterima Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang. Realisasi tersebut telah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu WTP.

Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan target WTP dan telah terealisasi dengan capaian WTP dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP oleh BPK RI atas LKPD tahun 2013 untuk yang pertama kali dengan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) mengungkapkan sebanyak 14 temuan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 7 temuan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 Laporan Keuangan SKPD Akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), sehingga masih berbasis Cash menuju akrual yang belum sepenuhnya berbasis Akrual.



2. Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2014 untuk yang kedua kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan mengungkapkan sebanyak 4 temuan dengan bukti surat Nomor 8B/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015
3. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas LKPD tahun 2015 untuk yang ketiga kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 9 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 temuan, dengan bukti surat Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2016 dan Nomor 07.B/LHP/XIX.BJM/05/2016 serta Nomor 07.C/LHP/XIX.BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016
4. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini dari BPK RI atas LKPD tahun 2016 untuk yang keempat kalinya dengan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 7 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 4 temuan, dengan bukti surat Nomor 12.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 dan Nomor 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.
5. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 untuk yang kelima kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 3 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor : 11.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
6. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 untuk yang keenam kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 8 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 5 temuan, bukti surat Nomor :

- 12.B/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2018 dan Nomor : 12.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
7. Sedangkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk yang ketujuh kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 10 temuan dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 6 temuan, bukti surat Nomor : 7.B/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan bukti surat Nomor : 7.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
8. Sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 untuk yang kedelapan kalinya dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 26 temuan, bukti surat Nomor : 12.A/LHP/IX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021, sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. sehingga dengan demikian tercapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Secara sederhana dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.5

Perolehan Opini BPK Kabupaten Tanah Laut

NO	TAHUN PEROLEHAN	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2014	WTP	Opini BPK
2	2015	WTP	Opini BPK
3	2016	WTP	Opini BPK
4	2017	WTP	Opini BPK
5	2018	WTP	Opini BPK
6	2019	WTP	Opini BPK

7	2020	WTP	Opini BPK
8	2021	WTP	Opini BPK

Sumber: BPKAD Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel dan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Opini WTP yang didapatkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terdapat peningkatan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan tercantum di dalam RPJMD 2018-2023 telah mencapai 100%. Untuk mencapai target tersebut tercapai dikarenakan adanya:

1. Komitmen Aparatur dan Pemangku Kepentingan
 - a. Penguatan Komitmen Bebas Temuan dan Rekomendasi Pemeriksa pada Tahun 2015 dengan penandatanganan pakta integritas
 - b. Peningkatan Intensitas Koordinasi Internal dan Eksternal
2. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Aparatur Pemda
 - b. Sistem *Reward and Punishment*
 - c. Penataan Organisasi dan Kelembagaan
3. Sistem Informasi Keuangan Daerah
 - a. SIMDA-Kuangan
 - b. SIMDA-BMD
 - c. SIMDA Pendapatan
4. Kelengkapan Regulasi Daerah
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Melalui upaya-upaya tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis bisa mempertahankan Opini WTP selama semua dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut akan menuangkan action plan mempertahankan Opini WTP dalam sebuah Peraturan Bupati Tanah Laut dan mencanangkan slogan “Sekali WTP tetap WTP atau *Forever WTP*”. *Progres Action Plan / Rencana Aksi* pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Daerah telah mensosialisasikan tentang adanya regulasi terbaru

berkaitan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada setiap pelaksanaan *coffee morning* untuk seluruh pimpinan SKPD.

2. Melakukan rapat koordinasi/penyamaan persepsi dengan Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset, Pemerintah Daerah (BPKAD) telah mengadakan pembinaan terhadap entitas akuntansi, sosialisasi regulasi, melaksanakan rekonsiliasi dan monitoring, melaksanakan FGD untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada Pemerintah Daerah.
4. Dalam menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi serta BPK dan BPKP.
5. Bupati Tanah Laut telah menetapkan revisi Kebijakan Akuntansi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pemerintah Daerah sudah menggunakan SIMDA versi 2.7.14 yang mengakomodir full basis akrual.
7. Pemerintah Daerah sudah membuat jaringan online berbasis website dengan menggunakan SIM-Cloude, sehingga SIMDA Keuangan telah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD.
8. Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian kode rekening secara bertahap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
9. Pemerintah Daerah akan memberikan penghargaan setiap tahunnya bagi SPKD terbaik, Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan

Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Para Pimpinan SKPD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
2. Kurangnya koordinasi antara PA/KPA ,PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Kurangnya tenaga Akuntansi pada setiap SKPD terutama di SKPKD.
4. Kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan aplikasi Keuangan dan Aset.
5. Pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset belum sepenuhnya memahami tentang Akuntansi Berbasis Akrua dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas.
6. Sering terjadi mutasi tenaga teknis pengelola keuangan dan aset, sehingga harus ada pembenahan ulang bagi SKPD terkait.
7. Belum terintegrasi antara Simda Keuangan dengan SIMDA BMD.

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/ kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan setiap adanya regulasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaru untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas pada pelaksanaan coffee morning.
2. Melakukan rapat-rapat koordinasi antara PA/KPA, PPK, Kasubbag Keuangan, Kasubbag Umum, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang dalam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
3. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan BKPSDM dalam pemerataan tenaga IT.
4. Melakukan Pembinaan entitas akuntansi, melaksanakan rekonsiliasi, monitoring, sosialisasi regulasi, FGD tentang pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel dan berkualitas.
5. Perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap tenaga ahli/tenaga teknis pengelola keuangan dan Aset dalam hal mutasi unit kerja.



6. Memberikan penghargaan bagi Bendahara Pengeluaran terbaik, Bendahara Penerimaan terbaik dan Pengurus Barang terbaik sesuai tupoksi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

Nilai SAKIP dan WTP merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya optimal dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan pembangunan Zona Integritas sebagai wujud keseriusan untuk menciptakan *Good Governance*.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh SKPD dan UPTD RSUD H. Boejasin Pelaihari. Hasil evaluasi terhadap 40 SKPD dan 1 UPTD tersebut dengan hasil yang dapat dikategorikan Cukup Baik.



Tabel 3.3.6
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi SKPD Tahun 2021

No	SKPD	IRBAN PENGAMPU	NILAI PEMENUHAN (14,6)	NILAI REFORM (21,7)	NILAI TOTAL (36,30)	RANKING	PERSENTASE %	KATEGORI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	13.83	21.36	35.19	1	96.94	AA
2	Inspektorat Kabupaten	3	13.46	21.25	34.71	2	95.62	AA
3	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1	14.25	20.15	34.4	3	94.77	AA
4	Sekretariat Daerah	4	13.75	19.54	33.29	4	91.71	AA
5	Badan Kesatuan bangsa dan Politik	1	13.33	19.76	33.09	5	91.16	AA
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	11.6	18.91	30.51	6	84.05	A
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A
9	Kecamatan Bumi Makmur	3	12.83	17.45	30.28	7	83.42	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4	12.26	17.93	30.19	10	83.17	A
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	11.85	17.85	29.7	11	81.82	A
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	4	12.29	17.19	29.48	12	81.21	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	11.49	17.98	29.47	13	81.18	A
14	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	2	11.37	16.87	28.24	14	77.80	BB



15	Dinas Pariwisata	2	9.74	18.42	28.16	15	77.58	BB
16	Kecamatan Takisung	4	12.31	15.49	27.8	16	76.58	BB
17	Dinas Kesehatan	2	9.97	17.47	27.44	17	75.59	BB
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia	1	10.76	16.54	27.3	18	75.21	BB
19	Dinas Sosial	4	10.77	16.44	27.21	19	74.96	BB
20	Dinas Perhubungan	1	9.82	17.36	27.18	20	74.88	BB
21	Badan Pendapatan Daerah	4	9.9	16.76	26.66	21	73.44	BB
22	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1	13.47	13.11	26.58	22	73.22	BB
23	Dinas Pendidikan	3	10.44	15.22	25.66	23	70.69	BB
24	RSUD H. BOEJASIN	2	10.12	15.09	25.21	24	69.45	B
25	Sekretariat DPRD	2	8.27	14.98	23.25	25	64.05	B
26	Kecamatan Panyipatan	2	11.12	12.1	23.22	26	63.97	B
27	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	10.46	11.69	22.15	27	61.02	B
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3	9.36	12.56	21.92	28	60.39	B
29	Kecamatan Batu Ampar	3	9	12.16	21.16	29	58.29	CC
30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	3	7.8	11.87	19.67	30	54.19	CC
31	Kecamatan Jorong	1	7.9	11.36	19.26	31	53.06	CC
32	Kecamatan Pelaihari	3	9.36	7.85	17.21	32	47.41	C



33	Kecamatan Bajuin	1	7.81	9.3	17.11	33	47.13	C
34	Kecamatan Kurau	1	8.08	8.69	16.77	34	46.20	C
35	Dinas Pemebrdayaan Masyarakat dan Desa	2	6.02	10.2	16.22	35	44.68	C
36	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	3	7.39	7.37	14.76	36	40.66	C
37	Kecamatan Tambang Ulang	4	5	9.26	14.26	37	39.28	C
38	Kecamatan Kintap	2	5.17	6.49	11.66	38	32.12	C
39	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1	3.77	4.04	7.81	39	21.52	D
40	Kecamatan Bati Bati	4	1.72	5.7	7.42	40	20.44	D
41	Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan	4	4.47	2.69	7.16	41	19.72	D

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 28 SKPD dengan nilai RB minimal Cukup Baik atau sebesar 70% dari seluruh SKPD (40 SKPD). Hal ini menggambarkan bahwa sudah 70% SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menerapkan reformasi birokrasi dengan cukup baik.

Di dalam RPJMD 2018-2023 telah ditargetkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah Laut yang merupakan indikator tujuan adalah 70 (Baik). Ini merupakan Tahun ke 4 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dilakukan evaluasi oleh KemenpanRB terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk Hasil evaluasi tahun 2021 sampai saat ini belum disampaikan oleh KemenpanRB kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Indonesia. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 adalah 56,21 dengan kategori Cukup.

Pembangunan Zona Integritas juga telah dilaksanakan dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memiliki 2 (dua) SKPD yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KEMENPANRB yaitu **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Berikut disajikan hasil evaluasi mandiri pelaksanaan Zona integritas oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3.7
Nilai hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2021

No	SKPD	Nilai
1	Disdukcapil	97,13
2	Inspektorat	89,61
3	DPMPTSP	89,61
4	Kecamatan Pelaihari	88,38
5	Sekretariat Daerah	87,45
6	BPKAD	81,85
7	Dinas Perhubungan	75,25

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tanah Laut



Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik di dukung oleh 7 Program Dengan Pagu sebesar Rp. 1,288,913,138,928.00 dan realisasi sebesar Rp. 1,087,284,075,887.00 atau sebesar 84,35%.

Tabel 3.3.8
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.582.909.316	31.461.319.323
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	252.594.595.623	237.627.654.715
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.158.957.644	7.067.304.330
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.568.962.434	2.093.437.574
5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	645.459.370	345.173.714
6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	559.052.700	439.534.900
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841	808,249,651,331
Jumlah		1,288,913,138,928.00	1,087,284,075,887.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9

Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Meningkatnya akses dan pelayanan masyarakat lainnya diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3.9
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	16	54,375	35,71	55,87	156,45%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							156,45%

Salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). DIP adalah catatan yang berisi keterangan sistematis tentang informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik.

Realisasi indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 adalah 55,87, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 35,71 dengan tingkat capaian 156,45%. mengalami peningkatan 1,49 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 54,375. Realisasi tersebut sudah mencapai 93,87% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 59,52.

Melalui website ppid.tanahlautkab.go.id badan publik dapat mempublikasikan informasi yang dikuasai yang selanjutnya tersusun sebagai DIP secara otomatis. Proses publikasi dokumen dan Informasi yang dapat dipertanggung jawabkan pada website ppid.tanahlautkab.go.id sebelumnya hanya dilakukan oleh PPID Utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Selanjutnya untuk meningkatkan progress publikasi dokumen dan informasi, maka dilaksanakanlah langkah langkah berupa :

1. Sosialisasi PPID ke seluruh SKPD dan Kecamatan dengan membuat akun PPID Pembantu, sehingga masing masing SKPD dan Kecamatan melalui PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris SKPD dan Kecamatan dapat mempublikasikan dokumen dan Informasi langsung ke website PPID.

2. Membuat surat edaran Bupati Tanah Laut tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Nomor : 555/141/III/Diskominfo tanggal 02 Maret 2020.
3. PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progress PPID Pembantu dalam mempublikasikan dokumen dan Informasi tersebut. Hingga Desember 2021 perkembangan publikasi Informasi dan Dokumentasi di *website* ppid.tanahlautkab.go.id telah mencapai 2537 buah, ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 yang berjumlah 1625 buah. Dari data statistik di website tersebut juga menunjukkan jumlah peminat informasi cukup tinggi dengan kunjungan mencapai jumlah 36.522.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu se Kabupaten Tanah Laut dengan agenda evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.
5. Selain melakukan monitoring dan evaluasi melalui website PPID, PPID Utama juga membentuk grup whatsapp yang beranggotakan seluruh PPID Pembantu sebagai media komunikasi dan diskusi terkait kegiatan PPID di Kabupaten Tanah Laut.
6. Melakukan pembelajaran pengelolaan PPID ke Pemerintah Kota Surabaya diikuti oleh PPID Utama dan PPID Pembantu dipimpin oleh Sekretaris daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengarah pelaksanaan PPID di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan terpublikasikannya dokumen dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh badan publik melalui *website* ppid.tanahlautkab.go.id, maka setiap orang dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mengakses alamat website tersebut, sehingga keterbukaan informasi publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.

Selain itu juga dilakukan forum konsultasi publik melalui siaran radio pada program dialog interaktif Tanah Laut Menyapa dengan menghadirkan narasumber dari SKPD di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan program dan kegiatan pada masing masing SKPD sesuai jadwal yang telah ditentukan pukul 09.00 sampai 10.00 Wita setiap hari Rabu dan Kamis.



Selain itu juga dilakukan penyebarluasan informasi melalui media sosial Facebook LPPL Radio Tuntung Pandang, instagram @radiotuntungpandang dan Youtube LPPL Radio Tuntung Pandang mengenai kegiatan Kepala Daerah dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menunjang keterbukaan informasi publik di masyarakat, dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat di desa, yang bertugas sebagai corong informasi untuk mempromosikan dan mempublikasikan potensi dan prestasi desa termasuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan di desa tersebut. Sampai dengan akhir Desember 2021, KIM yang terbentuk sebanyak 17 buah dari angka semula 12 buah, ini menunjukkan peningkatan jumlah sebanyak 5 buah KIM. Selain dilakukan pembinaan terhadap KIM, juga dilakukan sosialisasi pelaksanaan KIM dengan memberikan pelatihan pembuatan konten publikasi menggunakan twibbon, dan pemberian informasi mengenai pengelolaan KIM oleh narasumber dari Sekretaris Jendral KIM Nusantara bapak Bobbin Nila Prasanta Yudha dari Surabaya serta penggunaan Dana Desa untuk operasional KIM oleh narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Laut. Untuk menunjang capaian publikasi yang lebih luas, maka publikasi informasi dari seluruh KIM dilakukan pada website resmi KIM Tanah Laut dengan alamat *website* kim.diskominfo.tanahlautkab.go.id.

Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial *fanpage* Media Center Kabupaten Tanah Laut, media cetak berupa majalah interaksi, siaran Info Tanah Laut, portal berita daerah dan newsvideo di alamat *website* resmi pemerintah kabupaten tanah laut www.tanahlautkab.go.id.

Indeks keterbukaan informasi publik dihitung dengan menggunakan indikator jenis dokumen yang dipublikasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Ada sebanyak 10 jenis dokumen yang terdiri dari 22 rincian dokumen yang wajib dipublikasikan oleh setiap SKPD. Dari jumlah informasi dan dokumentasi seluruh SKPD yang wajib tersedia dibagi jumlah SKPD maka diperoleh capaian penilaian Keterbukaan Informasi publik Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 yaitu sebesar 55,87. Ini menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 35,71. Namun jika dianalisis per SKPD, Sebagian besar SKPD telah mempublikasikan

seluruh jenis dokumen yang wajib dipublikasikan, hanya ada beberapa SKPD yang belum mempublikasikan dokumennya.

Website PPID (<http://ppid.tanahlautkab.go.id/>) dimana data yang tersedia di dalam website adalah data langsung bersumber dari masing-masing PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan akurasi. Namun dalam pengelolaannya juga terdapat kendala yakni belum semua SKPD memahami akan pentingnya melakukan update data/informasi pada website PPID ini dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik. Untuk ke depannya akan diambil langkah monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Kepala Daerah. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembaharuan tampilan dan menu pada website PPID Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.3.1
Tampilan awal website PPID Kabupaten Tanah Laut



Untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut melakukan upaya untuk menghimbau setiap SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada website PPID diantaranya dengan:

Melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD tentang teknis pelaksanaan publikasi pada website PPID dan Daftar Informasi Publik yang wajib dipublikasikan.

1. Membuat surat edaran Bupati Tanah Laut kepada seluruh SKPD agar aktif mempublikasikan dokumen dan Informasi pada *website* PPID sebagai dukungan



- terhadap upaya Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tanah Laut.
2. Menyampaikan rekapitulasi publikasi pada *website* PPID setiap triwulan sebagai bahan evaluasi bagi SKPD.
 3. Mengadakan rapat koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
 4. Mengadakan pelatihan pengisian informasi dan dokumentasi pada *website* PPID Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.3.10
Rekapitulasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	NAMA SKPD	% INDEKS KIP		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
	KABUPATEN TANAH LAUT	16	54,375	55,87
1	RSUD. KH. MANSYUR KINTAP	-	-	44,44
2	RSUD. H. BOEJASIN	-	-	50
3	SEKRETARIAT DAERAH	10	58,3	50
4	SEKRETARIAT DPRD	20	16,7	14,28
5	INSPEKTORAT	20	66,7	72,22
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10	91,7	66,66
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30	8,3	33,33
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40	100	71,42
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10	58,3	94,44
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10	91,7	66,66
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	66,7	88,88
12	SATPOL PP DAN DAMKAR	10	75	52,38
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10	66,7	94,44
14	DINAS KESEHATAN	30	50	44,44
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	30	91,7	55,55
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	40	100	77,77
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN	20	58,3	27,77
18	DINAS PARIWISATA	10	75	94,44



19	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	10	83,3	61,11
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	10	75	61,11
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10	66,7	55,55
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	83,3	77,77
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	8,3	0
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	30	41,7	72,22
25	DINAS PERHUBUNGAN	10	25,0	90,47
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10	75	44,44
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10	91,7	61,11
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	10	58,3	72,22
29	DINAS SOSIAL	20	50	88,88
30	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	10	75	100
31	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	10	100	72,22
32	KECAMATAN BAJUIN	10	33,3	61,9
33	KECAMATAN BATI BATI	10	0	0
34	KECAMATAN KINTAP	10	8,3	0
35	KECAMATAN KURAU	10	41,7	42,85
36	KECAMATAN PELAIHARI	10	25	38,09
37	KECAMATAN TAKISUNG	10	8,3	14,28
38	KECAMATAN BATU AMPAR	10	0	66,66
39	KECAMATAN BUMI MAKMUR	10	0	38,09
40	KECAMATAN JORONG	10	50	4,76
41	KECAMATAN PANYIPATAN	10	100	66,66
42	KECAMATAN TAMBANG ULANG	10	0	57,14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut

Dalam mencapai sasaran meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik di dukung oleh 12 Program dengan pagu Rp. 72,044,204,609.00 dan realisasi Rp. 47,747,110,785.00 atau sebesar 66,27%.

Tabel 3.3.11
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.582.909.316	31.461.319.323
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.402.081.574	1.572.259.579
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.314.359.721	13.050.606.454
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	63.577.700	44.281.750
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	102.926.376	60.775.134
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472	190.815.492
7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825.549.762	325.449.862
8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	347.461.130	298.103.750
9	Program Penatagunaan Tanah	608.301.116	399.626.384
10	Program Pengelolaan Arsip	206.342.082	142.201.702
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.748.584	178.306.621
12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	29.119.776	23.364.734
Jumlah		72,044,204,609.00	47,747,110,785.00

MISI IV

Mewujudkan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 1 tujuan untuk misi IV yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan suatu indikator yaitu Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama.

Tabel 3.4.1
Indikator Tujuan dan Target Tahun 2023

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Persen	100%

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama.
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	Konflik	0	3	0	0	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%



Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Realisasi indikator jumlah konflik intern dan antarumat beragama tahun 2021 adalah 100%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 konflik dengan tingkat capaian 100%. Konflik intern dan antar umat beragama di tahun 2020 terjadi 3 konflik, mengalami penurunan jumlah konflik, yang artinya terjadi peningkatan kinerja dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu 0 konflik. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 0 konflik.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mempertahankan agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama selama tahun 2021. Banyak upaya yang dilakukan selama Tahun 2021 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
2. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi
3. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
4. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.4.3
Penyelesaian Konflik di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020

No	Tahun 2020	
	Konflik	Keterangan
1	Pendirian/penggunaan Rumah Ibadah Kristen HKI warga Batak yang tidak sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.	terselesaikan
2	Pendirian Rumah Ibadah Hindu (PURA/SANGGAH) yang tidak sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah	terselesaikan
3	Postingan ujaran kebencian/intoleran di media sosial	terselesaikan

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik intern dan antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan :
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan

manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp 2.709.062.196 dan realisasi sebesar Rp 2.088.830.557 atau sebesar 77,11%.

Tabel 3.4.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Anggaran
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.824.698.096	1.566.247.096
2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	612.236.410	326.280.263
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.127.690	196.303.198
Jumlah		2.709.062.196	2.088.830.557

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11

Meningkatnya wawasan kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Jumlah konflik sosial	Konflik	0	0	0	0	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							100%

Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

Realisasi indikator jumlah konflik sosial tahun 2021 adalah 0 konflik atau tidak ada konflik yang terjadi, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0 konflik dengan tingkat capaian 100%. Konflik sosial tidak pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir di Kabupaten Tanah Laut. Realisasi tersebut sudah mencapai 100% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 0 konflik.

Di Kabupaten Tanah Laut selama beberapa tahun terakhir tidak pernah terjadi konflik sosial. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya konflik melalui sosialisasi kepada anggota masyarakat, organisasi masyarakat, sekolah-sekolah tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan beberapa pendekatan baik antar umat beragama, suku-suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh beragama dan membentuk forum-forum kegamaan yang beranggotakan bermacam tokoh agama yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang terbentuk dalam Forum



Pembauran Kebangsaan (FKP) yang keanggotaanya terdiri dari berbagai etnis dan suku yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang juga melaksanakan sosialisasi ke kecamatan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Tanah Laut

2. Membentuk Tim Pusat Pendidikan wawasan Kebangsaan dan juga selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.
3. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelegen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
5. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
6. Membentuk Perda tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.
7. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan agar tidak terjadi konflik sosial selama tahun 2021. Namun ada 2 permasalahan yang berpotensi menjadi konflik dan secepat mungkin telah ditangani

oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan laporan, terjadi ada 2 (Dua) permasalahan selama tahun 2021 yaitu; Konflik Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI, tuntutan karyawan PT. Sukses Wijaya Adi Makmur perihal beberapa kewajiban perusahaan yang belum terselesaikan. Kedua permasalahan tersebut telah dimediasi di tingkat Kabupaten, dengan kronologi sebagai berikut :

a. Permasalahan Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI

Berdasarkan surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 005/2649/DPUPRP perihal Undangan Rapat Tim Mediasi Konflik Pertanahan yang menindaklanjuti surat dari Camat Kintap nomor 300/707/trantib perihal penyampaian berkas sengketa Andi Cs/PANI dengan PT. SMART/PT. Al site Kintap.

Tuntutan masyarakat melalui PANI tentang penyimpangan perizinan HGU PT. SMART Kintap seluas 144 ha dan 7 Ha yang masuk konsesi PT. Arutmin Indonesia. Dan juga meminta pertanggung jawaban atas lahan 7 Ha yang melakukan pertambangan karena bertentangan dengan izin HGU yang berupa perkebunan kelapa sawit.

Langkah yang ditempuh dengan melaksanakan mediasi tingkat kecamatan dan berlanjut ke tingkat Kabupaten. Hasil mediasi awal di tingkat Kecamatan adalah melakukan pengukuran lahan yang dimaksud. Kemudian hasil mediasi di tingkat Kabupaten adalah memanggil kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan masing-masing pihak. Hasil akhir adalah kedua belah pihak belum ada kesepakatan bersama dikarenakan salah satu pihak masih belum menerima kesepakatan yang diminta.

b. Tuntutan Karyawan PT. Sukses Adi Wijaya Makmur

Berdasarkan surat masuk dari Bupati Tanah Laut nomor 560/800/DTKP/HIJSTK-HI/2021 tentang audiensi ke-2 PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan Serikat Buruh Nasional Indonesia.

Beberapa tuntutan karyawan yaitu pembayaran gaji sesuai UMP, pembayaran upah lembur kepada karyawan, mengikustertakan karyawan dalam keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran THR yang tidak sesuai aturan, dan pemberian cuti tahunan.

Langkah penyelesaian yang dilakukan dengan melaksanakan rapat mediasi pada hari Rabu Tanggal 17 Nopember 2021 di Ruang Barakat Kantor Bupati Tanah Laut, Hasil yang diperoleh antara lain :

1. melaporkan tuntutan ke pengawas ketenagakerjaan;
2. melaksanakan mediasi melalui mekanisme bipartite dan tripartite;
3. melaporkan ke aparaturnya penegak hukum.

dari *owner* PT. SWA meminta harus ada saling pengertian antara PT. SWA dan karyawan, harus ada perwakilan dari PT. SWA yang ada di Bati-Bati untuk audit perusahaan. Adapun kesepakatan dari hasil mediasi adalah bahwa Pihak Perusahaan dan Pihak Karyawan telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di internal perusahaan saja.

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan untuk mengendalikan agar tetap tidak terjadi konflik sosial adalah dengan melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan manunggal tuntung pandang (kegiatan bermalam di desa oleh Bupati, wakil bupati beserta ASN) yang dilaksanakan setiap bulan dengan memasuki semua terkait materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya wawasan kebangsaan di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp. 11.433.477.531 dan realisasi sebesar Rp 8.393.825.372 atau sebesar 73,41%.

Tabel 3.4.6
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	380.051.090	283.325.630
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	689.271.976	513.473.416
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.364.154.465	7.597.026.326
	Jumlah	11.433.477.531	8.393.825.372



MISI V

Membangun sinegritas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan 5 tujuan untuk misi V yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial
2. Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
3. Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Peningkatan upaya membina desa dan menata kota

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 5 indikator yaitu angka kemiskinan, indeks Pembangunan Infrastruktur, persentase pertumbuhan sektor unggulan daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, indeks desa membangun.

Tabel 3.5.1
Tujuan dan indikator tujuan misi V

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Persen	4.35
2	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	73,00
3	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persen	5.06
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Nilai	61,712
5	Peningkatan upaya membina desa dan menata kota	Indeks Desa Membangun (skor rata-rata)	Nilai	0,720 (Maju)

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah

3. Menurunnya tingkat pengangguran
4. Meningkatnya perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas
6. Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah
7. Meningkatnya ketahanan pangan
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
9. Meningkatnya pembinaan desa
10. Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi diukur melalui 3 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,72	-1,95	3,50	3,47	99,14%
2	Indeks Gini	Skor	0,271	0,250	0,255	0,232	109,02%
3	PDRB Per kapita atas dasar harga konstan	Rp Juta	30,40	29,24	11,6	29,68	255,86%
							154,67%

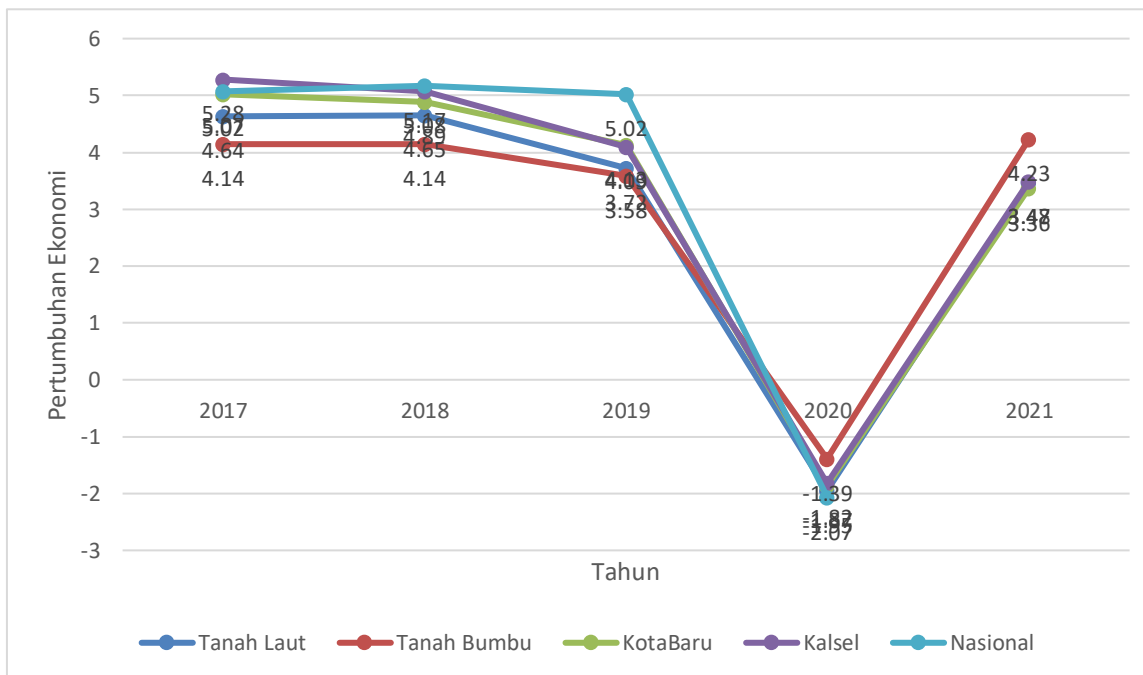
a. Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi indikator pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah 3,47. Realisasi tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3,50% dengan angka capaian 99,14%. Reallisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,45% dibandingkan tahun 2020 yaitu -1,99. Realisasi tersebut telah mencapai 69,30% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 5,05%.

Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2021.

Grafik 3.5.1

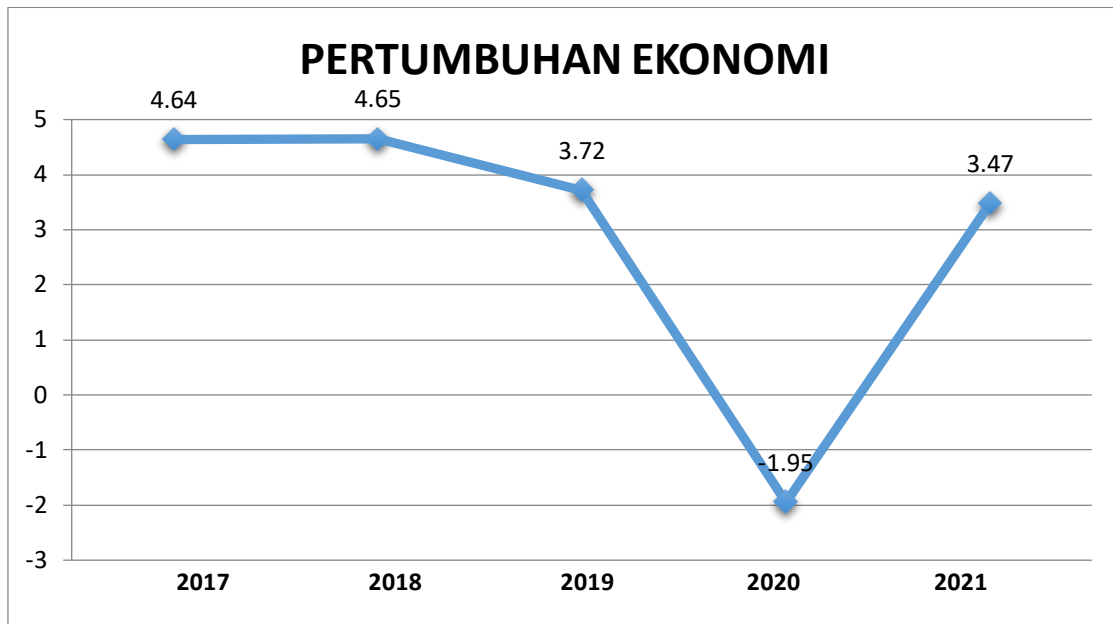
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Di atas disajikan laju pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada dibawah Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru dan Provinsi Kalimantan Selatan namun di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu -2,07%.

Grafik 3.5.2
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tanah Laut 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil membangkitkan perekonomian daerah dengan signifikan. Hal ini terbukti dengan angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 berada di angka 3,47 dengan perbandingan pada tahun 2020 di angka -1,95.

Banyak Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0 % untuk Pertanian, Nelayan, Perikanan, UMKM dan lain-lain Sebesar Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

Program ini dijalankan melalui penunjukan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai pengelola investasi (Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha, dengan Penunjukan Pelaksanaan Pengelolaannya Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanah Laut). Pencapaian program tersebut yaitu :

- a. Dilaunchingnya “GAPURA KAROMAH” (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) pada tahun 2019 dan disalurkan ke kredit 6 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 4 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar.
- b. Tahun 2020 yang disalurkan ke kredit 4 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 6 Milyar dengan jumlah investasi 10 Milyar
- c. Tahun 2021 yang disalurkan ke kredit 2 Milyar dan yang dikelola oleh BPR 3 Milyar dengan jumlah investasi 5 Milyar

Sehingga total yang disalurkan ke kredit berjumlah 12 Milyar dan total yang dikelola oleh BPR berjumlah 13 Milyar dari total seluruh investasi berjumlah 25 Milyar.

Penyaluran Gapura Karomah :

- a. Sektor Pertanian total realisasi 814 orang dengan nominal Rp.6.650.000.000 (55,42%)
- b. Sektor Perdagangan total realisasi 343 orang dengan nominal Rp.2.098.000.000 (17,48%)
- c. Sektor Peternakan total realisasi 263 orang dengan nominal Rp.3.025.000.000 (25,21%)
- d. Sektor Perikanan total realisasi 30 orang dengan nominal Rp.189.000.000 (1,58%)
- e. Sektor Industri total realisasi 4 orang dengan nominal Rp.38.000.000 (0,32%)

Posisi Akhir November 2021 Dana Kelolaan Gapura Karomah dengan total penyaluran kredit kepada 1454 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

- a. Investasi Tahap 1 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan 5.626.996.300 dan sisa dana Rp.4.373.003.700 dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah Rp.373.003.700 dan yang dikelola BPR Rp.4.000.000.000
- b. Investasi Tahap 2 Dana Masuk 10 Milyar dikembalikan Rp.0 dan sisa dana 10 Milyar dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah Rp.4.000.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.6.000.000.000
- c. Investasi Tahap 3 Dana Masuk 5 Milyar dikembalikan Rp.0 dan sisa dana 5 Milyar dengan alokasi dana kredit gapura karomah berjumlah



Rp.2.000.000.000 dan yang dikelola BPR Rp.3.000.000.000

2. Memperkuat permodalan kepada pelaku UMKM dengan memaksimalkan program Nasional yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi).
Capaian serapan KUR ditahun 2021 adalah sebesar Rp. 406.280.782.329,- (empat ratus enam milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) jumlah ini meningkat sebesar Rp. 115.259.812.229 dari tahun 2020 yaitu Rp 293.020.970.100,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), atau meningkat sebesar 39,33%.
Tahapan-tahapan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan upload data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) potensial untuk dapat dibiayai KUR kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan penanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
 - b. Mengidentifikasi data calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang di upload oleh penyalur KUR dan Perusahaan Penjamin, sesuai wilayah masing-masing kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
 - c. Melakukan pendampingan/monitoring dan evaluasi atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit.
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) minimal 1 kali dalam sebulan melalui yang terkoordinasi maupun yang dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - e. Membuat Iklan KUR
 - f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Kebijakan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha BUMD;
4. Kebijakan dalam rangkaantisipasi kenaikan harga Gas LPG 3 Kg bersubsidi selama pandemi covid 19;
5. Pembangunan jalan usaha Tani dan jalan produksi sebagai upaya untuk distribusi produk-produk pertanian dan perkebunan;

6. Pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan objek wisata;
7. Penggunaan Market Place Tanah Laut “SOSIALITA” (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut untuk memberdayakan UKM dan UMKM yang ada di Tanah Laut.
8. Program Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%.

Peningkatan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk perwujudan visi misi Kabupaten Tanah Laut pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu “Desa Dibina Kota Ditata” dengan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :

- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut
- b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018
- c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
- d. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi :

- a. Proses penganggaran harus melalui pembahasan di DPRD dan menjadi kesepakatan bersama, namun dalam perkembangannya terkait penganggaran ADD berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana perimbangan kurangi DAK, meski Pemda sudah mengalokasikan dalam rencana penganggaran pada tahun 2022 sebesar 15% namun Banggar DPDR mengurangi dan disamakan alokasinya dengan tahun 2021. Ini artinya penganggaran 15% untuk ADD tersebut diatas sangat bergantung dari kesepakatan bersama dengan DPRD.
- b. Terkait penyaluran ADD kepada Pemdes sangat tergantung dari kemampuan Pemerintah Desa dlm kelengkapan administrasinya dan kecepatan penyerapan ADD yg sdh disalurkan. Masih sangat Perlu ditingkatkan lagi koordinasi yang intensif terkait penganggaran dan

penyaluran ADD BPKAD selaku BUD Bapenda DPMD, Kecamatan dan Pemdes sendiri.

- c. Mencermati menurunnya alokasi dana transfer tahun 2022 dalam pembahasan DPRD dikarenakan menurunnya kemampuan keuangan daerah.

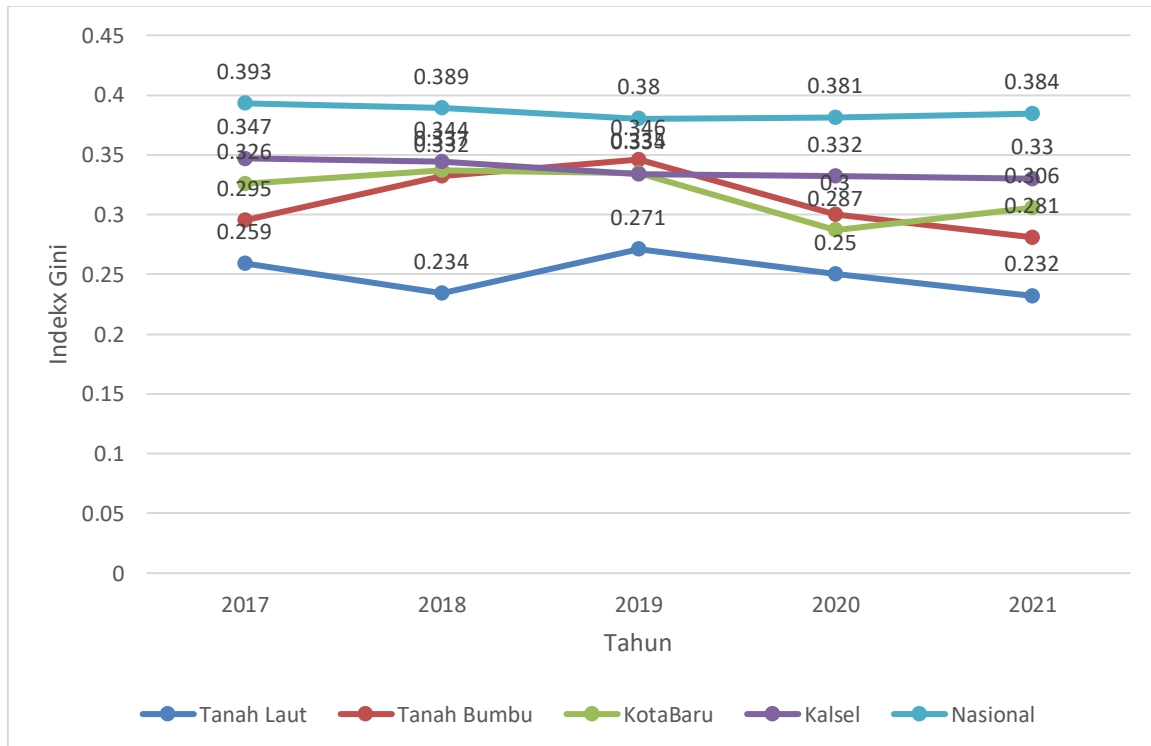
Rencana aksi ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah akan komitmen menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi minimal 10% dari proyeksi pendapatan daerah
2. Pemerintah Daerah akan komitmen menganggarkan Dana Bantuan keuangan berupa ADD yang bersumber dari Dana Perimbangan dikurangi DAK sebesar 15%.
3. Meningkatkan nilai tambah sector industry, perdagangan dan UMKM.
4. Meningkatkan ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan tetap melaksanakan Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun.
6. Meningkatkan sector pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Pemerataan infrastruktur yang sudah tercantum dalam RDTR dan RT RW.
8. Meningkatkan kualitas layanan digital dan membuat kajian tentang supaya tidak ada lagi *blank spot* di Kabupaten Tanah Laut.
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
10. Meningkatkan ketahanan bencana dan lingkungan hidup.
11. Penyusunan Master Plan pariwisata dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata.

b. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 0,232 mengalami penurunan sebesar 0,18 *point* dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,250. Berikut perbandingan indeks Gini Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2021.

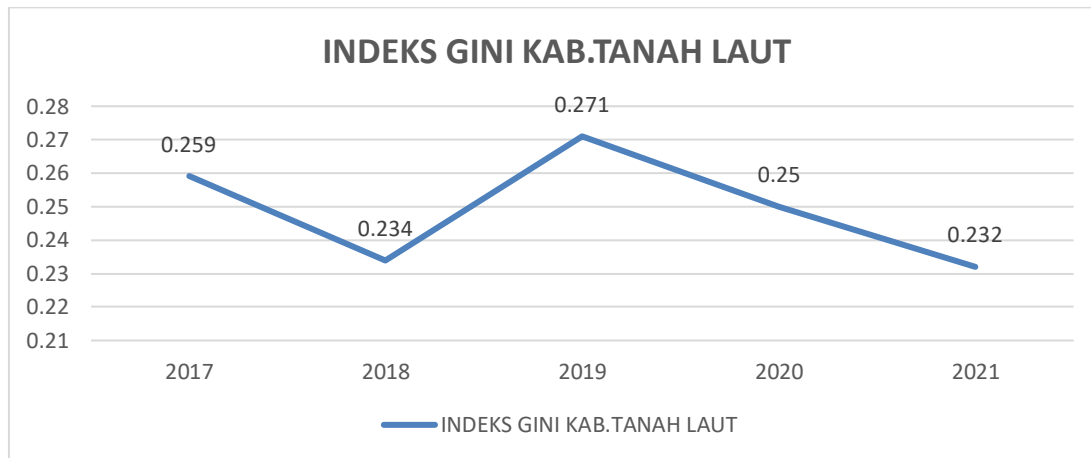
Grafik 3.5.3
Indeks Gini Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa untuk indeks gini tahun 2021 adalah 0,232 mengalami penurunan sebesar 0,018 atau peningkatan kinerja dari tahun 2020 yaitu 0,250, berbeda 0,152 dengan nasional. Sedangkan indeks gini nasional pada tahun 2021 untuk data per semester I (Maret 2021) adalah 0,384. Ini menggambarkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Tanah Laut relative tinggi atau merata.

Grafik 3.5.4
Indeks Gini Kab. Tanah Laut 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Selama periode 2019-2021 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2020 gini ratio tercatat sebesar 0,250 atau mengalami peningkatan sebesar 0,020 dibanding tahun 2019. Sementara pada tahun 2021 gini ratio tercatat sebesar 0,232 atau mengalami penurunan sebesar 0,018 dibanding tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 semakin kecil yang berarti pengeluaran penduduk semakin merata.

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah Gini Ratio. Gini Ratio didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi Uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Walaupun demikian, menurut *Michael Todaro* seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

- Gini Ratio terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.
- Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan kesenjangan sedang.

- c. Sementara apabila terletak diantara 0,20 – 0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata).

Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan 0 (nol) dan 1 (satu). Pada tahun 2021 Gini Ratio Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan, di mana pada tahun 2021 tercatat sebesar 2.32 atau mengalami penurunan sebesar 0,18 poin dibandingkan kondisi tahun 2020 yang sebesar 0,250. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 semakin kecil yang berarti pemerataan relatif tinggi atau dapat dikatakan pengeluaran penduduk semakin merata.

Disamping Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Berdasarkan tabel terlihat bahwa selama periode 2018-2020 Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2019 persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah adalah sebesar 23,61 atau turun 1,96 persen dibanding tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sempat terjadi kenikan ketimpangan. Sementara pada tahun 2020 persentasenya sebesar 24,77 atau naik 1,16 persen dibanding tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi perbaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Laut.

Upaya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mengurangi ketimpangan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan angka stunting tahun 2021 menjadi 6,4% mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 15,5%.
2. Pelaksanaan program UHC (*Universal Health Coverage*) bagi seluruh masyarakat Tanah Laut dengan program JKN KIS melalui APBD bagi masyarakat yang belum

tercover oleh APBN, maupun JKN KIS mandiri. Dengan total jumlah penduduk yang belum terdaftar adalah 5.671 jiwa atau sebesar 1,% dari seluruh jumlah penduduk yaitu 348.226 jiwa.

3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yaitu dengan pembangunan jalan dan jembatan, box culvert dengan data lengkap sebagaimana tersaji pada indikator indeks pembangunan infrastruktur.
 - a) Berusaha menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat termasuk PMKS. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 3.5.3

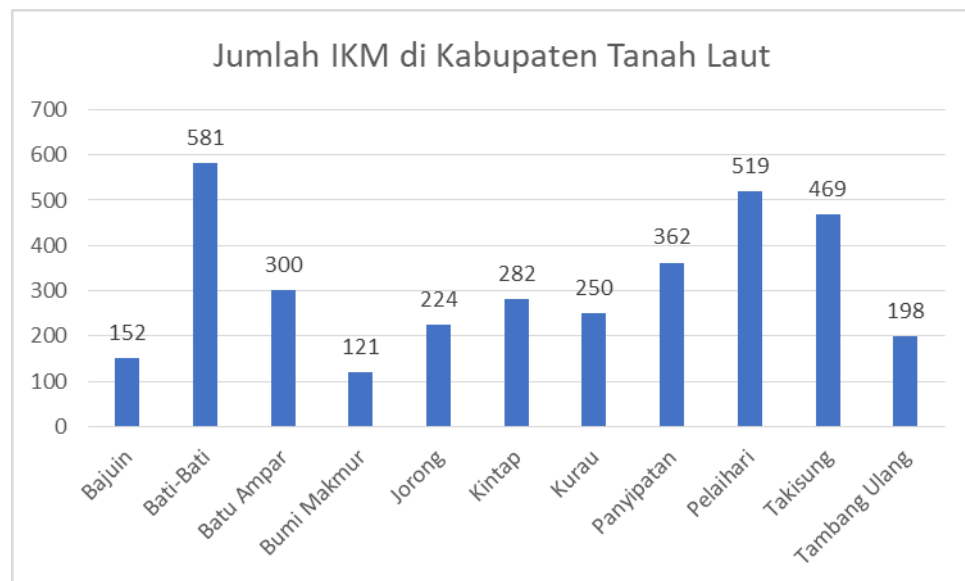
Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1	KUBE	Keluarga fakis miskin	70	APBN	
	KUBE	Keluarga fakis miskin	20		APBD I
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga fakis miskin	5.135 KPM	APBN	
3	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga fakis miskin	34.965 KPM	APBN	
4	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	123.074 Jiwa	APBD	
	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	83.096 Jiwa	APBN	
5	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Keluarga fakir miskin	66.180 KPM	APBN	
6	Bantuan Langsung Tunai APBD	Lansia dan Disabilitas	4.731 KPM	APBD	
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar	Lanjut usia terlantar	2.754 Jiwa	APBD	
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	368 Jiwa	APBD	
	Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	25 Orang	APBD	
	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	20 Orang	APBD	

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut

4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi sebanyak 999 orang selama tahun 2021.
5. Pembinaan IKM oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menjadi IKM yang tumbuh dan berkembang di tahun 2021 dengan total IKM adalah sebanyak 3.458 IKM.

Grafik 3.5.5
Jumlah IKM Tahun 2021 di Kab. Tanah Laut



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

6. Tumbuhnya pasar-pasar dan toko online yang menjangkau sampai dengan pelosok daerah seperti Pasar Pelaihari Online, Ojek Online, Pasar Takisung Online.
7. Pengalokasian ADD sebesar Rp. 115.040.966.190 terealisasi sebesar Rp. 115.040.966.190 atau sebesar 100%.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan dalam rangka penurunan Gini Ratio adalah:

- a. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penurunan stunting yg merupakan rencana aksi daerah dalam pencegahan

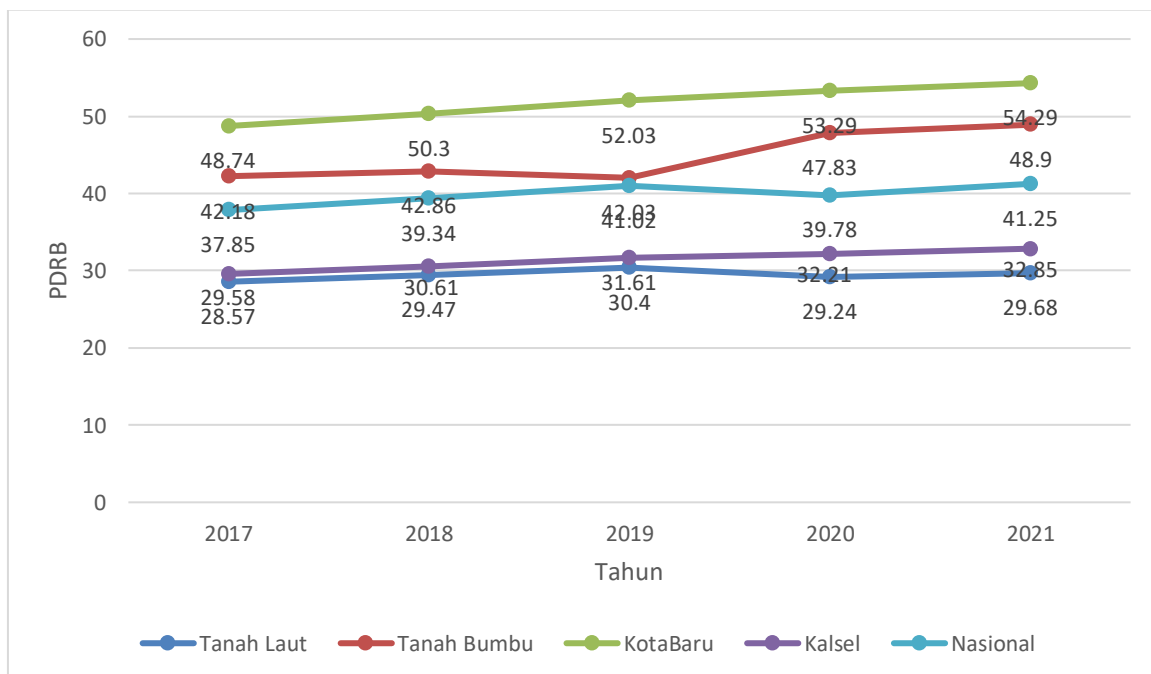
stunting dan penurunan prevelansi stunting.

- b. Pelaksanaan penanggulangan stunting dengan memfokuskan pada 20 Lokus Desa Stunting pada 6 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2022.
- c. Pembinaan terhadap industri industri kecil dan mikro;
- d. Mendorong pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi beberapa wilayah kecamatan yang belum memiliki akses internet yang baik, contohnya Kecamatan Bajuin di Desa Tebing Siring.
- e. Terus melakukan pelatihan tenaga kerja siap pakai 500 orang setiap tahun yang merupakan program unggulan Bupati.
- f. Pemagangan tenaga kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
- g. Melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam hal pemagangan tenaga kerja.

c. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

Realisasi indikator PDRB Perkapita atas dasar harga konstan tahun 2021 adalah 29,678 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29,239 juta rupiah. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 11,06 juta rupiah dengan tingkat capaian 255,86%. Realisasi tersebut telah mencapai 76,06% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 39,02 Juta Rupiah. Berikut perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2021.

Grafik 3.5.6
Perbandingan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Regional
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan angka 29,68 (juta rupiah) lebih rendah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka masing-masing 54,29 dan 48,9 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 32,85 (juta rupiah), terpaut berbeda 2,9 (juta rupiah). Berikut disajikan PDRB per kapita Kabupaten Tana Laut tahun 2016- 2021.

Tabel 3.5.4
PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai PDRB/GRPD(Milyar Rupiah/Billion rupiahs)						
ADHB/ at current price	11.392,82	12.329,41	13.241,24	13.902,30	13.786,69	14.755,19
ADHK/ at 2010 Constant Price	9.127,65	9.550,76	9.995,21	10.366,65	10.164,06	10.516,40
PDRB per Kapita/Per Capita GRPD (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)						

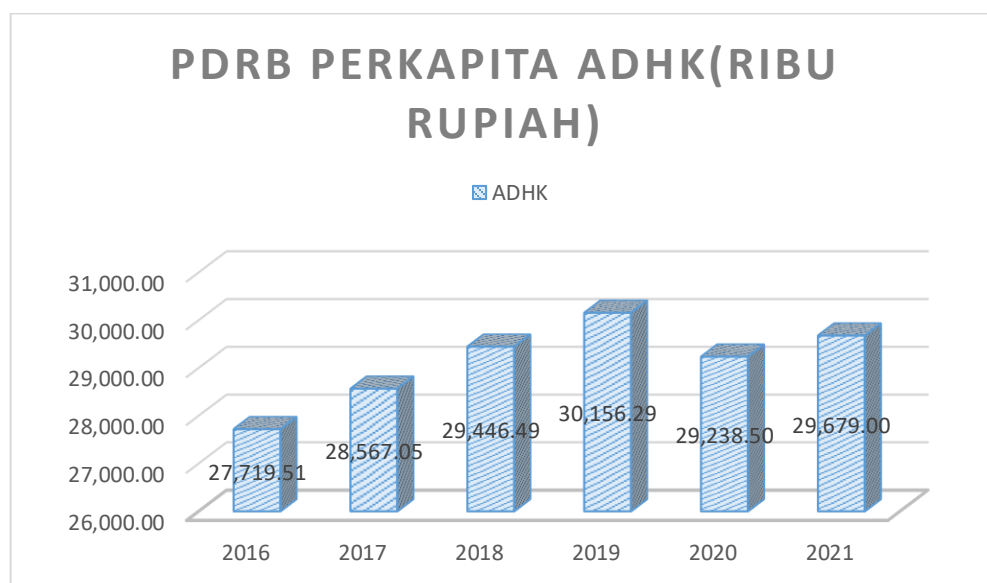
ADHB/ at current price	34.598,55	36.878,19	39.037,24	40.773,03	39.659,54	41.641,34
ADHK/ at 2010 Constant Price	27.719,51	28.567,05	29.467,46	30.403,58	29.238,50	29.678,84
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of per Capita GDRP at 2010Constant Price	1,67	3,06	3,15	3,18	-3,83	1,51
Jumlah Penduduk (orang)/ Population (people)	329.286	334.328	339.195	340.968	347.626	354.340
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)/ Population Growth (percent)	1,54	1,53	1,46	0,52	1,95	1,93

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel diatas. Selama tahun 2016-2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan Tanah Laut semakin meningkat setiap tahunnya dari 27,161 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 29,678 juta rupiah pada tahun 2021. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 30.403 juta rupiah menjadi 29,238 juta rupiah.

PDRB per kapita Tanah Laut selama tahun 2016-2021 sebagian besar mengalami pertumbuhan yang meningkat semenjak tahun 2016. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Tanah Laut dalam kurun waktu yang sama

Grafik 3.5.7
ADHK/ AT 2010 CONSTANT PRICE



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut



Peningkatan PDRB perkapita ADHK di tahun 2020 mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 yang melanda hampir diseluruh dunia dimana diberlakukannya pembatasan ekonomi berskala besar yang membatasi pergerakan masyarakat terhadap kegiatan perekonomian. Covid 19 menyebabkan banyaknya Pekerja yang di PHK mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, selain itu juga bertambahnya penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut, dimana data dari Dinas Sosial jumlah PMKS pada Tahun 2019 sebanyak 31.847 jiwa dan di Tahun 2020 menjadi 45.090 jiwa, dan meningkat lagi di Tahun 2021 menjadi 109.173 dikarenakan terjadinya bencana banjir dan masih adanya pandemic Covid 19 di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya pandemi Covid 19 serta bencana banjir yang terjadi, mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun aktifitas masyarakat pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bencana banjir mengakibatkan banyak jalan dan jembatan yang terputus serta jalan utama akses menuju Kabupaten Tanah laut juga terputus.

Adapun pemberian Bantuan Sosial yang diberikan Pemerintah baik itu Dana APBN, APBD maupun Dana Desa hanya bagi mereka yang terdampak langsung Covid 19 dan bencana banjir.

Namun meskipun jumlah PMKS meningkat dibandingkan tahun 2020, pada Tahun 2021 PDRB Perkapita ADHK mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 29,678 juta rupiah.

Dalam penanggulangan bencana banjir, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan dari BNPB Atas Kinerja Dan Sinergitas Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2021.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi di dukung oleh 14 Program dengan pagu Rp 8,501,421,890.00 dan realisasi sebesar Rp 6,224,730,143.00 atau sebesar 73,21%.

Tabel 3.5.5
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
----	---------	------	-----------



1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	161,820,820.00	63,424,750.00
2	Program Pengembangan Umkm	186,324,772.00	108,823,250.00
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,059,428.00	3,199,758,552.00
4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	125,073,750.00	104,918,750.00
5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	649,046,620.00	600,642,864.00
6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	152,462,800.00	85,255,000.00
7	Program Pengembangan Ekspor	149,695,620.00	137,078,334.00
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,503,202,350.00	1,112,641,244.00
9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179,215,100.00	8,154,500.00
10	Program Pelayanan Penanaman Modal	426,215,310.00	264,714,150.00
11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397,937,800.00	50,152,750.00
12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	117,940,820.00	93,630,450.00
13	Program Promosi Penanaman Modal		
14	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	198,129,500.00	-
Jumlah		8,501,421,890.00	6,224,730,143.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan

Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.6
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

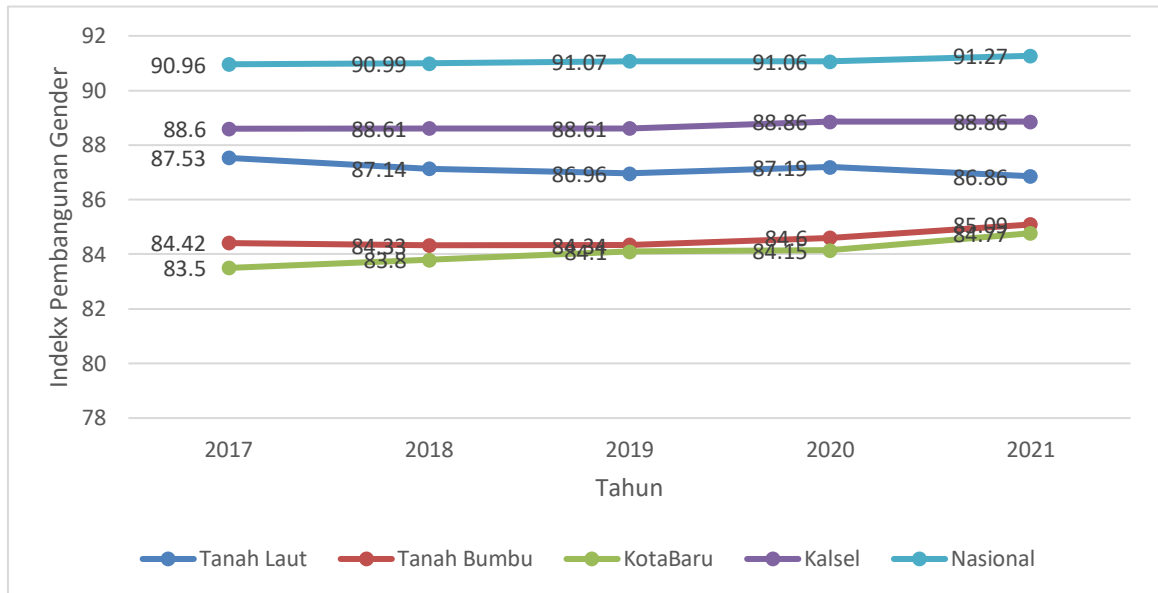
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86,96	87,19	88,75	86,86	97,87%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							97,87%

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (kesetaraan gender).

Realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2021 adalah 86,86. Belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 88,75 dengan tingkat capaian 97,87%. mengalami penurunan 1,89 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 87,19. Realisasi tersebut sudah mencapai 97,05% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 89,50. Berikut perbandingan indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut dengan kabupaten/kota lain, provinsi dan nasional tahun 2021.



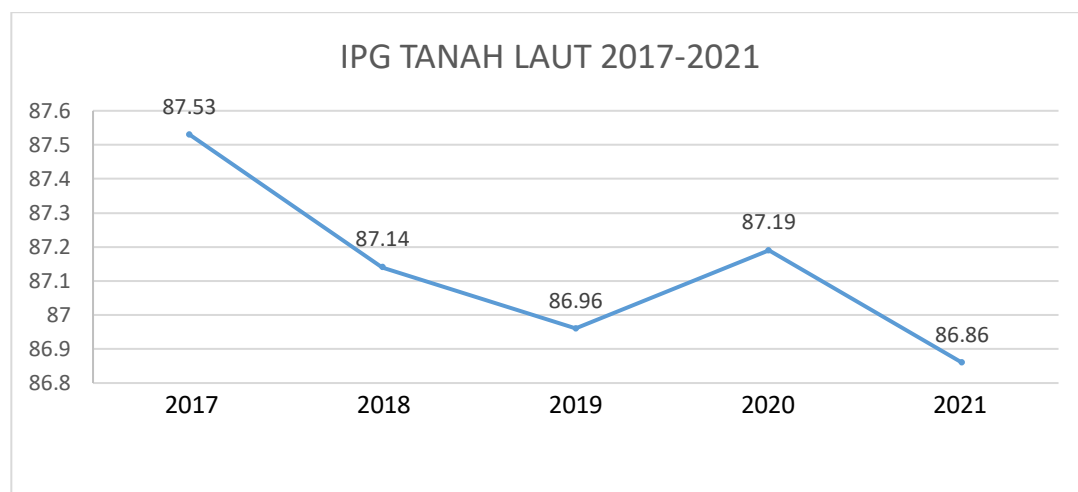
Grafik 3.5.8
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021



Sumber : BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, Indeks pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 pada skor 86,86, lebih rendah 2,00 point jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 88,86 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional dengan angka 91,27. Berikut grafik perkembangan indek pembangunan gender Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 2017-2021.

Grafik 3.5.9
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Laut 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Indikator komposit yang ada adalah Harapan Lama Sekolah, Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita. Dari sisi pendidikan perempuan Kab.Tala telah mdapat kesempatan yg sama dengan laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendiidkan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang, yang tercermin dari persentase yg menerima ijazah akhir, rasio APM, serta angka HLS, namun jika dilihat dari rata-rata Angka Lama Sekolah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Partisipasi perempuan mningkat dalam pemerintahan yang tercermin dari angka persentase jumlah ASN perempuan yang meningkat, namun dalam lembaga legislatif, keterwakilan perempuan masih rendah pada periode 2019-2023 yaitu 20% (7 perempuan dari 35 anggota dewan).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DP2KBP3A dalam penyataan gender diantaranya sebagai berikut:

1. Penyempurnaan proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan agar selalu mendapat masukan dari perspektif gender.
2. Pelaksanaan revieu dan harmonisasi seluruh peraturan daerah agar berspektif gender.
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi pemerintah daerah dalam menerapkan PUG.
4. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, duniau saha dalam penerapan PUG.
5. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender dan organisasi masyarakat.
6. Penguatan system penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilih.
7. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.



Keterangan : Foto kegiatan Pelatihan Sasirangan tanggal 01 s/d 03 September 2021 di Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur

Beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektoral dalam pengarustamaan gender (PUG).
2. Kelembagaan PUG belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai pentingnya pengintegrasian persepektif gender disemua bidang dan tahanan pembangunan.

Faktor Pendukung dalam mencapai SDGs 8 yaitu :

- Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pendidikan masyarakat dengan cara memasukkan nilai pengetahuan, teknologi dan pengalaman dalam membangun kualitas keluarga.
- Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung TPK2D terlihat dalam aktifnya masyarakat dalam mengikuti pembinaan-pembinaan.



Keterangan : Foto kegiatan Penilaian TPK2D oleh TPK2D Provinsi Kalimantan Selatan Di Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut Tahun 2021

- Mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan perempuan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Perlunya penyelarasan waktu dan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi wanita.
- Pengusulan penambahan tenaga administratif sehingga kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tercapainya realisasi sesuai dengan target.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah di dukung oleh 4 Program dengan pagu Rp 1,444,466,863.00 dan realisasi sebesar Rp 822,261,780.00 sebesar 56,92 %.

Tabel 3.5.7
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Anggaran
1	Program Perlindungan Perempuan	221,636,800.00	53,318,276.00
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	927,615,417.00	648,668,833.00
3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	34,702,436.00	32,602,636.00
4	Program Perlindungan Khusus Anak	260,512,210.00	87,672,035.00
	Jumlah	1,444,466,863.00	822,261,780.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 14

Menurunnya tingkat pengangguran

Menurunnya tingkat pengangguran diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

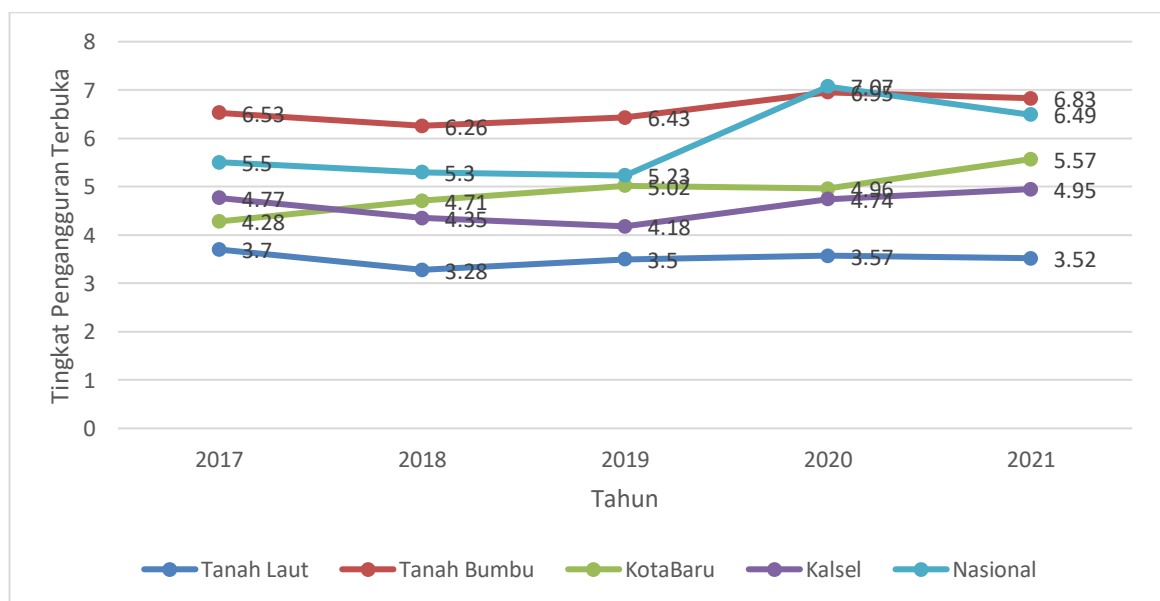
Tabel 3.5.8
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,57	4,0	3,52	112%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							112%

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 adalah 3,52%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,0% dengan tingkat capaian 112%. mengalami penurunan 0,05 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 3,57%. Indikaot TPT merupakan indikator terbalik, dimana apabila tingkat capaian semakin rendah maka kinerja semakin baik. Capaian tersebut baru mencapai 59,2% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 2,5%.

Grafik 3.5.10

Tingkat pengangguran terbuka Kab/Kota di Kalimantan Selatan dan Nasional



Sumber data BPS Kalimantan Selatan

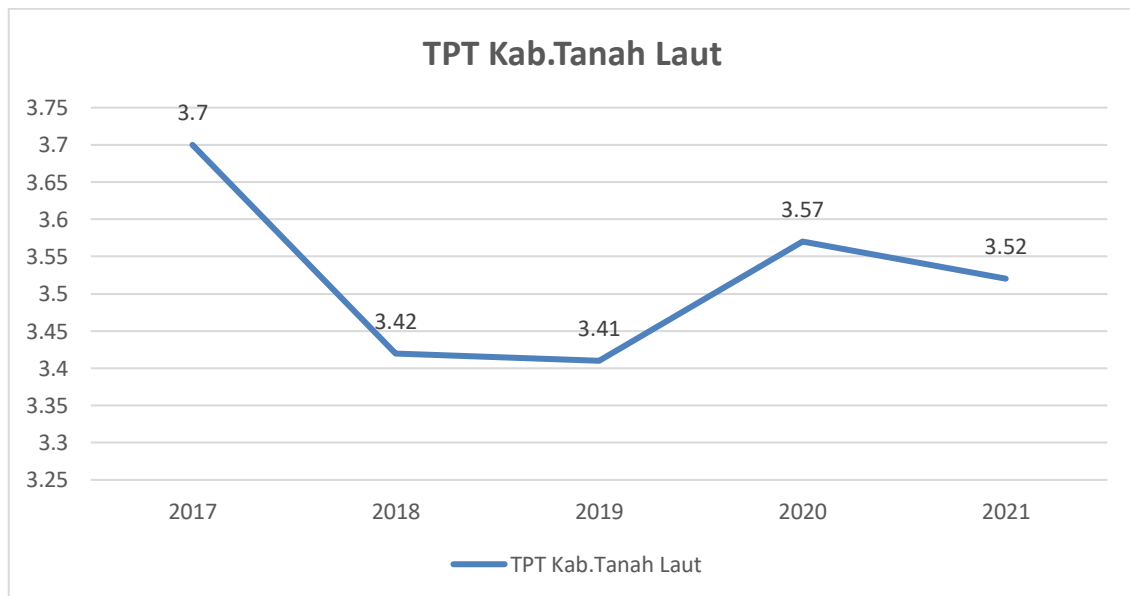
Dari grafik dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 untuk regional Kalimantan selatan, tingkat pengangguran terbuka **Kabupaten Tanah Laut lebih rendah** dibanding Kabupaten Tanah Bumbu dengan angka 6.83% dan Kabupaten Kotabaru dengan angka 5.57%.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Laut yaitu 3,52%, **lebih rendah 1,43%** jika dibandingkan **dengan Provinsi Kalimantan Selatan** dengan angka 4,95% dan **lebih rendah 2,97%** jika di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka **Indonesia** dengan angka 6,49%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mereka yang mencari pekerjaan
2. Mereka yang mempersiapkan usaha
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan
4. Mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Grafik 3.5.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut per Agustus 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Merujuk pada *Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024 pada Bab 5*, TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun 2021 sebesar 3,52 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada tahun 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,57 persen. Jika kita perhatikan capaian 3,52 persen ini dibawah angka target yang diharapkan oleh

Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu 4,0 persen. Namun di sisi lain, angka TPT kabupaten Tanah Laut masih di bawah angka TPT Provinsi Kal-Sel yaitu 4,95 persen.

TPT yang mengalami penurunan walaupun sangat tipis ini masih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, seperti gambaran faktor ekonomi dan faktor kemiskinan sebagai mana berikut ini:

- a. **Faktor Ekonomi**, Rilis Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ketenagakerjaan BPS Prov. Kal-Sel di tahun 2021, disampaikan bahwa secara umum perekonomian mulai menggeliat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi ke arah yg positif pada seluruh kategori Lapangan Usaha Ekonomi Kalsel. Hal ini memberikan sinyal yang positif bagi perkembangan ketenagakerjaan.
- b. **Faktor Kemiskinan** masih turut menahan kemampuan daya beli masyarakat, terutama ketika ada kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 maupun level 4. Masyarakat masih bisa menjalankan kegiatan perekonomian dengan menjalankan *proses yang ketat, termasuk pembatasan waktu berusaha dan mengurangi kapasitas pelayanan*. Kegiatan PPKM level 3 dan 4 ini juga di dukung oleh pengawasan atau pemantauan ketat dari Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Tanah Laut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,52% pada tahun 2021 menggambarkan masih diperlukannya peran Pemerintah Daerah untuk mengayomi masyarakat. Peluang dan tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun-tahun ke depan akan semakin kompleks dimana Kabupaten Tanah Laut akan menghadapi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu :

1. **Pasca pandemi COVID-19**. Secara global pandemi Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020 dan terasa dampaknya hingga sekarang ini diberbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor kependudukan dan lain-lain.
2. **Bonus demografi penduduk** yang dimulai pada tahun 2025 dan akan mengalami masa puncak pada tahun 2030. Bonus demografi ini menggambarkan

pertambahan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

3. **Era digital 4.0**, atau revolusi industri keempat yang menggambarkan dimana era dominasi mesin-mesin berteknologi canggih (komputerisasi) yang akan bersaing dengan tenaga kerja manusia.
4. **Era society 5.0**, yang menggambarkan era inovasi teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu menyusun perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis diatas. Pembinaan ketenagakerjaan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, sehingga tidak tepat jika ada anggapan bahwa pembinaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengandalkan suatu kebijakan tunggal dan tidak mungkin apabila tanggungjawabnya hanya diletakkan pada satu atau beberapa instansi saja.

Pada tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dan luas sehingga bersifat multi dimensial antar berbagai sektor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politis dan sebagainya, oleh sebab itu pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. *Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan.*

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4, Visi, Misi, dan 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati serta tantangan dan permasalahan sektor ketenagakerjaan pada saat ini dan di masa depan maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu :
 - c. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

- d. Pertambangan dan Penggalian;
 - e. Industri Pengolahan;
 - f. Pengadaan Listrik dan Gas;
 - g. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
 - h. Konstruksi;
 - i. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
 - j. Transportasi dan Pergudangan;
 - k. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - l. Informasi dan Komunikasi;
 - m. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - n. Real Estate;
 - o. Jasa Perusahaan;
 - p. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - q. Jasa Pendidikan;
 - r. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
 - s. Jasa Lainnya.
- 2) sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseimbangan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan
- 3) Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyandang status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja. Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 5) Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja,

penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan diperlukan kebijakan umum yang menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan :

- t. *Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan* terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:
 - 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
 - 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
 - 3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
 - 4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
 - 5) Memfungsikan pasar tenaga kerja:
- u. *Kebijakan umum pengendalian penduduk*, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.
- v. *Kebijakan umum Investasi*. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga



kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Tetap melaksanakan Program Pelatihan Tenaga Kerja “Siap Kerja” Minimal 500 Orang Pertahun yang merupakan salah satu dari tujuh program unggulan Bupati Tanah Laut.
2. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada duna kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
3. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
4. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
6. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
7. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
8. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
9. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
10. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun

non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;

11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
12. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
13. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
14. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
15. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

Semakin meningkatnya indikator-indikator di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.



Dalam mencapai sasaran menurunnya tingkat pengangguran daerah di dukung oleh 3 Program dengan pagu Rp 1,285,573,428.00 dan realisasi sebesar Rp 1,014,061,926.00 atau sebesar 78,88%.

Tabel 3.5.9
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	494,203,352.00	379,172,816.00
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	741,370,376.00	594,490,910.00
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49,999,700.00	40,398,200.00
Jumlah		1,285,573,428.00	1,014,061,926.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 15

Meningkatnya perlindungan masyarakat

Meningkatnya perlindungan masyarakat dan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.10
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Resiko Bencana Daerah	skor	178 (tinggi)	178 (tinggi)	130 (sedang)	178 (tinggi)	63,07%
2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	%	9,36	6,98	20	56,32	281,6%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							172,33 %

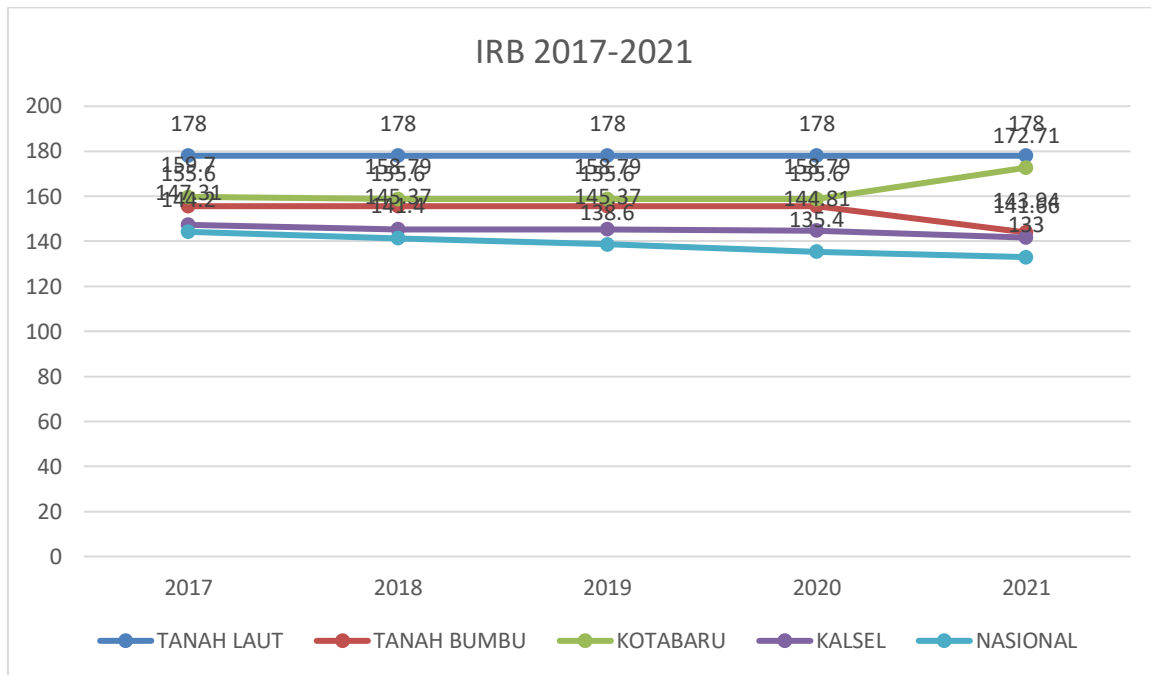
a. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Capaian indikator Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2021 adalah 178 (tinggi) berdasarkan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021. Nilai ini tidak mengalami penurunan/peningkatan atau tetap selama 5 tahun terakhir. Capaian tersebut baru mencapai 51,66% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 120 (sedang).

IRB tahun 2021, Kabupaten Tanah Laut merupakan Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dengan IRB paling tinggi dengan angka 178 (tinggi) dibandingkan seluruh Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk IRB Kalimantan Selatan adalah 141,66 kelas resiko tinggi, sedangkan nasional 2021 adalah 133,0.

Grafik 3.5.12

Indeks Resiko Bencana Daerah Kab/Kota se Kalimantan Selatan



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

IRB dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (bahaya)} \times \text{Vulnerability (kerentanan)}}{\text{Capacity (kapasitas)}}$$

IRB Kabupaten Tanah Laut tidak mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti disebutkan di dalam buku IRBI Tahun 2021. Komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat dan kapasitas pemulihan.

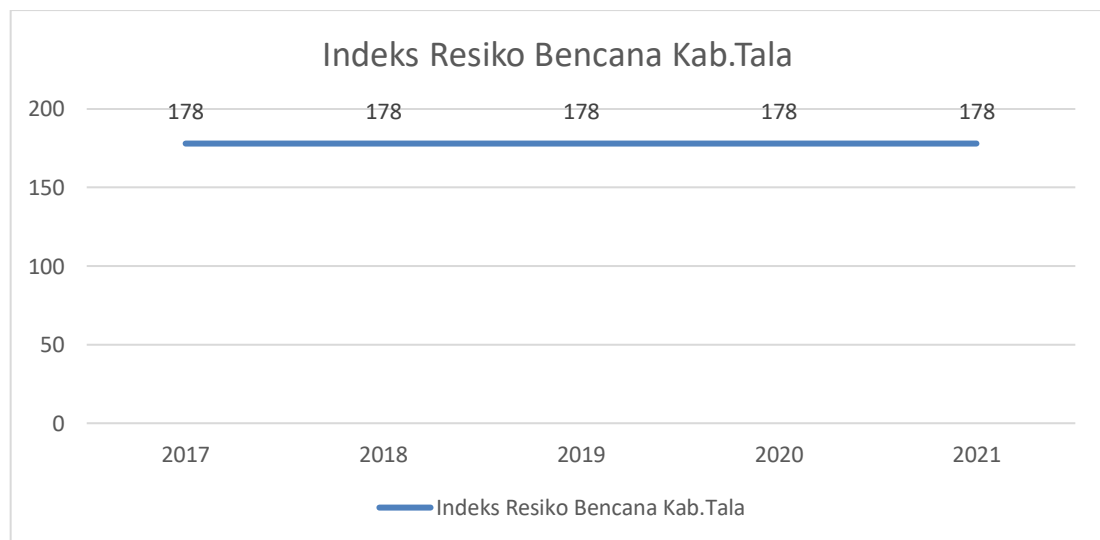
Perbandingan kinerja yang dicapai Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan Indeks risiko bencana tersebut melalui 7 Prioritas yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem Informasi, Diklat dan Logistik

4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana
5. Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Dari 7 Prioritas tersebut terdapat 71 indikator yang harus dilengkapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melibatkan beberapa SKPD terkait dalam penanganan bencana untuk menurunkan trend Indeks risiko bencana di Kabupaten Tanah Laut. Berikut *trend* Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2017-2021.

Grafik 3.5.13
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2017-2021



Sumber: IRBI Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1) Penilaian Ancaman

Penilaian ancaman bencana (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Penilaian tersebut diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya. Potensi luas bahaya tersebut dihitung berdasarkan pada parameter-parameter yang berbeda untuk setiap bahaya. Parameter tersebut mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya dari kementerian/lembaga di tingkat nasional. Berdasarkan parameter tersebut, maka

diketahui kelas bahaya dan luasan bahaya untuk masing-masing potensi bahaya. Rekapitulasi analisa kajian bahaya untuk seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.5.11
Potensi Bahaya di Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS BENCANA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	BANJIR	182.755	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	6.949	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	212.073	TINGGI
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	3.326	TINGGI
5.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	175.785	TINGGI
6.	KEKERINGAN	363.135	SEDANG
7.	TANAH LONGSOR	26.298	SEDANG
TOTAL LUAS BENCANA		970.321	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tabel di atas menunjukkan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kabupaten Tanah Laut hanya memiliki kelas sedang dan tinggi.

2) Penilaian Kerentanan

Kajian kerentanan merupakan penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana. Hasil potensi penduduk terpapar setiap bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.12
 Potensi Penduduk Terpapar Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Bencana	Penduduk	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
		Uk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Pendud Uk Cacat	
1.	Banjir	242.312	17.739	44.761	569	Tinggi
2.	Banjir Bandang	4.355	176	559	7	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrem	336.286	23.652	59.333	798	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	8.148	764	1.952	26	Tinggi
5.	Kekeringan	338.291	23.809	59.698	802	Sedang
6.	Tanah Longsor	1.713	128	285	15	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Indeks penduduk terpapar dilihat dari komponen sosial budaya yang menentukan potensi penduduk terpapar. Potensi penduduk terpapar tersebut dilihat berdasarkan parameter kepadatan penduduk dan kelompok masyarakat rentan. Kelompok masyarakat rentan meliputi rasio jenis kelamin, kelompok umur rentan, penduduk miskin, dan penduduk cacat. Penggabungan antara penduduk terpapar dengan kelompok masyarakat rentan menggunakan metode GIS dengan bobot 60% untuk kepadatan penduduk terpapar serta 40% untuk kelompok masyarakat rentan.

Parameter kerentanan sosial berlaku sama untuk seluruh potensi bencana, kecuali untuk bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak dikaji pada komponen sosial budaya. Hal ini disebabkan kebakaran hutan dan lahan berada diluar wilayah pemukiman penduduk. Sementara itu potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak) dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.13
Potensi Kerugian Bencana di Kabupaten Tanah Laut

No	BENCANA	POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah)				POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN (Ha)	
		KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	LUAS	KELAS
1.	BANJIR	842.701	82.135	924.837	TINGGI	42.463	TINGGI
2.	BANJIR BANDANG	16.058	106.716	122.774	TINGGI	3.623	TINGGI
3.	CUACA EKSTRIM	1.878.917	553.348	2.432.266	TINGGI	-	-
4.	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	30.529	10.003	40.532	TINGGI	2.271	TINGGI
5.	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	-	38.367	38.367	TINGGI	50.189	TINGGI
6.	KEKERINGAN	-	2.120	2.120	SEDANG	66.583	TINGGI
7.	TANAH LONGSOR	6.563	53.149	59.711	TINGGI	12.771	TINGGI

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tabel diatas memperlihatkan total kerugian fisik dan ekonomi (dalam rupiah) serta kerusakan lingkungan (dalam hektar). Pengkajian potensi kerugian tersebut dilihat dari komponen fisik, ekonomi, dan lingkungan.

3) Penilaian Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam rangka menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Penilaian kemampuan dilakukan pada sumberdaya orang per orang, rumah tangga, dan kelompok untuk mengatasi suatu ancaman atau bertahan atas dampak dari ancaman bencana. Aspek kemampuan antara lain kebijakan, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat.

Penilaian kapasitas daerah ditentukan berdasarkan 2 (dua) komponen, yaitu ketahanan daerah dan kesiapsiagaan Desa/Kelurahan:

a. Komponen Ketahanan Daerah

Komponen ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penilaian komponen ini berpedoman pada Indikator Ketahanan Daerah (IKD). Hasil kajian IKD diperoleh

dari hasil Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kebijakan di setiap institusi/instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana.

b. **Komponen Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan**

Komponen ini ditujukan untuk mengukur kemampuan masyarakat Desa/Kelurahan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana. Komponen kesiapsiagaan Desa/Kelurahan diperoleh dari survey lapangan dan interview langsung (Deep Interview) dengan pihak masyarakat Desa/Kelurahan.

Rekapitulasi hasil kajian kapasitas Kabupaten Tanah Laut untuk seluruh potensi bencana dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5.14
Hasil Kajian Kapasitas Daerah Kabupaten Tanah Laut

No	JENIS BENCANA	KELAS KETAHANAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN	KELAS KAPASITAS
1	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SEDANG	RENDAH	RENDAH
2	LONGSOR	SEDANG	RENDAH	RENDAH
3	BANJIR BANDANG	SEDANG	RENDAH	RENDAH
4	CUACA EKSTRIM	SEDANG	RENDAH	RENDAH
5	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
6	KEKERINGAN	SEDANG	RENDAH	RENDAH
7	BANJIR	SEDANG	RENDAH	RENDAH

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa kapasitas Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi seluruh bencana yang berpotensi berada pada tingkat rendah. Dengan kapasitas rendah, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu meningkatkan kapasitasnya guna mengurangi dampak risiko yang akan timbul apabila terjadi bencana yang sudah berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Laut.

1) **Tingkat Risiko Bencana**

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman

dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel :

Tabel 3.5.15
Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan	Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7.	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 (tujuh) jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko **tinggi**. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

2) Peta Risiko Bencana

Peta risiko bencana disusun dengan melakukan *overlay* peta bahaya, peta kerentanan, dan peta kapasitas. Pemetaan risiko untuk setiap jenis potensi yang ada diselaraskan dengan hasil dan pengelompokkan nilai indeks yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mendetailkan hasil perhitungan yang dapat dilihat secara visual melalui sebuah peta.

Analisis peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Untuk itu BPBD Kabupaten Tanah Laut menjadikan kapasitas sebagai sasaran strategis utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang disebabkan kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas



dilakukan mulai dari tahap bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap pra bencana yaitu melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana memberikan pelayanan informasi rawan bencana melalui:
 - a) Sosialisasi peringatan dini bencana dalam rangka menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau membakar lahan dengan sengaja.
 - b) Memberikan pelatihan kepada tenaga Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana) untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota Pusdalo BPBD Tanah Laut dalam rangka dukungan kesiapsiagaan mengenai informasi dan data kebencanaan dan pelatihan Vertical Rescue kepada tenaga TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk peningkatan sumber daya dalam rangka penanganan lokasi bencana, evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta kemampuan teknis lainnya yang ada di lapangan.
 - c) Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tahun tanggal 26 April yaitu untuk memberikan informasi kepada Peserta apel (Polri, TNI, SKPD, Relawan kebencanaan dan masyarakat) untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi musim hujan yang akan terjadi bencana banjir, tanah longsor dan angin putting beliung dan musim kemarau yang akan terjadi kebakaran pemukiman dan hutan dan lahan
 - d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan posko siaga darurat dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu. Pelaksanaan kegiatan mulai dari piket jaga, menerima laporan kejadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan

pelaporan kejadian bencana

2. Tahap pada saat tanggap darurat yaitu pada saat terjadi bencana melalui Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui:
 - a) Menyiapkan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Peralatan penanggulangan bencana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya penangan bencana. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana meliputi peralatan untuk penanganan bencana maupun peralatan komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Peralatan penanganan bencana terdiri atas perahu apung (perahu karet dan perahu polytheiylen), Mobil tangki air, mesin apung, jetshooter, mesin potable, pakain tahan api, selang dan komper serta alat pendukung lainnya seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, Velbeit, tandu, tali karmantel dan rompi pelampung serta alat komunikasi untuk mendukung proses koordinasi dalam penanganan bencana meliputi handy talky (HT)
 - b) Penanganan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan penanganan kejadian secara cepat dan tepat, bersama relawan yaitu Tim Reaksi Cepat dan Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasil Penanggulangan Bencana). Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati Tanah Laut dan BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana
 - c) Penanganan Bencana Non Alam yaitu pandemic Covid 19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan penanganan kejadian covid 19, bersama TNI dan Polri, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PMI,



Orari Tanah Laut, BPBD (TRC dan Pusdalops) dan relawan kebencanaan berupa penjagaan pintu masuk Posko perbatasan penanganan penyebaran Covid 19 di wilayah perbatasan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kintap, Kecamatan Bumi Makmur dan kecamatan Bati-Bati desa Pandahan dan Banyu Irang yaitu melakukan penyemprotan mobil dengan disefektan, cek suhu tubuh, dan melihat identitas diri yang ingin masuk ke Wilayah Kabupaten Tanah Laut serta Pembagian masker di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut dengan Dana bantuan Hibah dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

- d) Pengadaan Logistik Kebencanaan Pengadaan logistik kebencanaan diperuntukkan bagi korban terdampak bencana maupun pengungsi dalam kondisi darurat bencana. Bantuan logistik dimaksudkan sebagai stimulan untuk membantu memenuhi kebutuhan saat masa darurat bencana, yang meliputi bahan pokok makanan (sembako). Pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Tanah Laut mengajukan permohonan bantuan pengadaan logistik kebencanaan ke BPBD Provinsi.

3. Tahap pasca bencana yaitu saat setelah terjadi bencana melalui program penanganan Pascabencana melalui :

- a) Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana Alam Penanggulangan bencana merupakan suatu kesatuan upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Pemulihan kerusakan dampak bencana merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan melakukan perhitungan kebutuhan dari obyek yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana baik berupa fasilitas umum/publik maupun rumah masyarakat.
- b) Pelatihan dasar dalam kegiatan pasca bencana bagi aparat desa untuk mendata kerusakan rumah, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut oleh BPBD

dan Bappeda diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Kawasan Berpotensi bencana dan Mitigasinya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan dokumen mitigasi ini merupakan sebuah upaya untuk mengidentifikasi wilayah yang dianggap memiliki kiresiko tinggi terjadinya bencana alam yang dilakukan baik melalui pendekatan keilmuan maupun histori kejadian serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi wilayah untuk selanjutnya melakukan persiapan rencana pengelolaan bencana wilayah dalam rencana kontijensi. Berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh, didapatkan alternatif solusi terbaik yang dapat diterapkan pada upaya pengurangan risiko dan pencegahan bencana di Kabupaten Tanah Laut melalui meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui program sebagai berikut:
 - a. Menyusun strategi pengurangan risiko dan pencegahan bencana melalui pendekatan structural baik alami (upaya vegetative) dan buatan (upaya sipil teknis).
 - b. Penyesuaian pengaturan dalam rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan.
 - c. Penyusunan rencana dan jalur evakuasi.
 - d. Penentuan wilayah aman bencana sebagai arahan lokasi permukiman.
 - e. Pendidikan, penyuluhan dan pembentukan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.
 - f. Pematapan Tim Aksi Cepat Tanggap Bencana.
 - g. Pemantapan system monitoring dan peringatan dini bencana.
3. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sosialisasi Peringatan Dini Bencana di Beberapa Kecamatan setiap tahunnya.
4. Melaksanakan pelatihan Tenaga TRC/ Pusdalops.
5. Pelaksanaan penanggulangan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut.
6. Pembentukan Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 ada 3 desa yaitu di Desa penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa

Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada Pembentukan.

7. Pelayanan bencana dan pendistribusian logistik kepada korban bencana.

Rencana kedepan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kedepan yaitu melaksanakan hasil kajian analisa mitigasi bencana dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Memasukkan rencana kerja mitigasi bencana yang dilakukan SKPD ke dalam rencana kerja Tahun 2023 diantaranya BPBD, Dinas Sosial, DPUPRP, DPRKPLH.
2. Penyesuaian hasil analisa mitigasi bencana ke dalam rencana perubahan Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut.
3. Untuk rekomendasi upaya-upaya yang tidak dapat dilakukan/dijangkau oleh Pemerintah Kabupaten Tanah laut akan digunakan sebagai bahan koordinasi dan konsolidasi kepada Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat serta agar mendapatkan bagaimana solusi pemecahan masalah tersebut.

b. Persentase PMKS yang mandiri

Capaian indikator Persentase PMKS yang mandiri tahun 2021 adalah 56,32% mencapai target yang ditetapkan yaitu 20% dengan tingkat capaian 281,6%. Persentase realisasi ini mengalami kenaikan 49,34% dari tahun 2020 dengan capaian 6,98%. Capaian tersebut telah mencapai 187,73% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 30%.

Persentase PMKS yang menjadi mandiri diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\%PMKS \text{ Mandiri} &= \frac{\sum PMKS \text{ Mandiri}}{\sum PMKS \text{ yang ditangani}} \times 100\% \\ &= \frac{53.515}{95.005} \times 100\% \\ &= 56,32\%\end{aligned}$$

Pembangunan Kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Lau.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi salah satu sasaran strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial tersebut. Menurut Permensos nomor : 8 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdapat 26 jenis PMKS yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial, berikut adalah tabel rakapitulasi data PMKS di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021.

Tabel 3.5.16
Rekapitulasi Data PMKS Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO.	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	24
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	36
4	Anak Jalanan	-
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	-
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan Salah	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-
8	Lanjut Usia Terlantar	12.646
9	Penyandang Disabilitas	3044
10	Tuna Susila	-
11	Gelandangan	-
12	Pengemis	-
13	Pemulung	-
14	Kelompok Minoritas	-
15	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)	124
16	orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-
18	Korban Traffiking	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-
21	Korban Bencana Alam	48.252
22	Korban Bencana Sosial	4922
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-
24	Fakir Miskin (FM)	40.100
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	25



26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
	TOTAL	109.173

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan angka PMKS dari 45.090 jiwa pada tahun 2020 menjadi 109.173 jiwa pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 242,12 %. Meningkatnya angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut sangat dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Terjadinya bencana alam banjir pada awal tahun 2021 yang melanda hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut yang mengakibatkan meningkatnya warga terdampak bencana alam banjir.
2. Dampak pandemic covid-19 yang mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi terhambat, daya beli menurun dan aktifitas masyarakatpun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan apabila tidak segera ditangani maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Dengan meningkatnya angka warga terdampak bencana dan warga terdampak covid-19 maka angka PMKS di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 telah meningkat secara signifikan. Namun demikian penanganan terhadap PMKS pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara optimal, dari 109.173 PMKS telah ditangani sekitar 95.005 jiwa atau sekitar 87,02%, artinya terdapat sekitar 14.168 PMKS yang belum tertangani secara optimal. Dari 26 jenis PMKS tersebut di atas hanya sekitar 8 (delapan) jenis PMKS yang terdata dan menjadi sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Tabel 3.5.17
Jumlah PMKS yang dapat ditangani Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	0
2	Anak Terlantar	20
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	12
4	Lanjut Usia Terlantar	2.754

5	Penyandang Disabilitas	460
6	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	47
7	Korban Penyalahgunaan NAPZA	0
8	Korban Bencana Alam	48.252
9	Korban Bencana Sosial	4877
10	Fakir Miskin	38.583
TOTAL		95.005

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 95.005 PMKS yang telah ditangani yang terdiri dari 8 (delapan) jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dari 8 jenis PMKS yang paling banyak mendapat penanganan adalah Korban Bencana Alam yaitu sebesar 48.252 jiwa atau sekitar 50,79% dan penanganan Fakir Miskin yaitu sebanyak 38.583 jiwa atau sekitar 40,61 %. Program penanganan fakir miskin ini masih lebih banyak diarahkan pada warga terdampak Covid-19 sehingga program-program baik dari pusat seperti PKH, BPNT, dan BST. Sedangkan dari APBD Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program BLT APBD dan Program Pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sosial terencana.

Untuk mengukur PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan, terlebih dahulu ditetapkan indikator PMKS Mandiri yaitu sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat artinya setiap PMKS memiliki dan/atau menempati rumah sehat atau rumah yang layak huni
2. Dapat mengakses pangan 3 x sehari, artinya setiap PMKS dapat terpenuhi kebutuhan dasar pangannya untuk memenuhi makan sebanyak 3 x sehari.
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimalnya, artinya PMKS memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal yang meliputi permakanan, pakaian, pendidikan dan kesehatanya.
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah artinya PMKS dapat menyekolahkan anak-anaknya

5. Memiliki akses kesehatan dasar, artinya PMKS memiliki jaminan kesehatan dan dapat mengakses lembaga penyelenggara layanan kesehatan.

Berdasarkan indikator tersebut, maka dapat dihitung dan ditetapkan PMKS yang menjadi mandiri setelah mendapat penanganan adalah sebanyak **53.515 Jiwa**, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Korban bencana alam sebanyak 48.252 orang
2. Bencana Sosial sebanyak 4877 orang
3. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 47 orang
4. Keluarga Penerima Program PKH sebanyak 339 orang

Berdasarkan uraian di atas bahwa capaian PMKS yang menjadi mandiri setelah ditangani telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 20 % namun telah tercapai sebesar 56,32 % hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut telah dilaksanakan secara optimal. Namun demikian ada beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Data PMKS yang masih belum valid sehingga data yang disampaikan masih sering berubah-ubah.
2. Belum adanya system aplikasi data PMKS yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapat pelayanan dengan cepat dan tepat.
3. Masih tingginya program-program yang bersifat bantuan sosial dan masih rendah program-program yang memberdayakan masyarakat.
4. Belum adanya program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mempertahankan capaian target perlindungan masyarakat pada tahun 2022, maka akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelayanan

2. Membangun system aplikasi data PMKS hal ini untuk mempermudah akses pelayanan dan penanganan PMKS sehingga program-program penanganan masalah kesejahteraan social dapat lebih tepat sasaran
3. Menyusun SOP dan Kriteria penerima program-program penanganan dan pelayanan social sehingga penerima layanan akan sesuai dengan jenis program yang dibutuhkan
4. Melaksanakan sinkronisasi data dan program agar penanganan masalah kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan

Tabel 3.5.18

Uraian Program Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian Kegiatan	Sasaran	Jumlah	Sumber Dana	
				APBN	APBD
1	KUBE	Keluarga fakis miskin	70	APBN	
	KUBE	Keluarga fakis miskin	20		APBD I
2	Program Keluarga Harapan (PKH)	Keluarga fakis miskin	5.135 KPM	APBN	
3	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Keluarga fakis miskin	34.965 KPM	APBN	
4	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	123.074 Jiwa	APBD	
	Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBI-JK	Masyarakat	83.096 Jiwa	APBN	
5	Bantuan Sosial Tunai (BST)	Keluarga fakir miskin	66.180 KPM	APBN	
6	Bantuan Langsung Tunai APBD	Lansia dan Disabilitas	4.731 KPM	APBD	

	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar	Lanjut usia terlantar	2.754 Jiwa	APBD	
	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	368 Jiwa	APBD	
	Pelatihan Keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	WRSE	25 Orang	APBD	
	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas	20 Orang	APBD	

Dalam mencapai sasaran meningkatnya perlindungan masyarakat daerah di dukung oleh 8 Program dengan pagu Rp 25,721,059,467.00 dan realisasi sebesar Rp 20,403,013,849.00 atau sebesar 79,32%.

Tabel 3.5.19
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penanggulangan Bencana	1,954,838,128.00	1,227,146,511.00
2	Program Penanganan Bencana	6,845,033,480.00	3,581,377,000.00
3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10,209,212,266.00	9,597,174,886.00
4	Program Rehabilitasi Sosial	4,198,154,510.00	4,035,802,633.00
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	957,323,249.00	693,353,700.00
6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	528,444,000.00	479,434,600.00
7	Program Pemberdayaan Sosial	901,852,350.00	670,904,735.00
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126,201,484.00	117,819,784.00
Jumlah		25,721,059,467.00	20,403,013,849.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 16

Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas

Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.20
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	nilai	51,95	53	71,00	43,13	60,74%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							60,74%

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2021 adalah 43,13 dengan tingkat capaian 60,74%. Mengalami penurunan 9,87 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan angka 53. Capaian tersebut baru mencapai 59,08% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 73,00.

Untuk mendapatkan indeks pembangunan infrastruktur digunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{jumlah panjang jalan nasional} + \text{jalan propinsi} + \text{jalan lokal primer dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang jalan keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang irigasi}} \times 35 \right) + \left(\frac{\text{jumlah luas areal yang dilayani irigasi}}{\text{jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi}} \times 20 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang drainase}} \times 15 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani}}{\text{jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)}} \times 30 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik}}{\text{jumlah gedung kantor}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air limbah}}{\text{jumlah rumah}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah seluruh rumah}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Luas permukiman kumuh yang ditangani}}{\text{luas permukiman kumuh yang seharusnya ditangani}} \times 100\% \right) / 2 + \left(\frac{\text{Panjang jalan bertrottoar di perkotaan}}{\text{panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Panjang jalan berdrainase di perkotaan}}{\text{panjang jalan di perkotaan}} \times 100\% \right)$$

$$\text{perkotaan}) \times 100\%) \times 2) + (((\text{Jumlah sampah yang tertangani} / \text{Jumlah produksi sampah} \times 100\%) + (\text{Jumlah taman dalam kondisi baik} / \text{jumlah keseluruhan Taman} \times 100\%)) / 2) / 4 + (((\text{Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik} / \text{jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada} \times 100\%) + (\text{Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik} / \text{Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada} \times 100\%) / 2) / 5.$$

Dari rumus tersebut diperoleh hasil bahwa indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar 43,13. Dengan angka Indeks Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021 terealisasi sebesar 43,13 mengalami penurunan sebesar 9,87 point dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar 53.

Data indikator perhitungan indeks pembangunan infrastruktur Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 3.5.21
 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Satuan	2020	2021
1	Jumlah panjang jalan nasional kondisi baik	km	133.80	71.84
2	Jalan propinsi kondisi baik	km	60.34	51.72
3	Jalan lokal primer dalam kondisi baik	km	831.91	431.70
4	Jumlah panjang jalan keseluruhan	km	1,826.630	1,826.63
5	Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	m	567,871.24	538,667.60
6	Jumlah panjang irigasi	m	827,689	819,489
7	Jumlah luas areal yang dilayani irigasi	ha	17,111.00	17,111.00
8	Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi	ha	25,685.98	25,685.98
9	Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik	m	56,554	67,121
10	Jumlah panjang drainase	m	57,061	67,128.20
11	Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani	l	3,868,876,800	4,303,262,400
12	Jumlah kebutuhan air baku (liter/tahun)	l	9,904,032,000	10,041,588,000
13	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	buah	396.00	462.00
14	Jumlah gedung kantor	buah	396.00	462.00

15	Panjang jalan bertrottoar di perkotaan	km	345.18	6,783
16	panjang jalan di perkotaan	km	345.18	345.18
17	Panjang jalan berdrainase di perkotaan	km	345.18	345.18
18	panjang jalan di perkotaan	km	345.18	345.18
19	Jumlah sampah yang tertangani	ton	16,023.5	15,111
20	Jumlah produksi sampah	ton	51,041.45	51,807
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	buah	32.00	32.00
22	Jumlah keseluruhan Taman	buah	32.00	32.00
23	Jumlah rumah tangga berakses air bersih	KK	33,971.00	36,843.00
24	Jumlah rumah tangga	KK	117,185.00	118,015.00
25	Jumlah rumah tangga berakses air limbah	KK	45,109.00	46,533.00
26	Jumlah rumah	buah	78,561.00	109,254.00
27	Jumlah rumah layak huni	buah	74,025.00	104,962.00
28	jumlah seluruh rumah	buah	78,561.00	109,254.00
29	Luas permukiman kumuh yang ditangani	ha	21.83	7.11
30	luas pemukiman kumuh yang seharusnya ditangani	ha	170.95	86.61
31	Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik	buah	1,622.00	1,688
32	Jumlah perlengkapan jalan yg seharusnya ada	buah	20,000.00	20,000
33	Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik	buah	17.00	17
34	Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada	buah	138.00	138

1) Jalan Lokal Primer Dalam Kondisi Baik

Jalan lokal primer dalam kondisi baik mengalami penurunan pada 2021 dibandingkan tahun 2020 dari angka 831,91 km menjadi 431,70 km, bila dibandingkan dengan jumlah panjang jalan keseluruhan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka jalan yang dalam kondisi baik hanya 23,63% di tahun 2021.

2) Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik

Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 sudah mencapai 65,73% dari jumlah seluruh irigasi. Jika dibandingkan tahun 2020 Jumlah Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik mengalami penurunan pada tahun 2021 sekitar 2,88%.

3) Jumlah Luas Areal Yang Dilayani Irigasi

Jumlah luas areal yang telah dilayani irigasi pada tahun 2021 sekitar 66% dari seluruh area yang harus dilayani yaitu sekitar 25.685 Ha.

4) Jumlah Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik

Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2021 telah mencapai 99,98% jika dibandingkan dengan panjang seluruh drainase. Kondisi ini mengalami peningkatan sebanyak 9,85% dibandingkan pada tahun 2020 dengan capaian 99,11% jika dibandingkan dengan panjang seluruh panjang seluruh drainase.

5) Jumlah Kebutuhan Air Baku Yang Sudah Dapat Dilayani

Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani pada tahun 2020 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2020 dari 3.686.876.800 menjadi 4.303.262.400 atau 16,7%.

6) Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memiliki aset berupa gedung kantor sebanyak 396 buah di tahun 2020, meningkat menjadi 462 buah di tahun 2021 dan semua dalam kondisi yang masih baik atau terjadi peningkatan sebesar 16,6%.

7) Panjang Jalan Bertrotoar Di Perkotaan

Panjang jalan bertrotoar di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 6,783 Km.

8) Panjang Jalan Berdrainase Di Perkotaan

Panjang jalan berdrainase di Perkotaan Kabupaten Tanah Laut sepanjang 345.18 Km.

9) Jumlah Sampah Yang Tertangani

Jumlah sampah yang di produksi di Kabupaten Tanah Laut keseluruhan mencapai 51.041,45 ton pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 51.807 ton. Total sampah yang dapat di tangani Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 adalah 15,111 ton atau setara dengan 29,16% dari total produksi sampah pada tahun 2021, mengalami penurunan 2,23% dibandingkan tahun 2020 dengan angka 31,39%.

10) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang berakses air bersih hanya sekitar 31,21% atau sekitar 36.843 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu sekitar 118.015 rumah tangga.

11) Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Limbah

Jumlah rumah tangga yang berakses air Limbah sudah sekitar 39,42% atau sekitar 46.533 rumah tangga dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu sekitar 118.015 rumah tangga.

12) Jumlah Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2021 sebanyak 104.962 buah atau sekitar 96,07% dari seluruh jumlah rumah yang ada di kabupaten tanah laut yaitu sebanyak 109.254 buah. Mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan angka 94,23%.

13) Luas Permukiman Kumuh Yang Ditangani

Luar pemukiman kumuh pada tahun 2020 seluas 170,95 Ha dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 86,61 Ha atau mengalami penurunan sebanyak 97,37%. Luas pemukiman yang bisa ditangani pada 2021 seluas 7,11 Ha atau hanya 8,20% dari seluruh pemukiman kumuh.

14) Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada adalah 20.000, sedangkan jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik tahun 2021 hanya 1.668 buah atau sebesar 8,34%. Pada Tahun 2020 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik adalah 1568 Unit.

Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 sebanyak 20000 Unit, Perlengkapan jalan yang seharusnya ada terdiri dari rambu Standart sebanyak 17570 Unit, RPPJ sebanyak 1000 Unit, Marka Jalan sepanjang 300.000 m1, Cermin Cembung (Comvek Mirror) sebanyak 200 Unit , Warning Light sebanyak 200 Unit APILL sebanyak 30 Unit, Deliniator sebanyak 1000.

15) Jumlah Prasarana Perhubungan Dlm Kondisi Baik

Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada tahun 2021 adalah 138 buah, akan tetapi pada tahun 2021 hanya 17 buah yang dalam kondisi baik 12,32%.

Prasarana Perhubungan yaitu, Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Unit, Terminal Type c Lokasi Kantor Dinas 1 Unit, Halte 11 Unit, Mobil Uji Kendaraan Keliling 1 Unit, Pos Pelabuhan 1 Unit

Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada di tahun 2019 dan Tahun 2020 sebanyak 100 Buah terdiri dari : Gedung Pengujian 1 Unit, Kantor Dinas 1 Unit, Terminal 1 Lokasi, Mobil Uji Keliling 1 Unit, Bus Sekolah 11 Unit, Halte 75 Buah dan terminal Desa sebanyak 10 Unit, Pos Parkir 38 Unit.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas daerah di dukung oleh 10 Program dengan pagu Rp 314,265,258,625.00 dan realisasi sebesar Rp 302,103,121,651.00 atau sebesar 96,12%

Tabel 3.5.22
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan Jalan	140,388,663,345.00	137,798,193,270.00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30,796,526,594.00	29,901,916,547.00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,726,676,736.00	3,668,712,434.00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12,840,007,801.00	12,212,896,413.00
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	54,880,591,743.00	52,736,311,535.00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	45,634,966,313.00	44,053,559,868.00
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	99,999,950.00	44,908,050.00
8	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	489,947,874.00	237,585,436.00
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	24,894,076,029.00	21,080,888,398.00
10	Program Pengelolaan Pelayaran	513,802,240.00	368,149,700.00
Jumlah		314,265,258,625.00	302,103,121,651.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 17

Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah

Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

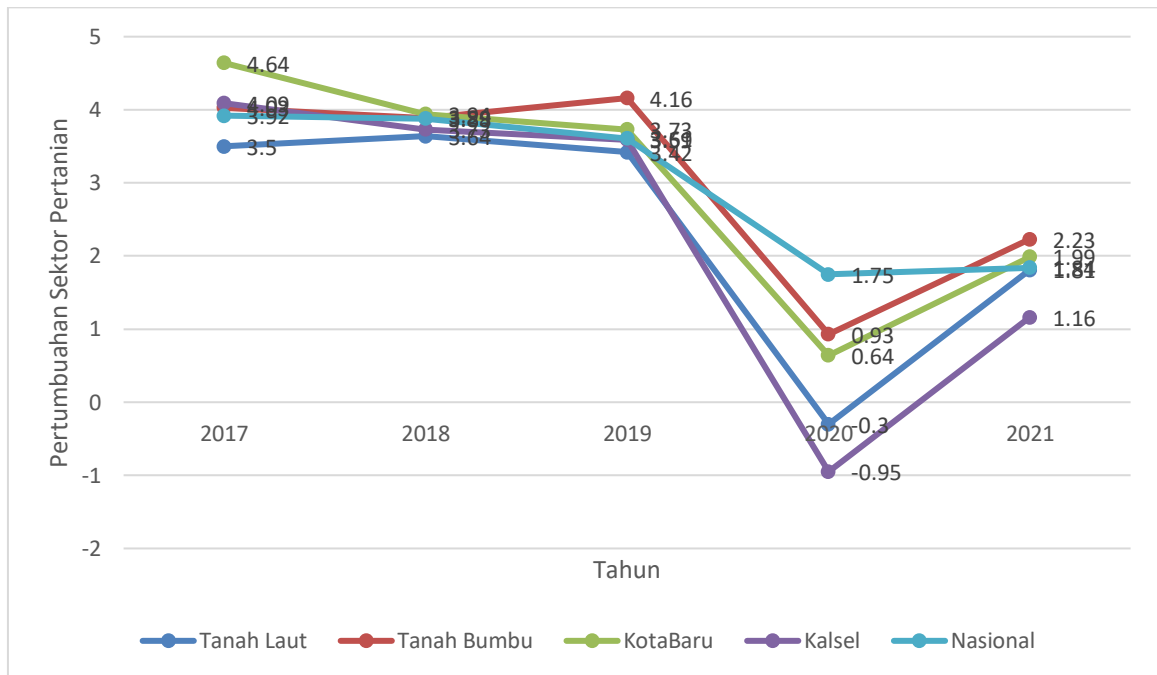
Tabel 3.5.23
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Pertumbuhan sektor Pertanian	%	3,42	-0,30	3,52	1,81	51,42%
2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	%	2,51	-4,27	7,58	5,01	66,09%
3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah	orang	346.366	330.241	285.000	193.671	66,78%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							61,43%

a. Pertumbuhan Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 1,81%, mengalami kenaikan 2,11% dari tahun 2020 yaitu sebesar -0,30%. Berikut perbandingan Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2021.

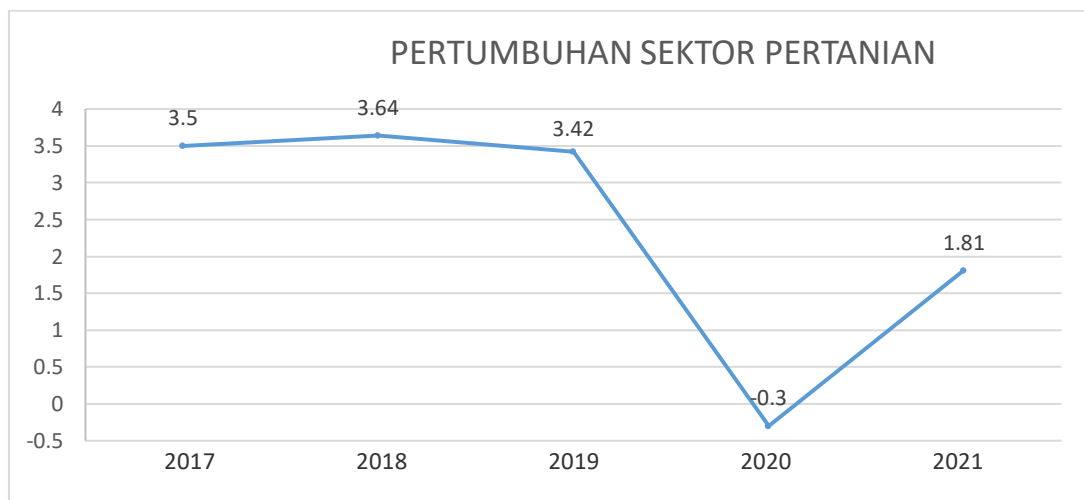
Grafik 3.5.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2021



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas, Pertumbuhan sector pertanian Kabupaten Tanah Laut berada di atas provinsi Kalimantan selatan yaitu -0,95% atau selisih sebesar

Grafik 3.5.15
Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut 2017-2021





Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Lapangan usaha ini mencakup tiga subkategori. Pertama, subkategori Pertanian, Perternakan, Perburuan dan jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman Holtikutura, tanaman perkebunan, perternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Subkategori kedua adalah kehutanan dan penebangan kayu, dan yang terakhir adalah subkategori perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang sangat signifikan dikarenakan terjadinya wabah Covid 19. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah melonjaknya kasus Covid 19 di Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Tutupnya rumah makan, dan berkurangnya mobilisasi serta menurunnya daya beli masyarakat mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2021, pertumbuhan sektor pertanian sudah tumbuh sebesar 1,81. Kontribusi sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi adalah 18,74 %.

Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tahun 2021 belum rilis yang direncanakan akan rilis pada bulan April. Untuk tahun 2020 Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.24
Peranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen), 2017-2021

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1.	Pertanian, perternakan, Perburuan, Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>					
	a. Distribusi/ <i>Distribution</i>	19,65	19,23	18,92	18,98	19,28
	b. Laju Pertumbuhan/ <i>Growth</i>	3,84	3,50	3,64	3,42	-0,30

c. Laju Implisit/ <i>Growth Rate of Implicit Price Index</i>	3,05	2,30	1,98	2,03	0,85
--	------	------	------	------	------

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Jika dilihat lebih dalam, peningkatan peranan ini disebabkan oleh beberapa fenomena pada masing-masing subkategori. Untuk sub kategori tanaman pangan, pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan program SERASI dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan porsi untuk padi rawa sebesar 13.182 ha. Untuk tanaman hortikultura, pengaruh datangnya musim hujan yang lebih cepat menyebabkan musim panen yang maju. Subkategori perkebunan mengalami langkah yang mundur karena merosotnya harga CPO dunia sebesar 3,22 persen serta menurunnya volume ekspor CPO sebesar 45,77 persen dan karet sebesar 17,89 persen. Subkategori peternakan memiliki pembinaan dan vaksinasi rutin untuk kerbau rawa di Pelaihari, pemotongan kerbau di RTH yang meningkat sebesar 76,92 persen, serta adanya bantuan berupa bibit ternak untuk rumah tangga miskin agar dapat memulai usaha. Kinerja sektor perikanan mengalami peningkatan pada sisi harga karena adanya kendala musim yang menyebabkan pasokan ikan yang menyusut.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diantaranya melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sector pertanian diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas penyuluh pertanian dan perkebunan sebanyak 102 orang yang terdiri dari pegawai negeri tahun 2021 sebanyak 84 orang dan untuk penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak sebanyak 18 orang yang tersebar pada 11(sebelas) Kecamatan.
2. melaksanakan pemberian/hibah benih tanaman pangan bersertifikat unggul misalnya padi dan kedelai.
3. melaksanakan pemberian/hibah bibit hortikultura yaitu bawang merah dan cabe.
4. pemberian/hibah peremajaan kebun karet kepada kelompok tani dengan menanggung semua biaya baik itu pembersihan lahan, bibit baru dan upah tanam dan pemberian bibit sawit kepada kelompok tani yang dananya berasal dari APBD.

5. Melaksanakan pemberian pelatihan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani dalam rangka peningkatan produksi pertanian, penggunaan teknologi dalam pengolahan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. adanya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan banjir melanda Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yang merusak sebagian lahan pertanian.
2. Adanya alih fungsi lahan misalnya dari pertanian perkebunan menjadi perumahan
3. Kurang tepatnya pemberian bibit yang diperbantukan misalnya benih jagung kurang sesuai dengan karakteristik dan cuaca, di daerah Kabupaten Tanah.

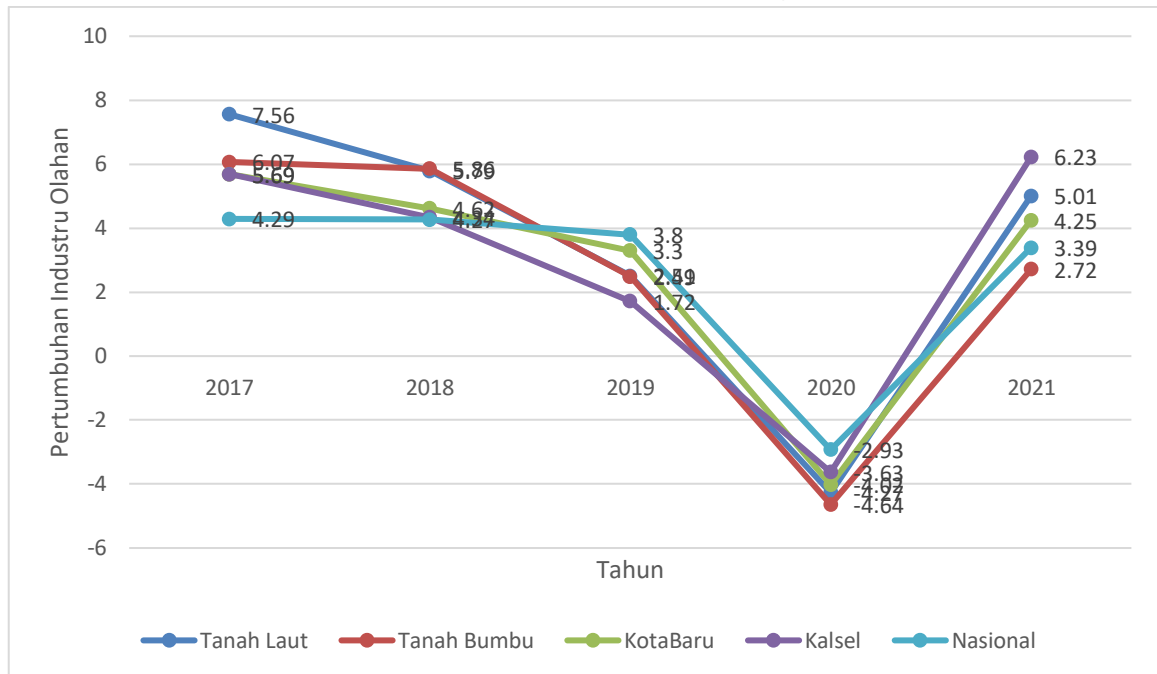
Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penetapan Kabupaten Tanah Laut sebagai Penyanggah pangan untuk pengembangan wilayah ibu kota nusantara sebagai sentral tanaman pangan dan hortikultura bersama dengan Kabupaten Tanjung, Batola dan Tapin.
2. Berupaya secara terus menerus meraih program-program pusat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait bantuan / hibah saprodi berupa benih, pupuk, alsintan dan lain-lain.
3. Dukungan pembiayaan terkait dengan bantuan bibit yang teranggarkan pembiayaan pada APBD Kabupaten Tanah Laut
4. Melaksanakan luas tanam dengan membuka areal baru yang potensial untuk dikembangkan dalam pengembangan tanaman pertanian diharapkan nantinya akan meingkatkan luas tanam dan luas panen.
5. Dukungan sumber daya manusia para petani khususnya yang mempunyai kemauan untuk bertanam bawang.

b. Pertumbuhan Sektor Industri Olahan

Pertumbuhan sektor industri olahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 adalah 5,01%, mengalami kenaikan sebesar 9,28% dari tahun 2020 dengan angka -4,27%. Berikut perbandingan Pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Tanah Laut dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi dan nasional tahun 2021.

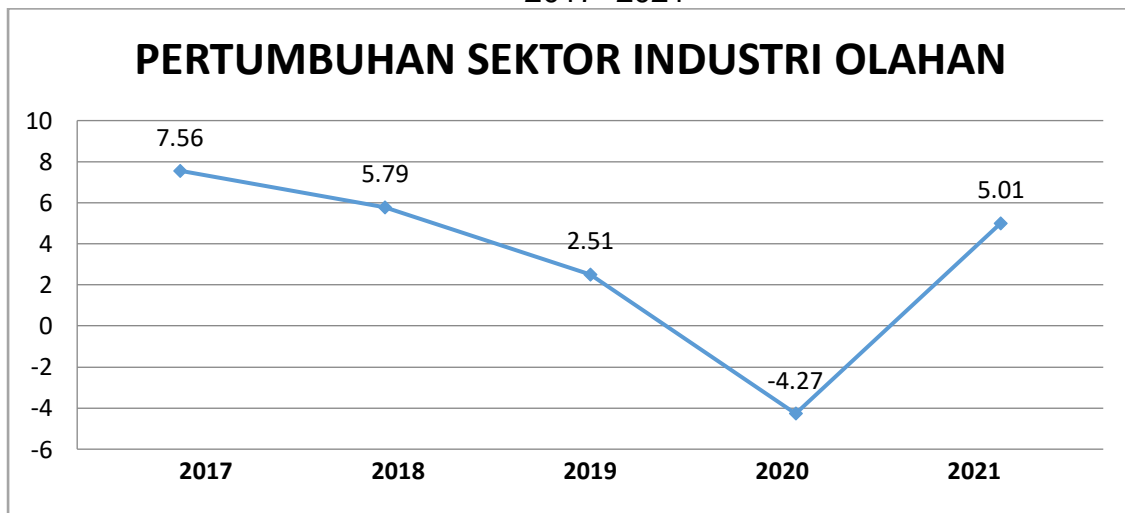
Grafik 3.5.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri Pengolahan 2021



Sumber: BPS Kalimantan Selatan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan provinsi merupakan yang tertinggi dengan angka 6,23%. **Sedangkan Kabupaten Tanah Laut berada di bawah provinsi** dengan capaian 5,01%, **lebih tinggi jika dibandingkan nasional** dengan angka 3,39%.

Grafik 3.5.17
Pertumbuhan Sektor Industri Olahan Kabupaten Tanah Laut
2017- 2021



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut

Pada tahun 2020 terjadi kontraksi yang sangat signifikan dikarenakan terjadinya wabah Covid 19. Adanya kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah melonjaknya kasus Covid 19 di Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Tutupnya rumah makan, dan berkurangnya mobilisasi serta menurunnya daya beli masyarakat mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berhasil meningkatkan pertumbuhan sektor industri olahan yang signifikan ke angka 5,01%.

Kategori manufaktur dalam PDRB atas dasar tahun 2010, dibagi dalam 16 subkategori. Subkategori yang mendominasi kerja industri manufaktur di Tanah Laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman Tanah Laut adalah crude palm oil (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Tanah Laut setelah batubara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman Tanah Laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global.

Pada tahun 2019, kinerja subkategori industri makanan dan minuman masih menunjukkan arah yang positif dimana berarti produk yang dihasilkan oleh industri ini masih mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun begitu pada tahun 2019 industri makanan dan minuman mengalami perlambatan yang tajam, hal ini disebabkan karena menurunnya harga komoditas CPO di dunia. Di Tanah Laut kinerja industri CPO ini didukung oleh kinerja subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong, dan Kintap).

Untuk Tahun 2021 data peranan lapangan usaha terhadap PDRB kategori industri pengolahan belum rilis dan dijadwalkan akan rilis pada bulan April. Berikut data peranan lapangan usaha terhadap PDRB kategori industri pengolahan tahun 2020.

Tabel 3.5.25
 Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan (persen),
 2016-2020

Lapangan Industri	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Industri Pengolahan					
a. Peranan	12,24	12,89	12,79	12,49	12,29
b. Laju Pertumbuhan	7,57	7,56	5,79	2,63	(4,48)
c. Laju Implisit	5,48	5,90	0,72	0,17	1,85

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Laut

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan pertumbuhan sector industri olahan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendorong investasi dari pihak ketiga, dengan cara mempermudah persyaratan investasi, melakukan promosi kepada pihak ketiga.
2. Penguatan daya beli masyarakat, dengan cara melakukan promosi kepada masyarakat untuk menggunakan hasil industri dalam daerah melalui berbagai media, baik media sosial, radio, atau melalui dekranasda Tanah Laut.
3. Pengembangan kawasan industri jorong yang juga merupakan isu strategis Kabupaten Tanah Laut, dengan cara mempermudah perizinan pembangunan kawasan industri.
4. Pelatihan dan pendampingan, melaksanakan pelatihan bagi pelaku industri olahan agar dapat menggunakan teknologi dalam proses pengolahan hasil industri, meningkatkan kreativitas hasil industri olahan utk menarik minat konsumen.
5. Fasilitasi pasar industri olahan, memberikan ruang bagi pelaku industri olahan agar dapat memasarkan hasil industri olahan, baik melalui pasar tradisional, dekranasda, maupun e-market (sosialita).

c. Jumlah kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah 2021 terealisasi sebesar 193.671 orang, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 290.000 orang dengan tingkat capaian 66,78%. Mengalami penurunan sebanyak 136.570 orang pengunjung jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 330.241 orang. Capaian tersebut baru mencapai 55,33% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 350.000 orang.

Tabel 3.5.26
Kunjungan Wisata menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara
1	Kota Banjarmasin	347,222	683
2	Kota Banjarbaru	473,056	2,552
3	Kabupaten Banjar	559,071	0
4	Kabupaten Tapin	508,836	0
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	69,697	0
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	21,026	1
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	72,801	0
8	Kabupaten Balangan	64,814	0
9	Kabupaten Tabalong	0	0
10	Kabupaten Tanah Laut	193,671	0
11	Kabupaten Tanah Bumbu	157,584	0
12	Kabupaten Kotabaru	516,773	37
13	Kabupaten Barito Kuala	17,079	0
	Total	2,825,812	3,273

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan, jumlah kunjungan wisata Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2021 pada urutan ke-6 setelah Kota Banjarmasin . Jumlah kunjungan wisata terbanyak yaitu Kabupaten Banjar dengan jumlah pengunjung sebanyak 559.071 dan untuk jumlah kunjungan wisata terendah adalah Kabupaten Tabalong dengan tidak ada jumlah kunjungan.

Objek wisata yang paling dominan dikunjungi wisatawan adalah Pantai Batakan Baru dan Pantai Takisung, karena selain jarak dekat dengan Kota Pelaihari sejumlah fasilitas sarana prasarana sudah banyak perbaikan dan lengkap. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastruktur di Obyek Wisata yang sudah ada dan melakukan pengembangan Obyek Wisata baru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, agar masyarakat mempunyai pilihan saat mengunjungi berbagai Destinasi Wisata. Pada tahun 2020 jumlah objek wisata yang ada adalah berjumlah 23 buah dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 24 objek wisata.

Tabel 3.5.27
 Jumlah Pengunjung Wisata di Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
 Tahun 2021

NO	NAMA OBJEK WISATA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH
Dikelola Pemda (Dinas Pariwisata)				
1	Gunung Kayangan	Desa Ambungan	Pelaihari	0
2	Air Terjun Bajuin	Desa Sungai Bakar	Bajuin	29,911
3	Taman Mina Tirta	Kelurahan Angsau	Pelaihari	
	- Sepeda Air	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Kereta Wisata	Kelurahan Angsau	Pelaihari	80
	- Orchid	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
	- Hutan Kota	Kelurahan Angsau	Pelaihari	0
4	Pantai Takisung	Desa Takisung	Takisung	45,630
5	Pantai Batakan Baru	Desa Batakan	Panyipatan	50,256
6	Pantai Swarangan	Desa Swarangan	Jorong	0
7	Pantai Batu Lima	Desa Kuala Tambangan	Takisung	0
Dikelola Oleh Masyarakat / Desa				
8	Pantai Kintap	Desa Muara Kintap	Kintap	97
9	Pantai Cemara Satu	Desa Muara Kintap	Kintap	0
10	Pantai Cemara Dua	Desa Muara Kintap	Kintap	0
11	Pantai Tanjung Dewa	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	235
12	Pantai R.Piungan	Desa Asam Jaya	Jorong	0
13	Pulau Datu	Desa Tanjung Dewa	Panyipatan	446
14	Kerbau Rawa	Desa Benua Raya	Bati-Bati	400
15	Mangrove Pagatan Besar	Desa Takisung	Takisung	14,372
16	Gunung Birah	Desa Kandungan Lama	Panyipatan	4,901
17	Dewa Katar	Desa Telaga	Pelaihari	25
18	Surai Bekantan Panjaratan	Desa Panjaratan	Pelaihari	424

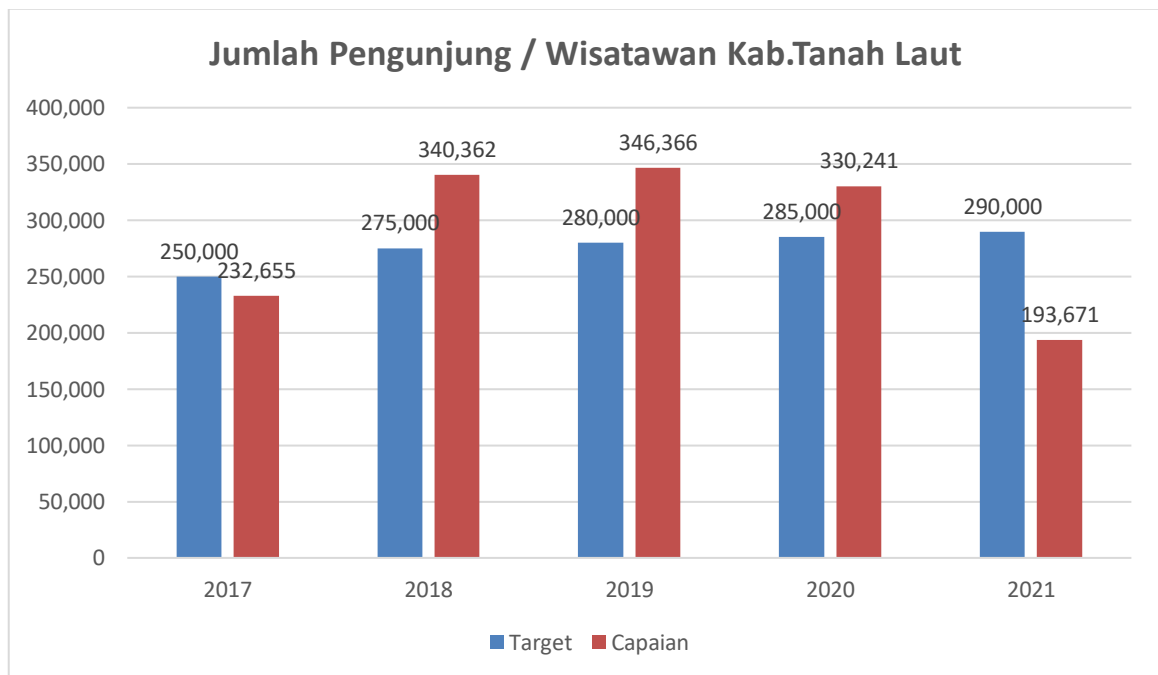
19	Wisata Mahuni	Ds. Padang	Bati-Bati	4,200
Dikelola oleh Pribadi				
20	Pantai Karindangan	Desa Pagatan Besar	Takisung	963
21	Pantai THR	Desa Pagatan Besar	Takisung	1,795
22	Pantai Turki	Desa Swarangan	Jorong	29,900
23	Pantai Asmara	Desa Muara Asam-Asam	Jorong	8,480
24	Taman Permana	Desa Telaga	Pelaihari	1,556
TOTAL JUMLAH				193,671

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Pada dasarnya jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 terus mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang muncul di Indonesia sejak Bulan Maret Tahun 2020. Berikut disajikan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2017-2021.

Grafik 3.5.18

Jumlah kunjungan wisata Tanah Laut tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Laut :

1. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan infrastuktur di obyek wisata yang sudah ada, pada tahun 2021 dilakukan pembangunan dan perbaikan pada 7 objek

wisata diantaranya Air Terjun Bajuin (pembangunan food court dan pintu gerbang, pagar wana outdoor play ground), Pantai Batakan (pembangunan pos jaga, pembangunan pintu gerbang, dan pembuatan dermaga), Gunung Kayangan (pemasangan vaping blok, pembangunan menara padang, rehabilitasi pintu gerbang), Pantai Tabanio yaitu pembuatan taman destinasi, pemeliharaan taman orchid Hutan Kota, pembuatan jembatan Mangrove Pagatan Besar, Kerbau Rawa Bati-Bati (pembuatan landmark, taman pelindung, dan pemasangan lampu penerangan).



2. Melakukan pengembangan obyek wisata baru yang ada di Kabupaten Tanah Laut, agar masyarakat mempunyai pilihan saat mengunjungi berbagai destinasi wisata di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga capaian pengunjung wisata terus meningkat setiap tahunnya. Ada penambahan sebanyak 3 objek wisata baru yaitu Pantai Karindangan, Pantai THR dan Taman Permana.
3. Melakukan pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi pariwisata, melaksanakan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata dan melakukan penyediaan dan penyampaian data dan informasi pariwisata.
4. Dinas Pariwisata melakukan koodinasi dengan BKSDA dan pihak terkait sehingga ada kesepakatan dalam pendistribusian karcis obyek wisata Pantai Batakan,
5. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli.

6. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pembinaan masyarakat dan pelaku usaha jasa kepariwisataan, dan
7. Melaksanakan promosikan/pemasaran pariwisata d kabupaten tanah Laut melalui media social, media cetak, pameran wisata di dalam provinsi maupun diluar provinsi Kalimantan selatan serta pelaksanaan lomba foto wisata, vlog wisata, podcast dan video wisata.
8. Melaksanakan pengembangan SDM kepariwisataan diantaranya pelatihan fotografi, pelatihan resque, pelatihan tour guide, dll.
9. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif melalui talk show pelaku ekonomi kreatif, pendataan seluruh ekonomi kreatif.
10. Menghimbau kepada seluruh SKPD agar setiap event yang ada di Kabupaten Tanah Laut disertai dengan melibatkan sarana akomodasi/pihak hotel/penginapan yang ada di Kabupaten Tanah laut.
11. Membina para pelaku usaha jasa khususnya penginapan dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik kepada pengunjung.
12. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus melakukan perbaikan jalan menuju objek wisata sesuai dengan program unggulan Bupati Wakil Bupati Tanah Laut yaitu peningkatan/pengaspalan minimal 85% pada akhir tahun RPJMD (2018-2023).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya :

1. Terjadinya bencana banjir bandang pada awal tahun 2021 yang menyebabkan banyaknya infrastruktur yg rusak diobjek- objek wisata. Selain itu juga putusnya jembatan Pabahanan yang merupakan akses masuknya ke Kabupaten Tanah Laut dan memerlukan waktu berbulan-bulan untuk membangun ulang. Banjir bandang juga menyebabkan banyaknya jalan dan jembatan yang rusak mengakibatkan akses menuju tempat-tempat wisata menjadi terhambat.
2. Kondisi Pandemi covid-19 yg terus meningkat selama tahun 2021, sehingga terbit kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Keg.Masyarakat) level IV dan III. Hal itu menyebabkan terbitnya kebijakan Bupati untuk melakukan penutupan disemua objek wisata yang ada di Tanah Laut dan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun di setiap hari-hari besar dan libur sekolah.

3. Perbaikan jalan poros Liang Anggang-Pelaihari yang melalui proses yang panjang mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas menuju Kabupaten Tanah Laut.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar objek wisata dalam mengembangkan wisata di daerahnya.
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengunjung wisata untuk memelihara sarana dan prasarana yang ada di objek wisata.
6. Belum adanya investor yang berpartisipasi mengembangkan objek wisata.
7. Keterbatasan dana dalam mengembangkan objek wisata menjadi objek wisata berkualitas atau sebuah kawasan wisata yang terkelola dengan baik.

Adapun upaya yang ditempuh untuk penyelesaian permasalahan tersebut, yaitu :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan pariwisata yaitu:
 - 1) Pengembangan potensi pariwisata yang telah mempunyai dokumen kajian dan perencanaan agar dituntaskan (rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Masterplan terumbu karang dan penataan sungai)
 - 2) Optimalisasi Kerjasama dengan pihak ke tiga (swasta) untuk potensi pariwisata yang belum dikelola maupun yang sudah dikelola pemerintah daerah.
 - 3) Optimalisasi promosi potensi pariwisata melalui event-event tahunan, pameran-pameran, promosi melalui media cetak, media elektronik dan media sosial serta memberdayakan penggiat seni dan budaya (influencer) yang ada untuk menarik minat wisatawan.
 - 4) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sdm dan komunitas-komunitas penggiat seni, budaya dan pariwisata.
 - 5) Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dalam rencana pengembangan pariwisata, sedangkan pelaksana pengembangan didorong pihak ke tiga (investor) sebagai operator.
2. Meningkatkan sosialisasi pembinaan kepada masyarakat sekitar obyek wisata dan para pelaku usaha jasa kepariwisataan
3. Memperbaiki jalan-jalan yang rusak dengan berkoordinasi kepada instansi terkait.
4. Melaksanakan monitoring ke objek-objek wisata dan melakukan kerja sama

dengan pihak keamanan seperti Satpol PP, kepolisian setempat, TNI dalam rangka pengamanan obyek wisata seperti premanisme dan pungli dan membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).

5. Meningkatkan promosi bidang kepariwisataan agar dapat menarik investor yang masuk ke Tanah Laut.
6. Melaksanakan koordinasi dengan Tim TAPD mengenai permasalahan anggaran melalui Rapat Koordinasi Teknis pada saat pembahasan anggaran mengenai program/kegiatan untuk ditahun yang akan datang dapat lebih intensif.
7. Dalam usaha pengembangan kepariwisataan ini, Dinas Pariwisata memerlukan dukungan dari instansi terkait dengan peran serta semua pihak (*stakeholder*).
8. Mengembangkan dan terus membina UMKM dan industri kreatif yang ada di Tanah Laut.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah di dukung Oleh 11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan pagu Rp 25,314,810,664.00 dan realisasi sebesar Rp 22,149,509,982.00 atau sebesar 87,49 %.

Tabel 3.5.28
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	440,317,574.00	333,068,900.00
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,902,498,495.00	1,810,138,414.00
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,975,042,240.00	7,569,737,192.00
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	502,556,142.00	410,513,024.00
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7,273,192,151.00	7,142,904,062.00
6	Program Pemasaran Pariwisata	1,951,446,818.00	1,835,529,100.00
7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00	146,158,129.00
8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,402,081,574.00	1,572,259,579.00
9	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,018,604.00	409,561,304.00
10	Program Perizinan Usaha Pertanian	364,964,068.00	260,152,050.00
11	Program Penyuluhan Pertanian	875,501,978.00	659,488,228.00
		25,314,810,664.00	22,149,509,982.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Meningkatnya Ketahanan Pangan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.29
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	83,3	82,8	95	84,1	88,53 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							88,53 %

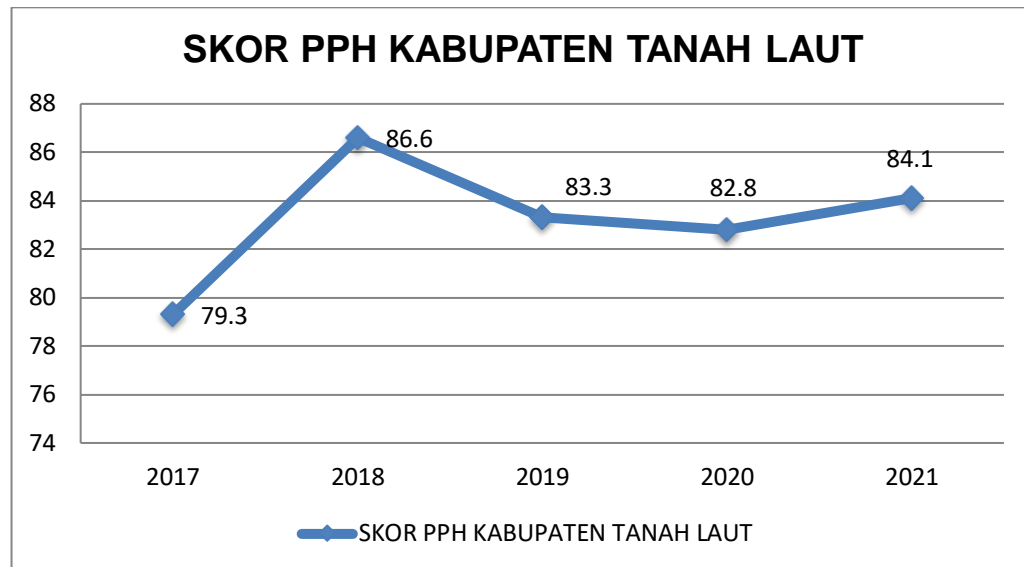
Skor PPH Ketersediaan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui Konsumsi pangan setiap rumah tangga yang berbeda baik jumlah, mutu gizi dan keberagaman pangan adalah dengan menggunakan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Melalui pendekatan PPH kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH. Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Indonesia. Skor maksimal yang dicapai 100 (skor ideal). Semakin tinggi skor PPH, menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang.

Capaian indikator Skor PPH Ketersediaan tahun 2021 adalah 84,1 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 95 dengan tingkat capaian 88,52%. Skor ini mengalami peningkatan sebesar 1,3 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 82,8. Realisasi tersebut baru mencapai 88,52% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 95.

Tabel 3.5.19
Skor PPH Kabupaten Tanah Laut 2017-2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Secara umum ada 9 kelompok pangan dalam PPH, yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut, dimasukkan ke lain-lain. Jumlah kalori harian ideal yang dikonsumsi orang Indonesia dalam hal ini Kabupaten Tanah Laut Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah 2000 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 52 gram/kap/hari.

Hasil dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanah Laut ini meliputi Data-data Baseline, Konsumsi Hasil Pangan Hasil Susenas, hasil Analisis Pola Konsumsi, Kecukupan Gizi, skor PPH, Sasaran PPH, Proyeksi Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan wilayah berdasarkan pendekatan PPH sebagaimana terlampir

Berdasarkan Hasil Analisis Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan (Konsumsi Energi Dan Protein) dan skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat dari hasil perhitungan skor PPH pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.30
**Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Susenas
 Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Konsumsi Protein Per Hari		
		Kkal/ Kapita	%	% AKE*)	Gram/ Kapita	%	% AKP**)
1	Padi-padian	1,295	58,5	64.8	30.8	58.5	53.9
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	0.3	1.8	0.6
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	24.8	13.4	43.4
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	0.0	12.6	0.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	0.2	0.7	0.4
6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	4.7	2.0	8.3
7	Gula	108	4.9	5.4	0.0	4.9	0.1
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	3.2	3.9	5.6
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	1.7	2.2	3.0
	Total	2,215	100.0	110.7	65.8	100.0	115.4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = *) *Angka Kecukupan Energi : 2000 Kkal/Kapita/Hari*

**) *Angka Kecukupan Protein : 52 Gram/ Kapita/ Hari*

Hasil Justifikasi Tingkat Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dihasilkan adalah sebesar 2.215 Kkal per kapita per hari, hal ini menunjukkan bahwa AKE telah melampaui angka standar AKE yang telah ditetapkan dalam analisis yaitu sebesar 2000 Kkal per kapita per hari, sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) juga menunjukkan hasil sebesar 65,8 Gram perkapita per hari, dimana AKP juga telah melampaui standar yang telah ditetapkan sebesar 52 Gram per kapita per hari. Hal ini berarti konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Tanah Laut meskipun telah melampaui standar normative dan sudah memenuhi standar.

Dilihat dari Komposisi Angka Kecukupan Gizi nya, konsumsi padi-padian idealnya 50%, namun konsumsi di Tanah Laut tahun 2021 adalah 64,8 %, angka ini masih terlalu tinggi dan harus diturunkan sebesar 14,8 %. Kampanye untuk

mengurangi konsumsi beras harus terus digalakkan dan ditingkatkan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan menggandeng seluruh Stakeholder agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.

Adapun data hasil konsumsi aktual berdasarkan hasil Susenas jika dibandingkan dengan standar kecukupan gizi yang dianjurkan maka tingkat konsumsi energi dan skor PPH actual penduduk Kabupaten Tanah laut masih sebesar 84,1 %, belum mencapai nilai standar Minimal yaitu 90 %. Dari capaian indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi menunjukkan belum berhasilnya pencapaian target yang ingin dicapai. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan karena terdapat selisih yang cukup tinggi pada kelompok konsumsi pangan tertentu dibandingkan dengan standar kecukupan konsumsi, antara lain :

- Masih tingginya konsumsi beras
- Masih rendahnya konsumsi umbi umbian, sayur dan buah
- Pola konsumsi masyarakat yang sukar dirubah terutama dalam konsumsi sayur dan buah
- Ketersediaan pangan untuk kelompok pangan tertentu masih kurang, misalnya di wilayah perikanan sayur dan buah kurang tersedia

Angka Kecukupan Energi dan Angka Kecukupan Protein. Namun kontribusi energi-energi dari 9 kelompok pangan belum menunjukkan keseimbangan, artinya konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut belum memenuhi kaidah konsumsi beragam, begizi, seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.31
Tingkat Pencapaian Energi Menurut Kelompok Pangan Penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Hari			Ideal Kkal/Kapita/Hari	SPM 90%
		Kkal/Kapita	%	% AKE*)		
1	Padi-padian	1.295	58.5	64.8	1000	900.0
2	Umbi-umbian	40	1.8	2.0	120	108.0
3	Pangan Hewani	296	13.4	14.8	240	216.0
4	Minyak dan Lemak	280	12.6	14.0	200	180.0
5	Buah/Biji Berminyak	16	0.7	0.8	60	54.0



6	Kacang-kacangan	45	2.0	2.2	100	90.0
7	Gula	108	4.9	5.4	100	90.0
8	Sayur dan Buah	87	3.9	4.3	120	108.0
9	Lain-lain	49	2.2	2.4	60	54.0
Total		2.215	100.0	110.7	2000	1,800.0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2000 Kkal/Kapita/Hari
SPM : Standar Pelayanan Minimum

Dari 9 (sembilan) kelompok pangan asupan energi yang paling tinggi disumbangkan oleh kelompok padi-padian yaitu sebesar 1.295 Kkal per kapita per hari kemudian disusul dari pangan hewani sebesar 296 Kkal perkapita per hari kemudian minyak dan lemak sebesar 280 kkal perkapita per hari, gula sebesar 108 kkal/kap/hari, 4 jenis ini semuanya sudah melebihi standar/ nilai idealnya utk asupan perharinya. Sayur dan buah, kacang-kacangan sedangkan umbi-umbian masih sedikit sekali dan yang paling kecil adalah buah / biji berminyak hanya sekitar 16 Kkal perkapita per hari.

Bila dilihat dari pencapaian energi menurut kelompok pangan. Maka tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Tanah Laut telah mencapai tingkat konsumsi energy yang lebih dari ideal beberapa kelompok pangan. Namun masih terdapat ada beberapa kelompok pangan yang lebih kecil nilainya dari batas ideal. Standar normative konsumsi padi-padian perkapita per hari adalah 1.000 Kkal sementara masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi jenis padi-padian hingga 1.295 Kkal. Konsumsi padi-padian idealnya adalah 50% sedangkan di Tanah Laut sebesar 58,5 %. Sedangkan standar normative konsumsi pangan sejenis umbi-umbian per kapita per hari adalah 120 Kkal, sementara masyarakat Kabupaten Tanah Laut mengkonsumsi pangan jenis ini baru mencapai 40 kkal per kapita per hari.

Pangan hewani mestinya dikonsumsi 240 Kkal per kapita per hari, sementara masyarakat Tanah Laut telah dapat mengkonsumsi pangan hewani sebanyak 296 Kkal. Minyak dan Lemak mestinya dikonsumsi 200 kkal per kapita perhari, masyarakat Tanah Laut mengkonsumsi lemak hingga 280 Kkal. Buah/biji berminyak mesti dikonsumsi 60 Kkal perkapita per hari, namun masyarakat Tanah Laut hanya 16 Kkal per kapita per hari.

Kacang-kacangan mesti dikonsumsi 100 Kkal per kapita per hari, namun warga Tanah Laut hanya mengonsumsi 44,7 Kkal. Demikian pula halnya Gula mesti dikonsumsi hingga 100 Kkal per kapita per hari. Namun dikonsumsi sebanyak 107,5 Kkal.

Sayur dan Buah-buahan mesti dikonsumsi 120 Kkal per kapita per hari faktanya yang dikonsumsi 87,0 Kkal per kapita per hari. Sedangkan bumbu-bumbuan dan minuman mesti dikonsumsi 60 Kkal per kapita per hari, sayangnya masyarakat Tanah Laut mengonsumsi bumbu-bumbuan dan minuman sebesar 49 Kkal Per kapita per hari.

Secara Keseluruhan Pola konsumsi pangan Kabupaten Tanah Laut masih belum optimal dikarenakan :

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
2. Masih rendahnya konsumsi pangan buah/biji berminyak, umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayur dan buah
3. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal
4. Diperlukan upaya untuk menganeekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
5. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system).

Apabila konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah tinggi skor PPH Konsumsi akan meningkat karena bobot dari kelompok pangan sayur dan buah dalam skor PPH konsumsi tinggi. Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatkan penyuluhan dan kampanye mengurangi konsumsi beras yang dilaksanakan secara terus menerus dan masif di seluruh Kabupaten Tanah Laut serta dukungan dari seluruh stakeholder yang ada agar terjadi perubahan mindset konsumsi beras.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH konsumsi yang ideal agar hidup menjadi sehat, aktif dan produktif.

3. Meningkatkan pembinaan pada masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui sosialisasi di kelompok wanita tani (KWT) dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), PKK dan posyandu.
4. Melaksanakan kegiatan Pemanfaatan pekarangan dengan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sehingga masyarakat dapat menyediakan pangan dan gizi secara mandiri tidak harus pergi kepasar atau warung yang jaraknya cukup jauh untuk dijangkau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir dan dipegunungan jauh dari penduduk, serta akses transportasi yang sulit.

Setelah dilakukan penilaian terhadap kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Tanah Laut berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) dengan rentang skor 0 hingga 100, dengan asumsi semakin tinggi skor PPH menunjukkan bahwa mutu atau kualitas pangan yang dikonsumsi semakin beragam, bergizi dan berimbang. Dari hasil perhitungan skor pola pangan harapan (PPH) mutu konsumsi masyarakat Tanah Laut mendapat skor PPH sebesar 84,1. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5.31
 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk
 Berdasarkan Data Susenas Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	307.4	1,295	58.5	64.8	0.5	29.2	32.4	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	33.7	40	1.8	2.0	0.5	0.9	1.0	2.5	1.0
3	Pangan Hewani	160.8	296	13.4	14.8	2.0	26.7	29.6	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	31.1	280	12.6	14.0	0.5	6.3	7.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	2.8	16	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4
6	Kacang-kacangan	19.8	45	2.0	2.2	2.0	4.0	4.5	10.0	4.5
7	Gula	29.4	108	4.9	5.4	0.5	2.4	2.7	2.5	2.5

8	Sayur dan Buah	206.3	87	3.9	4.3	5.0	19.6	21.7	30.0	21.7
9	Lain-lain	98.4	49	2.2	2.4	-	-	-	-	-
	Total		2,215	100.0	110.7		89.7	99.3	100.0	84.1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi : 2000 Kkal/Kapita/Hari

Untuk padi-padian, minyak dan lemak, Gula sudah mencapai skor PPH maksimum sedangkan umbi-umbian, pangan hewani, buah / biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah masih dibawah skor maksimal, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas pola konsumsi masyarakat Tanah Laut belum dikatakan memenuhi standar beragam, bergizi dan berimbang.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat Tanah Laut selama 4 tahun terakhir berdasarkan skor pola pangan harapan (PPH) maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya , hal ini dapat dilihat pada Tabel Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor PPH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018– 2021.

Tabel 3.5.32
Perkembangan Konsumsi Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2021

Tahun	Energi Justifikasi	Skor PPH Justifikasi
2018	2.058	86.6
2019	2.211	83.3
2020	2.130	82.8
2021	2.215	84,1

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel di atas dapat dilihat skor PPH tahun 2018 senilai 86.6 dan tahun 2019 skor PPH turun menjadi 83,3. Pada tahun 2020 skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 82,8. sedangkan tahun 2021 skor PPH naik lagi menjadi 84,1. Dilihat dari komposisi Angka Kecukupan Gizi, Konsumsi Dalam RPJMN 2020 - 2024, indikator skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan. Ada beberapa alternatif yang mungkin menyebabkan skor PPH Konsumsi Pangan Penduduk Tanah Laut mengalami penurunan, walaupun tahun 2021 ini mengalami kenaikan dari tahun 2020, namun

masih belum sesuai dengan skor ideal yang diharapkan, hal tersebut disebabkan antara lain jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan rumah tangga seperti kita ketahui bahwa dalam 2 tahun terakhir ini kasus covid-19 tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan hal ini sangat berimbas kepada pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap, faktor lainnya adalah pendidikan, dan pantangan makanan.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya ketahanan pangan di dukung Oleh 9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan pagu Rp 182,995,327,371.00 dan realisasi sebesar Rp 150,661,445,053.00 atau sebesar 82,33%.

Tabel 3.5.34
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,276,555,732.00	1,163,537,432.00
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,052,720,188.00	652,702,185.00
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	202,378,876.00	133,081,868.00
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	86,075,170.00	56,734,651.00
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178,655,350,953.00	147,594,648,587.00
6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	858,034,330.00	425,889,123.00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	357,850,696.00	284,842,616.00
8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	330,170,406.00	203,850,462.00
9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00	146,158,129.00
	Jumlah	182,995,327,371.00	150,661,445,053.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 19

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.35
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	58,06	69,82	60,96	68,70	112,7%
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten	%	74,19	82,66	87	87	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							106,35%

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 adalah 68,70 (sedang), telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 60,90 dengan tingkat capaian 112,7%. Nilai ini mengalami penurunan 1,12 point jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 69,82 (sedang). Capaian tersebut telah mencapai 113,32% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 61,712.

Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 adalah 69,82 mengalami peningkatan sebesar 11,76 point dari tahun 2019 yaitu sebesar 58,06.

Berdasarkan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2020, nilai Indeks kualitas lingkungan hidup selama tahun 2016 – 2021 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5.36
IKLH Kabupaten Tanah Laut tahun data 2016 – 2021

Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Tutupan Hutan	IKLH	Kategori
2016	88,63	45,56	41,14	56,71	Kurang
2017	95,81	50	40,40	59,90	Kurang
2018	90,88	51	39,78	58,48	Kurang
2019	90,68	50	39,65	58,06	Kurang
2020	91,29	60,67	45,83	69,82	Cukup Baik
2021	91,85	58,42	43,54	68,70	Sedang

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Tanah Laut dan hasil analisis tahun 2021

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi IKLH mengalami fluktuatif yakni pada tahun 2018 menjadi 58,42 yang sebelumnya tahun 2017 sebesar 59,42, sedangkan tahun 2016 lebih rendah yakni 56,71 dan secara keseluruhan dalam kategori kurang.

Perubahan tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh nilai IKU yang cukup baik yakni sebesar 90,88 (meskipun menurun dibandingkan tahun 2017) dan IKA naik sebesar 1 poin, sedangkan IKL menurun sebesar -0,62.

Untuk periode pemantauan 2019 untuk IKLH mengalami penurunan sebesar - 0,42 poin. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka IKLH yaitu sebesar 69,82 atau meningkat sebesar 11,76 poin.

Pada tahun 2021 terjadi penurunan IKA sebesar -2,25 point dan penurunan IKL sebesar -2,29 poin. Namun terjadi peningkatan IKU sebesar 0,56 poin. Sehingga angka IKLH mengalami penurunan 1,12 poin.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta

sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Kualitas Air

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik. Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup.

Pemantauan kualitas air permukaan periode I dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 4 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

1. Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah DO, BOD, Fe, TSS, Total Posfat dan Total Coliform
2. Dari hasil analisa kualitas parameter air pada air laut berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui parameter TSS dan orthofosfat yang tidak memenuhi baku mutu
3. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.68 – 2.41 dimana terdapat 3 (tiga) dengan status memenuhi dan 9 (enam) titik pantau dengan status cemar ringan.

4. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas I pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.82 – 1.43 dimana terdapat 2 (dua) dengan status memenuhi dan 10 (sepuluh) titik pantau dengan status cemar ringan.
5. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar pada semua titik pantau berada pada range 0.51 – 1.16 dimana terdapat 10 (sepuluh) dengan status memenuhi dan 2 (dua) titik pantau dengan status cemar ringan.
6. Dari hasil analisa indeks pencemar untuk 7 (tujuh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Colitinja, Coliform, DO Total Fosfat dan TSS dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk kategori kelas I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar 53.33 dengan kelas kategori cemar ringan.
7. Dari hasil perhitungan indeks pencemar untuk 7 (tujuh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Colitinja, Coliform, DO Total Fosfat dan TSS dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk kategori kelas II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar 66.67 dengan kelas kategori cemar ringan
8. Dari hasil perhitungan Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) untuk 10 (sepuluh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Fecal Coliform, DO Total Fosfat, TSS, TDS, NH₃, NO₃ dan pH dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai SISKANA Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 adalah sebesar 88.79 dengan kelas kategori baik
9. Dari hasil analisa daya tampung beban pencemar pada DAS Asam – asam, DAS Kintap, DAS Maluka dan DAS Tabanio diketahui bahwa parameter yang melebihi daya tampung beban pencemar adalah BOD dan Fe (Besi) Terlarut.

Tabel 3.5.37

Analisa kualitas parameter air Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

No	Parameter	Satuan	Baku	Sungai Kintap			Sungai Asam-Asam			Sungai Tabonio			Sungai Maluka		
			Mutu	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir
1	p H	-	06-Sep	6,9	6,9	7.2	6.9	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.4	7.2	3.2
2	Temperature	°C	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	<50	<1.857	11	16	3	30	17	65	62	28	49	9	1.857
4	TDS (Total Padatan Larutan)	mg/L	<1000	116	129	133.5	95.5	132	126	104	104	92	115	104	267
5	Kekeruhan	NTU	-	5.7	18.7	26.3	3.4	41.5	35.4	99.1	294.3	43.1	138.3	28.2	3.2
6	Sahnitas*	mg/L	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.1
7	DHL (Daya Hantar Listrik)	μ/cm	-	150.8	181.1	205.3	125.3	179.6	163	142.9	95.5	118.6	107.2	104.7	682.6
8	DO (Oksigen terlarut Laboratorium)	mg/L	≥6	4.8	4.4	4.3	4.8	4.7	4.7	4.2	4.3	5.7	4.2	4.8	5.2
9	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	≤2	2.1	2.5	2.6	2.6	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.4
10	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	≤10	6.9	6.1	7.5	7.5	6.4	7.1	7.8	6.9	6.6	6.6	6.8	7.5
11	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	≤0,3	0.09	0.17	0.2	<0.04	0.89	0.0076	0.49	0.82	0.18	0.37	0.15	4.42
12	Cd (Kadmium) Terlarut	mg/L	≤0,1	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04
13	Hg (Raksa) Terlarut	mg/L	≤0,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Amoniak (NH ₃ -N)	mg/L	≤0,5	<0.015	<0.015	0.04	0.015	0.02	0.015	0.03	0.13	0.08	0.05	0.02	0.03
15	Nitrat Sebagai N(NO ₃)*	mg/L	≤10	0.04	0.06	0.14	0.08	0.14	0.13	0.11	1.03	0.021	0.3	0.06	0.01
16	Total Fosfat Sebagai P	mg/L	≤0,2	<0.015	0.05	<0.015	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	<0.015	0.02	0.02	<0.015
17	Feca Coliform*	MPN/100 ml	≤100	20	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
18	Total Coliform*	MPN/100 ml	≤1000	110	750	1300	750	370	370	1020	1500	1100	1500	450	950

Pemantauan kualitas air permukaan periode II dilakukan pada 16 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan

di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanah Bumbu dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

1. Dari hasil pemantauan pada 16 (dua belas) titik pantau air permukaan dan analisa berdasarkan baku mutu air sungai kelas I sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI Baku Mutur Air Nasional untuk Sungai Kelas I diketahui bahwa jumlah parameter yang memenuhi baku mutu sebanyak 251 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 53 parameter parameter sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 83 % dari total parameter sebanyak 304 parameter
2. Dari hasil analisa pada setiap titik pantau diketahui bahwa pada periode terdapat 7 jenis parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang terdiri dari parameter pH pada 2 titik pantau, TSS pada 5 titik pantau, DO pada 15 titik pantau, COD pada 3 titik pantau, Fe (Besi) Terlarut pada 3 titik pantau, Fecal Coliform pada 15 titik pantau dan Total Coliform pada 10 titik pantau
3. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 16 (enam belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui nilai indeks pencemar berada pada range 1.16 – 5.21 sehingga status air pada semua titik pantau memiliki status cemar ringan – cemar sedang. Untuk nilai Indeks Pencemar (IP) tertinggi berada pada titik pantau DAS Maluka bagian hilir dengan nilai 5.21 dan status cemar sedang sedangkan nilai terendah berada pada titik pantau DAS Kintap bagian tengah dengan nilai 1.16 dan status cemar ringan
4. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas I pada 16 (enam belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui nilai indeks pencemar berada pada range 0.71 – 5.70 sehingga status air berada dari status memenuhi hingga ke cemar sedang. Untuk nilai Indeks Pencemar (IP) tertinggi berada pada titik pantau DAS

Tabanio bagian hulu dengan nilai 6.21 dan status cemar sedang sedangkan nilai terendah berada pada titik pantau DAS Kintap bagian tengah dengan nilai 0.71 dan status memenuhi.

5. Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II pada 16 (enam belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui bahwa nilai indeks pencemar berada pada range 0.21 – 3.13 sehingga status air berada dari status memenuhi hingga ke cemar ringan. Untuk nilai Indeks Pencemar (IP) tertinggi berada pada titik pantau DAS Tabanio bagian hulu dengan nilai 3.13 dan status cemar ringan sedangkan nilai terendah berada pada titik pantau DAS Asam - asam bagian hulu dengan nilai 0.21 dan status memenuhi.
6. Dari hasil perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk 12 (dua belas) titik pantau seperti pada tahap I tahun 2021 melalui pembobotan perhitungan indeks pencemar untuk 8 parameter yang terdiri pH, TSS, BOD, COD, DO, total posfat, Nitrat dan Fecal Coliform dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 untuk kategori sungai kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI adalah sebesar 45.00 dengan kelas kategori cemar sedang.
7. Dari hasil perhitungan proyeksi nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk periode selanjutnya berdasarkan penambahan titik pantau pada DAS Sabuhur dan Swarangan maka didapatkan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk 16 (enam belas) melalui pembobotan perhitungan indeks pencemar untuk 8 parameter yang terdiri pH, TSS, BOD, COD, DO, total posfat, Nitrat dan Fecal Coliform dari setiap titik pantau maka didapatkan proyeksi nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 untuk kategori sungai kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI adalah sebesar 46.25 dengan kelas kategori cemar sedang
8. Dari hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik pantau dengan kategori sungai kelas I Tahun 2021

- didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kategori sungai kelas I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar 50.00 dengan kelas kategori cemara ringan
9. Dari hasil perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk 12 (dua belas) titik pantau seperti pada tahap I tahun 2021 melalui pembobotan perhitungan indeks pencemar untuk 8 parameter yang terdiri pH, TSS, BOD, COD, DO, total posfat, Nitrat dan Fecal Coliform dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 untuk kategori sungai kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI adalah sebesar 58.33 dengan kelas kategori cemara ringan.
 10. Dari hasil perhitungan proyeksi nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk periode selanjutnya berdasarkan penambahan titik pantau pada DAS Sabuhur dan Swarangan maka didapatkan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk 16 (enam belas) melalui pembobotan perhitungan indeks pencemar untuk 8 parameter yang terdiri pH, TSS, BOD, COD, DO, total posfat, Nitrat dan Fecal Coliform dari setiap titik pantau maka didapatkan proyeksi nilai indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 untuk kategori sungai kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI adalah sebesar 60.00 dengan kelas kategori cemara ringan.
 11. Dari hasil perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik pantau dengan kategori sungai kelas I Tahun 2021 didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kategori sungai kelas I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sebesar 61.67 dengan kelas kategori cemara ringan
 12. Dari hasil perhitungan Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) pada 12 (dua belas) titik pantau seperti pada tahap I tahun 2021 untuk 10 (sepuluh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Fecal Coliform, DO Total Fosfat, TSS, TDS, NH₃, NO₃ dan pH dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai SISKANA Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 adalah sebesar 84.33 dengan kelas kategori baik.
 13. Dari hasil perhitungan proyeksi Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) untuk

periode selanjutnya berdasarkan penambahan titik pantau pada DAS Sabuhur dan Swarangan maka didapatkan hasil perhitungan nilai indeks kualitas air (IKA) untuk 16 (enam belas) untuk 10 (sepuluh) parameter yang terdiri parameter BOD, COD, Fecal Coliform, DO Total Fosfat, TSS, TDS, NH_3 , NO_3 dan pH dari setiap titik pantau maka didapatkan nilai SISKANA Kabupaten Tanah Laut Tahap II Tahun 2021 adalah sebesar 85.70 dengan kelas kategori baik

14. Dari hasil perhitungan nilai Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik pantau Tahun 2021 didapatkan nilai Sistem Kualifikasi IKA – INA (SISKANA) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 adalah sebesar 87.53 dengan kelas kategori baik
15. Dari hasil perhitungan daya tampung beban pencemar dengan metode neraca massa pada setiap aliran DAS di Kabupaten Tanah Laut diketahui bahwa ada 3 jenis parameter yang kandungannya dalam air permukaan telah melebihi daya tampung beban pencemar yaitu parameter TSS, COD dan Fe (besi) terlarut
16. Dari hasil perhitungan daya tampung beban pencemar dengan metode beban pencemar maksimum pada setiap aliran DAS di Kabupaten Tanah Laut diketahui bahwa ada 3 jenis parameter yang kandungannya dalam air permukaan telah melebihi batas beban pencemar maksimum dan daya tampung beban pencemar yaitu parameter COD, TSS dan Fe (besi) terlarut
17. Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas I diketahui bahwa nilai IKA mengalami Dari grafik trend diatas, diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 3.33 dari 53.55 menjadi 50.00 dimana hal ini dipengaruhi perubahan status mutu air dari setiap tahap pemantauan
18. Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5.00 dari 66.67 menjadi 61.67 dimana hal ini dipengaruhi perubahan status mutu air dari setiap pemantauan.

Tabel 3.5.38
Analisa Kualitas Parameter Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Periode II
berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu	DAS KINTAP			DAS ASAM - ASAM			DAS TABANIO			DAS MALUKA			DAS SABUHU R		DAS SWARAN	
				Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Tengah	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Temperature	°C	Dev 3	21.3	21.1	21.1	13.4	14.9	21.8	15	15	16.3	21.3	20.2	21.5	20.5	20.7	20.7	20.2
2	Ph	-	6 - 9	7.84	7.75	7.43	7.45	7.25	7.81	7.27	7.16	7.24	8.22	4.1	3.77	7.39	7.12	6.98	6.38
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	≤ 40	27	25	99.67	3.25	34.89	109.5	228.5	135.33	165.33	20.91	18.6	24.91	37.6	9.43	13.85	16.15
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	≤ 1000	92	138	162	102	130	114	140	116	140	104	702	374	134	84	98	3.294
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	93.95	158.45	178.25	144.4	82.55	150.25	128.4	113.7	114	103.3	512	72	106.8	59.2	70.75	616
6	Salinitas*	mg/L	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.3	0	0	0	3.3
7	DO (Oksigen Terlarut) Laboratorium*	mg/L	≥ 6	6	5.5	5.4	5.8	5.4	5.4	5.8	5.4	5.5	5.6	4.4	5.3	5.4	5.7	5.6	5.8
8	BOD5 (Biological Oxygen Demand)*	mg/L	≤ 2	< 0.77	< 0.77	1	< 0.77	2.1	< 0.77	1	0.8	< 0.77	< 0.77	< 0.77	< 0.77	< 0.77	0.9	0.9	< 0.77
9	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	≤ 10	13.6	6.13	9.62	4.63	14.1	12.61	< 2.9	7.12	7.12	< 2.9	4.13	6.13	3.64	7.62	3.14	5.13
10	Kekeruhan	NTU	-	37.8	35.4	201.9	6.1	55.8	152.9	501.4	241.9	309.9	59.5	59.3	69.5	59.7	22	29.3	18.3
11	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	≤ 0.3	0.177	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.21	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.22	5.147	5.331	0.122	0.382	0.197	< 0.05
12	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	≤ 0.01	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	0.014	< 0.013	0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013	< 0.013
13	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	≤ 0.001	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.000622	< 0.000005	0.000193	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
14	Amoniak (NH3-N)	mg/L	≤ 0.1	0.04	0.03	0.17	< 0.015	< 0.015	< 0.015	0.02	0.02	< 0.015	0.03	0.04	0.13	0.03	0.04	0.04	0.04
15	Nitrat Sebagai N (NO3)	mg/L	≤ 10	0.33	0.52	0.4	0.21	0.18	0.25	0.38	0.46	0.63	0.54	0.34	0.11	0.09	0.21	0.1	0.14
16	Total Fosfat sebagai P	mg/L	≤ 0.2	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015
17	Fecal Coliform	MPN /100 ml	≤ 100	920	93	2400	270	340	270	3300	2400	490	3300	1300	1100	1400	140	270	920
18	Total Coliform	MPN /100 ml	≤ 1000	920	1200	2400	3300	340	270	3300	2400	490	3300	1300	1100	1400	1700	270	920
19	Kecepatan	m/s	-	0.6	0.8	0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.9	0.7	0.5	0.3	1.1	0.7	1.1	1	0.4

2) Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan deskripsi, analisis data hasil perhitungan dan pemantauan kualitas udara ambien dan kebisingan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berkategori Baik, namun terdapat juga kategori Sedang untuk parameter Sulfur dioksida (SO₂), kategori Tidak Sehat untuk parameter PM10 dan PM2,5 dan kategori Sangat Tidak Sehat untuk parameter TSP di satu titik kawasan Padat Transportasi.
- 3) Tingkat kebisingan di Kabupaten Tanah Laut pada 4 (Empat) titik pengukuran sebagian besar masih memenuhi Baku Mutu dan hanya 1 (satu) titik pengambilan sampel yang melebihi baku mutu tingkat kebisingan yaitu Kawasan Padat Transportasi.
- 4) Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur

Tabel 3.5.39

Hasil Uji Kualitas Udara Ambien Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Parameter	Satuan	Buku Mutu	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	Depan PT.Indo food Tbk	Jl.A.Yani KM.123Si mpang 4 Asam Asam	Ket
1	Suhu	°C	-	26,5	27,8	28,3	31,0	KAN
2	Kelembapan	% RH	-	90,0	84,5	84,3	70,5	KAN
3	Arah Angin Ke	Dari	-	Utara	Barat	Barat	Barat	KAN
4	Kecepatan Angin	m/s	-	0,32	0,33	0,40	0,65	KAN
5	Tekanan	Hpa	-	1005,3	1008,2	1006,3	1004,7	KAN
6	TSP	µg/Nm ³	230 (24 Jam)	38,7	25,3	27,4	281,5	KAN
7	PM 10	µg/Nm ³	75 (24 Jam)	13,3	22,3	20,0	181,4	-
8	PM 2,5	µg/Nm ³	55 (24 Jam)	6,6	11,8	4,8	144,7	-
9	Timbal	µg/Nm ³	2 (24 Jam)	< 0,051	< 0,051	< 0,051	< 0,051	KAN
10	Karbon Monoksida (co)	µg/Nm ³	10000 (1 Jam)	550	515	378	641	KAN
11	Nitrogen Dioksida (No ₂)	µg/Nm ³	200 (1 Jam)	< 34,6	< 34,6	< 34,6	< 34,6	KAN
12	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	< 112,1	< 112,1	< 112,1	< 112,1	KAN

13	Ozon (O ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	< 5	14,0	< 5	< 5	KAN
----	------------------------	--------------------	-------------	-----	------	-----	-----	-----

Tabel 3.5.40
 Hasil Uji Tingkat Kebisingan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	65	57,0	KAN
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	51,6	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	61,0	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	60	71,9	

5) Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya.

Angka kualitas lahan mengalami penurunan yang semula 45,83 menjadi 43,54 yaitu sebesar -2,29 poin. Luas Tutupan Lahan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.41
 Hasil perhitungan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

Tutupan	Luas (Ha)
Luas Tutupan Hutan	58743,94
Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	36140,73

Luas Belukar pada Kawasan berfungsi Lindung	2844,12
Luas RTH	10389,13656
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3519,209447
IKL	43,54

Sumber: KLHK, 2022

b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten

Capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW tahun 2021 adalah 87%, mencapai target yang ditetapkan yaitu 87%, dengan tingkat capaian 100%. Mengalami peningkatan 4,34% sebesar dari tahun 2020 yaitu sebesar 82,66%. Capaian tersebut telah mencapai 88,78% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 98%.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupaya meningkatkan persentase kesesuaian tata ruang wilayah dengan RTRW Kabupaten. Saat ini terdapat 13% yang tidak sesuai dengan RTRW dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW ditetapkan yaitu sebelum tahun 2016.

Berdasarkan indikasi pola ruang diatas, yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting terindikasi seluas $\pm 13\%$ dari luas Kabupaten tanah Laut atau seluas $\pm 47.207,55$ Ha, dan terindikasi pemanfaatan ruang telah mencapai $\pm 87\%$ atau seluas $\pm 315.927,45$ Ha.

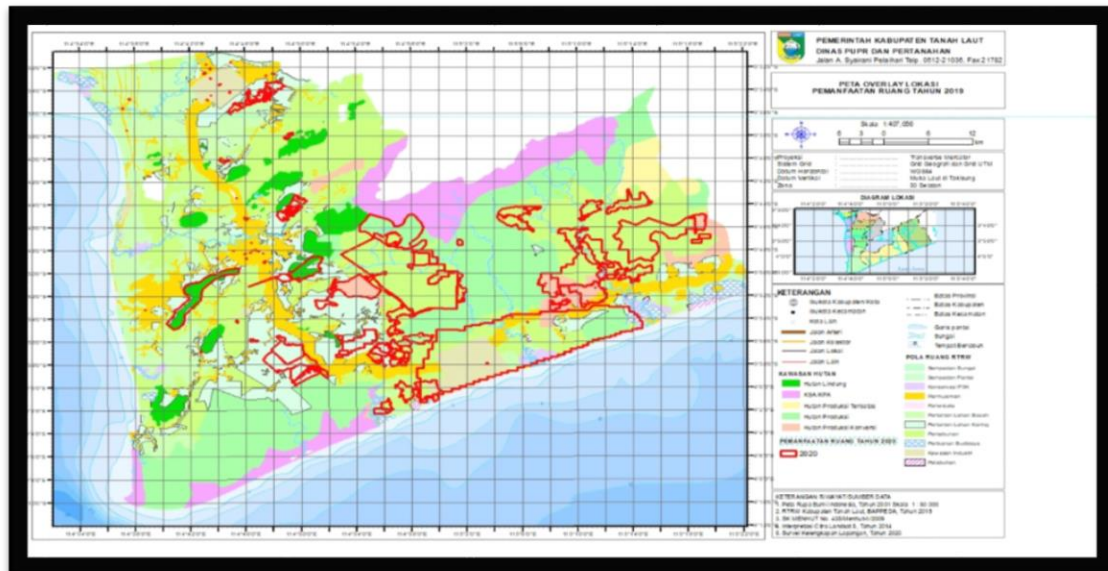
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Rencana tata ruang wilayah ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016- 2036. Dengan dasar Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah laut melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan melakukan upaya upaya agar tata ruang wilayah sesuai dengan Perda RTRW minimal 87% yaitu :

- 1) Membangun komitmen antar SKPD terkait agar segala bentuk perizinan yang menggunakan perencanaan Tata Ruang sesuai dengan Perda RTRW.
- 2) mewajibkan setiap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup wajib mendapatkan pertek

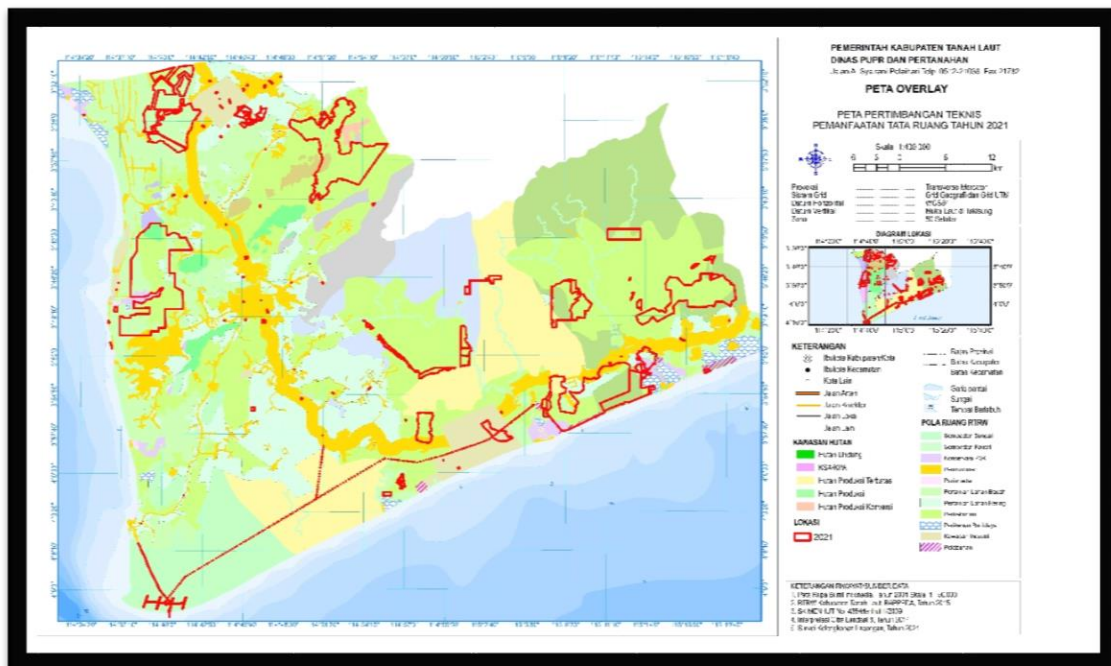
- tata ruang terlebih dahulu sehingga setiap izin pemanfaatan sudah dapat dipastikan sesuai peruntukannya.
- 3) Mewajibkan setiap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus mendapatkan pertek tata ruang terlebih dahulu, sehingga peruntukan dapat dipastikan sesuai.
 - 4) Melaksanakan pengecekan lapangan, apakah pembangunan dilapangan sudah sesuai dengan perda RTRW.

Untuk 13% yang dianggap tidak sesuai dengan perda RTRW ini terjadi dikarenakan pembangunan dilaksanakan sebelum Perda RTRW disahkan di tahun 2016. Untuk 13% yang tidak sesuai dengan RTRW akan disesuaikan melalui revisi perda RTRW tahun 2022.

Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2020



Peta overlay lokasi pemanfaatan ruang tahun 2021



Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup di dukung oleh 8 Program dengan pagu Rp 30,175,238,951.00 dan realisasi sebesar Rp 28,555,302,313.00 atau sebesar 94,63%.

Tabel 3.5.42
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	213,858,016.00	204,074,435.00
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4,806,231,872.00	4,456,380,491.00
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9,933,521,872.00	9,633,843,443.00
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1,475,462,400.00	1,372,628,808.00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	365,904,492.00	265,941,556.00
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	115,021,596.00	89,482,985.00
7	Program Pengelolaan Persampahan	13,202,210,637.00	12,487,454,943.00



8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	63,028,066.00	45,495,652.00
	Jumlah	30,175,238,951.00	28,555,302,313.00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 20

Meningkatnya pembinaan desa

Meningkatnya pembinaan desa diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.43
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Desa Kategori Maju	%	19,23	21,54	24	33,08	137,83 %
2	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa	5	5	5	6	120%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							128,91%

a. Persentase Desa Kategori Maju

Untuk menghitung persentase desa kategori maju adalah dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa.

Realisasi indikator persentase desa kategori maju tahun 2021 adalah 33,08 %, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 24% dengan tingkat capaian kinerja 137,83%. Mengalami peningkatan sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 21,54%. Realisasi tersebut sudah mencapai 118,14% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 28%.

Perhitungan persentase desa kategori maju diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Persentase desa kategori maju

= $\frac{\text{Jumlah desa kategori maju}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$

Jumlah desa

= 43 Desa x 100%

130 Desa

= 33,08%

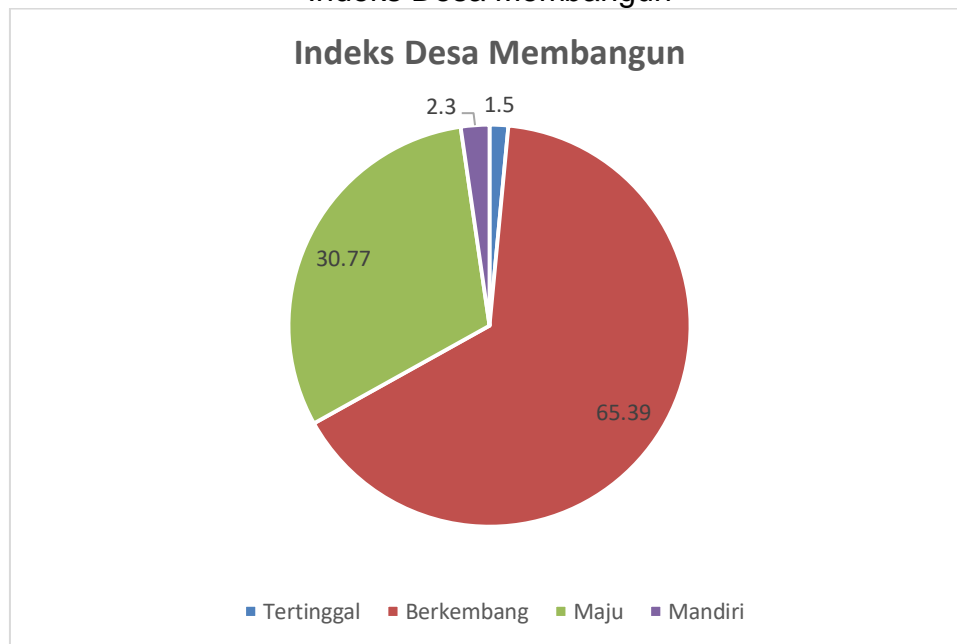
Tabel 3.5.44
Klasifikasi Status Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS IDM				
			SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
1	TAKISUNG	12	-	-	9	3	-
2	JORONG	11	-	-	7	3	1
3	PELAIHARI	15	-	-	10	5	-
4	KURAU	11	-	-	8	3	-
5	BATI-BATI	14	-	-	10	4	-
6	PANYIPATAN	10	-	-	6	4	-
7	KINTAP	14	-	-	7	6	1
8	TAMBANG ULANG	9	-	-	8	1	-
9	BATU AMPAR	14	-	-	6	7	1
10	BAJUIN	9	-	-	5	4	-
11	BUMI MAKMUR	11	-	2	9	-	-
JUMLAH		130	-	2	85	40	3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masih ada 2 Desa kategori tertinggal, 85 Desa kategori berkembang, 40 Desa kategori maju dan 3 Desa kategori mandiri dari total 130 desa se Kabupaten Tanah Laut.

Grafik 3.5.20
Indeks Desa Membangun



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa Kategori Maju Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebesar 33,08%, mengalami peningkatan sebesar 11,54% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 21,54%. Untuk tahun 2020 terdapat 2 desa mandiri dan 4 desa tertinggal sedangkan di tahun 2021 terdapat 3 desa dengan kategori mandiri dan masih ada 2 desa dengan kategori tertinggal.

Tabel 3.5.45

Kriteria Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 – 2021

No	Kriteria IDM	Jumlah Desa		
		2019	2020	2021
1	Sangat Tertinggal	1	0	0
2	Tertinggal	15	4	2
3	Berkembang	89	98	85
4	Maju	25	26	40
5	Mandiri	0	2	3
Jumlah		130	130	130

Indikator yang digunakan dalam menetapkan status desa dalam indeks desa membangun adalah IKS : Indeks Ketahanan Sosial, IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi, IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Sedangkan klasifikasi status desa dibedakan menjadi lima (5) status, yakni : (i) Desa sangat tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri.

Tabel 3.5.46
Klasifikasi Desa

No	Status Desa	Nilai Batas
1.	Sangat tertinggal	$\leq 0,4907$
2.	Tertinggal	$> 0,4907$ dan $\leq 0,5989$
3.	Berkembang	$> 0,5989$ dan $\leq 0,7072$
4.	Maju	$> 0,7072$ dan $\leq 0,8155$
5.	Mandiri	$> 0,8155$

Ada 3 pendekatan yang diambil oleh Kementerian Desa PDTT untuk mendorong desa semakin lebih cepat dalam melaksanakan pembangunan. Pertama, Jaring Komunitas Wiradesa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbanyak kesempatan dan pilihan masyarakat desa dalam upaya menegakkan hak dan martabatnya, serta peningkatan memajukan kesejahteraan, baik sebagai individu, keluarga maupun kolektiva. Sampai saat ini masalah yang dihadapi masyarakat desa adalah ketidakberdayakan dan marjinalisasi. Masalah inilah yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu diharapkan dengan Jaring Komunitas Desa ini mampu mendorong ekspansi kapabilitas dengan memperkuat daya pada berbagai aspek kehidupan manusia warga Desa yang menjangkau aspek nilai dan moral, serta pengetahuan LokalDesa.

Kedua, Lumbung Ekonomi Desa. Desa sebagai jenis entitas wilayah terkecil. Dalam suatu Negara, memiliki potensi sumber daya yang sangat beragam. Ketika potensi tersebut mampu untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa

sendiri maka akan menjadi lumbung komoditas ekonomi. Pengembangan lumbung ekonomi tidak akan pernah lepas dengan masalah modal, jaringan dan informasi. Oleh karena itu lembaga ekonomi yang dibentuk di desa harusnya sudah mempunyai kapasitas dan kualitas yang sudah mumpuni. Dalam Konteks ini BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penggerak perekonomian harus mampu dan tanggap dengan kesempatan dan peluang ekonomi yang bias dikembangkan. Ketiga, Lingkar Budaya Desa. Budaya desa merupakan ruh keterkaitan emosional warga yang terbentuk dari kebersamaan persaudaraan, kekerabatan dan kolektivitas yang mengakar lama dalam masyarakat. Budaya desa yang seperti ini akan mampu mengarahkan, membimbing secara kolektif untuk tetap pada jalur dan tujuan program pembangunan. Norma dan nilai budaya desa yang telah ada sejak lama secara otomatis akan mengontrol program tersebut hingga menghasilkan kemajuan hingga sampai pada kesejahteraan masyarakat. Tiga pendekatan inilah yang kemudian menghasilkan tiga kategori dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi (Lingkungan).

Tabel 3.5.47
Klasifikasi Status Desa Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	KRITERIA IDM	JUMLAH DESA
1	Sangat Tertinggal	0
2	Tertinggal	2
3	Berkembang	85
4	Maju	40
5	Mandiri	3
Jumlah		130

Derap pembangunan di wilayah perdesaan di Kabupaten Tanah Laut terus melaju pesat. Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut mulai terus ditingkatkan dari tahun 2020 sampai sekarang, khususnya mengenai perkembangan kemajuan di 130

Desa. Dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, maka diperlukan ketersediaan data dasar Pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana ketentuan Permendes PDTT-RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri.

Target kenaikan status Desa selain didasarkan pada capaian prestisius tahun lalu, juga dikarenakan masifnya pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut. Baik yang mempergunakan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dari 130 desa di Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari 11 Kecamatan, pada tahun 2020 di Kabupaten Tanah Laut masih memiliki Desa Tertinggal, yakni sebanyak 4 Desa (3,07 persen) tapi pada tahun 2021 Desa Tertinggal berkurang menjadi 2 Desa (1,5 persen). Kemudian, Desa Berkembang pada tahun 2020 sebanyak 98 Desa (75,38 persen) turun menjadi 85 Desa (65,38 persen) pada tahun 2021. Desa Maju pada tahun 2020 sebanyak 26 Desa (20 persen) naik menjadi 40 Desa (30,77 persen) pada tahun 2021. Dan Desa Mandiri pada tahun sebelumnya ada 2 Desa (1,54 persen) sekarang pada tahun 2021 menjadi 3 Desa (2,3 persen).

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah pada semua tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dan tidak ketinggalan partisipasi para Pendamping Desa serta semua pihak yang terkait. Karena itu, sinergi harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga status Desa Tertinggal tidak ada lagi di Kabupaten Tanah Laut ini, semuanya sudah naik menjadi Desa Berkembang, Maju dan Desa Mandiri.

Pembangunan desa merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sehingga banyak upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Program peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Sebesar 50%, dari

tahun 2018 – hingga 2023 nanti. Pada tahun 2020 dan 2021 Desa dapat membangun desa dalam segala dimensi, baik itu pembangunan infrastruktur (jalan desa, saluran irigasi, jalan pertanian) yang memudahkan akses masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan pagelaran budaya di desa, peningkatan kualitas sumberdaya manusia desa melalui kegiatan pelatihan kepada pemuda di desa misalnya tata rias, memasak, perbengkelan dan lain-lain. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tanah Laut untuk pagu tahun anggaran 2018-2021 adalah sebesar :

- a. Tahun 2018, ADD yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp. 76.717.987.513,00 atau 10% dari jumlah DAU dan DBH yang diterima, untuk 130 Desa di Kabupaten Tanah Laut.
 - b. Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 132.096.433.930,00 atau mengalami kenaikan 72% dari tahun 2018.
 - c. Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 138,765,257,820,00 atau mengalami kenaikan 81% dari tahun 2018 dan 5% dari tahun 2019.
 - d. Realisasi bantuan keuangan ADD tahun 2021 sebesar Rp. 115.040.966.190 dari total anggaran Rp. 115.040.966.190 dengan persentase capaian 100%.
2. Bupati mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten sejak Tahun 2019 untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi keuangan dan kinerja, dan di tahun 2019 telah dilakukan audit kepada 109 Desa dari total 130 Desa dan di tahun 2020 telah dilaksanakan audit kepada 29 Desa dan pada Tahun 2021 dilaksanakan audit penyelenggaraan terhadap desa sebanyak 11 Desa dikarenakan 2 tahun terakhir terjadi adanya pandemi Covid 19.

Kegiatan-kegiatan pengawasan dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

- a. Pengawasan kebijakan pengelolaan APBDesa yang lebih mengutamakan pada pemberdayaan tenaga kerja dan potensi lokal secara mandiri dalam pengerjaan kegiatan pembangunan dengan fokus pada aspek efektivitas dan efisiensi yang menggunakan anggaran dana desa.
- b. Pengawasan pengelola administrasi dan pelaporan penyelenggaraan

- pemerintahan dan BPD dalam pengelolaan APBDesa sehingga tidak terjadi kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pemberian sosialisasi dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Perangkat dan BPD Desa.
 - d. Melakukan Reviu penyaluran dan Penggunaan APBDesa setiap Triwulan.
 - e. Pengawasan pengelola Penatausahaan Aset Desa.
 - f. Pengawasan terhadap efektifitas kinerja Perangkat Desa, Penggunaan tenaga kerja, organisasi desa yang telah dibentuk.
 - g. Melakukan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - h. Melakukan koordinasi terhadap dugaan adanya penyelewengan dana desa dari masyarakat diantaranya dengan meminta hasil laporan audit dari Inspektorat.
3. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan upaya sebagai berikut:
- a. Melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan SKPD lain (Forum SKPD) dalam rangka bersama-sama menjadikan desa-desa yang tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri yang merupakan sasaran dari forum ini sehingga semua program yang ada di masing-masing SKPD dapat bersinergi yang sudah barang tentu untuk peningkatan status desa tersebut.
 - b. Mengawal penggunaan ADD desa dengan melaksanakan monitoring serta evaluasi penggunaan DD dan ADD yang dikucurkan pemerintah pada desa-desa yang status desanya masih sangat tertinggal dan tertinggal apakah sudah sesuai dan mendukung dalam peningkatan status desanya.
 - c. Melakukan penguatan Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dll) serta BumDes melalui kegiatan bimtek/pelatihan/pembinaan agar mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mendukung percepatan peningkatan status desa.
 - d. Melaksanakan pembinaan desa yang memiliki ciri khas untuk terus meingkatkan potensi desa melalui kerjasama dengan SKPD terkait, agar

menumbuhkan usaha-usaha kecil di desa.

Upaya-upaya kedepan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selain terus melaksanakan kegiatan kegiatan yang baik yang telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan yang masih dianggap kurang juga akan menjalankan strategi percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa yaitu meningkatkan keterpaduan, koordinasi, dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan kemandirian Desa di Kabupaten Tanah Laut.

b. Jumlah Desa Dibina Berciri Khas

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Desa dan Pembangunan Masyarakat Desa, di Kabupaten Tanah Laut juga telah terbentuk Desa Berciri Khas. Desa Berciri Khas yaitu Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa setempat masih mempertahankan tradisi turun temurun dalam kehidupan sosial dan budaya. Sementara pada aspek geografi tergantung dari potensi alam tempat tinggal masyarakat Desa. Kebanyakan masih menggantungkan hidup dengan kondisi alam setempat sesuai potensi alamnya, misalnya daerah pesisir yang rata-rata adalah nelayan.

Sedangkan warga yang hidup dipinggiran hutan akan mengandalkan potensi hutan setempat utk bertahan hidup. Sementara dari aspek SDM yaitu masyarakat Desa setempat memiliki keterampilan khusus sebagai mata pencaharian yang mana mereka hidup dari industri kerajinan atau Desa pengrajin dan rata-rata biasanya bersifat homogen.

Jadi Desa Berciri Khas sesuai karakteristik desa masing-masing tersebut dengan potensi yang ada perlu digali, dipertahankan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa setempat dan sekaligus pelestarian alam dapat terjaga dengan baik.

Realisasi indikator Jumlah Desa di bina berciri khas di Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 terealisasi sebanyak 6 desa dari target 5 desa, sehingga capaian kinerja jumlah desa dibina berciri khas adalah sebesar 120%. mengalami peningkatan

sebanyak 1 Desa jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 5 Desa. Realisasi tersebut sudah mencapai 120% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 5 Desa.

Ke 6 (enam) desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau
2. Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati
3. Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan
4. Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang
5. Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
6. Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari

Jumlah Desa dibina berciri khas tahun 2021 adalah sebanyak 6 Desa. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 5 Desa. Berikut daftar desa di bina berciri khas tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.5.48
Desa dibina berciri khas 2020 – 2021

No	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Desa Bukit Mulya Kecamatan Kintap	Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau
2	Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong	Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati
3	Desa Telaga Langsung Kecamatan Takisung	Desa Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan
4	Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar	Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang
5	Desa Handil Birayang Bawah Kecamatan Bumi Makmur	Desa Tanjung Kecamatan Bajuin
6		Desa Tungkaran kecamatan Pelaihari

Pada Tahun 2021 telah dilakukan kegiatan penancangan desa berciri khas di Tanah Laut yang kemudian dilakukan pembinaan. Untuk desa yang dibina berciri khas dari 5 desa yang ditargetkan sudah terlaksana semua (bahkan ada penambahan 1 desa berciri khas) yaitu dengan melaksanakan pembinaan terhadap desa yang berciri khas.

Berikut kegiatan koordinasi Desa Berciri Khas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2021 :

1. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Kepala SKPD/ yang mewakili, Enam Kecamatan yang dtunjuk berciri khas. Kecamatan

tersebut memilih Desa yang mempunyai ciri khasnya.

2. Rapat koordinasi dan konsolidasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas yang dihadiri oleh Bupati Tanah Laut, Kepala SKPD/ yang mewakili, Enam Kecamatan dan enam Kepala Desa yang ditunjuk berciri khas yaitu Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Desa Tungkaran Kec. Pelaihari, Desa Tanjung Kec. Bajuin, Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan, Desa Sungai Bakau Kec. Kurau dan Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang. Desa tersebut mempunyai adanya karakteristiknya masing-masing Desa, wisata, Kountur budaya dan alamnya.
3. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau, desa yang memilki potensi alam pada bulan tertentu masyarakat berbondong-bondong melakukan aktivitas mencari pahat-pahat atau yang biasa disebut kerang bambu. Yang diputuskan dinamakan Kampung Pahat-Pahat. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
4. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, lokasi yang bertepatan di pinggir jalan menuju arah Pelaihari – Banjarmasin banyak pengguna jalan yang singgah untuk beristirahat sambil menikmati jagung rebus manis. Yang diputuskan dinamakan Kampung Jagung. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Tanah Laut, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
5. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Kandangan Baru Kecamatan Panyipatan yaitu lebih unik lagi karena dengan keragaman yang seni budaya yang selalu di selenggarakan tiap ada kegiatan acara hajatan atau pada waktu tertentu yang ada di Kabupetan Tanah Laut. Yang diputuskan dinamakan Kampung Kesenian Damuluk. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.

6. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang yaitu dengan masyarakatnya usaha pengrajin pembuat sasirangan se Kabupaten Tanah Laut. Yang diputuskan dinamakan Kampung Sasirangan. Yang dihadiri oleh Bupati Kab. Tanah Laut / yang diwakili, enam Kecamatan dan enam kepala Desa yang ditunjuk berciri khas dan dihadiri Kepala SKPD/ yang mewakili.
7. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang Berciri Khas di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh kepala Desa yaitu sebagai Desa berciri khas “Dayak Biaju” yang mempunyai tarian adat budaya sering ditampilkan pada acara atau kegiatan pemerintahan seperti acara Kunjungan Kerja.
8. Rapat Koordinasi Pembinaan Desa yang berciri khas di Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari dengan pemaparan profil Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu dimana lahan masyarakat banyak tumbuh pohon durian dengan rasa buah yang berkarakter pembeda dari durian ditempat lain, bahkan nanti akan ada agenda tahunan untuk memperkenalkan buah durian dari Desa Tungkaran dalam event khusus penampilan buah durian.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pembinaan desa di dukung oleh 7 Program dengan pagu Rp. 16.336.647.566,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.661.777.563,00 atau sebesar 71,38%.

Tabel 3.5.49
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.723.727.516,00	2.676.368.285,00
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.668.984.320,00	1.127.555.072,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.273.114.554,00	5.525.255.378,00
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.547.130.504,00	1.874.711.892,00
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	276.976.716,00	185.084.500,00



6	Program Penataan Desa	436.188.310,00	18.688.500,00
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	410.525.646,00	254.113.936,00
Jumlah		16.336.647.566,00	11.661.777.563,00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 21

Meningkatnya cakupan penataan perkotaan

Meningkatnya cakupan penataan perkotaan melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5.50
Capaian Kinerja Terhadap Target 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		TAHUN 2021		
			2019	2020	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,45	0,44	7	0,33	195,28%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							195,28%

Realisasi indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2021 adalah 0,33%, telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 7,0% dengan tingkat capaian 195,28%. mengalami penurunan 0,11% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 0,441%. Indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan indikator terbalik, dimana apabila tingkat capaian semakin rendah maka kinerja semakin baik. Capaian tersebut telah mencapai 167% dari target akhir Tahun RPJMD (2023) yaitu 1%.

Tahun 2021 luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan adalah 123,49 Ha, sedangkan luasan kota Pelaihari adalah 37.945 Ha sehingga diperoleh data persentase luasan kumuh di kawasan perkotaan tahun 2020 adalah :

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan =

$\frac{\text{Luas permukiman kumuh}}{\text{Luas perkotaan}} \times 100\%$

Luas perkotaan

$\frac{123,49 \text{ Ha}}{37.945 \text{ Ha}} \times 100\% = 0,33 \%$

37.945 Ha

Untuk memperjelas data luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan, berikut disajikan data luasan permukiman kumuh dan kriteria kumuh di Kota Pelaihari.

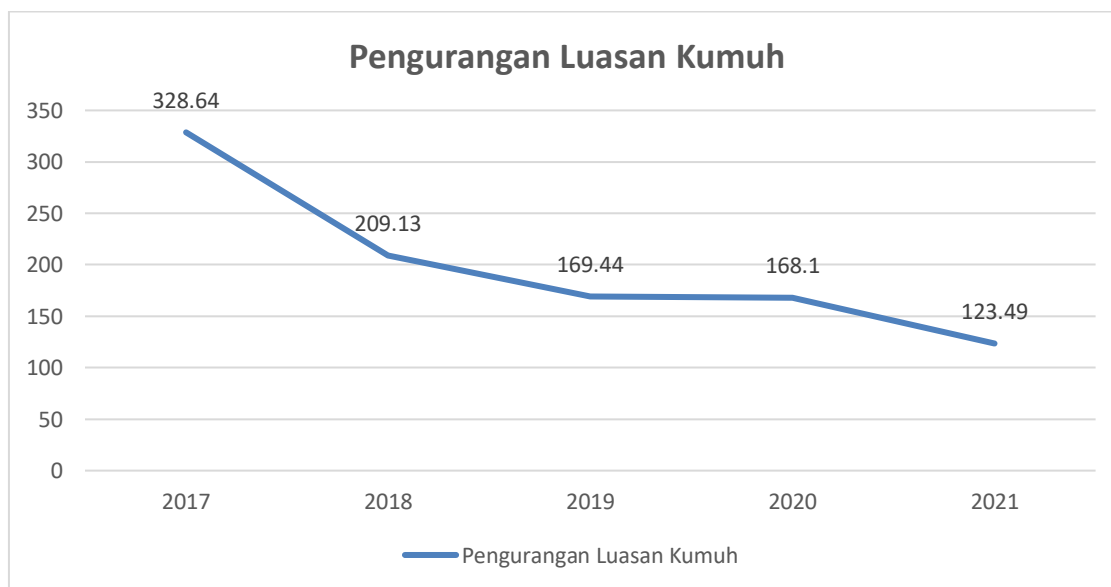
Tabel 3.5.51
Luasan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Kawasan	Luas (Ha)
1.	Pelaihari	Panjaratan	Panjaratan	3,88
		Angsau	Pintu Air	7,95

Tabel 3.5.52
Kriteria Kumuh Kota Pelaihari

Pengurangan Kumuh Sampai 2021						
No	Desa / Kelurahan	Jumlah RT	Luasan Kumuh (Ha)	Pengurangan Kumuh 2020 (Ha)	Pengurangan Kumuh 2021 (Ha)	Sisa Kumuh (Ha)
1.	Panjaratan	6	3,88	1,34		2,54
2.	Angsau	1	7,95	0		7,95

Grafik 3.5.21
Pengurangan Luasan Kumuh 2017-2021



Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota di Indonesia. Telaah tentang permukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, pertama, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain

tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kedua, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Ketiga, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berapa langkah diambil dalam rangka menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh yang ada di perkotaan yaitu Kota pelaihari, meskipun Kota Pelaihari yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut adalah dalam kategori kota kecil namun masih terdapat titik-titik kawasan kumuh. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Pembangunan jalan lingkungan
 - Penanganan Persampahan
- 1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Pada Bidang Perumahan dan Permukiman kegiatan BSPS yang dilaksanakan, yaitu:

Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.

Adapun sumber pendanaan dalam kegiatan BSPS ini terbagi menjadi 2 (dua) sumber, yaitu :



a. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bantuan ini bersumber dari dana APBN RI oleh Kementerian Keuangan RI, yang dikelola oleh Kementerian PUPR RI, yang selanjutnya dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut

Bantuan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan BSPS ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan nama-nama Calon Penerima Bantuan.
2. Nama-nama Calon Penerima Bantuan diverifikasi dengan data bass yang berpacu pada data TNP2K.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial yang mempunyai Kegiatan yang sama.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) melakukan tinjauan lapangan kondisi sebenarnya rumah Calon Penerima Bantuan.
5. Nama-nama Calon Penerima Bantuan yang sudah diverifikasi dan tinjauan lapangan dan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan kemudian diusulkan ke TAPD Kabupaten Tanah Laut (untuk alokasi DAK dan APBD Kabupaten).
6. Sosialisasi dengan Penerima Bantuan perihal alur proses pelaksanaan kegiatan.

Pada Tahun 2021 jumlah penerima bantuan BSPS ini sebanyak 175 unit rumah, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Tanah Laut, yaitu sebagai berikut :

Dana Alokasi Khusus (DAK) (133 unit)

-	Desa Atu-atu	15	Unit
-	Kelurahan Angsau	19	Unit
-	Kelurahan Pelaihari	15	Unit
-	Kelurahan Karang Taruna	18	Unit
-	Desa Tungkaran	18	Unit
-	Desa Panggung	18	Unit
-	Desa Ambungan	15	Unit
-	Desa Ujung Batu	15	Unit

APBD Kabupaten Tanah Laut (42 unit)

-	Desa Ambungan	11	Unit
-	Desa Bumi Jaya	10	Unit
-	Desa Atu-atu	3	Unit
-	Kelurahan Sarang Halang	1	Unit
-	Kelurahan Pelaihari	7	Unit
-	Kelurahan Angsau	1	Unit
-	Kelurahan Karang Taruna	1	Unit
-	Desa Ujung Batu	8	Unit



Gambar Sebelum direhab



Gambar Setelah direhab

2) Pembangunan Jalan Lingkungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan ini merupakan jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten. Kegiatan ini berupa pengaspalan / paving block jalan lingkungan perumahan dan jalan lingkungan permukiman. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan Program/Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dan developer perumahan mengajukan proposal permohonan pengaspalan atau perkerasan jalan lingkungan perumahan atau permukiman, dimana untuk developer perumahan harus menyerahkan sertifikat untuk fasum dan fasos perumahan tersebut.
- b. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan survey lapangan perihal usulan tersebut dan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti Dinas PUPRP.
- c. Setelah dilakukan survey dan koordinasi, kemudian dapat ditentukan apakah usulan tersebut memang tupoksi kegiatan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, apabila telah sesuai maka dapat dilakukan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan.
- d. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang ada.

- e. Perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan.

Peningkatan/pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula peningkatan/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya. Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasaran sarana utilitas umum pada beberapa lokasi, yaitu :

- Drainase/ Saluran Jalan Swadaya RT.6 RW.3 Desa Bumi Jaya
- Jalan Lingkungan Gang Berlian RT.3 RW.1 Kecamatan Pelaihari
- Jalan Lingkungan Komplek Ratu Graha Asri Kelurahan Angsau
- Jalan Lingkungan Gang Madani dan Gang Maryah Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari
- Paving Block Jalan Lingkungan Komplek Roemah Legenda dan Gang Aman Kelurahan Karang Taruna
- Drainase/ Saluran Jalan Lingkungan Jalan Raya Takisung (Bukit Sabat) Kelurahan Karang Taruna
- Jalan Lingkungan Graha Banua Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari
- Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Bakunci Kelurahan Karang Taruna
- Jalan Lingkungan Jalan Griya Pesona Bintang Kelurahan Karang Taruna
- Paving Block Jalan Atilam Kelurahan Pabahanan
- Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Rancah Pabahanan Kelurahan Pabahanan
- Jalan Lingkungan Gang Sumur Halau dan Gang Mulia Beramban Raya Kecamatan Pelaihari
- Jalan Lingkungan Jalan Pusaka Kelurahan Pelaihari

- Jalan Lingkungan Perumahan Mangga Besar Kelurahan Sarang Halang
- Jalan Lingkungan Perumahan Mangga Permai Residence Kelurahan Sarang Halang
- Jalan Lingkungan Perumahan Pondok Indah 2 Pelaihari
- Jalan Lingkungan RT.5 Desa Pemuda
- Jalan Lingkungan RT 09, 10 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari
- Jalan Lingkungan RT.4 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari
- Jalan Lingkungan Trans Desa Ujung Batu RT.9 dan RT.11

Dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, perlu adanya suatu penanganan yang segera sebelum kerusakan meluas / meningkat. Hal ini dapat dilakukan bila koordinasi antara semua pihak yang terkait dengan masalah pemeliharaan rutin (operasional pemeliharaan) prasarana sarana utilitas umum berjalan secara baik dan lancar. Perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola suatu prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, program yang telah direncanakan umumnya adalah program pembangunan dan program pemeliharaan. Program pemeliharaan justru merupakan keharusan pada setiap prasarana sarana utilitas umum, setiap prasarana sarana utilitas umum harus dilakukan pemeliharaan rutin dalam setiap periode/waktu dalam setahun, sesuai dengan tujuan pemeliharaan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan prasarana sarana utilitas umum yang terjaga dan tercapai umur rencana serta tingkat pelayanan.

3) Penanganan Persampahan

Penanganan persampahan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh dilakukan beberapa upaya di tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan yaitu dengan Pengecatan Dan Perawatan TPS Dalam Kota Pelaihari

2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu pembangunan lapangan parkir armada di TPA Bakunci
3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu perawatan pengecatan dan perawatan halaman TPA
4. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu pemeliharaan kolam lindi
5. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu pengadaan kontener sejumlah 2 unit
6. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu pembangunan pengelolaan kompos dan gudang (RSUD Boejasin)
7. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu berupa dokumen kajian penetapan lahan untuk belanja modal pengadaan tanah untuk penggudangan dan lahan controllandfill
8. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu berupa dokumen kajian kelembagaan pengelolaan sanitasi daerah untuk penggudangan dan lahan controllandfill
9. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yaitu berupa dokumen pembuatan DED Tempat Pemilahan Sampah.
10. Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan, melalui kegiatan:
 - Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Tahan Tubuh
 - Belanja pakaian kerja lapangan dan pakaian keselamatan kerja
11. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dan
12. membenahi fasilitas persampahan (perbaikan dan penambahan)

Selain kegiatan kegiatan di atas berikut disajikan rekapitulasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Tahun 2021.

Tabel 3.5.53
Rekapitulasi Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Volume		Pagu	Desa/Kelurahan	Sumber Dana
1	Pengoptimalan SPAM IKK Pelaihari dan Perluasan Jaringan Desa Ujung Batu/Tungkaran/Panjaratan (DDUB APBN)	4520	m	Rp 4,520,000,452	Ujung Batu, Tungkaran, Panjaratan	APBN
2	Perluasan Jaringan Pipa Layanan Kel. Karang Taruna	333.35	m	Rp 100,004,900	Karang Taruna	APBD
3	Pembuatan Sumur Bor Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	1	jaringan	Rp 100,000,000	Sungai Riam	APBD
4	Pembuatan Sumur Bor Kel. Karang Taruna	1	unit	Rp 100,000,000	Karang Taruna	APBD
5	Pembangunan Tangki Septik Individual Panjaratan	13	unit	Rp 143,000,000	Panjaratan	APBD
6	Peambangunan Drainase Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Sungai Riam	APBD
7	Pembangunan Drainase Desa Pemuda Kec. Pelaihari	150	m	Rp 150,000,015	Pemuda	APBD
8	Pembangunan Drainase Jalan Basuki Rahmat Kec. Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Angsau	APBD
9	Pembangunan Drainase Jalan Berkat Kec Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Angsau	APBD
10	Pembangunan Drainase Jalan Dr. Soepomo Kec. Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Angsau	APBD
11	Pembangunan Drainase Jalan Sirajul Huda Kec. Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Karang Taruna	APBD
12	Pembangunan Drainase Jl. Penerangan Kec. Pelaihari	199.99	m	Rp 199,990,020	Karang Taruna	APBD
13	Pembangunan Drainase Matah RT.7A Kec. Pelaihari	150	m	Rp 150,000,015	Karang Taruna	APBD
14	Pembuatan Drainase Jalan Bakti Kel. Karang Taruna	199.99	m	Rp 199,990,020	Karang Taruna	APBD
15	Pembuatan Drainase Jalan Taruna Jaya RT.14/04 Kel. Karang Taruna	199.99	m	Rp 199,990,020	Karang Taruna	APBD
16	Konsultan Supervisi SPAM IKK Pelaihari (MYC Lanjutan)	1	Paket	Rp 500,000,000	Desa Panggung Baru, Desa Ujung Batu, Desa Tungkaran	APBN
17	Pembangunan Sanitasi Perdesaan Padat Karya Kabupaten Tanah Laut	84	Unit	Rp 840,000,000	Desa Panjaratan	APBN



18	Sambungan Rumah	46	Unit	Rp	96,000,000	Desa Panjaratan	APBD
Total Dana				Rp 8,298,925,542			

Dalam mencapai sasaran meningkatnya cakupan penataan perkotaan di dukung oleh 7 Program dengan pagu Rp. 40.761.513.381,00 dan realisasi sebesar Rp 38.977.836.914,00 atau sebesar 95,62 %.

Tabel 3.5.54
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00
2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
3	Program Pengembangan Perumahan	-	-
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	24.111.576.687,00	23.387.238.476,00
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.647.059.428,00	3.199.758.552,00
7	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.209.212.266,00	9.597.174.886,00
Jumlah		40.761.513.381,00	38.977.836.914,00



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp1.392.339.474.407,00 dan anggaran belanja sebesar Rp. 2.220.694.238.313,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 828.354.763.906,00 Defisit anggaran tersebut ditutupi dengan penggunaan SILPA tahun 2020 sebesar Rp990.302.466.610,00.

Berdasarkan perhitungan APBD tahun 2021 sebelum dilakukannya audit oleh BPK menunjukan bahwa realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 109,37% (Rp 1.522.747.758.516,04) sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar 85,29% (Rp1.894.075.108.174,75), dan terdapat defisit anggaran sebesar Rp371.327.349.658,71 serta SILPA senilai Rp604.829.375.351,29

Untuk persentase Pencapaian Pendapatan Daerah yaitu 109,37%, hal ini menunjukan Kinerja yang bagus dari seluruh SKPD yang memiliki sumber-sumber bagi penerimaan daerah sementara untuk realisasi belanja sebesar terealisasi sebesar 85,29%.

MISI I

Tabel 3.8
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	7,89	1	Program Pengelolaan Pendidikan	144.672.051.327	127.002.272.231	87,79
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,12	12,31	2	Program Pengelolaan Kurikulum	1.204.205.780	404.711.019	33,61
						3	Program Pembinaan Perpustakaan	638.092.110	567.685.510	88,97
						4	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	67.382.110	36.489.000	54,15
								146,581,731,327.00	128,011,157,760.00	87,33
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,30	69,59	1	Upaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.925.400.983	39.081.121.820	79,88
						2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178.655.350.953	147.594.648.587	82,61
						3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90.414.500	26.332.500	29,12
						4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.535.350.184	3.208.762.559	90,76
								231.206.516.620	186.702.102.907	80,75
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,5	84,53	1	Program Pendaftaran Penduduk	554.663.900	438.368.985	979,03



						2	Program Pencatatan Sipil	126.115.500	104.298.950	82,70
						3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	991.796.020	971.269.246	97,93
						4	Program Pengendalian Penduduk	226.784.206	205.720.466	90,71
						5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.169.876.746	4.062.125.824	78,57
						6	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	999.038.735	430.049.452	43,05
								8.068.275.107	6.211.832.923	76,99
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	100	100	1	Program Pengembangan Kebudayaan	199.979.870	105.357.070	52,68
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	74	136	2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	946.352.580	717.384.900	75,81
						3	Program Pembinaan Sejarah	106.500.000	80.797.500	75,87
						4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.182.158.159	1.164.494.000	98,51
						5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.948.668.644	2.607.753.262	88,44
						6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.663.667.230	12.616.311.041	92,33
						7	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	698.809.320	414.209.000	59,27
								19.746.135.803	17.706.306.773	89,67
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Presentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	100	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	3.218.789.432	2.918.423.057	90,67

						2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	44.040.390	32.175.000	73,06
						3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.910.000	50.345.000	67,21
								3.337.739.822	3.000.943.057	89,91

MISI II

Tabel 3.9

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No.	Sasaran Strategis	Indktor Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
								Rp	Rp	%
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841	808,249,651,331	81,66
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	15	103	1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.176,861,614	2,869,059,059	90,31
						2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	124,999,750	113,741,600	90,99
						3	Program Hubungan Industrial	193,999,586	149,224,546	76,92
								3,495,860,950	3,132,025,205	89,59

MISI III

Tabel 3.10
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)	NA	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.582.909.316	31.461.319.323	90,97
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap kualitas Pengelolaan Keangan Daerah (opini)	WTP	WTP	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	252.594.595.623	237.627.654.715	94,07
						3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.158.957.644	7.067.304.330	86,62
						4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.568.962.434	2.093.437.574	81,49
						5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	645.459.370	345.173.714	53,48
						6	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	559.052.700	439.534.900	78,62
						7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	989,803,201,841	808,249,651,331	81,65
								1,288,913,138,928	1,087,284,075,887	84,36
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	35,71	55,87	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	34.582.909.316	31.461.319.323	90,97
						2	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.402.081.574	1.572.259.579	65,45



					3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	32.314.359.721	13.050.606.454	40,39
					4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	63.577.700	44.281.750	69,65
					5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	102.926.376	60.775.134	59,05
					6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	360.827.472	190.815.492	52,88
					7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825.549.762	325.449.862	39,42
					8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	347.461.130	298.103.750	85,79
					9	Program Penatagunaan Tanah	608.301.116	399.626.384	65,70
					10	Program Pengelolaan Arsip	206.342.082	142.201.702	68,92
					11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200.748.584	178.306.621	88,82
					12	Program Pengelolaan Izin Lokasi	29.119.776	23.364.734	80,24
							72.044.204.609	47.747.110.785	66,27

MISI IV

Tabel 3.11

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Terget	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	0	1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.824.698.096	1.566.247.096	85,84
						2	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	612.236.410	326.280.263	53,29
						3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	272.127.690	196.303.198	72,14
								2.709.062.196	2.088.830.557	77,11
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	0	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	380.051.090	283.325.630	74,55
						2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	689.271.976	513.473.416	74,50

						3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.364.154.465	7.597.026.326	73,30
								11.433.477.531	8.393.825.372	73,41

MISI V

Tabel 3.12

Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi		Program Prioritas			
							Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
								Rp	Rp	%
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	3.50		1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	161,820,820.00	63,424,750.00	39.19
		2	IndekGini (skor)	0,255	0,232	2	Program Pengembangan Umkm	186,324,772.00	108,823,250.00	58.41
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	11.6		3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,059,428.00	3,199,758,552.00	87.73
						4	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	125,073,750.00	104,918,750.00	83.89
						5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	649,046,620.00	600,642,864.00	92.54
						6	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	152,462,800.00	85,255,000.00	55.92
						7	Program Pengembangan Ekspor	149,695,620.00	137,078,334.00	91.57



						8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1,503,202,350.00	1,112,641,244.00	74.02
						9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179,215,100.00	8,154,500.00	4.55
						10	Program Pelayanan Penanaman Modal	426,215,310.00	264,714,150.00	62.11
						11	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	397,937,800.00	50,152,750.00	12.60
						12	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	117,940,820.00	93,630,450.00	79.39
						13	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-
						14	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	198,129,500.00	-	-
								8,501,421,890.00	6,224,730,143.00	73.21
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75		1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	927.615.417,00	648.668.833,00	69,93
						2	Program Perlindungan Perempuan	221.636.800,00	53.318.276,00	24,06
						3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	34.702.436,00	32.602.636,00	93,95
						4	Program Perlindungan Khusus Anak	260.512.210,00	87.672.035,00	33,65
								1.444.466.863,00	822.261.780,00	56,92
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00	3,52	1	Program Penempatan Tenaga Kerja	494.203.352	379.172.816	76,72
						2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	741.370.376	594.490.910	80,19

						3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49.999.700	40.398.200	80,80
								1,285,573,428.00	1,014,061,926.00	78,88
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (sedang)	105,95 (sedang)	1	Program Penanggulangan Bencana	1,954,838,128.00	1,227,146,511.00	62,77
		2	Presentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	56.32	2	Program Penanganan Bencana	6,845,033,480.00	3,581,377,000.00	52,32
						3	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	10,209,212,266.00	9,597,174,886.00	94,01
						4	Program Rehabilitasi Sosial	4,198,154,510.00	4,035,802,633.00	96,13
						5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	957,323,249.00	693,353,700.00	72,43
						6	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	528,444,000.00	479,434,600.00	90,73
						7	Program Pemberdayaan Sosial	901,852,350.00	670,904,735.00	74,39
						8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126,201,484.00	117,819,784.00	93,36
								25,721,059,467	20,403,013,849	79,32
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks pembangunan infrastruktur	71.00		1	Program Penyelenggaraan Jalan	140,388,663,345.00	137,798,193,270.00	98,15
						2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	30,796,526,594.00	29,901,916,547.00	97,10
						3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3,726,676,736.00	3,668,712,434.00	98,44
						4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	12,840,007,801.00	12,212,896,413.00	95,12



						5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	54,880,591,743.00	52,736,311,535.00	96,09
						6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	45,634,966,313.00	44,053,559,868.00	94,92
						7	Program Penataan Bangunan Gedung	99,999,950.00	44,908,050.00	96,53
						8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	489,947,874.00	237,585,436.00	44,91
						9	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	24,894,076,029.00	21,080,888,398.00	48,49
						10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	513,802,240.00	368,149,700.00	84,68
						11	Program Pengelolaan Pelayaran	140,388,663,345.00	137,798,193,270.00	71,65
								314,265,258,625.00	302,103,121,651.00	96,12
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,52		1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	440,317,574.00	333,068,900.00	87,74
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58		2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,902,498,495.00	1,810,138,414.00	81,69
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembngkan pemerintah (orang)	290.000	193.671	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7,975,042,240.00	7,569,737,192.00	98,21
						4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	502,556,142.00	410,513,024.00	94,06
						5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7,273,192,151.00	7,142,904,062.00	82,95
						6	Program Pemasaran Pariwisata	1,951,446,818.00	1,835,529,100.00	65,45
						7	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00	146,158,129.00	55,92
						8	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2,402,081,574.00	1,572,259,579.00	39,19



							Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,018,604.00	409,561,304.00	90,80
							Program Perizinan Usaha Pertanian	364,964,068.00	260,152,050.00	71,28
							Program Penyuluhan Pertanian	875,501,978.00	659,488,228.00	75,32
								25,314,810,664.00	22,149,509,982.00	87,49
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00		1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1,276,555,732.00	1,163,537,432.00	91,15
						2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,052,720,188.00	652,702,185.00	62,00
						3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	202,378,876.00	133,081,868.00	65,76
						4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	86,075,170.00	56,734,651.00	65,91
						5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	178,655,350,953.00	147,594,648,587.00	82,61
						6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	858,034,330.00	425,889,123.00	49,63
						7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	357,850,696.00	284,842,616.00	79,59
						8	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	330,170,406.00	203,850,462.00	61,74
						9	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,191,020.00	146,158,129.00	82,95
								182,995,327,371.00	150,661,445,053.00	82,33
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,960	68,70	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	213,858,016.00	204,074,435.00	95,43
		2	Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang	87.00	87,00	2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	4,806,231,872.00	4,456,380,491.00	92,72



			dengan RTRW Kabupaten (%)				Kerusakan Lingkungan Hidup			
						3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9,933,521,872.00	9,633,843,443.00	96,98
						4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1,475,462,400.00	1,372,628,808.00	93,03
						5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	365,904,492.00	265,941,556.00	72,68
						6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	115,021,596.00	89,482,985.00	77,80
						7	Program Pengelolaan Persampahan	13,202,210,637.00	12,487,454,943.00	94,59
						8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	63,028,066.00	45,495,652.00	84,46
								30,175,238,951.00	28,555,302,313.00	94,63
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Presentas Desa Kategori Maju	24	33.09	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.723.727.516	2.676.368.285	71,87
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	6	2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.668.984.320	1.127.555.072	67,56
						3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.273.114.554	5.525.255.378	75,97
						4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.547.130.504	1.874.711.892	73,60



						5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	276.976.716	185.084.500	66,82
						6	Program Penataan Desa	436.188.310	18.688.500	4,28
						7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	410.525.646	254.113.936	61,90
								16.336.647.566	11.661.777.563	71,38
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Presentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7.00	0,33	1	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	2.793.665.000,00	2.793.665.000,00	100
						2	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-
						3	Program Pengembangan Perumahan	-	-	-
						4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	-	-	-
						5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	24.111.576.687,00	23.387.238.476,00	97,00
						6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3.647.059.428,00	3.199.758.552,00	87,74
						7	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.209.212.266,00	9.597.174.886,00	94,01
								40.761.513.381,00	38.977.836.914,00	95,62

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 147,31% dengan realisasi keuangan sebesar 82,27% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

MISI I

Tabel 3.13
Berkarya meningkatkan kualitas SDM

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	87.33 %	94,62%	7.29%
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	80.75 %	100,41%	19.66%
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	76.99 %	110,49%	33.50%
4	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	89.67 %	143,64%	53.97%
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	89.91 %	100%	10.09%

MISI II

Tabel 3.14
Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	81.66 %	300%	218.34%
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	89.59 %	686,67%	597.08%

MISI III

Tabel 3.15
Membangun tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*)

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	84.36 %	100%	15.64%
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	66.27 %	156,45%	90.18%

MISI IV

Tabel 3.16
Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	77.11 %	100%	22,89%
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	73.41 %	100%	26.59%

MISI V

Tabel 3.17
Membangun sinegritas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% realisasi Kinerja	Efisiensi
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	73.21 %	109,02%	35,99%
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	56.92 %	97,87%	40,95%

14	Menurunnya tingkat pengangguran	78.88 %	112%	33,12%
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	79.32 %	200,05%	120.73%
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	96.12 %	171,35%	75.23%
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	87.49 %	66,78%	-20.71%
18	Meningkatnya ketahanan pangan	82.33 %	88,53%	6.20%
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	94.63 %	106,34%	11.71%
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	71.38 %	128,915%	57.53%
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	95.62 %	195,28%	99.66%

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian		Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	(%)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)
A	PENDAPATAN	1,392,339,474,407.00	1,511,451,055,349.66	108.55	1,613,752,681,343.77
A.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167,212,726,505.00	194,844,646,001.66	116.53	189,603,069,628.77
	Pendapatan Pajak Daerah	41,615,000,000.00	43,638,422,656.00	104.86	44,576,818,515.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	6,301,915,303.00	5,743,153,528.80	91.13	7,526,749,567.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,836,676,685.00	9,836,676,685.00	100.00	7,441,598,663.00
	Lain-lain PAD Yang Sah	109,459,134,517.00	135,626,393,131.86	123.91	130,057,902,883.77
A.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,184,440,698,375.00	1,274,449,541,251.00	107.60	1,378,371,482,553.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,097,579,440,375.00	1,174,467,043,937.00	107.01	1,274,403,755,843.00
	Dana Perimbangan	968,433,260,375.00	1,045,900,191,937.00	108.00	1,104,360,025,851.00
	Dana Insentif Daerah (DID)	19,072,439,000.00	19,072,439,000.00	100.00	62,537,345,000.00



			Dana Desa	110,073,741,000.00	109,494,413,000.00	99.47	107,506,384,992.00
			Pendapatan Transfer Antar Daerah	86,861,258,000.00	99,982,497,314.00	115.11	103,967,726,710.00
			Pendapatan Bagi Hasil	86,161,258,000.00	99,282,497,314.00	115.23	103,967,726,710.00
			Bantuan Keuangan	700,000,000.00	700,000,000.00	100.00	0.00
A.3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40,686,049,527.00	42,156,868,097.00	103.62	45,778,129,162.00
			Pendapatan Hibah	482,500,000.00	3,203,438,570.00	663.93	4,218,979,162.00
			Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	40,203,549,527.00	38,953,429,527.00	96.89	41,559,150,000.00
B			BELANJA DAERAH	2,220,694,238,313.00	1,853,177,431,264.37	83.45	1,535,660,520,668.00
B.1			BELANJA OPERASI	1,503,387,412,140.00	1,180,213,069,204.54	78.50	1,002,473,431,818.00
			Belanja Pegawai	788,923,466,697.00	639,003,317,796.56	81.00	578,446,294,875.00
			Belanja Barang dan Jasa	638,019,452,224.00	472,321,145,443.98	74.03	392,824,218,663.00
			Belanja Hibah	57,810,893,219.00	53,638,315,964.00	92.78	25,056,029,030.00
			Belanja Bantuan Sosial	18,633,600,000.00	15,250,290,000.00	81.84	6,146,889,250.00
B.2			BELANJA MODAL	466,438,684,170.00	436,773,866,434.83	93.64	208,749,071,699.00
			Belanja Modal Tanah	3,293,636,400.00	2,902,745,120.00	88.13	5,545,262,443.00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102,194,794,158.00	81,837,866,993.00	80.08	58,400,912,689.00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	129,304,101,334.00	124,969,155,825.83	96.65	44,763,996,794.00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	230,514,460,184.00	226,307,789,870.00	98.18	98,075,489,148.00
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,131,692,094.00	756,308,626.00	66.83	1,963,410,625.00
B.3			BELANJA TIDAK TERDUGA	20,569,890,343.00	6,471,571,965.00	31.46	84,356,731,883.00
			Belanja Tidak Terduga	20,569,890,343.00	6,471,571,965.00	31.46	84,356,731,883.00
B.4			BELANJA TRANSFER	230,298,251,660.00	229,718,923,660.00	99.75	240,081,285,268.00
			Belanja Bagi Hasil	5,183,544,470.00	5,183,544,470.00	100.00	4,376,364,987.00
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4,161,500,000.00	4,161,500,000.00	100.00	3,718,512,265.00



			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1,022,044,470.00	1,022,044,470.00	100.00	657,852,722.00
			Belanja Bantuan Keuangan	225,114,707,190.00	224,535,379,190.00	99.74	235,704,920,281.00
			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	225,114,707,190.00	224,535,379,190.00	99.74	235,704,920,281.00
			SURPLUS / (DEFISIT)	(828,354,763,906.00)	(341,726,375,914.71)	41.25	78,092,160,675.77
C			PEMBIAYAAN				
C.1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	996,302,466,610.00	996,049,651,010.00	99.97	922,210,305,934.34
			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	990,302,466,610.00	990,302,466,610.00	100.00	922,160,938,434.34
			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6,000,000,000.00	5,747,184,400.00	95.79	49,367,500.00
C.2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00	10,000,000,000.00
			Pembentukan Dana Cadangan	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00	0.00
			Pemberian Pinjaman Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	100.00	10,000,000,000.00
			PEMBIAYAAN NETTO	976,302,466,610.00	976,049,651,010.00	99.97	912,210,305,934.34
			SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	147,947,702,704.00	634,323,275,095.29	428.75	990,302,466,610.11

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Uraian							Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%
A							1,511,451,055,349.66	1,613,752,681,343.77	(6.34)
A.1							194,844,646,001.66	189,603,069,628.77	2.76
							43,638,422,656.00	44,576,818,515.00	(2.11)
							5,743,153,528.80	7,526,749,567.00	(23.70)
							9,836,676,685.00	7,441,598,663.00	32.18
							135,626,393,131.86	130,057,902,883.77	4.28



A.2		PENDAPATAN TRANSFER		1,274,449,541,251.00	1,378,371,482,553.00	(7.54)
		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1,174,467,043,937.00	1,274,403,755,843.00	(7.84)
		Dana Perimbangan		1,045,900,191,937.00	1,104,360,025,851.00	(5.29)
		Dana Insentif Daerah (DID)		19,072,439,000.00	62,537,345,000.00	(69.50)
		Dana Desa		109,494,413,000.00	107,506,384,992.00	1.85
		Pendapatan Transfer Antar Daerah		99,982,497,314.00	103,967,726,710.00	(3.83)
		Pendapatan Bagi Hasil		99,282,497,314.00	103,967,726,710.00	(4.51)
		Bantuan Keuangan		700,000,000.00	0.00	100.00
A.3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		42,156,868,097.00	45,778,129,162.00	(7.91)
		Pendapatan Hibah		3,203,438,570.00	4,218,979,162.00	(24.07)
		Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		38,953,429,527.00	41,559,150,000.00	(6.27)
B		BELANJA DAERAH		1,853,177,431,264.37	1,535,660,520,668.00	20.68
B.1		BELANJA OPERASI		1,180,213,069,204.54	1,002,473,431,818.00	17.73
		Belanja Pegawai		639,003,317,796.56	578,446,294,875.00	10.47
		Belanja Barang dan Jasa		472,321,145,443.98	392,824,218,663.00	20.24
		Belanja Hibah		53,638,315,964.00	25,056,029,030.00	114.07
		Belanja Bantuan Sosial		15,250,290,000.00	6,146,889,250.00	148.10
B.2		BELANJA MODAL		436,773,866,434.83	208,749,071,699.00	109.23
		Belanja Modal Tanah		2,902,745,120.00	5,545,262,443.00	(47.65)
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin		81,837,866,993.00	58,400,912,689.00	40.13
		Belanja Modal Gedung dan Bangunan		124,969,155,825.83	44,763,996,794.00	179.17
		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		226,307,789,870.00	98,075,489,148.00	130.75
		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		756,308,626.00	1,963,410,625.00	(61.48)
B.3		BELANJA TIDAK TERDUGA		6,471,571,965.00	84,356,731,883.00	(92.33)
		Belanja Tidak Terduga		6,471,571,965.00	84,356,731,883.00	(92.33)



B.4		BELANJA TRANSFER		229,718,923,660.00	240,081,285,268.00	(4.32)
		Belanja Bagi Hasil		5,183,544,470.00	4,376,364,987.00	18.44
		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		4,161,500,000.00	3,718,512,265.00	11.91
		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		1,022,044,470.00	657,852,722.00	55.36
		Belanja Bantuan Keuangan		224,535,379,190.00	235,704,920,281.00	(4.74)
		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa		224,535,379,190.00	235,704,920,281.00	(4.74)
		SURPLUS / (DEFISIT)		(341,726,375,914.71)	78,092,160,675.77	(537.59)
C		PEMBIAYAAN				
C.1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN		996,049,651,010.00	922,210,305,934.34	8.01
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		990,302,466,610.00	922,160,938,434.34	7.39
		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		5,747,184,400.00	49,367,500.00	11,541.64
C.2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN		20,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100.00
		Pembentukan Dana Cadangan		15,000,000,000.00	0.00	100.00
		Pemberian Pinjaman Daerah		5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	(50.00)
		PEMBIAYAAN NETTO		976,049,651,010.00	912,210,305,934.34	7.00
		SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		634,323,275,095.29	990,302,466,610.11	(35.95)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Keterangan :

2020 DID dan Dana Desa masuk di Lain-lain pendapatan daerah yang sah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun ketiga terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **21 Sasaran 31 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 140,00 % dengan rincian **23 (dua puluh tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan** dengan rentang capaian lebih dari 90%, **3 (tiga)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan** dengan rentang capaian 80% s.d 90%, **4 (empat)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik** dengan rentang capaian 60% s.d 70%, dan **1 (satu)** indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup** dengan rentang capaian 50% s.d 60%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh kepala SKPD dalam meningkatkan penerapan SAKIP di masing-masing SKPD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
3. Mengintegrasikan system berbasis elektronik tentang Perjanjian Kinerja kedalam aplikasi penilaian kinerja seluruh PNS sehingga lebih memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan kinerja yang telah diperjanjikan.
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
5. Melakukan perencanaan kinerja tahunan SKPD yang selaras dengan RPJMD.

6. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level Eselon III, Eselon IV dan individu pegawai.
7. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran;
8. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan Pimpinan SKPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerjanya;
9. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan.
10. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *outcome* dan *output* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja (tujuan dan sasaran) organisasi;
11. Meningkatkan kualitas indikator kinerja sasaran strategis pada SKPD sehingga lebih berorientasi hasil dan relevan dengan sasaran yang dicapai;
12. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegritas mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Pimpinan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerjanya;
13. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja SKPD yang menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran;
14. Mendorong APIP untuk meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap SKPD, sehingga menciptakan pemahaman yang merata antar SKPD, serta mendorong secara khusus kepada SKPD pengampu bidang perencanaan dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mewujudkan efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran;



15. memberikan *reward* dan *punishment* kepada SKPD sesuai dengan kinerja organisasi.

Pelaihari, Maret 2022

Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21384 Pelaihari

PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pelaihari, 8 Maret 2022

Pt. Inspektur,



Drs. H. Husein Irianta
Pembina Muda Muda (IV/c)
NIP. 19630720 198503 1 015



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
7. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 54 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

Di tetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumus Perhitungan	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Minimum 0 tahun, maksimal 15 tahun (sesuai standar global) $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun telah bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun yang mendapatkan ijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Harapan lama sekolah (tahun)	$HSL_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan :</p> <p>HSL_a^t = Harapan Lama Sekolah Pada Umur a di tahun t</p> <p>E_i^t = Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Rata-rata harapan hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah IKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	1. Bagian Organisasi 2. Seluruh SKPD

	masyarakat lainnya				
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (%)	$\frac{\text{Jumlah budaya daerah yang dikembangkan dan dilestarikan}}{\text{Jumlah budaya daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi dalam kompetisi minimal kompetisi tingkat provinsi	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang masuk}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	Inovasi Pelayanan Publik yang masuk dalam kompetisi inovasi pelayanan Publik minimal tingkat provinsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (until)	Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

				<p>dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p>
	2	Indeks Gini (skor)	$G = 1 - \sum_{i=1}^i P_i(Q_i + Q_{i+1})$ <p>Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika :</p> <p>G < 0,3 = Ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G = Ketimpangan Sedang</p> <p>≤0,5</p> <p>G > 0,5 = Ketimpangan tinggi</p>	<p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan</p> <p>4. Diskopdag</p>
	3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	<p>PIRR</p> <p><u>Penduduk Pertengahan Tahun</u></p>	<p>1. Sumber Data Badan Pusat Statistik</p> <p>2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>3. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan</p>

8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian SAKIP Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun n	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	Hasil evaluasi keterbukaan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik antar umat maupun seagama	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	Diharapkan tidak ada konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\text{PDRB tahun ke } n - \text{PDRB tahun } (n-1)}{\text{PDRB tahun } (n-1)} \times 100\%$	1. Sumber Data Badan Pusat Statistik 2. Dinas Peternakan

				Perkebunan 4. Diskopdag
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	1. Sumber data BPS 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian
			<ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja = penduduk usia kerja (15+) yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran - Pengangguran = mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa, sudah ada pekerjaan tapi belum mulai bekerja $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	Badan Penanggulangan Bencana daerah
		3	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	Dinas Sosial
			$\frac{PMKS \text{ tahun } n - PMKS \text{ tahun } n-1}{PMKS \text{ tahun } n-1} \times 100\%$	

16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur		1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Petanian	Growth Pertanian= $= \frac{\text{PDRD ADIHK Per laianan tahun } n - \text{PDRD ADIHK Per laianan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Pertanian tahun } (n-1)} \times 100\%$	1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Kōpdag 1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	Pertumbuhan sector industry olahan dalam PDRB Growth Industri Olahan (GIO) $\text{GIO} = \frac{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)}{\text{PDRB ADHK Industri Olahan tahun } (n-1)} \times 100\%$	

					3. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n	Dinas Pariwisata
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) × bobot masing-masing kelompok pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	30 % indeks pencemaran air + 30% indeks pencemaran udara + indeks cakupan lahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	$\frac{\text{Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa Kategori Maju	Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4	Jumlah Desa di bina berciri khas	Desa di bina berciri khas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	$\frac{\text{Luasan permukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFRIAL, S.H., MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

H. SUKAMTA



BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, November 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

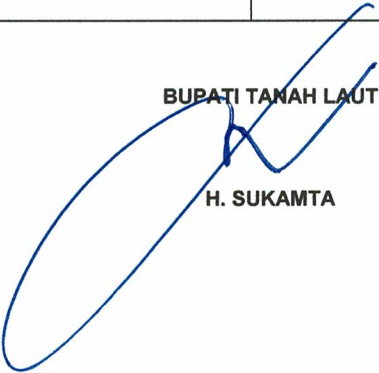
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,12	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,30	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	76,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	1	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Inspektorat

9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	35,71	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	3,50	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,255	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	11,6	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,00	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,52	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan
		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,960	Dinas Perumahan Rakyat, Kwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kategory Maju	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	989,803,201,841.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144,672,051,327.00
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	178,655,350,953.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	54,880,591,743.00
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,209,212,266.00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	901,852,350.00
7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	49,999,700.00
8	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	927,615,417.00
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1,276,555,732.00
10	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	29,119,776.00
11	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	213,858,016.00
12	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	554,663,900.00
13	PROGRAM PENATAAN DESA	436,188,310.00
14	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	226,784,206.00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	24,894,076,029.00
16	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,218,789,432.00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	179,215,100.00
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,948,668,644.00
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	74,910,000.00
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	44,040,390.00
21	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	199,979,870.00
22	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	638,092,110.00
23	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	206,342,082.00
24	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	7,273,192,151.00
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,902,498,495.00
26	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	125,073,750.00
27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3,176,861,614.00
28	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34,582,909,316.00
29	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	32,314,359,721.00
30	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	825,549,762.00
31	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	252,594,595,623.00
32	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4,561,321,896.00

33	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,684,238,580.00
34	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	347,461,130.00
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	645,459,370.00
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200,748,584.00
37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	380,051,090.00
38	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,204,205,780.00
39	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	48,925,400,983.00
40	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	30,796,526,594.00
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,793,665,000.00
42	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1,954,838,128.00
43	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	741,370,376.00
44	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	221,636,800.00
45	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,052,720,188.00
46	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4,806,231,872.00
47	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126,115,500.00
48	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	276,976,716.00
49	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5,169,876,746.00
50	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	513,802,240.00
51	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4,644,768,003.00
52	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	152,462,800.00
53	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13,663,667,230.00
54	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	946,352,580.00
55	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	63,577,700.00
56	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	858,034,330.00
57	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1,951,446,818.00
58	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	7,975,042,240.00
59	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3,647,059,428.00
60	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,402,081,574.00
61	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	360,827,472.00
62	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8,158,957,644.00
63	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	559,052,700.00
64	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,723,727,516.00
65	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1,824,698,096.00
66	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	67,382,110.00

67	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	90,414,500.00
68	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	528,444,000.00
69	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4,198,154,510.00
70	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	494,203,352.00
71	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	202,378,876.00
72	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	102,926,376.00
73	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9,933,521,872.00
74	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	991,796,020.00
75	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7,273,114,554.00
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	999,038,735.00
77	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	426,215,310.00
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	698,809,320.00
79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	106,500,000.00
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	357,850,696.00
81	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	440,317,574.00
82	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	649,046,620.00
83	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	124,999,750.00
84	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2,568,962,434.00
85	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,668,984,320.00
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	612,236,410.00
87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3,535,350,184.00
88	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3,726,676,736.00
89	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24,111,576,687.00
90	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	957,323,249.00
91	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	193,999,586.00
92	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	86,075,170.00
93	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1,475,462,400.00
94	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2,547,130,504.00
95	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	607,297,200.00
96	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	397,937,800.00
97	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1,182,158,159.00
98	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	330,170,406.00
99	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	502,556,142.00
100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	451,018,604.00
101	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	149,695,620.00

102	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10,364,154,465.00
103	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	272,127,690.00
104	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12,840,007,801.00
105	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6,845,033,480.00
106	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34,702,436.00
107	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	365,904,492.00
108	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	117,940,820.00
109	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	176,191,020.00
110	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	364,964,068.00
111	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1,503,202,350.00
112	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	410,525,646.00
113	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	689,271,976.00
114	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	126,201,484.00
115	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	260,512,210.00
116	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	161,820,820.00
117	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	875,501,978.00
118	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	198,129,500.00
119	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	45,634,966,313.00
120	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	186,324,772.00
121	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	99,999,950.00
122	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	63,028,066.00
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	140,388,663,345.00
124	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	608,301,116.00
125	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	115,021,596.00
126	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	489,947,874.00
127	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13,202,210,637.00
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4,139,253,292.00
TOTAL		2,220,694,238,313.00

Pelaihari, November 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA



PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021



BUPATI TANAH LAUT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pelaihari, Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)		Indikator Kinerja Utama	Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,00	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		2	Harapan lama sekolah (tahun)	12,12	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	69,30	Sumber Data Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	1	Indeks kepuasan masyarakat	76,5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DP2KBP3A Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung Bagian Organisasi Seluruh SKPD
4	Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga	1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Jumlah Atlet yang berprestasi	74	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Sekretariat Daerah Kecamatan Panyipatan Kecamatan Takisung
5	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	1	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
7	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	1	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB (77,00)	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Daerah Inspektorat
		2	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	1	Indeks keterbukaan informasi publik	35,71	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Kesejahteraan Masyarakat
10	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	1	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

11	Meningkatnya wawasan kebangsaan	1	Jumlah konflik sosial (kasus)	0	Badan kesatuan Bangsa dan Politik
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		2	Indeks Gini (skor)	0,255	Sumber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TP, Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
		3	PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)	34,73	Suber Data Badan Pusat Statistik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Diskopdag DPMPTSP Sekretariat Daerah
13	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	1	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	Sumber data BPS Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Dinas Sosial
15	Meningkatnya perlindungan masyarakat	1	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana daerah Dinas Sosial
		2	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	Dinas Sosial Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,00	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
17	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	1	Pertumbuhan sektor Pertanian	3,52	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata Dinas Kopdag Seluruh Kecamatan

		2	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,58	Sumber Data badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan
		3	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)	290	Dinas Pariwisata Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95,00	Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	60,960	Dinas Perumahan Rakyat, Kwasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Meningkatnya Pembinaan Desa	1	Persentase Desa kotegori Maju	24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2	Jumlah Desa di bina berciri khas	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	1	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengembangan Kurikulum	1,204,205,780
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7,178,890,554
3	Program Aplikasi Informatika	5,536,996,792
4	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd	32,819,904,130
5	Program Hubungan Industrial	193,999,586
6	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2,536,085,402
7	Program Kepegawaian Daerah	4,676,183,576
8	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	679,472,422
9	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	459,326,850
10	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	741,370,376
11	Program Pelayanan Penanaman Modal	296,525,310
12	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	982,167,709
13	Program Pemasaran Pariwisata	2,247,118,648
14	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	612,236,410
15	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	181,021,142
16	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2,577,957,320
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	777,253,370
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4,824,662,506
19	Program Pemberdayaan Sosial	901,852,350
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)	244,320,820
21	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	457,994,076
22	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	484,588,492
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	272,127,690
24	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1,958,146,352
25	Program Pembinaan Perpustakaan	638,092,110
26	Program Pembinaan Sejarah	284,015,050
27	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	34,702,436
28	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	111,099,653,242
29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	28,695,356,266
30	Program Penanganan Bencana	701,584,930
31	Program Penanganan Kerawanan Pangan	248,003,166
32	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	115,021,596
33	Program Penanggulangan Bencana	2,105,643,058
34	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	99,999,950

35	Program Penataan Bangunan Gedung	42,267,394,663
36	Program Penataan Desa	585,563,710
37	Program Penatagunaan Tanah	312,531,356
38	Program Pencatatan Sipil	156,115,500
39	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	551,114,000
40	Program Pendaftaran Penduduk	554,663,900
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	151,224,940
42	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	216,993,660
43	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	710,189,590
44	Program Penempatan Tenaga Kerja	615,643,972
45	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	939,943,944
46	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	152,462,800
47	Program Pengawasan Keamanan Pangan	160,716,080
48	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	248,208,656
49	Program Pengelolaan Arsip	206,364,792
50	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,184,596,685
51	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,095,391,136
52	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	7,437,877,072
53	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	22,818,984,589
54	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	119,645,880
55	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	995,096,020
56	Program Pengelolaan Izin Lokasi	50,464,776
57	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9,433,523,602
58	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	239,550,021,050
59	Program Pengelolaan Pelayaran	915,280,240
60	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,408,427,474
61	Program Pengelolaan Pendidikan	113,175,015,532
62	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	358,887,176
63	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	238,064,336
64	Program Pengelolaan Persampahan	11,564,138,376
65	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	124,999,750
66	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	40,102,192,712
67	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	749,288,236
68	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	126,201,484
69	Program Pengembangan Ekspor	149,695,620

70	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249,186,700
71	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	722,190,306
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	12,344,378,090
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,966,669,764
74	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	698,809,320
75	Program Pengembangan Kebudayaan	199,979,870
76	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1,337,129,980
77	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,166,360,060
78	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	516,994,842
79	Program Pengembangan UMKM	77,234,300
80	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	42,609,400
81	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	451,018,604
82	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	427,797,864
83	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62,999,900
84	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4,529,880,637
85	Program Pengendalian Penduduk	235,904,206
86	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	198,129,500
87	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	63,028,066
88	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	176,493,370
89	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	380,051,090
90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7,246,417,152
91	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1,111,553,574
92	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	24,197,607,652
93	Program Peningkatan Kerjasama Desa	276,976,716
94	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,907,065,526
95	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	689,271,976
96	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,824,698,096
97	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	22,111,576,687
98	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	3,647,539,868
99	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	866,875,272,503
100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4,419,799,040
101	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2,740,203,421
102	Program Penyelenggaraan Jalan	85,411,607,281
103	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	21,345,427,700
104	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	200,748,584

105	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5,094,747,612
106	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,355,855,370
107	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49,990,390
108	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74,910,000
109	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11,192,531,395
110	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	126,976,376
111	Program Penyuluhan Pertanian	1,009,868,218
112	Program Perekonomian dan Pembangunan	2,903,502,574
113	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	894,502,390
114	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	213,858,016
115	Program Perencanaan Tenaga Kerja	49,999,700
116	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,336,286,362
117	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	125,073,750
118	Program Perizinan Usaha Pertanian	414,964,068
119	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	957,328,259
120	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	63,582,540
121	Program Perlindungan Khusus Anak	125,422,210
122	Program Perlindungan Perempuan	71,658,300
123	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	687,372,900
124	Program Rehabilitasi Sosial	4,198,154,510
125	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90,414,500
126	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	649,046,620
127	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1,503,202,350
Total		1,833,335,262,831

Pelaihari, Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

LAMPIRAN PENGHARGAAN

NO	HARI/TANGGAL	PENYELENGGARA	JENIS PENGHARGAAN
(1)	(2)	(3)	(5)
1	10/03/2021		Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) meraih penghargaan Penghargaan Atas Kinerja Dan Sinergitas Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2021
2	28/05/2021		Penghargaan WTF
3	29/06/2021		Penghargaan Manggala Karya Kencana
4	06/07/2021	IPB dan ULM	Penghargaan Dari IPB Dan ULM
5	22/06/2021		Tala Sebagai Pilot Project Bebas Pungli
6	09/09/2021		Penghargaan Kepemimpinan Indonesia Visionary Leader's (LVL) Certificate Of Presentation Tahun 2021
7	28/10/2021	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI)	Kabupaten Tanah Laut Mendapatkan Penghargaan Daerah Tertib Ukut (DTU) Tahun 2020 Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI)
8	05/11/2021		Bupati Tanah Laut H. M. Sukamta Mendapat Penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif (KDI) kategori ekonomi.

10	03/11/2021	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Penghargaan SimPel Award dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wilayah terbaik Kabupaten/Kota dalam implementasi Simpanan Pelajar (SimPel) melalui Program Genta Sambung Rasa.
11	15/12/2021	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia	Bupati Tanah Laut menerima Penghargaan Dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD selaku Pengendali dan Penanggung Jawab Satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), Penghargaan diberikan kepada Bupati H. M. Sukamta sebagai tokoh Penanggungjawab Program Kegiatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Tanah Laut (Tala) Tahun 2021.

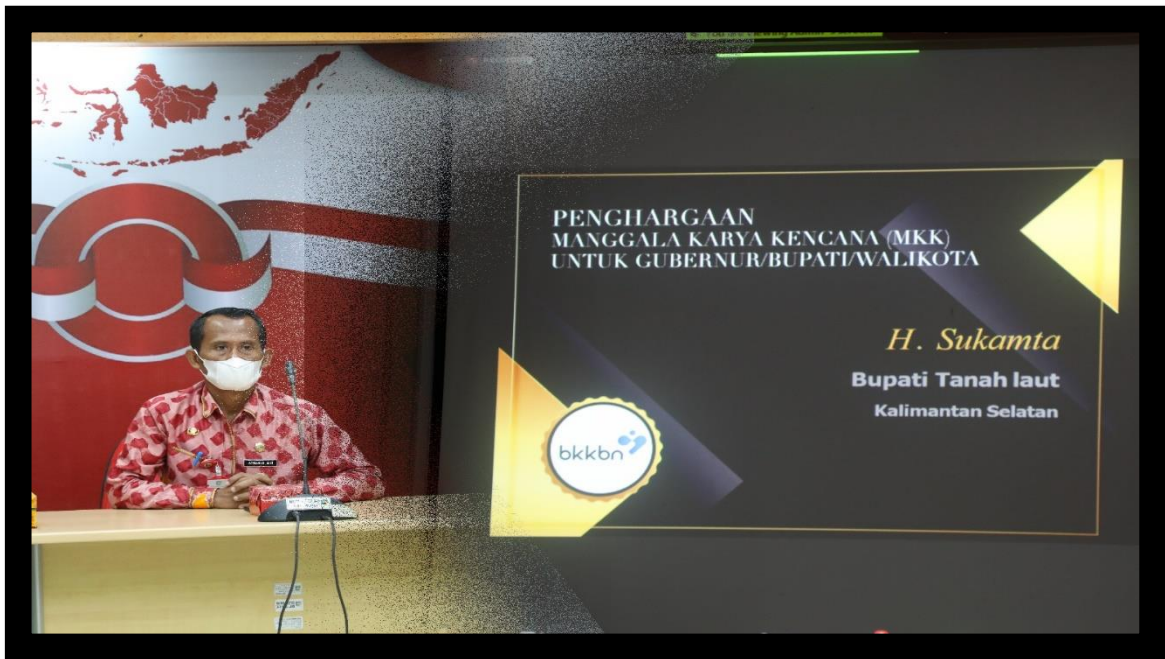
1. Penghargaan Atas Kinerja Dan Sinergitas Dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2021 (10/03/2021).



2. Penghargaan WTP (28/05/2021)



3. Penghargaan Manggala Karya Kencana (29/06/2021).



4. Penghargaan Dari IPB Dan ULM (06/07/2021)



5. Tala Sebagai Pilot Project Bebas Pungli (22/06/2021)



6. Penghargaan Kepemimpinan Indonesia Visionary Leader's (LVL) Certificate Of Presentation Tahun 2021 (09/09/2021).



7. Kabupaten Tanah Laut Mendapatkan Penghargaan Daerah Tertib Ukut (DTU) Tahun 2020 Dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (RI) (28.10.2021)



8. Penghargaan SimPel Award dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wilayah terbaik Kabupaten/Kota dalam implementasi Simpanan Pelajar (SimPel) melalui Program Genta Sambung Rasa. 03.11.2021



9. Bupati Tanah Laut H. M. Sukamta Mendapat Penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif (KDI) kategori ekonomi. 05.11.2021



10. Bupati Tanah Laut menerima Penghargaan Dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD selaku Pengendali dan Penanggung Jawab Satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli), Penghargaan diberikan kepada Bupati H. M. Sukamta sebagai tokoh Penanggungjawab Program Kegiatan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Tanah Laut (Tala) Tahun 2021 (15.12.2021)



11. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Mendapatkan Anugerah Predikat Zona Hijau Penilaian Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021
"Kategori Pemerintah Kabupaten " oleh Ombudsman RI Tahun 2021
(belum menerima piagam)